



Creating Value for Sustainability

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

2	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
4	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION
6	KOMITMEN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN PTPN THE COMPANY'S SUSTAINABILITY COMMITMENT AND STRATEGY
8	IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2022 2022 SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS
10	PENJELASAN DIREKSI REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

01

20	TENTANG LAPORAN INI ABOUT THE REPORT
----	------------------------------------------------

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

02

28	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY
29	SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN THE COMPANY AT A GLANCE
31	VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND COMPANY CULTURE
31	VISI VISION
31	MISI MISSION
33	MAKNA LOGO PERUSAHAAN MEANING OF THE COMPANY'S LOGO
34	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE
36	KEGIATAN USAHA DAN PASAR YANG DILAYANI BUSINESS ACTIVITIES AND MARKET SERVED
38	PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

38	STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS
39	STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN STRUCTURE GROUP PERUSAHAAN
40	DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA DAN KERJA SAMA OPERASI LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS
42	SKALA PERUSAHAAN SCALE OF THE ORGANIZATION
43	INFORMASI TENTANG KARYAWAN INFORMATION ON EMPLOYEES
45	RANTAI PASOKAN SUPPLY CHAIN
46	PERUBAHAN TERHADAP ORGANISASI ATAU RANTAI PASOKAN CHANGES IN THE ORGANIZATION OR SUPPLY CHAIN
46	PENDEKATAN ATAU PRINSIP PENCEGAHAN PRECAUTIONARY APPROACH OR PRINCIPLE
47	INISIATIF EKSTERNAL EXTERNAL INITIATIVES
52	KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI MEMBERSHIP OF ASSOCIATION

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

About Sustainability Report

03

56	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
80	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY GOVERNANCE

KINERJA EKONOMI

Economic Performance

04

90	MOMENTUM UNTUK MERAHAI KINERJA TERBAIK MOMENTUM TO ACHIEVE THE BEST PERFORMANCE
----	-------------------------------------------------------------------------------------------



KEAMANAN DAN KUALITAS PRODUK
Product Safety and Quality

05

100 **KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI PRIORITAS**
CUSTOMER SATISFACTION AS A PRIORITY

LEMBAR UMPAN BALIK
FEEDBACK FORM

08

184 **LEMBAR UMPAN BALIK**
FEEDBACK FORM

KINERJA LINGKUNGAN
Environmental Performance

06

108 **MENGUKUHKAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN**
STRENGTHENING ENVIRONMENTAL CARRYING CAPACITY INCREASE

PERNYATAAN PENDAPAT PENJAMINAN INDEPENDEN
INDEPENDENT ASSURANCE OPINION STATEMENT

09

184 **PERNYATAAN PENDAPAT PENJAMINAN INDEPENDEN**
INDEPENDENT ASSURANCE OPINION STATEMENT

KINERJA SOSIAL
Social Performance

07

144 **KINERJA MAKSIMAL DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANDAL**
OPTIMAL PERFORMANCE WITH RELIABLE HUMAN RESOURCES

166 **PENGUATAN KEBERLANJUTAN RANTAI PASOK**
STRENGTHENED SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY

170 **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
COMMUNITY EMPOWERMENT

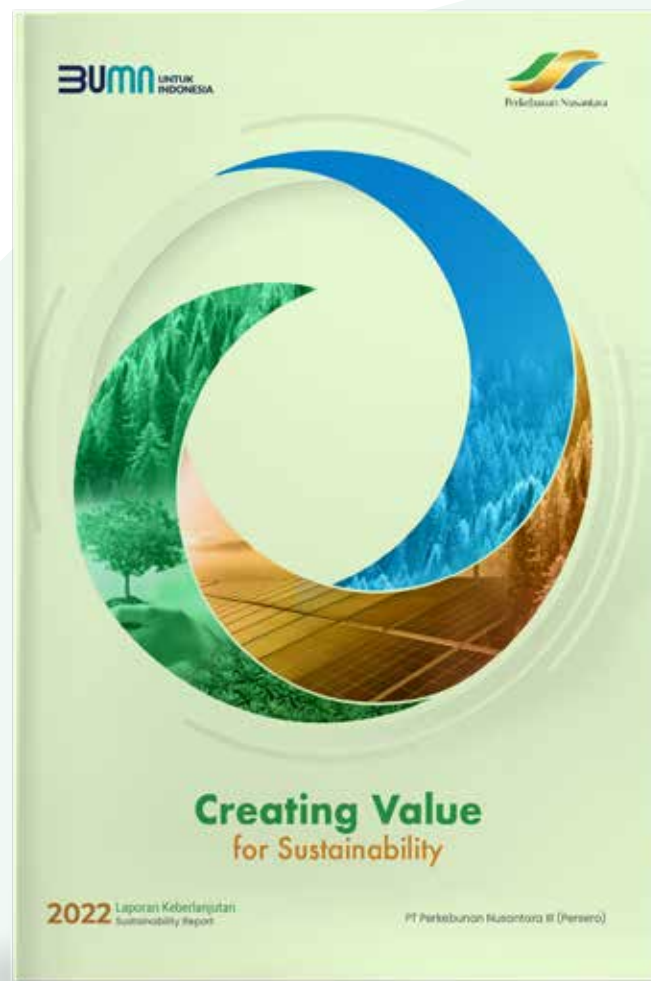
INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2022
INDEX OF GRI UNIVERSAL STANDARDS 2022 CONTENT

10

189 **INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2022**
INDEX OF GRI UNIVERSAL STANDARDS 2022 CONTENT

PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



Creating Value for Sustainability

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) secara berkesinambungan melakukan transformasi secara menyeluruh. Langkah nyata yang dilakukan antara lain merestrukturisasi organisasi dan terus memperkuat integrasi di antara anak-anak perusahaan. Transformasi dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas, sekaligus menciptakan nilai baru bagi untuk keberlanjutan Perusahaan.

Sejalan dengan transformasi yang tengah dijalankan, Perseroan menerapkan sejumlah strategi akselerasi kerja dan efektivitas dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai core value BUMN. Strategi tersebut di antaranya optimalisasi portfolio dan operational excellence, commercial excellence dan ekspansi hilir, optimalisasi aset dan kemitraan strategis, pengembangan kapabilitas dan budaya, serta meningkatkan sistem dan teknologi.

Kesungguhan dan konsistensi seluruh insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam mengimplementasikan transformasi membuahakan hasil membanggakan. Selain mampu mewujudkan target-target yang ditetapkan, pada tahun 2022, Perseroan juga mencatatkan peningkatan kinerja dibanding tahun sebelumnya antara lain ditandai dengan bertumbuhnya laba bersih dan EBITDA.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) consistently conducts the comprehensive transformation. Concrete steps actions have been conducted, such as restructuring the organization and strengthening integration among subsidiaries. Transformation is carried out to optimize performance and effectiveness while creating new value for the Company's sustainability.

In line with the continuous transformation, the Company implemented several strategies to accelerate work and effectiveness with the values of AKHLAK as the core value of SOEs. Portfolio optimization and operational excellence, commercial excellence and downstream expansion, asset optimization and strategic partnerships, capability and culture development, and system and technology improvement are all part of these initiatives.

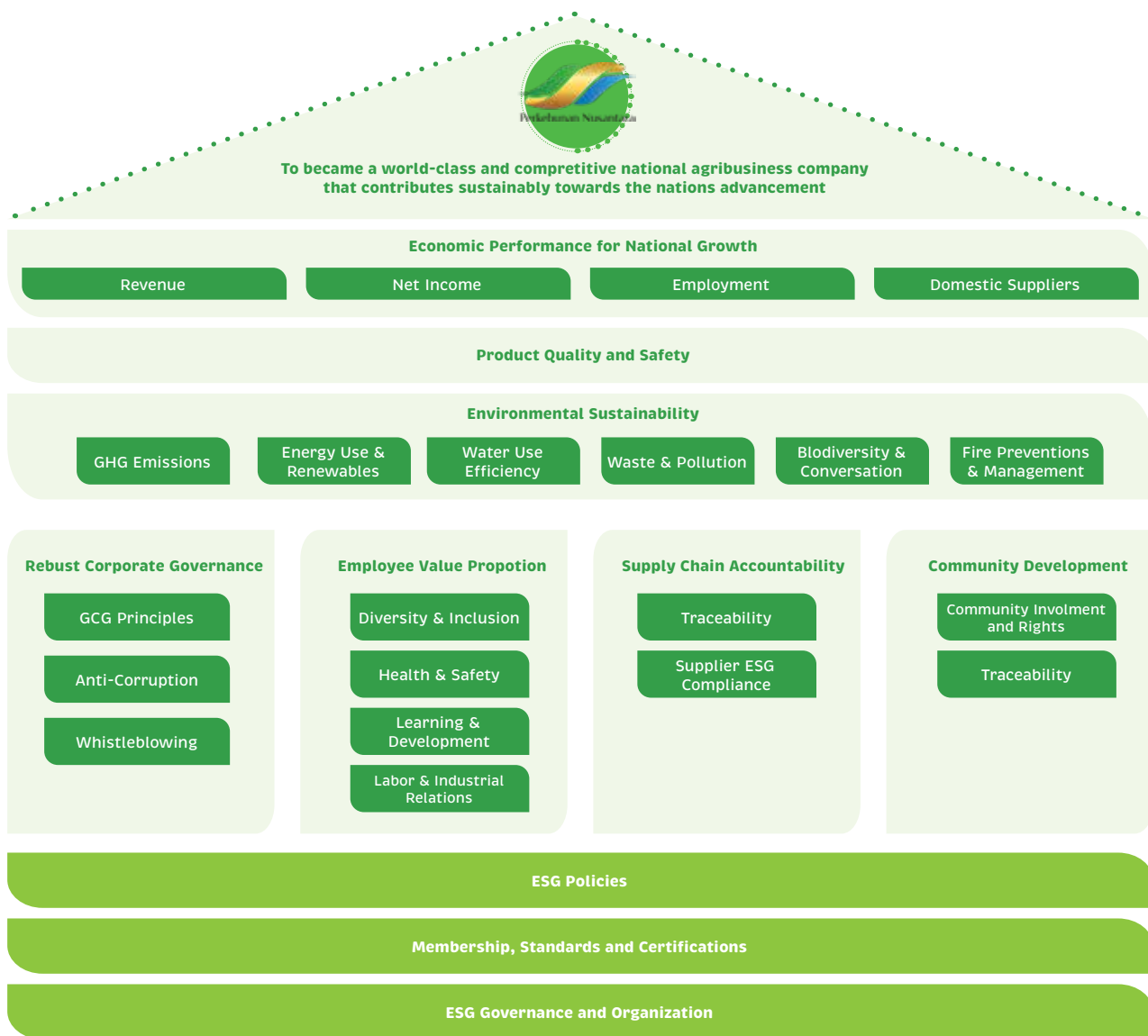
The sincerity and consistency of all personnel's of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in implementing the transformation has resulted in gratifying results. In addition to meeting the milestones established, the Company improved its performance in 2022 compared to the previous year, as evidenced by increases in net profit and EBITDA.

KOMITMEN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN PTPN

THE COMPANY'S SUSTAINABILITY COMMITMENT AND STRATEGY

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan adopsi praktik-praktik keberlanjutan, perusahaan telah mengorganisir strategi ESG PTPN untuk memobilisasi perusahaan sesuai dengan topik-topik material yang telah diidentifikasi. Strategi ini direpresentasikan dalam kerangka sebagai berikut, dan pembahasan lebih mendalam untuk tiap bagian di dalamnya dapat ditemukan dalam bagian-bagian selanjutnya dalam Laporan Keberlanjutan ini.

The Company has organized PTPN's ESG strategy to mobilize the Company according to the identified material topics in an effort to continuously improve performance and adoption of sustainability practices. This strategy is described in the framework below, and a more in-depth discussion of each component may be found in later sections of this Sustainability Report.



Dalam strategi ini, perusahaan memulai upaya keberlanjutan kami dengan meletakkan fondasi yang kuat untuk memobilisasi organisasi PTPN ke arah praktik-praktik keberlanjutan. Perusahaan telah secara resmi menetapkan struktur *task force* ESG khusus di bawah pembinaan langsung Direksi dengan Wakil Direktur Utama sebagai Wakil Direktur Program, dengan aturan tata kelola termasuk pelaporan

Under this strategy, the Company started its sustainability efforts by creating a strong foundation to mobilize the PTPN organization towards sustainable practices. The Company has formally established a dedicated ESG task force structure under the direct supervision of the Board of Directors with the Vice President Director serving as Program Director, with governance rules which



berkala akan kemajuan dari inisiatif keberlanjutan perusahaan. Kemudian PTPN berkaca kepada regulasi serta standar-standar internasional maupun nasional sebagai panduan umum akan prinsip-prinsip keberlanjutan yang perlu diikuti sesuai dengan topik masing-masing, dan dari situ, Perusahaan mengembangkan kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang menjadi landasan dari tiap inisiatif keberlanjutan yang akan diambil oleh perusahaan.

Di atas fondasi yang kuat ini, terdapat 4 pilar yang merepresentasikan pemangku kepentingan utama yang perlu dilibatkan dalam usaha keberlanjutan perusahaan. Di pilar pertama, Tata Kelola Perusahaan amat penting untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan akuntabel sesuai dengan praktik terbaik, untuk memperhatikan hak dan kepentingan pemilik perusahaan yaitu pemegang saham. Pilar kedua memperhatikan kepentingan insan-insan sumber daya manusia PTPN sebagai penggerak utama inisiatif apa pun dalam perusahaan. Pilar ketiga terkait dengan pemasok dan memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang PTPN hormati, juga dihormati oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan. Dan tidak kalah penting, di pilar keempat, PTPN juga memperhatikan masyarakat sekitar yang tentunya tidak lepas dari dampak operasi perusahaan di wilayahnya, baik positif (yang harus diperkuat dan di amplifikasi) maupun negatif (yang harus dimitigasi sebaik mungkin).

Keempat pilar ini kemudian menopang kinerja PTPN untuk mengantarkan performa operasional yang baik, melakukan kegiatan operasi dengan memperhatikan risiko lingkungan dan mengadopsi praktik-praktik kelestarian lingkungan terbaik. Dengan proses yang sustainable dan ramah lingkungan tersebut, PTPN kemudian perlu tetap dapat menyediakan produk dengan jaminan kualitas dan keamanan tertinggi bagi pelanggan. Hal ini kemudian bermuara kepada kontribusi perusahaan dalam memajukan perekonomian nasional Indonesia, baik dengan kontribusi nilai ekonomi langsung dalam bentuk performa finansial perusahaan sebagai BUMN, maupun kontribusi tidak langsung melalui penyediaan lapangan kerja serta menghidupkan lanskap pemasok domestik.

Keseluruh strategi keberlanjutan/ESG PTPN ini tentu tidak lepas, dan bahkan menjadi bagian integral, dari visi perusahaan secara keseluruhan di mana keberlanjutan/kesinambungan menjadi elemen penting di dalamnya: "menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa."

include regular reporting on the progress of the Company's sustainability initiatives. PTPN further refers to international and national regulations and standards as a general guide to the sustainability principles that must be followed in accordance with their respective topics, and from there, the Company developed sustainability policies that serve as the foundation for all future sustainability initiatives which will be taken by the Company.

On top of this strong foundation, there are 4 pillars that represent the key stakeholders that need to be involved in the Company's sustainability efforts. In the first pillar, Corporate Governance is very important to ensure that the Company is run accountably in accordance with best practices, to pay attention to the rights and interests of the owners of the Company, namely shareholders. The second pillar takes into account the interests of PTPN's human resources as the main driver of any initiative within the Company. The third pillar relates to suppliers and ensures that the sustainability principles that PTPN honors, are also respected by third parties that work with the Company. And last but not least, in the fourth pillar, PTPN also pays attention to the surrounding communities who certainly cannot be separated from the impact of the Company's operations in the region, both positive (which must be strengthened and amplified) and negative (which must be mitigated as best as possible).

These four pillars then sustain PTPN's performance to deliver good operational performance, conducting operations with due regard to environmental risks and adopting best environmental sustainability practices. With such sustainable and environmentally friendly processes, PTPN then needs to be able to continue providing products with the highest quality and safety assurance for customers. This then leads to the Company's contribution in promoting Indonesia's national economy, both by contributing direct economic value in the form of the Company's financial performance as a state-owned enterprise, as well as indirect contributions through the provision of employment and reviving the domestic supplier landscape.

PTPN's overall sustainability/ESG strategy is certainly inseparable, and even an integral part, of the Company's overall vision in which sustainability is an important element: "To become a world-class leading and competitive national agribusiness company that contributes sustainability towards the nation's advancement."

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2022

2022 SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Kinerja Ekonomi Economic Performance				
Kuantitas Produk Product Quantity	Jenis Komoditas Types of Commodity	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)
Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	Jutaan Rupiah IDR Million	55,863,302	53,569,662	39,390,437
Laba/(Rugi) bersih Net Profit (Loss)	Jutaan Rupiah IDR Million	6,016,981	4,644,333	-1,136,603
Pelibatan pemasok lokal (barang dan jasa) Local supplier involvement (goods and services)	Perusahaan/ Mitra Company/ Partner	1,862	1,719	1,024
Nilai kontrak pekerjaan untuk pemasok lokal/ yang berdomisili di Indonesia (barang dan jasa) Work contract value for local/ Indonesia-domiciled suppliers (goods and services) ²	Jutaan Rupiah IDR Million	18,543,600	11,957,000	8,599,900
Kinerja Lingkungan Environmental Performance				
Penggunaan listrik Electricity consumption	kWh	64,147,777	64,758,333	67,814,722
	Gigajoule	230,932	233,136	244,133
Penggunaan BBM Fuel Consumption	Liter	6,066.70	65,957,44	6,260.61
	Gigajoule	243,867	232,475	251,662
Total Energi Terbarukan Total Renewable Energy	Gigajoule	1,731,941	1,695,206	1,627,565
Total Energi Non-Terbarukan Total Non-Renewable Energy	Gigajoule	501,214	494,119	430,698
Total % penggunaan energi terbarukan PTPN Group Total % of PTPN Group renewable energy use	%	78%	77%	79%
Penggunaan air Water Usage	Meter kubik Cubic meter	60.932.016	58.591.254	57.016.746
Penambahan (Pengurangan) emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) dari penggunaan BBM Increase (Reduction) of GHG Direct Emission (Scope 1) from Fuel Consumption	Ton CO ₂ eq	1.968.870,48	1.834.518,41	1.751.782,67



Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Penambahan (Pengurangan) emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan listrik Increase (Reduction) of GHG Indirect Emission (Scope 2) from Electricity Consumption	Ton CO2eq	197.533	218.477,22	239.268,66
Pengaduan lingkungan Environmental Complaints	Kasus Case(s)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Kinerja Sosial Social Performance				
Jumlah total pegawai Number of employees	Orang People	122,215	129,901	105,616
Jumlah pegawai wanita Number of female employees	Orang People	16,779	15,530	13,689
Jumlah pegawai pria Number of male employees	Orang People	105,436	114,371	91,927
Jumlah kecelakaan kerja Number of work accidents	Kasus Case(s)	653	693	309
Jumlah Penyaluran Dana CSR/ PKBL Total Distributed CSR/PKBL Funds	Juta Rupiah IDR Million	126,019,101,725	166,829,504,224	129,001,696,558
Kepuasan Konsumen Consumer Satisfaction	Persen Percentage	83.51%	83.96%	83,32%
Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Receiving Training	Pekerja Worker(s)	91583	97111	105616
Jam Pelatihan yang diberikan Perseroan Hours of Training provided by the Company	Jam Hour(s)	3.204.489	1.798.495	1.228.314
Kinerja Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Performance				
Jumlah pengaduan WBS yang masuk Number of incoming WBS complaints	Kasus Case(s)	43	49	38
Jumlah pengaduan WBS yang masuk diproses Number of incoming WBS complaints processed	Kasus Case(s)	43	49	38
LTIFR1	rate	2,004	1,746	1,996
Fatalities	Orang People	2	2	2

Catatan | Notes:

LTIFR = Lost Time Injury / Total Karyawan x 1000000. Konsolidasi LTIFR menggunakan metode weighted average berdasarkan jumlah karyawan masing-masing perusahaan

LTIFR = Lost Time Injury / Total Employees x 1000000. Consolidate LTIFR using the weighted average method based on the number of employees of each company.

Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam SPPBJ

Work contract value as specified in SPPB

PENJELASAN DIREKSI [GRI 2-22]

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



Abdul Ghani

Direktur Utama
President Director



Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dapat melalui tahun 2022 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja terbaik. Selain mencatatkan raihan target yang bagus, kinerja Perseroan juga meningkat signifikan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja PTPN III tak lepas dari keberhasilan pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan pertumbuhan tahun 2022 melebihi raihan sebelum Indonesia dilanda pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar 5,31%, naik dibanding tahun 2021, yang mencapai 3,69% (*year on year/y-on-y*). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi yaitu 5,02% pada tahun 2019 dan 5,17% pada 2018.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditopang oleh tumbuhnya 17 lapangan usaha atau sektor yang dijadikan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia saban tahun oleh BPS. Di antara lapangan usaha atau sektor yang tumbuh positif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang tumbuh 2,25% serta sektor Industri Pengolahan –termasuk di dalamnya industri makanan dan minuman, yang tumbuh sebesar 4,89%.

Bagi Perseroan yang berusaha dalam bidang agribisnis dan agroindustri, pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan pada tahun 2022 merupakan kabar yang sangat bermakna. Pertumbuhan kedua sektor tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja dan pencapaian PTPN III pada tahun pelaporan.

Selain faktor eksternal, keberhasilan Perseroan juga tak lepas dari faktor internal, yaitu ketepatan dalam merumuskan rencana kerja dan kebijakan strategis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022. Terlebih lagi, segenap insan PTPN III berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik agar target-target yang ditetapkan Perseroan tercapai.

Dengan mengucap syukur, melalui laporan keberlanjutan inilah, kami menyampaikan pencapaian tersebut. Selaras dengan prinsip keberlanjutan, yaitu keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka kami juga menyampaikan berbagai pencapaian kinerja aspek sosial dan lingkungan melalui laporan ini. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), laporan ini merupakan media bagi PTPN III untuk menyampaikan informasi terkait kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dear distinguished stakeholders,

Praise and gratitude to the presence of God Almighty for His blessings that have enabled Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in passing the year 2022, a year full of challenges, with excellent performance. In addition to recording a good target achievement, the Company's performance improved significantly compared to the previous year's achievement.

The Company's improved performance was inseparable from the government's success in achieving sustainable economic growth; in fact, growth in 2022 exceeded the achievements before Indonesia was hit by the COVID-19 pandemic in March 2020. According to BPS-Statistics Indonesia, Indonesia's economic growth in 2022 was 5.31%, an increase from 3.69% (year on year)/y-on-y in 2021. This achievement outperformed Indonesia's pre-pandemic economic growth of 5.02% in 2019 and 5.17% in 2018.

Economic growth in 2022 was supported by the growth of 17 business fields or sectors used by BPS as the basis for calculating Indonesia's economic growth every year. Among the business fields or sectors that grew positively were Agriculture, Forestry and Fisheries sector, which grew by 2.25% and the Manufacturing Industry sector - including the food and beverage industry, which grew by 4.89%.

For the Company, which is engaged in agribusiness and agro-industry, the growth of the agriculture sector and processing industry in 2022 was highly significant news. The growth of both sectors had a significant impact on the Company's performance and achievements during the reporting year.

In addition to external factors, the Company's success was also inseparable from internal factors, namely the accuracy in formulating work plans and strategic policies in the Company's 2022 Work Plan and Budget. Moreover, all PTPN III personnel are committed to making the best contribution to achieve the targets set by the Company.

We are grateful for the opportunity to share these accomplishments through this sustainability report. We also present various performance achievements in social and environmental aspects through this report, in accordance with the sustainability principle of harmony between economic, social, and environmental aspects. This report serves as a means for PTPN III to communicate information about its contribution to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

PERSEROAN DAN KEGIATAN BERKELANJUTAN

Kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*) yaitu kegiatan operasional usaha dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial merupakan fokus dan concern Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Hal itu didorong oleh kesadaran bahwa keberadaan Perusahaan tidak sekedar mencari laba atau keuntungan, tetapi juga dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan peduli terhadap isu-isu sosial. Sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, implementasi atas kegiatan berkelanjutan yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2022 dilaporkan melalui penerbitan laporan keberlanjutan.

PTPN III mendukung pembangunan berkelanjutan karena meyakini bahwa keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan praktik terbaik, sekaligus merupakan koreksi atas konsep sebelumnya yang lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi yang terbukti menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya.

Dukungan terhadap kegiatan berkelanjutan dilakukan Perseroan dengan berbagai kebijakan dan program, antara lain, mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN), seperti diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Secara lebih luas, pelaksanaan TJSL/CSR tidak hanya bermanfaat untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga bermanfaat bagi penguatan daya dukung lingkungan. Sebab, selain pilar ekonomi dan sosial, penerapan program tersebut juga meliputi berbagai kegiatan terkait pilar lingkungan. Implementasi ketiga pilar sudah pula dipetakan sehingga dukungan PTPN III terhadap pencapaian TPB/SDGs tergambar dengan jelas.

Kebijakan Strategis untuk Keberlanjutan

Kontribusi dan dukungan PTPN III terhadap pembangunan berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan Perseroan dalam mewujudkan kinerja ekonomi seperti disampaikan dalam RKAP. Rencana kerja yang disusun setiap tahun tersebut di dalamnya antara lain berisi tentang kebijakan strategis, kegiatan/program kerja yang akan dilakukan, serta target dan sasaran yang hendak dicapai pada tahun pelaporan. Perseroan menetapkan kebijakan strategis berdasarkan analisis situasi dan kondisi akhir tahun 2021, yang dipadukan dengan prediksi situasi dan kondisi tahun 2022.

Memperhatikan potensi pengaruh pandemic Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia yang secara langsung masih berdampak terhadap bisnis perusahaan pada tahun 2022 maka Perseroan mengambil posisi konservatif dalam penyusunan RKAP 2022. Dengan kondisi demikian untuk menjaga keseimbangan financial Perseroan akan memaksimalkan potensi produksi dan penurunan harga pokok produksi, terutama melalui strategi dan program

THE COMPANY AND SUSTAINABLE ACTIVITIES

Sustainable operation, namely business operations with regard to economic, environmental and social aspects, is the focus and concern of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). This is motivated by the realization that the Company's existence is required not only to seek profit or profit, but also to preserve the environment and care about social issues. The implementation of sustainable activities carried out by the Company during 2022 is reported to stakeholders through the issuance of a sustainability report.

The Company supports sustainable development because it believes that harmony between economic, environmental, and social aspects is the best practice. It also serves as a correction to the previous concept, which emphasized economic development, which has been shown to cause social inequality and a decrease in environmental quality, with all of its implications.

Support for sustainable activities is carried out by the Company through various policies and programs, among others, allocating funds to finance the Social and Environmental Responsibility program of State-Owned Enterprises (SOEs TJSL), as specified in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.

TJSL/CSR implementation, in general, is beneficial not only for fostering community independence and empowerment while reducing social inequality, but also for strengthening the carrying capacity of the environment. This is due to the fact that, in addition to the economic and social pillars, the program's implementation also includes various activities related to the environmental pillar. The implementation of the three pillars has also been mapped, demonstrating PTPN III's support for SDG achievement.

Strategic Policy for Sustainability

PTPN III's contribution and support to sustainable development will be greatly influenced by the Company's success in realizing economic performance as stated in the Company's Work Plan and Budget. The annual work plan, contains strategic policies, activities/work programs to be carried out, as well as targets and objectives to be achieved during the reporting year. The Company formulates strategic policies based on an analysis of the situation and conditions at the end of 2021, combined with projections of the situation and conditions in 2022.

Considering the probable impact of the Covid-19 pandemic on the Indonesian economy, which continued to have a direct impact on the Company's business in 2022, the Company took a conservative approach in preparing the Company's 2022 Work Plan and Budget. Under these conditions, the Company would maximize production potential and reduce production costs, particularly through operational strategies and programs to improve the usage of production capacity controlled by the Company. PTPN



operasional untuk mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan. PTPN III juga terus berkomitmen melaksanakan transformasi selaras dengan program-program strategis jangka panjang (RJPP), dengan fokus kepada 5 strategi akselerasi Perusahaan yakni:

1. Optimalisasi portfolio & operational excellence;
2. Commercial excellence & Ekspansi hilir;
3. Optimalisasi aset & kemitraan strategis;
4. Pengembangan kapabilitas & budaya;
5. Peningkatan sistem & teknologi.

PENCAPAIAN KEGIATAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2022

Manajemen dan karyawan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) berkomitmen untuk bersinergi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan arahan strategis yang telah diputuskan Perusahaan. Dengan demikian, masing-masing turut berkontribusi untuk mewujudkan target dalam RKAP Tahun 2022. Komitmen tersebut membawa hasil menggembirakan dengan pencapaian kinerja tahun 2022 yang meningkat dibanding tahun sebelumnya sebagaimana uraian berikut:

Kinerja Aspek Ekonomi

Selama tahun 2022, manajemen didukung seluruh staf Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kinerja tahun 2022. Secara umum, upaya tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Pendapatan, laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, serta laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Muara dari pencapaian tersebut adalah keberhasilan Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 6.016 miliar meningkat dari laba bersih yang dicatatkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4.644 miliar.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari kontribusi yang sangat signifikan dari komoditas kelapa sawit. Komoditi kelapa sawit memberikan kontribusi laba sebelum pajak sebesar Rp 9.862,85 miliar atau laba tersebut naik sebesar Rp 2.602,72 miliar dibandingkan target laba pada RKAP periode sampai dengan Desember 2022 dan dibandingkan realisasi laba pada periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp 110,98 miliar; Komoditi karet memberikan kontribusi rugi pada tahun 2022 sebesar Rp 361,16 miliar. Komoditi teh juga memberikan kontribusi rugi pada tahun 2022 Rp 425,12 miliar, sedangkan komoditi tebu memberikan kontribusi rugi pada tahun 2022 sebesar Rp 1.392,25 miliar.

Peningkatan kinerja ekonomi tahun 2022 diikuti dengan bertambahnya distribusi nilai ekonomi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Nilai ekonomi yang dihasilkan, yaitu manfaat ekonomi yang diterima Perusahaan atas operasional usaha yang dilakukan tercatat sebesar Rp 59.854 miliar (2021: Rp 56.705 miliar); nilai ekonomi yang didistribusikan, yaitu manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti pembayaran pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk program TJSL BUMN terbilang sebesar Rp53.817 miliar (2021: Rp52.081 miliar); sedangkan nilai ekonomi yang disimpan, yaitu selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan setelah dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan, yang digunakan untuk pengembangan usaha, mencapai Rp 6.036 miliar (2021: Rp 4.623 miliar).

III remained committed to conduct transformation in accordance with long-term strategic programs (the Company's Long-term Plan), with a focus on five Company acceleration strategies

1. portfolio optimization and operational excellence;
2. commercial excellence and downstream expansion;
3. asset optimization and strategic partnership;
4. capability and culture development; and
5. system and technology improvement.

ACHIEVEMENT OF SUSTAINABILITY ACTIVITIES IN 2022

The management and employees of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) are committed to synergizing in implementing various policies and strategic directions that have been determined by the Company. Thus, each of them contributes to realizing the targets in the Company's 2022 Work Plan and Budget. The commitment brought encouraging results with the achievement of 2022 performance which increased compared to the previous year as described below:

Economic Aspect Performance

During 2022, management supported by all staff of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) has made various efforts to maximize performance in 2022. In general, these efforts produced satisfactory results. Revenue, gross profit, operating profit, profit before income tax, and profit for the year showed a significant increase compared to the previous year. The result of the achievement was the Company's success in recording a net profit of IDR6,016 billion, an increase from the previous year's net profit of IDR4,644 billion

This success was inseparable from the huge contribution from the palm oil commodity. The oil palm commodity contributed a profit before tax of IDR9,862.85 billion or an increase of IDR 2,602.72 billion compared to the Company's Work Plan and Budget target for the period up to December 2022 and compared to the realization of profit in the same period the previous year, which declined by IDR110.98 billion; The rubber commodity contributed a loss in 2022 of IDR361.16 billion. The tea commodity also contributed a loss in 2022 of IDR425.12 billion, while the sugarcane commodity contributed a loss in 2022 of IDR 1,392.25 billion.

The increase in economic performance in 2022 was followed by an increase in the distribution of economic value of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). The economic value generated, namely the economic benefit received by the Company for the business operations carried out, was recorded at IDR59,854 billion (2021: IDR 56,705 billion); the economic value distributed, namely the economic benefit provided by the Company to stakeholders, such as tax payments, dividends, payments to suppliers, as well as the realization of funds for SOEs TJSL program, was recorded at IDR53.817 billion (2021: IDR52,081 billion); while the economic value retained, namely the difference between the economic value generated deducted by the economic value distributed and used for the development of the Company's business amounted to IDR6,036 billion (2021: IDR4,623 billion).

Kinerja Aspek Lingkungan

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyadari bahwa upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan, merupakan tanggung jawab bersama, termasuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dalam menjalankan operasional bisnis dengan menaati berbagai regulasi terkait lingkungan. Komitmen itu ditegakkan karena perusahaan menyadari bahwa bidang usaha perkebunan berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk meminimalkan dampak tersebut, Perusahaan melakukan mitigasi dengan mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan seksama dan bertanggung jawab.

Langkah nyata yang dilakukan Perusahaan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, antara lain, dengan mengadopsi standar sistem mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk itu, kami telah meraih Sertifikasi SPO/ISPO Pabrik Kelapa Sawit; Sertifikasi RSPO/ISPO Rantai Pasok; Sertifikasi sistem Manajemen untuk Unit; dan Sertifikasi Sistem Manajemen untuk Pabrik. Sejalan dengan sertifikasi tersebut, kami juga secara konsisten mempraktikkan operasional kantor yang ramah lingkungan, seperti mengelola sumber daya alam (air, listrik dan bahan bakar minyak) yang ketersediaannya kian terbatas, mengelola emisi gas rumah kaca, mengelola limbah cair dan padat, B3 maupun non-B3, mengurangi sampah dengan dan sebagainya dengan sesuai prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), dan sebagainya.

Melalui pengelolaan seperti itu, per 31 Desember 2022, Perusahaan menggunakan total energi listrik sebanyak 64.147.777 kWh atau setara dengan 230.932 Gigajoule (GJ), turun dibandingkan tahun 2021 dengan penggunaan listrik sebesar 64.760.000 kWh atau 233.136 GJ. Adapun penggunaan BBM tercatat sebanyak 321,78 kiloliter atau 12.935 GJ, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 156,72 kiloliter atau 6.300 GJ.

Berkaitan dengan pemanfaatan energi, selain melakukan berbagai langkah efisiensi, Perusahaan juga terus menambah pemanfaatan unit energi baru terbarukan (EBT). Saat ini, pembangkit EBT yang dimiliki PTPN Group antara lain pembangkit listrik berbasis tenaga air/hidro (PLTA) sejumlah 10 unit (total kapasitas 17,14 MW), berbasis biomassa (PLTBm) sejumlah 2 unit (total kapasitas 9,2 MW), berbasis biogas dari POME (PLTBg) sejumlah 9 unit (total kapasitas 11,35 MW).

Berdasarkan penggunaan energi di atas, maka Perusahaan menghasilkan emisi gas rumah kaca tidak langsung [Cakupan 2] dari penggunaan energi listrik tahun 2022 tercatat sebesar 197.533 tonCO₂eq, turun dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 218.448 tonCO₂eq. Sedangkan emisi gas rumah kaca langsung [Cakupan 1] dari penggunaan BBM tercatat sebesar 1.968.870,48 tonCO₂eq, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.834.518,41 tonCO₂eq.

Adapun penggunaan air selama tahun pelaporan tercatat sebesar 60.932.016 meter kubik, naik dibandingkan tahun 2021 dengan penggunaan air sebesar 58.591.254 meter kubik. Kenaikan antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi bahan baku pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, komitmen Perusahaan untuk mengelola air limbah dengan baik

Environmental Aspect Performance

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) recognizes that efforts to preserve the environment while increasing its carrying capacity are a shared responsibility that includes business actors. Therefore, the Company is committed to contributing to environmental preservation in carrying out business operations by complying with various regulations related to the environment. This commitment is upheld because the Company realizes that the plantation business has the potential to have a negative impact on the environment. To mitigate these impacts, the Company carefully and responsibly identifies, plans, and implements environmental management activities.

Concrete steps taken by the Company to create a better environment, among others, by adopting quality system standards and certifications that are recognized nationally and internationally. Hence, the Company has received SPO/ISPO Certification for Palm Oil Mills; RSPO/ISPO Certification for Supply Chain; Management System Certification for Units; and Management System Certification for Mills. In line with these certifications, the Company also consistently practices environmentally friendly of operations, such as managing natural resources (water, electricity and fuel) whose availability is increasingly limited, managing greenhouse gas emissions, managing liquid and solid waste, hazardous and non-hazardous, reducing waste with and others in accordance with the 3R principle (reduce, reuse, recycle), etc.

Through such management, as of December 31, 2022, the Company's total electricity consumption amounted to 64,147,777 kWh or equivalent to 230,932 Gigajoules (GJ), a decline compared to 2021 with electricity consumption of 64,760,000 kWh or 233,136 GJ. Meanwhile, fuel consumption was recorded at 321.78 kiloliters or 12,935 GJ, an increase compared to 2021 of 156.72 kiloliters or 6,300 GJ.

Regarding the use of energy, in addition to taking various efficiency measures, the Company also continues to increase the utilization of new renewable energy (EBT) units. Currently, the renewable energy plants owned by PTPN Group include 10 units of hydroelectric power plants (total capacity of 17.14 MW), 2 units of biomass power plants (total capacity of 9.2 MW), and 9 units of biogas power plants from POME (total capacity of 11.35 MW).

Based on the above use of energy, the Company generated indirect greenhouse gas emissions [Scope 2] from the use of electrical energy in 2022 of 197,533 tonsCO₂eq, a decline compared to 2021 of 218,448 tonsCO₂eq. While direct greenhouse gas emissions [Scope 1] from fuel consumption were recorded at 1,968,870.48 tonsCO₂eq, an increase compared to 2021 of 1,834,518.41 tonsCO₂eq.

Meanwhile, water usage during the reporting year was recorded at 60,932,016 cubic meters, an increase compared to 2021 with water usage of 58,591,254 cubic meters. The increase was partly influenced by an increase in raw material production during the reporting year compared to the previous year. On the other hand, the Company's commitment to manage wastewater well has



membawa hasil dengan tidak adanya pengaduan dari masyarakat yang terdampak akibat air limbah dengan kadar polutan tinggi. Dalam skala yang lebih luas, Perusahaan juga tidak mendapat sanksi atau denda akibat pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan lain tentang lingkungan.

Terkhusus untuk keanekaragaman hayati, Perseroan secara aktif melakukan upaya-upaya konservasi. Sesuai dengan Protokol dan Kriteria RSPO, PTPN telah menilai lahan yang dianggap memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) menggunakan pendekatan High Carbon Value – High Carbon Stock Approach untuk setiap pembangunan baru, serta melindungi hutan NKT dan SKT keanekaragaman hayati di dalamnya. Adapun area konservasi NKT yang ditetapkan Perseroan sebagai fokus perlindungan keanekaragaman hayati adalah seluas 30.758 hektare. Area HCV tersebut telah diberi batas/plang HCV. Di area konservasi terdapat keanekaragaman flora dan fauna, termasuk spesies RTE (Rare, Threatened, or Endangered) di antaranya Gaharu, Meranti Kuning, Gajah, Harimau, Orangutan, dan lainnya. Perusahaan menyimpan catatan spesies yang terdaftar menurut daftar merah IUCN dan daftar Convention on International Trade of Endangered Species (CITES).

Kinerja Aspek Sosial

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mewujudkan komitmen terhadap aspek sosial melalui pemenuhan hak pemangku kepentingan internal yaitu karyawan dan manajemen lintas divisi, maupun pemangku kepentingan eksternal, antara lain, konsumen/pelanggan dan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Pada tahun pelaporan, Perusahaan berhasil mempertahankan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sehingga tidak ada pengaduan atau sengketa perburuhan.

Selain itu, juga tidak tercatat adanya insiden diskriminasi, pekerja anak maupun insiden kerja paksa.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perusahaan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi yang diikuti 91583 karyawan dengan biaya sebesar Rp 146,8 miliar. Selain meningkatkan kompetensi, Perusahaan juga berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Upaya itu membawa hasil antara lain dengan berkurangnya LTIFR dari 2,004 kasus pada tahun 2020 menjadi 1,996 pada tahun pelaporan.

Untuk konsumen/pelanggan, pemenuhan tanggung jawab dilakukan Perusahaan dengan melakukan berbagai inovasi produk dan layanan agar konsumen/pelanggan meraih kepuasan maksimal, memberikan informasi produk yang jelas dan lengkap, menjamin keamanan dan kualitas produk, dan sebagainya. Perusahaan juga menyiapkan saluran pengaduan serta berkomitmen memberikan solusi terbaik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berbagai upaya tersebut membawa hasil dengan meningkatnya kepuasan konsumen, yaitu dari 81,4% pada tahun 2021 menjadi 83,1% pada tahun 2022.

Khusus kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal berikutnya, Perusahaan menunaikan tanggung jawab dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan TJSL BUMN dengan total biaya sebesar Rp 27,2 miliar melalui Program Pendanaan UMK (PUMK) dan Rp 98,7 miliar melalui Program TJSL non

resulted in no complaints from communities affected by wastewater with high pollutant levels. On a broader scale, the Company also received no sanctions or fines for violations of other environmental laws or regulations.

Specific to biodiversity, the Company is actively engaged in conservation efforts. In accordance with the RSPO Protocol and Criteria, PTPN has assessed land deemed to have High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) using the High Carbon Value - High Carbon Stock Approach for any new development, as well as protecting HCV and HCS forests for biodiversity within them. The HCV conservation area designated by the Company as the focus of biodiversity protection amounted to 30,758 hectares. The HCV areas have been demarcated with HCV signs. The conservation areas contain a diversity of flora and fauna, including RTE (Rare, Threatened, or Endangered) species including Agarwood, Yellow Meranti, Elephant, Tiger, Orangutan, and others. The Company keeps records of species listed according to the IUCN red list and the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) list.

Social Aspect Performance

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) demonstrates its social commitment by fulfilling the rights of internal stakeholders, namely employees and management across divisions, as well as external stakeholders, including consumers/customers and communities surrounding the Company's areas of operations. During the reporting year, the Company managed to maintain harmonious industrial relations with its employees, with no complaints or labor disputes.

In addition, there were also no recorded incidents of discrimination, child labor or forced labor incidents.

In line with the commitment to improve employee competencies, the Company held competency development programs attended by 91,583 employees at a cost of IDR146.8 billion. In addition to improving competence, the Company is also committed to creating a safe and healthy working environment. This effort has brought results, among others, by reducing LTIFR from 2,004 cases in 2020 to 1,996 during the reporting year.

The Company fulfills its responsibilities to consumers/customers by innovating products and services that provide maximum satisfaction, providing clear and complete product information, ensuring product safety and quality, etc. In addition, the Company prepares complaint channels and is dedicated to providing the best solution in accordance with applicable procedures. Customer satisfaction has increased from 81.4% in 2021 to 83.1% in 2022 as a result of these efforts.

Specifically to the community as the next external stakeholder, the Company fulfills its responsibility by organizing various SOEs TJSL activities with a total cost of IDR27.2 billion through the MSE Funding Program and IDR98.7 billion through the non-MSE Funding TJSL Program. In line with the Company's commitment

PUMK. Sejalan dengan komitmen Perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), program-program TJSL telah dipetakan sehingga menjadi jelas dukungannya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Berdasarkan pemetaan tersebut, kegiatan TJSL BUMN tahun 2022 telah mendukung 15 dari 16 TPB.

Prospek dan Peluang

Keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19, sekaligus mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% pada tahun 2022, merupakan modal penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2023. Namun demikian, di balik pencapaian tersebut, pemerintah tetap perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena tahun 2023, sebagaimana disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan melambat pada kisaran 4,8% pada tahun 2023 .

Prediksi perlambatan ekonomi Indonesia didasari sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian global, seperti belum pulihnya Tiongkok dari dampak pandemi COVID-19 dan efek perang Rusia-Ukraina. Kondisi tersebut menjadi alasan sehingga IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 turun menjadi 2,9% dibanding pertumbuhan tahun 2022, yang mencapai 3,4%. Terhadap peringatan dan prediksi IMF tersebut, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri telah mengungkapkan kesiapannya. Walau tidak mudah, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap kuat dan tumbuh positif.

Komitmen dan keyakinan pemerintah tersebut menjadi salah satu pondasi bagi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk menyusun target-target yang lebih tinggi dalam RKAP Tahun 2023 dibandingkan pencapaian tahun 2023. Target tersebut antara lain produktivitas TBS kelapa sawit naik 6,36% dibanding tahun 2022, produktivitas karet naik 22,09% produktivitas gula naik 9,51%, produktivitas teh kering naik 17,18%. Adapun pendapatan

to the Sustainable Development Goals (SDGs), TJSL programs have been organized in such a way that their support for the SDGs is clear. According to this mapping, SOEs TJSL activities in 2022 have supported 15 of the 16 SDGs.

Outlook and Opportunities

The government's success in controlling the COVID-19 pandemic, as well as achieving 5.31% economic growth in 2022, is an essential asset for achieving sustainable economic growth in 2023. However, the government must still exercise the principle of prudence since according to the International Monetary Fund (IMF), Indonesia's economic growth will experience slowdown to around 4.8% in 2023.

The estimated slowdown of the national economy was based on a number of factors that affected the global economy, such as China's ongoing recovery from the COVID-19 pandemic and the effects of the Russia-Ukraine war. As a result, the IMF predicted that global economic growth will experience slowdown to 2.9% in 2023, down from 3.4% in 2022. President Joko Widodo and a number of ministers have expressed readiness in response to IMF's warning and global economic forecasts for 2023. Despite the difficulties, the government is confident that the Indonesian economy will remain strong and grow positively.

The government's commitment and confidence is one of the foundations for the Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) to set higher targets in the Company's 2023 Work Plan and Budget compared to the achievement in 2023. The targets include palm oil FFB productivity to increase by 6,36% compared to 2022, rubber productivity to increase by 22,09% sugar productivity to increase by 9,51%, dry tea productivity to increase by 17,18%.



ditargetkan naik sebesar 27,97%, dan total aset naik sebesar 2,48%. Untuk mewujudkan target-target tersebut, Perusahaan telah menyusun kebijakan strategis dan meyakini bisa menerapkannya di sepanjang tahun 2023

Penutup

Keberhasilan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui tahun 2022 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja terbaik merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama berbagai pihak, serta dukungan dari segenap pemangku kepentingan. Untuk itu, Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam mengelola Perusahaan selama tahun pelaporan.

Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pemasok/mitra, konsumen/pelanggan, regulator, kreditur, pemerintah pusat/daerah maupun masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Kami berharap dukungan tersebut tetap diberikan karena menjadi modal penting bagi Perseroan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Meanwhile, revenue is targeted to increase by 27,97%, and total assets to increase by 2,48%. In realizing these targets, the Company has developed strategic policies and it believes it will be able to implement throughout 2023.

Closing

The success of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in passing through the challenging year 2022 by posting excellent performance was the result of hard work and collaboration of various parties, as well as support from all stakeholders. Hence, the Board of Directors would like to thank the Board of Commissioners for the supervision and direction, which enabled the Board of Directors to carry out strategies properly. We would also like to convey our gratitude to the shareholders, who have placed their trust in us to manage the Company during the reporting year.

Our deepest gratitude also goes to all employees for their hard work, dedication and loyalty. We would also like to express our appreciation to all of our partners/suppliers, customers/consumers, regulators, creditors, and central/regional government, as well as the community for their unwavering support for the Company. We hope that this support and trust will continue since it is an important asset for the Company to realize its vision and mission.

Jakarta, 2 Mei 2023

Jakarta, 2 May 2023

Atas Nama Direksi

On behalf of the Board of Directors

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Mohammad Abdul Ghani

Direktur Utama

President Director





01

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

Melalui laporan ini, kami berharap para pemangku kepentingan dapat mengetahui komitmen dan kontribusi PT Perkebunan Nusantara III terhadap keberlanjutan dalam menjalankan usaha, sekaligus dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Through this report, we hope our stakeholders to know the commitment and contribution of PT Perkebunan Nusantara III's commitment and contribution to sustainability in running the business, as well as the support to the achievement of the Sustainable Development Goals.

TENTANG LAPORAN INI

ABOUT THE REPORT



PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) berkomitmen untuk mengukuhkan transparansi dalam menjalankan operasional usaha, termasuk menyampaikan dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Salah satu langkah nyata untuk mewujudkan transparansi itu adalah Perseroan menerbitkan laporan keberlanjutan PT Perkebunan Nusantara III Tahun 2022. Selain itu, penerbitan laporan merupakan upaya Perseroan memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2c, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mewajibkan Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan.

Melalui laporan ini, kami berharap para pemangku kepentingan, seperti konsumen/pelanggan, pemasok, pekerja, pemegang saham, regulator, pemerintah-termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat mengetahui komitmen dan kontribusi PT Perkebunan Nusantara III terhadap keberlanjutan dalam menjalankan usaha, sekaligus dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) yang saat ini tengah dijalankan secara optimal oleh pemerintah Indonesia.

Dalam laporan ini kami menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Pelaporan data keuangan menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Indonesia. Sedangkan data keberlanjutan dalam laporan ini, kami menggunakan teknik pengukuran yang berlaku secara internasional. Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, laporan ini dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) is committed to strengthening transparency in conducting business operations, including conveying the impacts it has, both from the economic, environmental and social aspects. One concrete step toward achieving this transparency is the Company's publication of the 2022 Sustainability Report of PT Perkebunan Nusantara III. Furthermore, the report's publication meets the requirements of Article 66 paragraph 2c of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which requires the Company to submit a report on the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) in the Annual Report.

We hope that through this report, stakeholders such as consumers/customers, suppliers, workers, shareholders, regulators, government-including local government, communities, and other stakeholders will understand PT Perkebunan Nusantara III's commitment and contribution to sustainability in business operations, as well as support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) that are currently being optimally implemented by the Indonesian government.

In this report we use Rupiah nomination, unless otherwise indicated. The methodologies used in financial data reporting are based on the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards. As for sustainability data in this report, we use internationally accepted measurement techniques. This report has been written in two languages, Indonesian and English, in order to reach a wider audience.



RUJUKAN LAPORAN

Laporan ini disusun berdasarkan GRI Universal Standards 2021 (Standard GRI) yang diterbitkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan panduan, Perseroan mencantumkan angka pengungkapan Standard GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini dimulai halaman 189.

PRINSIP PELAPORAN

Laporan kami disusun dengan merujuk pada delapan prinsip pelaporan sebagaimana ditentukan dalam GRI 1: Landasan 2021 sebagai berikut:

1. Akurasi:
Perseroan melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.
2. Keseimbangan:
Perseroan melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.
3. Kejelasan:
Perseroan menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.
4. Keterbandingan:
Perseroan memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.
5. Kelengkapan:
Perseroan menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.
6. Konteks keberlanjutan:
Perseroan melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.
7. Ketepatan waktu:
Perseroan melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.
8. Keterverifikasi:
Perseroan mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.

REPORT REFERENCE

The preparation of this report refers to the GRI Universal Standards 2021 (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) - an institution established by the Global Reporting Initiative (GRI) to manage the development of sustainability reporting standards. The Company provides the GRI Standard disclosure number at the end of each relevant sentence or paragraph to make it easier for readers to find information that conforms with the standards. The complete data on the report content's conformity with both references is presented at the back of this report beginning at page 189.

REPORT PRINCIPLES

The Company's report is written in accordance with the eight reporting principles outlined in GRI 1: Foundation 2021, which are as follows:

1. Accuracy:
The Company shall report information that is correct and sufficiently detailed to allow an assessment of the organization's impacts.
2. Balance:
The Company shall report information in an unbiased way and provide a fair representation of the organization's negative and positive impacts.
3. Clarity:
The Company shall present information in a way that is accessible and understandable.
4. Comparability:
The Company shall select, compile, and report information consistently to enable an analysis of changes in the organization's impacts over time and an analysis of these impacts relative to those of other organizations.
5. Completeness:
The Company shall provide sufficient information to enable an assessment of the organization's impacts during the reporting period.
6. Sustainability context:
The Company shall report information about its impacts in the wider context of sustainable development.
7. Timeliness:
The Company shall report information on a regular schedule and make it available in time for information users to make decisions.
8. Verifiability:
The Company shall gather, record, compile, and analyze information in such a way that the information can be examined to establish its quality.

CAKUPAN DAN BATASAN LAPORAN

Laporan ini mencakup seluruh kegiatan operasional Kantor Pusat PTPN III beserta anak perusahaan yang laporan keuangannya masuk dalam laporan konsolidasian, yaitu:

1. PTPN I s/d PTPN XIV
2. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
3. PT Riset Perkebunan Nusantara
4. PT LPP Agro Nusantara.
5. PT Sinergi Gula Nusantara

Pelaporan mencakup kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial beserta dampak yang ditimbulkannya selama periode 1 Januari-31 Desember 2022, termasuk di dalamnya dampak yang bermakna positif. [GRI 2-2]

SIKLUS, PERIODE PELAPORAN DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perseroan, laporan ini terbit setahun sekali. PTPN III telah melaporkan informasi yang dikutip pada indeks konten GRI untuk periode dari 1 Januari-31 Desember 2022 "Sesuai dengan Standard GRI." [GRI 2-3]

PERNYATAAN ULANG INFORMASI

Untuk mendukung validitas isi laporan, apabila terdapat pernyataan ulang informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, kami memberi tanda *disajikan kembali. Pada laporan ini, penyajian kembali dilakukan pada beberapa hal yang berkaitan dengan ESG karena bertambahnya objek entitas yang menjadi cakupan pada laporan ini [GRI 2-4]

VERIFIKASI OLEH PIHAK INDEPENDEN

GRI merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Untuk itu, Perseroan melakukan penjaminan terhadap laporan ini dengan menggandeng pihak ketiga independen, yaitu TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dilakukan sesuai dengan standar AA1000 dari AccountAbility tahun 2018. Perseroan tidak memiliki hubungan kerja sama lain dengan assesor selain pekerjaan penjaminan terhadap laporan ini. Selain itu, assesor juga tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan sehingga tidak ada benturan kepentingan dalam proses penjaminan. Proses penetapan assesor dilakukan melalui persetujuan Direksi, yang diwakili oleh Sekretaris Perseroan. Mohon untuk dapat mengacu kepada *assurance statement* yang dikeluarkan oleh TUV Rheinland Indonesia. [GRI 2-5]

AKSESIBILITAS DAN UMPAN BALIK

Perseroan mengundang para pembaca dan pemangku kepentingan yang lain untuk mengakses dan mengunduh laporan keberlanjutan melalui situs www.holding-perkebunan.com Kami menyambut baik komentar, ide dan umpan balik dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kualitas laporan tahun berikutnya. Tanggapan dan masukan dapat disampaikan kepada kami melalui: [GRI 2-3]

SCOPE AND BOUNDARY OF REPORT

This report includes all operational activities of the Company's Head Office and its subsidiaries whose financial reports are included in the consolidated report, namely:

1. PTPN I to PTPN XIV
2. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
3. PT Riset Perkebunan Nusantara
4. PT LPP Agro Nusantara.
5. PT Sinergi Gula Nusantara

This report includes the performance of economic, environmental, and social aspect, as well as their impacts from January 1 to December 31, 2022, including positive impacts. [GRI 2-2]

REPORTING CYCLE, PERIOD, AND STATEMENT OF USE

As an integral part of the Company's Annual Report, this report is published once a year. The Company has reported the information cited on the GRI content index for the period from January 1 to December 31, 2022 "In accordance with GRI Standards." [GRI 2-3]

RESTATEMENT OF INFORMATION

To support the validity of the report's contents, we mark *restated if there is a restatement of information provided in the previous report. In this report, restatement is made on several matters related to ESG due to the increase in the entity object that is the scope of this report [GRI 2-4].

VERIFICATION BY INDEPENDENT PARTY

To ensure the quality and reliability of the information presented in this report, GRI recommends using external assurance by an independent third party. As a result, the Company underwrites each report in collaboration with an independent third party, TUV Rheinland Indonesia. In 2018, the verification was carried out in accordance with AccountAbility's AA1000 standard. The Company has no other working relationship with the assessor other than the assurance work for this report. Furthermore, the assessor is not involved in the report preparation process, ensuring that there is no conflict of interest in the assurance process. The procedure of determining the assessor is carried out with the approval of the Board of Directors, who are represented by the Company's Secretary. Please refer to the assurance statement issued by TUV Rheinland Indonesia. [GRI 2-5]

ACCESSIBILITY AND FEEDBACK

The Company invites readers and stakeholders to access and download the sustainability report through the website www.holding-perkebunan.com. We welcome comments, ideas and feedback from stakeholders to improve the quality of our next report. Feedback and inputs can be submitted to us via: [GRI 2-3]



Kantor Pusat:

Gedung Agro Plaza Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2. No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 Email : sekretariat@holding-perkebunan.com
 Website : www.holding-perkebunan.com
 Tlp : (021) 2918 3300
 Fax : (021) 520 3030

Kantor Operasional:

Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
 Tlp: (061) 845 2244, 845 3100
 Fax: (061) 8455177, 8454728

PROSES PENENTUAN TOPIK MATERIAL UNTUK PERUSAHAAN [GRI 3-1]

1. Assessment topik material adalah proses kunci untuk menentukan isu-isu Environmental, Social and Governance (“ESG”) yang paling penting untuk perusahaan kami. Identifikasi topik-topik ini membantu jajaran pimpinan PTPN untuk menentukan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan.
2. Setiap tahun, PTPN melakukan kajian akan topik material ESG apa saja yang paling relevan untuk bisnis kami. Assessment materialitas ini mengacu kepada referensi GRI Standards Reporting Principles dan AA1000 Accountability Principles. Secara umum, proses penentuan dan reviu topik material kami dapat dirangkum dalam tahap-tahap sebagai berikut:
3. Untuk ditambahkan kalimat yang mengikutsertakan entitas PTPN mana saja yang dimasukkan ke dalam assessment [GRI 2-2]

Head Office:

Agro Plaza Building Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2. No. 1, Setiabudi, South Jakarta, 12950
 Email : sekretariat@holding-perkebunan.com
 Website : www.holding-perkebunan.com
 Phone : (021) 2918 3300
 Fax : (021) 520 3030

Operational Office:

Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
 Tel: (061) 845 2244, 845 3100
 Fax: (061) 8455177, 8454728

PROCESS OF DETERMINING MATERIAL TOPICS FOR THE COMPANY [GRI 3-1]

1. Material topic assessment is a key process to determine the most important Environmental, Social and Governance (“ESG”) issues for our company. The identification of these topics helps PTPN’s leadership to determine the right strategy to continuously improve the company’s sustainability performance.
2. Every year, PTPN assesses which material ESG topics are most relevant for our business. This materiality assessment refers to the GRI Standards Reporting Principles and AA1000 Accountability Principles. In general, the process of determining and reviewing our material topics can be summarized in the following stages:
3. Untuk ditambahkan kalimat yang mengikutsertakan entitas PTPN mana saja yang dimasukkan ke dalam assessment [GRI 2-2]

Tahapan Proses Process Stages	Deskripsi Description
Tahap 1: Identifikasi topik Stage 1: Topic Identification	PTPN membuat daftar topik-topik ESG yang mungkin memiliki dampak material pada bisnis dan pemangku kepentingan kami dengan cara melakukan analisis tren industri dan tren keberlanjutan, serta melakukan reviu akan topik ESG yang tertulis dalam standar-standar pelaporan keberlanjutan untuk industri yang relevan. PTPN develops a list of ESG topics that may have a material impact on our business and stakeholders by analyzing industry and sustainability trends, as well as reviewing ESG topics outlined in relevant industry sustainability reporting standards.
Tahap 2: Pelibatan pemangku kepentingan dan prioritasasi topik Stage 2: Stakeholder engagement and topic prioritization	PTPN melakukan prioritasasi berdasarkan potensi dampak tiap-tiap topik pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan value jangka panjang untuk bisnis dan pemangku kepentingan perusahaan. Proses ini dilakukan melalui beberapa forum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PTPN prioritizes based on the potential impact of each topic on the company’s ability to create long-term value for its business and stakeholders. This process was conducted through several forums involving internal and external stakeholders.
Tahap 3: Validasi dan peresmian Stage 3: Validation and Ratification	Topik ESG material yang terpilih ditinjau dan disetujui oleh manajemen senior. The selected ESG material topics are reviewed and approved by senior management.
Tahap 4: Integrasi dan peninjauan Stage 4: Integration and Review	Daftar topik ESG material dijadikan dasar pembuatan strategi keberlanjutan, metrik kinerja untuk dimonitor, serta target-target manajemen terkait. The list of ESG material topics forms the basis for the sustainability strategy, performance metrics to be monitored, and for associated management targets.

TOPIK MATERIAL [GRI 3-2]

Melalui proses yang telah dijabarkan di atas, PTPN telah menentukan topik material bagi perusahaan sebagai berikut:

MATERIAL TOPIC [GRI 3-2]

Through the process described above, PTPN has determined the following material topics for the Company:

Aspek ESG ESG Aspect	#	Topik ESG Material ESG Topics	Cakupan Scope	Direksi penanggung jawab Responsible Director	Divisi pelaksana Implementing Division
Lingkungan Environment	1	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Greenhouse Gas (GHG) Emission	Terkait emisi GHG Scope 1/2/3, rencana dekarbonisasi, pemetaan & mitigasi risiko fisik dan risiko transisi dari perubahan iklim Related to GHG Emissions Scope 1/2/3, decarbonization plan, mapping & mitigation of physical risks and transition risks from climate change	WDU	DBSS
	2	Penggunaan Energi dan EBT Use of Energy and Renewable Energy	Terkait penggunaan energi dan porsi yang dibangkitkan dari sumber terbarukan di operasi PTPN Group Related to energy use and portion generated from renewable sources in PTPN Group operations	WDU	DBSS
	3	Keanekaragaman Hayati & Konservasi Biodiversity & Conservation	Terkait praktik-praktik untuk menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi hutan Related to practices to maintain biodiversity and forest conservation	DPP	DOSK + DOAT
	4	Pencegahan dan Manajemen Kebakaran Hutan Forest Fire Prevention and Management	Terkait praktik-praktik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Related to forest fire prevention and management practices	DPP	DOSK + DOAT
	5	Efisiensi Penggunaan Air Water Usage Efficiency	Terkait praktik-praktik penggunaan air secara efisien Related to efficient water usage practices	DPP	DTSK
	6	Limbah dan Polusi Waste and Pollution	Terkait pengelolaan limbah dan polusi non-GHG Related to waste management and non-GHG pollution	DPP	DTSK + DOAT
Sosial Social	7	Keberagaman & Inklusi Diversity & Inclusion	Terkait inisiatif keberagaman dan inklusi tenaga kerja Related to workforce diversity and inclusion initiatives	DRS	DSDM
	8	Kesehatan & Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety	Terkait praktik keselamatan kerja Related to occupational safety practices	DRS	DSDM
	9	Pengembangan Kompetensi Pekerja Worker Competency Development	Terkait praktik-praktik untuk mengembangkan kompetensi karyawan Related to practices to develop employee competencies	DRS	DSDM
	10	Praktik Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Employment Practices and Industrial Relations	Terkait komitmen kepada hukum dan praktik ketenagakerjaan Related to commitment to labor laws and practices	DRS	DSDM + DAIN
	11	Keterlibatan dan Hak-Hak Masyarakat Lokal Local Community Involvement and Rights	Terkait praktik dan komitmen untuk menghormati hak masyarakat lokal & adat dalam operasi PTPN sesuai standar Hak Asasi Manusia internasional Related to practices and commitments to respect the rights of local & indigenous communities in PTPN operations in accordance with international human rights standards.	DHAL	DSPN + DAIN
	12	Pemberdayaan Masyarakat Lokal Local Community Empowerment	Terkait topik pembangunan & keterlibatan komunitas; TJSL Related to community development & engagement topics; TJSL	DHAL	DSPN



Aspek ESG ESG Aspect	#	Topik ESG Material Material ESG Topics	Cakupan Scope	Direksi penanggung jawab Responsible Director	Divisi pelaksana Implementing Division
Tata Kelola Governance	13	Good Corporate Governance	Terkait praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik / GCG (Good Corporate Governance) Related to Good Corporate Governance (GCG) practices	DUM	DAIN + DSPN
	14	Keluhan dan Whistleblowing Complaints and Whistleblowing	Terkait sistem pelaporan keluhan atau kasus baik internal maupun eksternal Related to complaint or case reporting system both internal and external	DUM	DAIN + DSPN
	15	Etika dan Anti-Korupsi Ethics and Anti-Corruption	Terkait sistem pencegahan tindak kecurangan & korupsi Related to fraud & corruption prevention system	DUM	DAIN + DSPN
	16	Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	Terkait kualitas dan keamanan produk, utamanya pangan Related to product quality and safety, especially food	DP	DPSK + DPAT
Topik Umum General Topics	17	Kepatuhan ESG Rantai Pasok Supply Chain ESG Compliance	Terkait traceability & kepatuhan pemasok akan praktik ESG Related to traceability & supplier compliance with ESG practices	DUM	DPDU
	18	Kontribusi Pada Ekonomi Nasional Contribution to the National Economy	Terkait kontribusi perusahaan kepada pertumbuhan ekonomi nasional Related to the Company's contribution to national economic growth	n.a.	n.a.

Singkatan untuk Direksi penanggung jawab yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. WDU: Wakil Direktur Utama
2. DPP: Direktur Produksi & Pengembangan
3. DRS: Direktur Sumber Daya Manusia
4. DHAL: Direktur Hubungan Antar Lembaga
5. DUM: Direktur Umum
6. DP: Direktur Pemasaran

The abbreviations for the responsible Directors as referred to above are as follows:

1. WDU: Vice President Director
2. DPP: Director of Production & Development
3. DRS: Director of Human Resources
4. DHAL: Director of Inter-Agency Relations
5. DUM: Director of General Affairs
6. DP: Director of Marketing

Adapun singkatan untuk Divisi pelaksana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. DBSS: Divisi Bisnis Strategis & Sustainability
2. DOSK: Divisi Operasional Tanaman Sawit & Karet
3. DOAT: Divisi Operasional Aneka Tanaman
4. DTSK: Divisi Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit & Karet
5. DSDM: Divisi Sumber Daya Manusia
6. DSPN: Divisi Sekretariat Perusahaan
7. DAIN: Divisi Audit Internal
8. DPSK: Divisi Pemasaran Kelapa Sawit & Karet
9. DPAT: Divisi Pemasaran Aneka Tanaman
10. DPDU: Divisi Pengadaan & Umum

The abbreviations for the implementing divisions as referred to above are as follows:

1. DBSS: Strategic Business & Sustainability Division
2. DOSK: Palm Oil & Rubber Plants Operations Division
3. DOAT: Assorted Plants Operations Division
4. DTSK: Palm Oil & Rubber Engineering & Processing Division
5. DSDM: Human Resources Division
6. DSPN: Corporate Secretariat Division
7. DAIN: Internal Audit Division
8. DPSK: Palm Oil & Rubber Marketing Division
9. DPAT: Assorted Plants Marketing Division
10. DPDU: Procurement & General Affairs Division





02

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Saat ini, Holding Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Currently, Holding Perkebunan includes subsidiaries of palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, tobacco and cocoa plantations, as well as their respective downstream products.

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan [GRI 2-1]
Company Name

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

11 Maret 1996 | 11 Maret 1996

Modal Dasar
Nama Perusahaan

Rp66.600.000.000.000,- | Rp66.600.000.000.000,-

Jumlah Karyawan [GRI 2-7]
Number of Employees

122.215 orang (2022) | 122,215 people (2022)

Dasar Hukum Pembentukan Holding Perkebunan Nusantara
Legal Basis of Establishment of Holding Company of Perkebunan Nusantara

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III, menjadi perusahaan induk (holding) bagi PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.
Government Regulation No. 72 of 2014 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Company's Share Capital of PT Perkebunan Nusantara III, became the holding company of PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII and XIV.

Alamat
Address

Kantor Pusat [GRI 2-1]
Head Office

**Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telp. (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003

Maksud dan Tujuan Pendirian [GRI 2-6]
Purpose and Objective of Establishment

Berusaha dalam bidang Agrobisnis dan Agroindustri.
Engaged in Agrobusiness and Agroindustry.

Kepemilikan Saham [GRI 2-1]
Share Ownership

Negara Republik Indonesia 100,00%
100% owned by the Republic of Indonesia



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp40.216.132.000.000,- (per 31 Desember 2022)
IDR40,216,132,000,000 as of December 31, 2022

Status Perusahaan [GRI 2-1]
Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perusahaan Perkebunan Nusantara
State-Owned Enterprise (SOE) Holding Company of Perkebunan Nusantara



Website Perusahaan
Company Website

www.holding-perkebunan.com

Surel
Email

sekretariat@holding-perkebunan.com

Media Sosial
Social Media

- Facebook : @holdingperkebunan
- Twitter : @holding_ptpn
- Instagram : holdingperkebunan
- Youtube : holding_perkebunan

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Bambang Agustian
Kedudukan Kantor Holding
Location: Holding Office
Telp | Tel: 021 29183300
Fax: 021 5203030
Email: sekretariat@holding-perkebunan.com

Layanan Pengaduan
Customer Care

LAPOR!: <https://lapor.go.id>
Whistleblowing: apps.ptpn3.id:81/wbs/

Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates

Sebagai Holding Perkebunan Nusantara, Perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung atau tidak langsung pada beberapa entitas anak dan juga penyertaan saham pada beberapa entitas asosiasi dari PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV
As Holding Company of Perkebunan Nusantara, the Company has direct or indirect ownership in several subsidiaries as well as equity participation in several associates of PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII and XIV.

Kantor Operasional
Operational Office

Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
Telp: (+62 61) 845 2244, 845 3100
Fax: (+62 61) 8455177, 8454728



SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN

THE COMPANY AT A GLANCE



PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang selanjutnya disebut juga dengan "PTPN III (Persero)" atau "Perusahaan", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tanggal 14 Februari 1996, sesuai dengan akta No.36 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, S.H., notaris di Jakarta. Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agribisnis dan agroindustri. Perusahaan dipercaya mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) di Simalungun, Sumatera Utara, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2012 yang merujuk pada Undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. KEK Sei Mangkei memiliki luas 1.933,8 ha dan dapat menyerap tenaga kerja 83.304 orang hingga tahun 2031. [GRI 102-1] [GRI 2-1, 2-6]

Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PTPN III (Persero), yang mengubah komposisi saham Pemerintah Indonesia pada PTPN III (Persero) dengan mengalihkan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV, sehingga PTPN III (Persero) memiliki 90% saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Dengan perubahan tersebut, PTPN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), also known as "PTPN III (Persero)" or "the Company", was established on March 11, 1996 based on the Government Regulation No. 8 dated February 14, 1996, in accordance with Deed No. 36 dated March 11, 1996 from Harun Kamil, S.H., Notary in Jakarta. The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in agribusiness and agro-industry. The Company is entrusted with managing the Sei Mangkei Special Economic Zone (KEK Sei Mangkei) in Simalungun, North Sumatra, which has been stipulated by the Government of Indonesia through Government Regulation No. 29 of 2012, which refers to Law No. 39 of 2009 concerning Special Economic Zone. Sei Mangkei SEZ has an area of 1,933.8 ha and can absorb a workforce of 83,304 people until 2031. [GRI 102-1] [GRI 2-1, 2-6]

In 2014, the Government issued Government Regulation No. 72 of 2014 dated September 17, 2014 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), which changed the share composition of the Government of Indonesia to the Company by transferring the Republic of Indonesia's shares to PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV. Therefore, the Company owned 90% of shares of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV. With these changes, PTPN III (Persero) was transformed into

III (Persero) bertransformasi menjadi *Nusantara Holding Plantation Company* sebagai induk perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV (PTPN). Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, PTPN III (Persero) menyusun kajian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang mencakup evaluasi kinerja historis, analisis kondisi saat ini, pengembangan strategi dan proyeksi keuangan, serta *roadmap* implementasi.

Terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan diharapkan dapat mendorong integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan (PTPN I sampai dengan PTPN XIV) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta mampu meningkatkan efisiensi dengan skala ekonomi yang semakin besar. Dengan demikian, diharapkan permasalahan yang dihadapi tiap BUMN Perkebunan dapat lebih mudah diatasi sehingga kinerja diharapkan akan meningkat drastis.

Saat ini, *Holding* Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Areal tanaman keseluruhan *holding* tahun 2022 didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit seluas 562.440,99 ha, areal tanaman karet seluas 127.856,52 ha, areal konsesi teh 23.594,81 ha, serta areal tebu sendiri seluas 61.341,95 ha. [GRI 2-6]

Keterangan Perubahan Nama

Sejak terbentuk pada tanggal 11 Maret 1996 sampai sekarang, Perusahaan tidak pernah mengalami perubahan nama dan tetap menggunakan nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang di singkat menjadi PTPN III (Persero). Perubahan hanya terjadi pada status Perusahaan seperti yang telah dijelaskan di atas, yang membuat Perusahaan resmi menjadi Perusahaan Induk (*Holding*) BUMN Perkebunan dari PTPN I, II, dan IV sampai dengan XIV (PTPN). Kedudukan Perusahaan menjadi *Holding* BUMN Perkebunan ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan sesuai Akta No. 08 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan.

Nusantara Holding Plantation Company as the holding company of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV (PTPN). In realizing the Company's vision and mission, PTPN III (Persero) has prepared a review of the Company's Long-Term Plan, which includes evaluating historical performance, analyzing current conditions, developing financial strategies and projections, and implementing roadmap.

The establishment of *Holding* BUMN Perkebunan (*Plantation* SOEs) is expected to encourage integration and synergy among *Plantation* SOEs (PTPN I to PTPN XIV), which spread in nearly all regions of Indonesia, and to increase efficiency with the growing economic scale. Thus, it is hoped that the problems encountered by each *Plantation* SOE will be more easily overcome, and that performance will improve dramatically.

Currently, *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) or *Holding* Perkebunan includes subsidiaries of palm oil, rubber, sugar cane, tea, coffee, tobacco and cocoa, as well as their respective downstream products. In 2022, the total plant area of *Holding* Perkebunan was dominated by palm oil plantations covering an area of 562,440.99 ha, rubber plantations covering an area of 127,856.52 ha, tea concession area of 23,594.81 ha and sugar cane area of 61,341.95 ha. [GRI 2-6]

Information Regarding The Change in The Company's Name

Since its establishment on March 11, 1996 until present, the Company has never changed its name and is still known as PT Perkebunan Nusantara III (Persero), which was shortened to PTPN III (Persero). Only the Company's position changed, as indicated above, and the Company formally became the *Holding* Company of *Plantation* SOEs from PTPN I, II, and IV to XIV (PTPN). The Company's position as the *Holding* of *Plantation* SOEs was confirmed in the Company's Articles of Association according to Deed No. 08 dated June 24, 2021, drawn up by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notary in South Jakarta.



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional khususnya sub sektor perkebunan serta meningkatkan keuntungan melalui prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham.

The Company was established with the purpose and objective to implement the Government policies and programs by contributing to the national economy and development, especially plantation subsector, and increasing profit through the principles of a sound Company based on added value increase for the state as shareholder.

VISI VISION

Menjadi Perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

To become a world-class leading and competitive national agribusiness company that contributes sustainably towards the nation's advancement.



MISI MISSION

- 1 Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.
Producing high quality products for customers
- 2 Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
Establishing excellent work process capabilities through continuous improvement and innovation in conjunction with good corporate governance
- 3 Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.
Developing an excellent organization and culture, as well as competent and prosperous human resources, to realize the potential of every personnel
- 4 Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik.
Optimizing asset utilization to maximize returns
- 5 Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.
Contributing to the improvement of community welfare and preserving the environment for the benefit of future generations;



Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

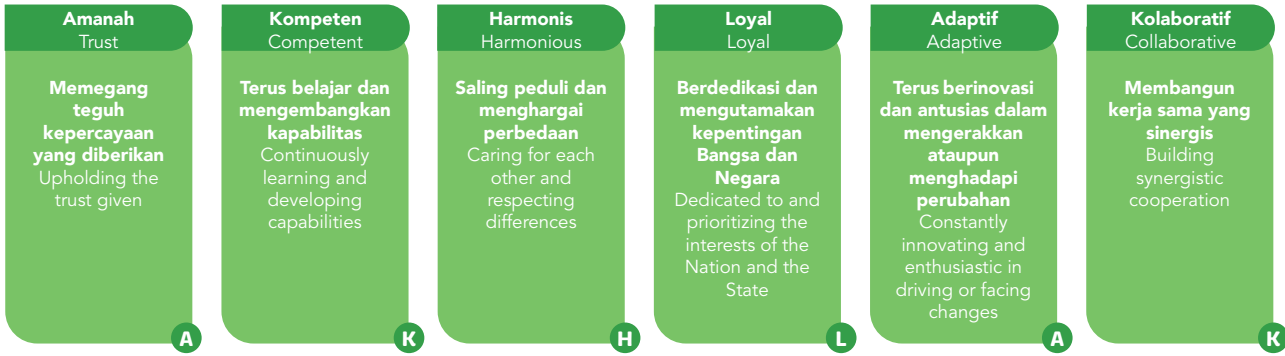
Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 19 April 2020, maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang telah disetujui Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali, No.: S-483/MBU/07/2021, perihal Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 – 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 7 Juli 2021.

Review of the Company's Vision and Mission by Key Management

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 19 April 2020, maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang telah disetujui Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali, No.: S-483/MBU/07/2021, perihal Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 – 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 7 Juli 2021.

Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus bergerak, berkembang dan berperan aktif di dalam industri perkebunan Nasional dengan berlandaskan semangat berkarya, mengabdikan dengan prinsip AKHLAK yang merupakan bentuk budaya perusahaan PTPN sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara.



Statement on Corporate Culture

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) continues to move, develop and play an active role in the National plantation industry based on the spirit of work, serving the AKHLAK principle which is a form of PTPN corporate culture as part of a State-Owned Enterprise.

Paradigma Bisnis Perusahaan

Paradigma perusahaan selaras dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap kebijakannya, meliputi:

1. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan metoda dan kinerja adalah suatu keharusan;
2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan persaingan;
3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;
4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan, dan kebhinekaan;
5. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (*human capital*) dan intelektual yang dibutuhkan Perusahaan;
6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan menjadi panutan;
7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerja;
8. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;
9. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif;
10. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;
11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab;
12. Seluruh aktivitas Perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

The Company's Business Paradigm

The Company's paradigm is in line with all stakeholders in all of its policies, including:

1. Change, improvement, and enhancement of methods and performance are necessities;
2. Customer satisfaction is the main priority to enhance competitiveness;
3. Every business activity must generate added value for the Company;
4. Development of egalitarian industrial relations based on openness, equality, and diversity;
5. Development of integrated human resources to build human capital and intellectuals required by the Company;
6. Effective leadership builds influence through ability to share knowledge, develop good relations, and be a role model;
7. Award to employees based on competency and performance;
8. Operational effectiveness must be supported by simple and dynamic organizational structure;
9. Utilization of technology as a means to improve work productivity and competitive advantage;
10. Business decision is made based on accurate facts and data;
11. Every task and operation of the Company is performed responsively, completely, with quality, and responsibly;
12. All of the Company's activities must be oriented to the improvement of quality and environment.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN

MEANING OF THE COMPANY'S LOGO



Angka 3 Romawi
Number 3 in Roman numerals

Melambangkan identitas dan basis orientasi bisnis Perusahaan (3P: People, Planet, Profit).
The number 3 in Roman numeral symbolizes the Company's identity and reflects its business orientation based on 3P (People, Planet, Profit).



Daun
Leaf

Menunjukkan inti bisnis perusahaan yakni perkebunan dengan aset utamanya adalah tanaman.
The leaf shape indicates that the Company has plantation as its core of business with plants as its main assets.



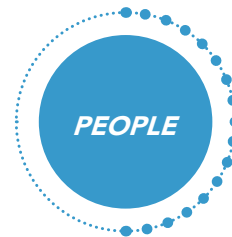
Simpul Tali
Knot

Melambangkan Perusahaan sebagai Holding BUMN Perkebunan yang akan menjadi pemersatu dan mensinergikan PTPN Group.
The knot shape symbolizes the Company's role as Holding BUMN Perkebunan that will unite and synergize PTPN Group.



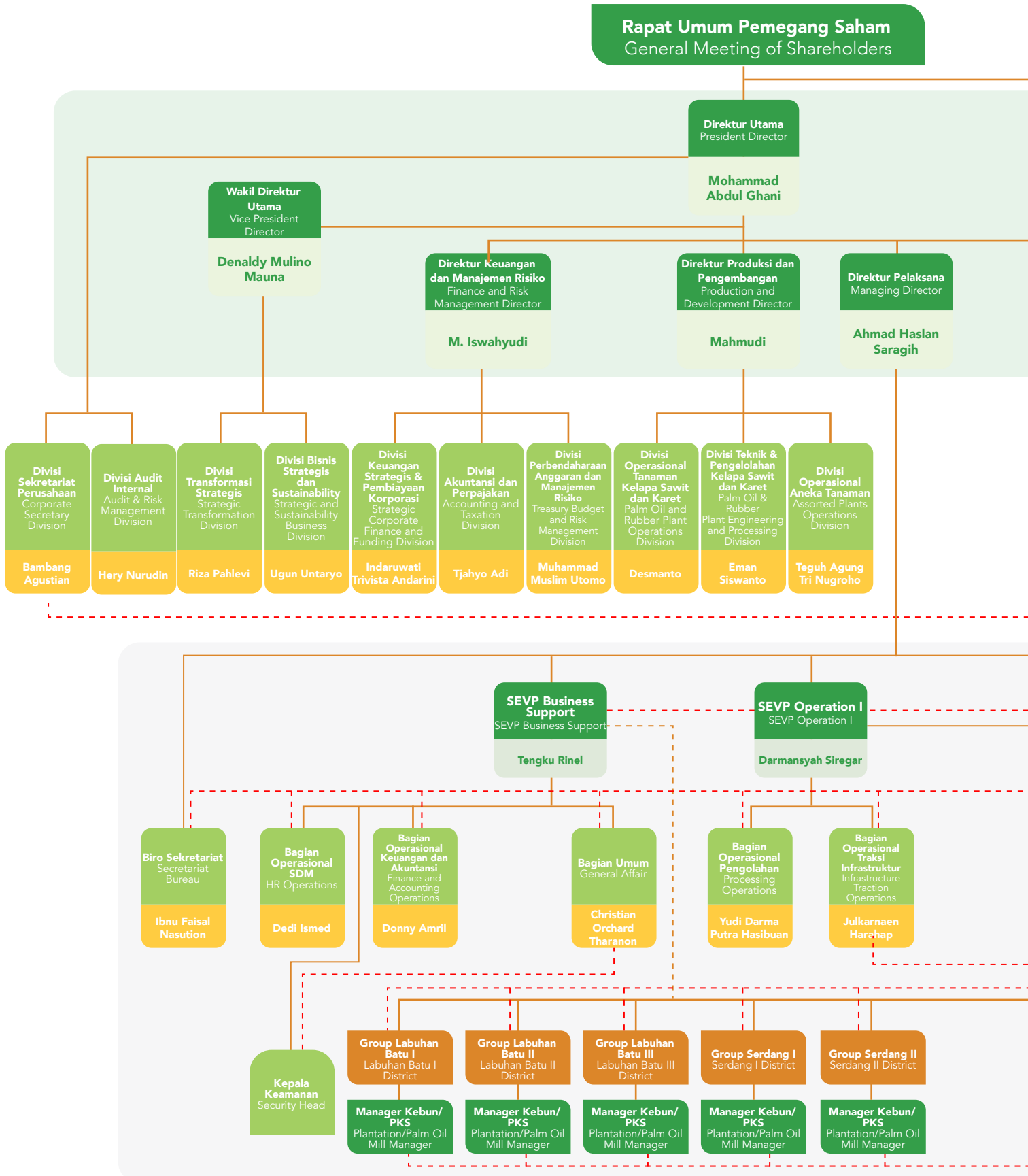
Infinity (tidak ada akhir)
Infinit

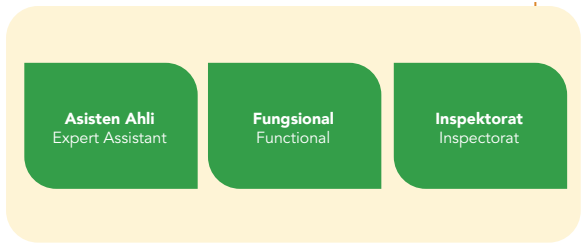
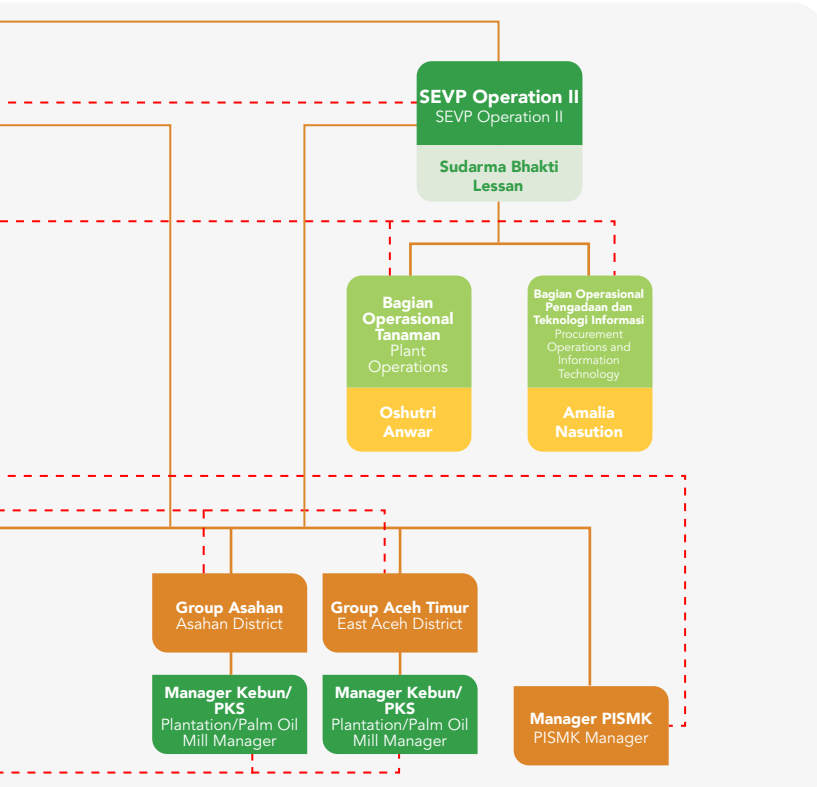
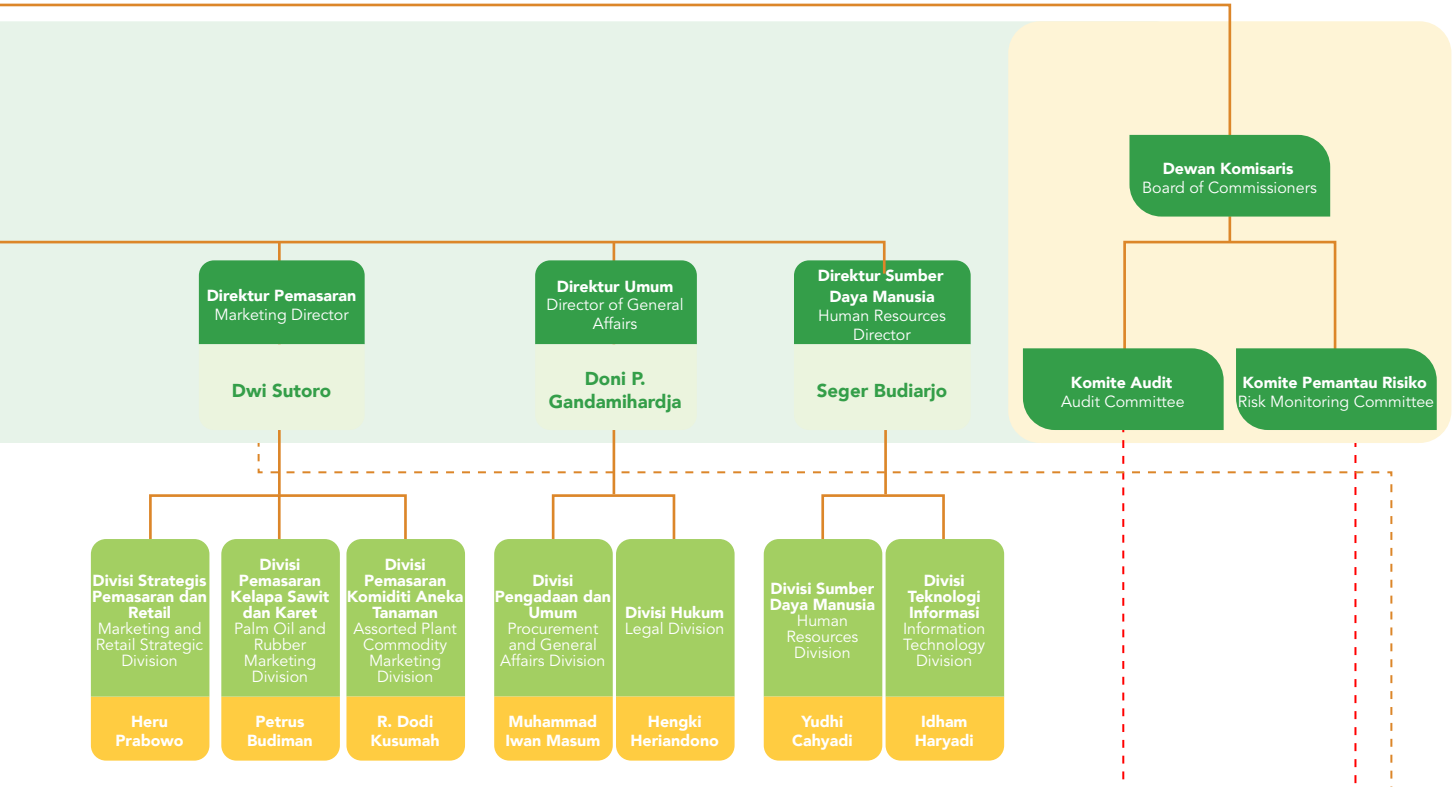
Menunjukkan harapan dan tekad Perusahaan untuk berkelanjutan (sustainability) sepanjang masa
The infinity symbol (with no end) shows th Company hopes and determination to continue to be sustainable (sustainability) for all times.



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE





- Keterangan:**
Information:
- Garis Komando Operasional
Operational Command Line
 - - - Garis Komando Fungsional
Functional Command Line
 - - - Garis Koordinasi Operasional
Operational Coordination Line

KEGIATAN USAHA DAN PASAR YANG DILAYANI [GRI 2-6]

BUSINESS ACTIVITIES AND MARKET SERVED

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agribisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perkebunan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/menjejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain;
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro industri;
5. Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
 - a. *Trading house, real estate, pengudangan, pariwisata, resort, olahraga dan rekreasi, rest area, rumah sakit, pendidikan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana/prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat perbelanjaan/mall, pupuk, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri;*
 - b. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. Pengelolaan Kawasan Industri.

PASAR YANG DILAYANI [GRI 2-6]

Perusahaan terus berupaya untuk memperluas pangsa pasar demi memperkuat kinerja Perusahaan Untuk itu, Perusahaan tidak hanya mengembangkan kegiatan usahanya di dalam negeri, melainkan juga merambah luar negeri melalui ekspor berbagai produk perkebunan yang dihasilkan Perusahaan dan entitas anak Perusahaan.

Perusahaan bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang mencakup komoditas kelapa sawit, karet, komoditas aneka tanaman, serta pengembangan

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on the latest amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purpose and objectives include conducting business in agribusiness and agroindustry, as well as optimizing utilization of plantation resources to produce high quality and highly competitive goods/services to obtain/search for profit to increase the Company's value by implementing the principles of good corporate governance. In achieving the purpose and objectives, the Company performs the following main activities:

1. Cultivation of plants includes opening and managing lands, nursery, planting, maintenance, and harvesting crops, as well as other activities related to the cultivation of plants;
2. Production includes processing own-crops and other parties into semi-finished goods and or finished goods, as well as derivative products;
3. Trade includes organizing marketing activities of various production outputs and organizing other trade activities related to the Company's business activities, either ownproduction outputs or other parties;
4. Business development in plantation, agrotourism, agrobusiness, and agroindustry;
5. In addition to the main business activities above, the Company may perform business activities in order to optimize the utilization of existing resources for:
 - a. *Trading house, real estate, warehousing, tourism, resort, sport and recreation, rest area, hospital, research education, telecommunication and energy resources facilities, rental service and enterprising of facilities/infrastructures owned by the Company, freeway (toll road), shopping center/mall, fertilizer, consultation service in agribusiness and agroindustry;*
 - b. Management of Special Economic Zone;
 - c. Management of Industrial Zone.

MARKET SERVED [GRI 2-6]

The Company continues to expand its business activities, to all regions of Indonesia and overseas, which are export destinations of plantation products produced by the Company and its subsidiaries, which the Company consistently performs in order to develop market share to strengthen the Company's performance.

The Company is engaged in plantations, processing and marketing of plantation products, including palm oil, rubber, assorted plants commodities, as well as other business development, in



bisnis lainnya Hal ini sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan konsolidasian yang menjadi sumber pendapatan Perusahaan

Komoditas Kelapa Sawit

Areal tanaman kelapa sawit tahun 2022 adalah seluas 562.440,99 ha yang terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 463.226,10 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 40.917,10 ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/ Tanaman Tahun Ini (TTI) 17.972,93 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 39.838 ha dan Pembibitan seluas 486,86 ha

Komoditas Karet

Areal tanaman karet tahun 2022 seluas 127.856,52 ha, terdiri dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 106.405,65 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 3.726,08 ha, Tanaman Baru (TB) /Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI) 1.121,48 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 16.434,76 ha dan Pembibitan seluas 168,55 ha

Komoditas Tebu

Realisasi luas areal tebu yang ditebang s.d. Desember 2022 seluas 177.551,8 Ha atau mencapai 95,5% terhadap RKAPP 2022 yang direncanakan seluas 185.903,3 Ha dan 116,2% terhadap realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu seluas 152.742,6 Ha.

Komoditas Aneka Tanaman

Areal teh seluas 23.594,81 ha di PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, dan XII di mana areal terluas 58,43% berada di PTPN VIII seluas 13,691,80 ha. Total areal tanaman kopi seluas 9.752,70 ha berada di PTPN V (KSO dengan PTPN XII), VI, IX, dan XII dengan areal terluas 57,64% berada di PTPN XII yaitu 5.621,84 ha. Sedangkan komoditi kakao ada di PTPN XII seluas 220,30 Ha.

Pengembangan Bisnis lainnya

Pada tahun 2022 PTPN telah mengusulkan program hilirisasi kelapa sawit PTPN Group sebagai program strategis nasional dan telah disahkan melalui Permenko Perekonomian nomor 9 tahun 2022 dengan beberapa usulan program hilirisasi diantaranya pembangunan pabrik minyak goreng kapasitas 2.500 ton CPO/hari di KEK Sei Mangkei, pembangunan pabrik biodiesel/FAME kapasitas 1.500 ton RBDPO/hari di KEK Sei Mangkei serta pengembangan bioCNG plant di PKS PTPN Group.

Penyusunan studi kelayakan oleh konsultan independen untuk ketiga program diatas telah dilakukan pada tahun 2022 dan proses konstruksi akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan sektor bisnis atau pasar yang dilayani dibanding tahun sebelumnya.

accordance with the information stated in the consolidated Financial Statements, which are the Company's source of revenues.

Palm Oil Commodities

In 2022, the Company's area of palm oil plantations amounted to 562,440.99 ha consisting of 463,226.10 ha of Mature Plants (TM), 40,917.10 ha of Immature Plants (TBM), 17,972.93 ha of New Plants (TB)/Replanting (TU)/Plants for the Year (TTI), 39,838 ha of Unproductive Plants (TTAD), and Nurseries of 486.86 ha.

Rubber Commodities

The area of rubber plantations in 2022 amounted to 127,856.52 ha consisting of 106,405.65 ha of Mature Plants (TM), 3,726.08 ha of Immature Plants (TBM), 1,121.48 ha of New Plants (TB)/Replanting (TU)/Plants for the Year (TTI), and 16,434.76 ha of Unproductive Plants (TTAD) and Nurseries of 168.55 ha.

Sugarcane Commodities

Realization of the area of sugarcane plants that were cut down up to December 2022, covering an area of 177,551.8 ha or 95.5% of the Company's 2022 Revised Work Plan and Budget, which was planned to cover an area of 185,903.3 ha and 116.2% of the realization of the same period in the previous year, which was 157,742.6 ha

Assorted Plants Commodities

The tea area amounted to 23,594.81 ha in PTPN IV, VI, VII, VIII, IX and XII where the largest area of 58.43% is in PTPN VIII with an area of 13,691.80 ha. The total coffee plantation area amounted to 9,752.70 ha in PTPN V (KSO with PTPN XII), VI, IX, and XII with the largest area of 57.64% being in PTPN XII, namely 5,621.84 ha. While the cocoa commodity is in PTPN XII covering an area of 220.30 Ha.

Other Business Development

In 2022, PTPN has proposed the PTPN Group's palm oil downstream program as a national strategic program and has been ratified through the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 9 of 2022 with several proposed downstream programs including the construction of a cooking oil factory with a capacity of 2,500 tons of CPO/day in Sei Mangkei SEZ, construction of a biodiesel factory/FAME with a capacity of 1,500 tons of RBDPO/day in Sei Mangkei SEZ and the development of a bioCNG plant at PTPN Group Plantation.

The preparation of feasibility studies by independent consultant for the three programs above has been conducted in 2022 and the construction process will be implemented in 2023 and 2024.

There has been no change in the business sector or market served in 2022 from the previous year.

PRODUK DAN JASA [GRI 2-6] PRODUCTS AND SERVICES

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya .

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding is a State-Owned Enterprise engaged in the management, processing and marketing of Plantation products. Commodities cultivated include palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, cocoa, tobacco, various woods, fruits and other assorted plants.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM [GRI 2-1] STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2022
Composition of the Company's Shareholders As of December 31, 2022

Pemegang Saham Shareholder	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital		Persentase Kepemilikan Percentage of Share Ownership (%)
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheet)	Nominal (Rp) Nominal (IDR)	
	Nilai nominal Rp1.000.000,-/lembar saham Par value IDR1,000,000/share		
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	40.216.132	40.216.132.000.000	100,00%





STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



100%



PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III" atau "Perseroan"), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah diberlakukannya PP No.72 tahun 2014, Perseroan menjadi pemegang saham pengendali PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV dengan cakupan lokasi grup Perseroan tersebar dari Aceh hingga Papua

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III" or "The Company"), is a State-Owned Enterprise (SOE) with 100% ownership by the Government of Indonesia. After the promulgation of Government Regulation No. 72 of 2014, the Company became the controlling shareholder of PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, and XIV, with coverage of areas consist of the Company's group locations that spread across Indonesia from Aceh to Papua

90%

10%



Anak Perusahaan non-PTPN dengan kepemilikan >50%

Non-PTPN Subsidiaries with more than 50% ownership



DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA DAN KERJA SAMA OPERASI [GRI 2-2]

LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS

ENTITAS ANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DENGAN KEPEMILIKAN LANGSUNG

SUBSIDIARY OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) WITH DIRECT OWNERSHIP

No.	Entitas Entity	Nama Perusahaan Company Name	Domisi dan Tahun Pendirian Domicile and Year of Establishment	Saham Share (%)
1	PTPN I	PT Perkebunan Nusantara I	Aceh, 1996	76,00%
2	PTPN II	PT Perkebunan Nusantara II	Medan, 1996	90,00%
3	PTPN IV	PT Perkebunan Nusantara IV	Medan, 1996	90,00%
4	PTPN V	PT Perkebunan Nusantara V	Pekanbaru, 1996	90,00%
5	PTPN VI	PT Perkebunan Nusantara VI	Jambi, 1996	90,00%
6	PTPN VII	PT Perkebunan Nusantara VII	Bandar Lampung, 2014	90,00%
7	PTPN VIII	PT Perkebunan Nusantara VIII	Bandung, 1996	90,00%
8	PTPN IX	PT Perkebunan Nusantara IX	Semarang, 1996	90,00%
9	PTPN X	PT Perkebunan Nusantara X	Surabaya, 1996	90,00%
10	PTPN XI	PT Perkebunan Nusantara XI	Surabaya, 1996	90,00%
11	PTPN XII	PT Perkebunan Nusantara XII	Surabaya, 1996	90,00%
12	PTPN XIII	PT Perkebunan Nusantara XIII	Pontianak, 1996	90,00%
13	PTPN XIV	PT Perkebunan Nusantara XIV	Makassar, 1996	90,00%
14	PT IKN	PT Industri Karet Nusantara (IKN)	Medan, 2006	99,99%
15	PT INL	PT Industri Nabati Lestari	Medan, 2012	95,10%
16	PT KPBN	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Jakarta, 2009	97,94%
17	PT RPN	PT Riset Perkebunan Nusantara	Bogor, 2009	91,04%
18	PT BIN	PT Bio Industri Nusantara	Bandung, 2009	91,71%
19	PT LPPAN	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta, 2002	30,04%
20	PT SGN	PT Sinergi Gula Nusantara	Jakarta, 2021	100,00%

ENTITAS ANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DENGAN KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG

SUBSIDIARY OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) WITH INDIRECT OWNERSHIP

No.	Entitas Entity	Nama Perusahaan Company Name	Domisi dan Tahun Pendirian Domicile and Year of Establishment	Saham Share (%)
1	PT CMMN	PT Cut Meutia Medika Nusantara	Langsa, 2013	75,24%
2	PT NDB	PT Nusa Dua Bekala	Medan, 2012	89,10%
3	PT TDM	PT Tembakau Deli Medika	Medan, 2017	88,20%
4	PT ASN	PT Agro Sinergi Nusantara	Meulaboh, 2011	85,07%
5	PT SPN	PT Sinergi Perkebunan Nusantara	Morowali, 2012	90,00%
6	PT ALN	PT Alam Lestari Nusantara	Jambi, 2019	90,00%
7	PT KNT	PT Karya Nusa Tujuh	Bandar Lampung, 2013	81,00%



No.	Entitas Entity	Nama Perusahaan Company Name	Domisi dan Tahun Pendirian Domicile and Year of Establishment	Saham Share (%)
8	PT ONT	PT Optima Nusa Tujuh	Bandar Lampung, 2015	81,00%
9	PT AMN	PT Agro Medika Nusantara	Subang, 2012	83,97%
10	PT MDT	PT Mitratani Dua Tujuh	Jember, 2004	65,00%
11	PT DN	PT Dasaplast Nusantara	Jepara, 2004	90,00%
12	PT EAN	PT Energi Agro Nusantara	Mojokerto	99,25%
13	PT RNT	PT Rolas Nusantara Tambang	Surabaya	90,00%
14	PT KAN	PT Kalimantan Agro Nusantara	Kutai Timur	0,00%
15	PT NB	PT Nusantara Batulicin	Tanah Bumbu	45,90%
16	PT KMN	PT Kalimantan Medika Nusantara	Pontianak	89,55%
17	PT KPB	PT Kharisma Pemasaran Bersama Niaga	Jakarta	88,08%
18	PT RNM	PT Rolas Nusantara Medika	Jawa Timur	32,99%

ENTITAS ASOSIASI DAN PENYERTAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) (TIDAK DIKONSOLIDASI)

ASSOCIATE AND INVESTMENT OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) (UNCONSOLIDATED)

No.	Entitas Entity	Nama Perusahaan Company Name	Domisi dan Tahun Pendirian Domicile and Year of Establishment	Saham Share (%)
1	PT AARN	PT Applied Agricultural Resources Nusantara	Jakarta	35,00%
2	PT IGN	PT Industri Gula Nusantara	Kendal	32,01%
3	PT LNK	PT Langkat Nusantara Kepong	Medan	40,00%
4	PT GA	PT Perkebunan Agrintara	Jakarta	30,05%
5	PT PMO	PT Perkebunan Mitra Ogan	Palembang, 1997	26,42%
6	PT PND	PT Propemas Nusa Dua	Medan, 2014	44,10%
7	PT PAN	PT Pupuk Agro Nusantara	Medan, 2010	49,00%
8	PT SIL	PT Sinkona Indonesia Lestari	Subang, 1986	49,00%
9	PT TMN	PT Tiga Mutiara Nusantara	Serdang Bedagai, 2006	30,00%
10	PT PSBI	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Jakarta, 2015	25,00%
11	PT MNR	PT Mardec Nusa Riau	Riau, 2011	40,00%
12	PT KPBE	PT KPBE Trading Limited	Singapura, 2018	45,00%

SKALA PERUSAHAAN [GRI 2-6]

SCALE OF THE ORGANIZATION

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Total Pegawai Number of Employee	Orang People	91,583	97.111	105.616
Pendapatan Bersih Net Revenue	Jutaan Rupiah IDR Million	55,863,302	53.569.662	39.390.437
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	Jutaan Rupiah IDR Million	(36,669,237)	(33.660.029)	28.953.637
Total Ekuitas Total Equity	Jutaan Rupiah IDR Million	70,116,144	65.706.974	53.875.384
Total Liabilitas Total Liabilities	Jutaan Rupiah IDR Million	79,039,706	78.918.584	77.807.881
Total Aset Total Assets	Jutaan Rupiah IDR Million	149,155,850	144.625.558	131.683.265
Jumlah Total Operasi Total Operations	Anak Perusahaan Subsidiaries	Penyertaan pada anak Perusahaan: 23 perusahaan Penyertaan pada perusahaan asosiasi: 3 perusahaan Participation in Subsidiaries: 23 Companies Participation in Associates: 3 Companies	Penyertaan pada anak Perusahaan: 23 perusahaan Penyertaan pada perusahaan asosiasi: 3 perusahaan Participation in Subsidiaries: 23 Companies Participation in Associates: 3 Companies	Penyertaan pada anak Perusahaan: 23 perusahaan Penyertaan pada perusahaan asosiasi: 5 perusahaan Participation in Subsidiaries: 23 Companies Participation in Associates: 5 Companies
Produk/Jasa yang dihasilkan Products/ Services produced	Jenis Komoditas Types of Commodity	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)	4 (Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Aneka Tanaman, dan Pengembangan Bisnis Lainnya) 4 (Palm Oil, Rubber, Assorted Plants Commodities, and Other Business Development)
Pemilik saham terbesar Major Shareholder	Persen Percent	Pemerintah RI (100%) Government of Indonesia (100%)	Pemerintah RI (100%) Government of Indonesia (100%)	Pemerintah RI (100%) Government of Indonesia (100%)



INFORMASI TENTANG KARYAWAN

INFORMATION ON EMPLOYEES

Per 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perseroan tercatat mencapai 91,583 berkurang sebanyak 5,528 orang atau 5,69% dibanding tahun 2021 yang mencapai 97.111. Pengurangan karyawan dimaksud dikarenakan adanya program pensiun Karyawan secara normal. Data jumlah karyawan Perseroan dikumpulkan dari anak perusahaan Perseroan, yang lalu dikelola oleh Divisi Sumber Daya Manusia (DSDM). Data yang disajikan adalah data per posisi akhir Desember 2022.

The number of employees at the Company as of December 31, 2022 amounted to 91,583, a decline of 5,528 individuals or 5.69% from 97,111 in 2021. The employment reduction was related to the standard employee pension program. Data on the number of the Company's employees are collected from the Company's subsidiaries, which are then managed by the Human Resources Division (DSDM). The data presented is data per position at the end of December 2022.

Informasi selengkapnya tentang karyawan disajikan dalam tabel-tabel berikut: [GRI 2-4, GRI 2-7]

Detailed information on employees are presented in the following tables: [GRI 2-4, GRI 2-7]

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin (orang)
Employee Composition by Employment Status and Gender (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%	L M	P F	Jumlah Total	%
Karyawan Tetap Permanent Employees	78,013	13,570	91,583	74.94%	85,331	11,780	97,111	74.76%	91,927	13,689	105,616	80.36%
Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees	27,423	3,209	30,632	25.06%	29,040	3,750	32,790	25.24%	22,853	2,952	25,805	19.64%
Jumlah Total	105,436	16,779	122,215	100.00%	114,371	15,530	129,901	100.00%	114,780	16,641	131,421	100.00%

L = Laki-laki / P = Perempuan | M = Male/F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Wilayah Kerja (orang)
Employee Composition by Employment Status and Areas of Operations (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2022				2021				2020*			
	KP HO	KD RO	Jumlah Total	%	KP HO	KD RO	Jumlah Total	%	KP HO	KD RO	Jumlah Total	%
Karyawan Tetap Permanent Employees	4,057	87,526	91,583	74.94%	4,224	92,887	97,111	74.76%	NA	NA	105,616	80.36%
Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees	549	30,083	30,632	25.06%	709	32,081	32,790	25.24%	NA	NA	25,805	19.64%
Jumlah Total	4,606	117,609	122,215	100.00%	4,933	124,968	129,901	100.00%	NA	NA	131,421	100.00%

KP: Kantor Pusat di Jakarta/KD: Kantor di Daerah | HO: Head Of ce in Jakarta/RO: Office in the Regions (Regional Office)
*Data tahun 2020 tidak terdapat breakdown untuk karyawan KP dan KD | *Data for 2020 has no breakdown for HO and RO employees

Tabel Komposisi Pegawai Bukan Pekerja Langsung Berdasarkan Wilayah Kerja
Table of Composition of Non-Direct Employees By Work Area [GRI 2-8]

Deskripsi Description	2022	2021	2020
Pekerja magang Internship	45	288	227
Pekerja alih daya Outsourced worker	0	0	0
Kontraktor Contractor	0	0	0
Jumlah Total	45	288	227

1. Pekerja magang adalah mahasiswa yang melakukan magang di perusahaan
 2. Pekerja alih daya adalah tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu di luar core business
 3. Pekerja kontraktor adalah karyawan yang menjalankan pekerjaan di bidang konstruksi
1. Internship are students who are currently interns at the company
 2. Outsourced workers are workers originating from outside the company, a third party to do certain work outside the core business
 3. Contractor workers are employees who perform construction work

Deskripsi Description	2022	2021	2020
Karyawan Employees	91.583	97.111	105.616
Karyawan Baru New employees	1.141	873	2.735
Karyawan Resign Employee resignations	452	782	504
Rata turnover (%) Turnover rate (%)	0.49%	0.81%	0.48%

Turnover rate = jumlah karyawan resign/ total karyawan | Turnover rate = Number of employee resignations/ total number of employees

Deskripsi Description	2022	2021	2020
Jumlah karyawan yang diberikan maternity leave	31.906	35.472	36.004
Jumlah Karyawan yang mengambil maternity leave	1.061	1.305	1.485
Jumlah karyawan yang kembali dari maternity leave	1.061	1.305	1.485
Jumlah karyawan yang diberikan paternity leave	3.761	4.307	4.967
Jumlah Karyawan yang mengambil paternity leave	77	81	90
Jumlah karyawan yang kembali dari paternity leave	77	76	85



RANTAI PASOKAN [GRI 2-6]

SUPPLY CHAIN

Pengadaan barang dan jasa di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengikuti regulasi/ketentuan terbaru dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara di antaranya Surat Edaran No. SE-1 O/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perusahaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. [GRI 3-3]

Sejalan dengan regulasi di atas, Perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk mengutamakan dan memberdayakan pemasok nasional, yaitu pemasok yang lokasi usahanya berada di Indonesia, yang terdiri dari BUMN, swasta maupun UMKM. Melalui pemberdayaan serupa itu, maka pemasok nasional akan semakin maju dan berkembang, yang pada gilirannya akan membuat perekonomian mereka semakin kuat. Selain pemasok nasional, Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pemasok asing, yakni pemasok yang lokasi usahanya di luar negeri. Kerja sama dengan pemasok asing dilakukan apabila barang dan jasa yang diperlukan PTPN III (Persero) tidak dapat dipenuhi oleh pemasok nasional atau dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan Perusahaan. [GRI 3-3]

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Holding Perkebunan secara terintegrasi melalui *Integrated Procurement System* yang bisa diakses di <https://ips.holding-perkebunan.com/vendors#>

Per 31 Desember 2022, jumlah pemasok barang dan jasa berdasarkan lokasi usaha serta nilai kontraknya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 204-1]

The goods and services procurement in the Company follows the latest regulations/stipulations from the Ministry of State-Owned Enterprises, including Circular No. SE-10/MBU/08/2020 concerning Increasing the Role of Micro, Small, and Medium Enterprises in Goods and Services Procurement of State-Owned Enterprises. In addition, the Company also refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Goods and Services Procurement of State-Owned Enterprises. In addition, the Company is also guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-07/MBU/04/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-03/Mbu/08/2017 concerning Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises. [GRI 3-3]

In line with these regulations, the Company makes every effort to prioritize and empower national suppliers, namely suppliers whose business locations are in Indonesia, which consists of SOEs, private and MSMEs. Through such empowerment, national suppliers shall be more advanced and developed, which in turn will make their economies stronger. In addition to national suppliers, the Company also cooperates with foreign suppliers, namely suppliers whose business locations are overseas. Cooperation with foreign suppliers is carried out when the goods and services required by the Company could not be provided by national suppliers or with certain considerations according to the needs of the Company. [GRI 3-3]

To increase effectiveness, efficiency and transparency, goods and services procurement within Holding Perkebunan is carried out an integrated manner through the *Integrated Procurement System*, which can be accessed at <https://ips.holding-perkebunan.com/vendors#>

The number of goods and services suppliers based on business location and contract value as of December 31, 2022 is presented in the following table: [GRI 204-1]

Jumlah pemasok barang dan jasa
Number of Goods and Services Suppliers

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Barang dan Jasa Number of Goods and Services Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan* (Rp dalam Juta) Contract Value* (IDR Million)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Nasional National	1,862	1,719	1,024	18.543.600	11.957.000	8.599.900
Asing Foreign	1	1	0	1.361.182	526.378,5	0
Jumlah Total	1,863	1,720	1,024	19.904.782	12.483.378,5	8.599.900

*Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam SPPBJ | *The work contract value as stated in the Letter of Appointment of Goods/Services Suppliers

PERUBAHAN TERHADAP ORGANISASI ATAU RANTAI PASOKAN [GRI 2-6] CHANGES IN THE ORGANIZATION OR SUPPLY CHAIN

Pada tahun pelaporan tidak terdapat perubahan signifikan pada operasional Perusahaan, seperti perubahan kepemilikan modal, pembukaan/penutupan kantor, dan sebagainya. Sedangkan perubahan pada rantai pasokan terjadi dengan adanya penambahan jumlah pemasok barang dan jasa, yaitu dari 1.720 pemasok pada tahun 2021 menjadi 1.863 pemasok pada tahun 2022 atau bertambah 143 pemasok atau meningkat 8,31% dibandingkan tahun 2021 dengan satu pemasok di antaranya adalah pemasok asing. Pada tahun pelaporan nilai SPPBJ yang dibukukan mengalami peningkatan sebesar Rp7,42 triliun atau 59,45% dibandingkan tahun 2021, yaitu dari Rp12,48 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp19,90 triliun pada tahun 2022. Pada tahun pelaporan perubahan jumlah pemasok dan nilai kontrak tersebut berdampak signifikan pada upaya pencapaian target dan kinerja perusahaan.

During the reporting year, there have been no significant changes in the Company's operations, such as changes in capital ownership, office opening/closing, etc. Meanwhile, changes in the supply chain occurred as the number of goods and services suppliers increased from 1,720 in 2021 to 1,863 in 2022, representing an increase of 143 suppliers or 8.31% over 2021, with one supplier being a foreign supplier. The recorded SPPBJ value increased by IDR7.42 trillion or 59.45% in the reporting year compared to 2021, increased from IDR12.48 trillion in 2021 to IDR 19.90 trillion in 2022. Changes in the number of suppliers and contract values during the reporting year have a substantial impact on the Company's performance and efforts to achieve its targets.

PENDEKATAN ATAU PRINSIP PENCEGAHAN [GRI 2-23] PRECAUTIONARY APPROACH OR PRINCIPLE

Dalam menjalankan usaha, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Terlebih lagi, situasi dan kondisi Indonesia pada tahun 2022 belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Untuk meminimalkan dampak atas risiko-risiko tersebut, Perusahaan telah menyusun manajemen risiko, yang di dalamnya terdapat penetapan konteks, penilaian dan penanganan risiko. Manajemen risiko diterapkan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian atau prinsip pencegahan agar Perusahaan terhindar dari berbagai risiko dan dampak lanjutannya. Profil risiko dan mitigasinya disampaikan lebih lengkap di laporan dalam pembahasan Manajemen Risiko pada Bab Tata Kelola Keberlanjutan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) faces a variety of risks in conducting business that have the ability to impede performance and achievement of the targets outlined in the Company's Work Plan and Budget. Furthermore, Indonesia's circumstances and condition in 2022 had not entirely recovered from the COVID-19 pandemic's prolonged impact. To mitigate the impact of these risks, the Company has created risk management, which comprises establishing the context, assessing, and dealing with risks. Risk management is used as a form of prudence or as a precautionary principle to keep the company safe from numerous risks and their consequences. The risk profile and its mitigation are discussed in greater depth in the report in the Risk Management section of the Sustainability Governance Chapter.



INISIATIF EKSTERNAL

EXTERNAL INITIATIVES

Untuk memenuhi kualifikasi dan standar produk dan layanan terbaik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengikuti dan mendukung beberapa prinsip dan inisiatif yang dikembangkan oleh organisasi/ lembaga lain, baik berupa sertifikasi atau standar-standar untuk bidang-bidang tertentu, yang diakui secara nasional maupun internasional.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) follows and supports several principles and initiatives developed by other organizations/ institutions, either in the form of certification or standards for specific fields, which are recognized nationally and internationally, in order to meet the qualifications and standards of the best products and services.

Implementasi atas berbagai sertifikasi dan standar tersebut oleh Perusahaan telah mendapatkan berbagai pengakuan dan apresiasi dari pihak luar berupa penghargaan. Daftar sertifikasi/standar yang masih berlaku pada tahun 2022 dan penghargaan yang diterima Perusahaan disajikan dalam tabel berikut

Implementation of these various certifications and standards by the Company has received various acknowledgments and appreciation from external parties in the form of awards. The list of certifications standards that are still valid in 2022 and the awards received by the Company are presented in the following table

Sertifikasi

Certifications

No.	Sertifikat Certification	Topik Material Terhait Relevant Material Topics	Pemberi Organizer	Akhir Masa Berlaku End of Validity Period
1		Berbagai topik keberlanjutan (untuk Kelapa Sawit) Various sustainability topics (for Palm Oil)	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi RSPO Certification Body with RSPO license	2025
2		Seluruh topik terkait Lingkungan All Environment related topics	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KAN Certification Body with National Accreditation Committee (KAN) license	2025
3		Etika dan Anti-Korupsi Ethics and Anti-Corruption	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KAN Certification Body with National	2023
4		Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KAN Certification Body with National Accreditation Committee (KAN) license	2025
5		Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KAN Certification Body with National Accreditation Committee (KAN) license	2025

Sertifikasi
Certifications

No.	Sertifikat Certification	Topik Material Terhait Relevant Material Topics	Pemberi Organizer	Akhir Masa Berlaku End of Validity Period
6	ISCC 	Berbagai topik keberlanjutan Various sustainability topics	Lembaga sertifikasi dengan lisensi ISCC Certification Body with ISCC license	2025
7	Rainforest Alliance 	Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi RA Certification Body with RA license	2024
8	Good Manufacturing Practices 	Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KAN Certification Body with National Accreditation Committee (KAN) license	2024
9	ISPO 	Berbagai topik keberlanjutan (untuk Kelapa Sawit) Various sustainability topics (for Palm Oil)	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi ISPO Certification Body with ISPO license	2025
10	PROPER 	Seluruh topik terkait Lingkungan All Environment related topics	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ministry for the environment and forestry	2023
11	Halal 	Kualitas dan Keamanan Produk Product Quality and Safety	MUI	2024
12	SMK3 	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Lembaga Sertifikasi dengan lisensi KA Certification Body with National Accreditation Committee (KAN) license	2024



PENGHARGAAN



1



2



3



4

AWARDS

Nama Penghargaan

Name of Award

Gold Rating Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

National Center for Sustainability Reporting (NCSR)

24 November 2022

November 24, 2022

Nama Penghargaan

Name of Award

Peringkat Perunggu Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2022

Bronze Award of the 2022 Indonesian National Standard (SNI) Award

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

National Standardization Agency of Indonesia

30 November 2022

November 30, 2022

Nama Penghargaan

Name of Award

Penghargaan atas pencapaian Inovasi Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Tempat Kerja

Award for the Achievement of Innovation for Increasing the Implementation of Workplace Safety and Health

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Gubernur Sumatera Utara

Governor of North Sumatra

27 Mei 2022

May 27, 2022

Nama Penghargaan

Name of Award

Penghargaan Partisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan

Award for Participating in the National Movement for the Protection of Vulnerable Workers Program

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

BPJS Ketenagakerjaan

23 Mei 2022

May 23, 2022



5

Nama Penghargaan

Name of Award

Nusantara CSR Awards 2022

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

La Tofi

26 Agustus 2022

August 26, 2022



6

Nama Penghargaan

Name of Award

Indonesia Best Innovation Excellent Award 2022

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

5 Pilar Media

30 September 2022

September 30, 2022



7

Nama Penghargaan

Name of Award

**Penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Kecelakaan Nihil**

Zero Accident Occupational Health and Safety (OHS) Award

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

20 Juni 2022

June 20, 2022



8

Nama Penghargaan

Name of Award

**Penghargaan K3
OHS Award**

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

27 Mei 2022

May 27, 2022



9

Nama Penghargaan

Name of Award

The Winner of Indonesia TJSL Awards 2022 in Agriculture Sector Industry

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Indonesia CSR&TJSL Awards 2022 (The Economics)

10 Juni 2022

June 10, 2022



10

Nama Penghargaan

Name of Award

Penghargaan dan Pelestarian Cagar Budaya
Penghargaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Lembaga Pemberi penghargaan

Institution Giving the Award

Indonesia CSR&TJSL Awards 2022 (The Economics)

Office of Culture and Tourism of East Java Province

29 September 2022

September 29, 2022

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI [GRI 2-28] MEMBERSHIP OF ASSOCIATION

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bergabung dalam berbagai asosiasi atau organisasi yang memiliki kesamaan usaha di bidang perkebunan. Dengan demikian, Perusahaan dapat mengikuti perkembangan isu atau topik-topik terkini, sekaligus berkesempatan untuk menyampaikan berbagai pendapat terkait isu atau topik tersebut. Asosiasi atau organisasi yang diikuti Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is a member of various associations or organizations in the plantation sector. As a result, the Company is able to stay up to date on the current issues or topics, as well as has the ability to express varied viewpoints on these issues or topics. The Company joined the following associations or organizations in 2022:

Nama Asosiasi /Perhimpunan Name of Association/Organization	Posisi di Asosiasi Position within the Association (e.g. Member, Management)
GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia) GAPKINDO (Rubber Association of Indonesia)	Anggota Member
GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Indonesian Palm Oil Association (IPOA)	Anggota Member
RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil)	Anggota Member
ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Anggota Member
AGI (Asosiasi Gula Indonesia) AGI (Indonesian Sugar Association)	Anggota Member
SCOPI (Sustainable Coffee Platform of Indonesia)	Anggota Member
SCAPI (Specialty Coffee Association of Indonesia)	Anggota Member
GAEKI - ICEA (Gabungan Eksportir Kopi Indonesia) GAEKI - ICEA (Indonesia Coffee Exporters Association)	Anggota Member
AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia) AEKI (Association of Indonesian Coffee Exporters and Industries)	Anggota Member
ATI (Asosiasi Teh Indonesia) ATI (Indonesian Tea Association)	Anggota Member
DTI (Dewan Teh Indonesia) DTI (Indonesian Tea Board)	Anggota Member



Perkebunan Nusantara





03

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara khusus, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan menerapkan GCG karena didorong keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

In particular, as one of the State-Owned Enterprises (SOEs), the Company implements GCG because it is driven by a strong desire to optimize the value of SOEs in order to have strong competitiveness, both nationally and internationally.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi bagi operasional usaha PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Keberadaannya menjadi perhatian utama pemegang saham menyamai kinerja finansial dan pertumbuhan bisnis. Dengan posisinya yang begitu sentral, maka penerapan GCG di Perusahaan merupakan hal yang mutlak, tak sekedar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana harapan pemegang saham, sekaligus merujuk pada visi dan misi perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menerapkan GCG secara konsisten dan persisten. Melalui penerapan seperti itu, Perusahaan akan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG juga akan berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah yang optimal bagi Perusahaan.

Hal yang tak kalah penting, implementasi GCG sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, serta merujuk pada standar *best practice* dari korporasi-korporasi unggulan, akan membuat PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*). Berbekal semua itu, Perusahaan optimistis akan mencatatkan kinerja terbaik secara berkesinambungan.

Good Corporate Governance (GCG) is the foundation for PT Perkebunan Nusantara III (Persero)'s business operations. Its existence is the primary concern of shareholders in order to match financial performance and company growth. With such a pivotal position, GCG implementation in the Company is absolute, not just meeting Indonesian regulatory requirements.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) implements GCG consistently and persistently, as required by shareholders and in accordance with the Company's vision and mission. Through such implementation, the Company will be able to achieve a balance in corporate control while minimizing the risk of errors in the Company's management. GCG implementation will also have a positive impact on the Company's ability to create optimal added value.

Equally important, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) will be able to respond to challenges and demands from stakeholders and shareholders by implementing GCG in accordance with applicable laws and regulations and referring to best practice standards from leading corporations. With all of this, the Company is confident that it will continue to deliver the best performance sustainably.



Secara khusus, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan menerapkan GCG karena didorong keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Dengan posisi seperti itu, maka Perusahaan akan mampu mempertahankan keberadaannya, bahkan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai BUMN.

DASAR PENERAPAN GCG

Dalam menerapkan GCG, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengacu pada beberapa ketentuan di antaranya:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Selain itu, Perusahaan juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan pokok GCG, antara lain berupa *Board Manual*, *Code Of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan kebijakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN PRINSIP GCG

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran yang berlaku bagi seluruh Insan Perkebunan sebagai salah satu wujud komitmen dasar untuk menerapkan GCG. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip, Perusahaan optimistis mampu menciptakan hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris bisa selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.

As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company, in particular, implements GCG because it is motivated by a strong desire to maximize the value of SOEs in order to have strong competitiveness, both nationally and internationally. With such a position, the company will be able to survive and even thrive in order to achieve its purpose and objectives as an SOE.

BASIC OF GCG IMPLEMENTATION

In implementing GCG, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) refers to several provisions including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
4. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

In addition, the Company has also established GCG main policies, including in the form of a Board Manual, Code of Conduct, Whistleblowing System, and compliance policies with the applicable laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The Company implements the principles of Transparency, Accountability, Independence, Responsibility and Fairness, which apply to all Plantation Personnel as one form of its basic commitment to implementing GCG. The objective of implementing these principles is to build a healthy business environment with all stakeholders. By implementing these principles, the Company feels optimistic to be able to create a working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners that is always harmonious, supporting and reminding each other. Thus, strong determination and commitment towards the direction of the Company's objectives shall continue to grow and develop.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang menjadi acuan Perusahaan merujuk Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. *Kemandirian (independence)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan setiap dua tahun sekali melakukan penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*review*) atas penerapan GCG. Evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada Indikator/Parameter GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator dan parameter penilaian tersebut dijabarkan dari beberapa aspek dan memiliki bobot sebagai berikut:

Aspek Pengujian Aspect of Assessment	Bobot Weight
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Governance	7,00
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00
Direksi Board of Directors	35,00
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00
Aspek Lainnya Other Aspects	6,00
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00

The following are the key GCG principles to which the Company refers in the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises:

1. Transparency is openness in decision making and disclosure of material and relevant information about the Company.
2. Accountability is clarity of functions, implementation, and accountability of the Organs to ensure effective management of the Company.
3. Accountability is compliance of the Company's management with laws and regulations, as well as sound corporate principles;
4. Independence is a situation where the Company is managed professionally without conflict of interest or influence/p essure from any party that is contrary to the laws and regulations and sound corporate principles;
5. Fairness is justice and equality in the fulfillment of Stakeholder rights arising from agreements, laws, and regulations.

GCG ASSESSMENT CRITERIA

The Company conducts assessment and evaluation (*review*) of GCG implementation. Evaluation is carried out by referring to the GCG Indicators/Parameters determined through Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The assessment indicators and parameters are described from several aspects with the following weights:



• **Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022**

Pada tahun 2022, pelaksanaan assessment GCG Perusahaan menunjukkan hasil dengan predikat “Sangat Baik”, mencakup 6 (enam) aspek seperti yang telah diuraikan di atas, dengan capaian skor sebesar 90%

• **2022 GCG Implementation Assessment**

In 2022, the implementation of the Company's GCG assessment resulted in the predicate of “Very Good,” covering 6 (six) aspects as described above, with a score of 90%

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	Self Assessment
Assessor/Penilai Assessor/Reviewer	:	Tim Assessor Internal PTPN III (Persero) Internal assessment team PTPN III (Persero)
Periode Penerapan Period of GCG Implementation	:	Maret - April 2023 March - April 2023
Tahun Buku Fiscal Year	:	2022
Tempat Venue	:	Kantor Holding Jakarta Holding office Jakarta
Waktu Pengukuran Assessment Period	:	1 Maret s.d 14 April 2023 1 March - 14 April 2023

Rincian hasil assessment penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

Details of the results of the Company's GCG implementation assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

Aspek Pengujian Aspect of Assessment	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2022 2022 Fiscal Year Achievements		
		Nilai Value	Pencapaian Achievement (%)	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Governance	7,00	6,70	95,71	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,45	93,89	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,05	91,57	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,10	91,71	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,10	90,00	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,50	70,00	Cukup baik Good
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	90,90	90,90	Sangat Baik Very Good
Kualifikasi Kualitas Penerapan GC GCG Implementation Quality Qualification				

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Information:
0-50 : Not Good | 50-60 : Not Good | 60-75 : Fairly Good | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

STRUKTUR TATA KELOLA DAN KOMPOSISI [GRI 2-9]

Struktur tata kelola PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terdiri dari tiga Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT). Adapun sistem kepengurusan di Perusahaan menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris

GOVERNANCE STRUCTURE AND COMPOSITION [GRI 2-9]

The governance structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). The management system in the Company adheres to a two-tier system,

dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Di PTPN, Badan Tata Kelola tertinggi adalah RUPS, di mana hal ini mengeliminasi risiko konflik karena tidak ada bagian tata kelola tertinggi yang juga berperan sebagai eksekutif. [GRI 2-11]

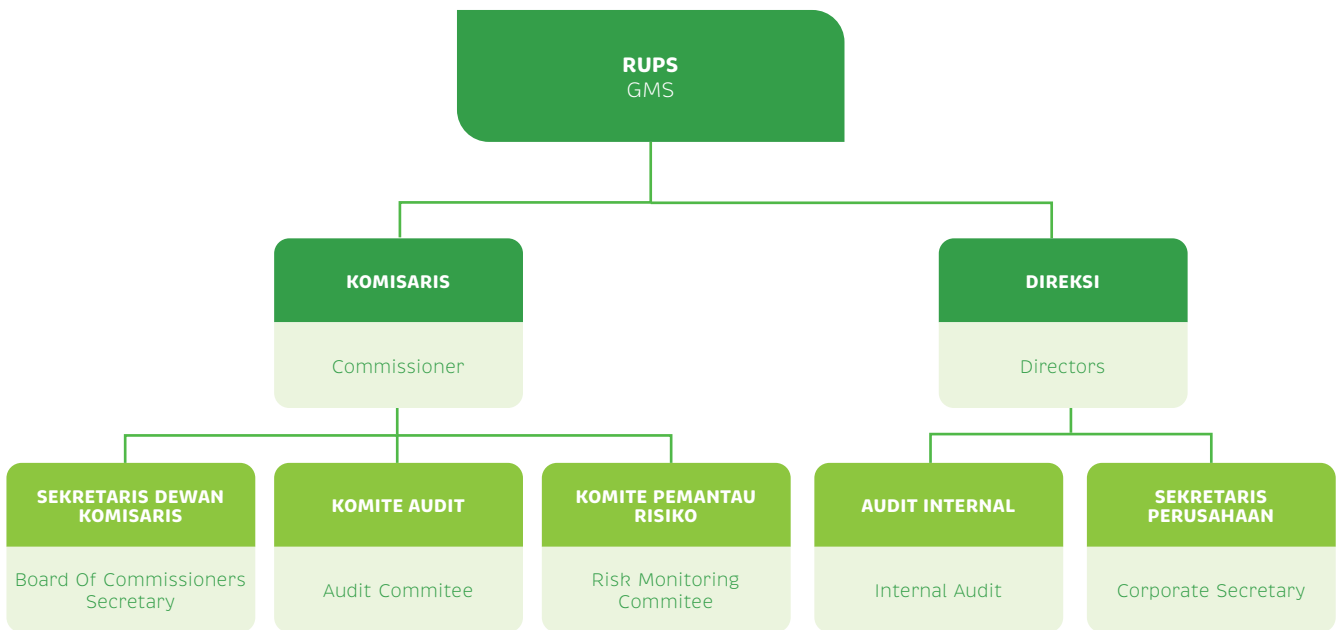
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara itu, Organ Pendukung di bawah Direksi terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perseroan tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku. Di antara organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggungjawab untuk mengambil keputusan tentang topik ekonomi lingkungan dan sosial yang dihadapi Perusahaan adalah Divisi Sekretariat Perusahaan. [GRI 2-13]

namely the Board of Commissioners and the Board of Directors who have clear authority and responsibilities according to their respective functions as mandated in the Articles of Association and laws and regulations.

At PTPN, the highest governance body is the GMS, which eliminates the risk of conflict because there is no highest governance body that also has an executive role. [GRI2-11]

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by Supporting Organs, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Secretary to the Board of Commissioners. Meanwhile, the Supporting Organs under the Board of Directors consist of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit (IAU). In practice, each organ of the Company carries out its duties, functions and responsibilities independently for the benefit of the Company in accordance with the laws and regulations, the Company's Articles of Association and other applicable provisions. The Corporate Secretariat Division is one of the supporting organs of the Board of Commissioners and Board of Directors that is in charge of making decisions on environmental and social economic issues that the Company faces. [GRI 2-13]

Struktur Tata Kelola
Governance Structure



PROSES NOMINASI, KRITERIA & PEMILIHAN ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GRI 2-10)

Komite Nominasi berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu dalam pelaksanaan tugas mengevaluasi atas usulan dan pelaksanaan kebijakan nominasi perusahaan. Setiap tahapan proses nominasi PTPN dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur internal Perseroan, yang tidak melanggar Anggaran Dasar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

NOMINATION PROCESS, CRITERIA AND SELECTION OF GOVERNING BODY (GRI 2-10)

The nomination committee acts as a supporting organ for the Board of Commissioners which assists in the implementation of the task of evaluating the proposed and implementation of the company's nomination policy. Each step of PTPN's nomination process is done in accordance with the requirements of the internal procedures and is inline with the article of association and regulations that governs the



Proses nominasi dan pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga mengikuti Pedoman dan Peraturan yang berlaku yang dikeluarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS menjadi wadah bagi para Pemegang Saham untuk menggunakan wewenang dan hak-haknya dalam pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jenis RUPS yang diselenggarakan Perusahaan terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

• RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi:

- a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - i) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris.
 - ii) Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan
 - iii) Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan. Perusahaan menyampaikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS yang meliputi metode perhitungan dan rincian penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
- b. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - i) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.
 - ii) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Dalam RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS tahunan.

company. The nomination process and the selection of candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners also follows the prevailing Guidelines and Regulations issued by the Minister of State Enterprises of the Republic of Indonesia.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ that has an authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within limits specified in the Law and/or Articles of Association. The GMS is a forum for Shareholders to exercise their authority and rights in making strategic decisions and defining the path of the Company. Decisions taken at the GMS must be entirely based on the Company's interests in the long and short term.

In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the type of GMS held by the Company consists of the annual GMS and other GMS.

• Annual GMS

The Annual GMS is held every year, covering:

- a. GMS regarding the approval of the Annual Report. The Annual GMS for approving the annual report is held no later than June after the closing of the fiscal year. At the meeting, the Board of Directors presents the following:
 - i) Annual Report, which has been signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners.
 - ii) Proposed use of the Company's net profit
 - iii) Other matters that need approval from the GMS for the benefit of the Company. The Company submits a complete explanation and accurate information to the Shareholders regarding the holding of the GMS, which includes the calculation method and details of determining the salary/ honorarium, facilities and/ or other allowances for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who is currently serving.
- b. GMS to approve the Company's Work Plan and Budget is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the relevant Company's Work Plan and Budget year), and in the meeting, the Board of Directors submits:
 - i) The Company's Work Plan and Budget including Financial Statements Projection.
 - ii) Other matters that need approval from the General Meeting of Shareholders for the Company's benefit that has not been included in the Draft Work Plan.

In the annual GMS, proposals submitted by the Board of Commissioners may also be included, provided that the Board of Directors must receive the relevant proposals before the date of the invitation for the annual GMS.

• **RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

• **Pelaksanaan RUPS Tahun 2022**

Selama tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan 2 (Dua) RUPS Tahunan dan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama RUPS Name of GMS	Hari/Tanggal/Tempat Day/Date/venue
1	RUPS RKAP Tahun 2022 <i>GMS for the Company's 2022 Work Plan and Budget</i>	Rabu, 26 Januari 2022 <i>Wednesday, January 26, 2022</i>
2	RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 <i>GMS for the Company's 2021 Financial Statements</i>	Selasa 28 Juni 2022 <i>Tuesday 28 June 2022</i>

• **Other GMS (Extraordinary GMS)**

Extraordinary GMS can be held at any time when required for the benefit of the Company.

• **2022 GMS Implementation**

During 2022, the Company held 2 (two) Annual GMS as shown in the following table:

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang perkebunan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan agro industri, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun

• **Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris**

Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Per 31 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 8 (delapan) orang dengan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama sebagaimana tabel berikut :

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's Organ having the main duty of supervising the policies of the Board of Directors in managing the Company and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring the implementation of GCG principles in every business activity of the Company at all levels of the Company's organization. The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently.

All members of the Board of Commissioners must have the core competencies needed to ensure the effectiveness of the Board of Commissioners. These competencies include plantation sector, strategic ability, business understanding, managerial experience and depth, agro-industry knowledge, regulatory understanding, and risk management and control. The term of office for members of the Board of Commissioners is 5 (five) year

• **Number and Composition of the Board of Commissioners**

The composition of the Board of Commissioners is determined in such a way as to enable decision making to be carried out effectively, accurately and quickly, and to act independently. As of December 31, 2022, the Company's Board of Commissioners consisted of 8 (eight) people with one of them serving as President Commissioner as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position
Zulkifli Zain	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>
Erwan Pelawi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris <i>Commissioner</i>
Arie Yuriwin	Komisaris <i>Commissioner</i>



Nama Name	Jabatan Position
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner
Rini Widyastuti	Komisaris Commissioner
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner

Informasi selengkapnya tentang Dewan Komisaris disampaikan dalam situs resmi perusahaan (<https://holding-perkebunan.com/manajemen/>)

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang berfungsi sebagai manajemen tertinggi yang melakukan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegal dalam memaksimalkan nilai Perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi didahului dengan proses *fit and proper test*. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun.

- Jumlah dan Komposisi Direksi**

Per 31 Desember 2022, Direksi terdiri dari 8 orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama sebagaimana tabel berikut :

Nama Name	Jabatan Position
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran Director of Marketing
Seger Budiarjo	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan Director of Production and Development
Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum Director of General Affairs
Ahmad Haslan Saragih	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations

Informasi selengkapnya tentang Dewan Direksi disampaikan dalam situs resmi perusahaan (<https://holding-perkebunan.com/manajemen/>)

Complete information on the Board of Commissioners is presented in the Company's official website (<https://holding-perkebunan.com/manajemen/>)

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors functions as the highest management who manages the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court under the regulations of the Articles of Association. The Board of Directors has the collegiate duty and complete responsibility to maximize the Company's value by optimally using all available resources. The Board of Directors is appointed and dismissed by the Shareholders. Selecting and appointing the Board of Directors is preceded by a fit and proper test process. The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years

- Number and Composition of the Board of Directors**

As of December 31, 2022, the Board of Directors consisted of 8 people with one of them serving as President Director as shown in the following table:

MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menyadari bahwa jalannya operasional Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik di bawah maupun di luar kendali Perusahaan. Terlebih lagi, pada tahun pelaporan, situasi dan kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan Indonesia belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak awal Maret 2020. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perusahaan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan operasional Perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan pertumbuhan yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki filosofi risiko bahwa dalam pengelolaan bisnis, Direksi bersama organ pendukung di bawahnya berkomitmen mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko yang terpenting, dan memberikan perhatian terhadap proses pengendalian risiko. [GRI 2-12]

- **Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan**

Perusahaan berkomitmen untuk membangun dan memelihara pengelolaan risiko dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko perusahaan secara formal, terstruktur dan terintegrasi. Pada akhirnya, diharapkan akan terwujud budaya sadar risiko yang merupakan salah satu pilar pengelolaan perusahaan yang sehat menurut tata kelola perusahaan yang baik, juga demi mencapai *Key Performance Indicators* Perusahaan. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholders* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang tepat, efektif dan efisien

- **Sistem Manajemen Risiko Perusahaan**

Perusahaan menjalankan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi berbasis ISO 31000:2018, yang berfokus pada harmonisasi kerangka, prinsip dan proses pengelolaan risiko yang terpadu dengan sistem manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang relatif ideal bagi perusahaan perkebunan, termasuk dalam hal akuntabilitas pengelolaan risiko dan upaya peningkatan kesadaran risiko di seluruh unit yang selaras dengan penilaian performance appraisal dan remunerasi. Kebijakan untuk mengelola risiko utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dituangkan dalam profil risiko korporat, yang meliputi eksposur risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan dan risiko strategis.

RISK MANAGEMENT

The Company realizes that the Company's operations are inseparable from various risks, both under and outside the control of the Company. Furthermore, in the reporting year, as of early March 2020, Indonesia's economic and social circumstances and conditions had not entirely recovered from the prolonged COVID-19 epidemic. Therefore, the Company always carries out risk control and management of Company policies in an integrated and sustainable manner to actualize the Company's healthy operations and produce optimal growth within the established risk tolerance limits.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has a risk philosophy in which the Board of Directors and its supporting organs are committed to managing all risks effectively and efficiently and ensuring the sustainability and risk of sustainable business growth through proactive risk management, focusing on the most important risks, and paying attention to the risk control process. [GRI 2-12]

- **The Company's Risk Management Policy**

The Company is committed to develop and maintain risk management by implementing a formal, structured, and integrated corporate risk management policy. In the end, it is hoped that a risk-aware culture will be realized, which is one of the pillars of good corporate governance, as well as the achievement of the Company's Key Performance Indicators. Implementation of risk management can increase shareholder value and provide a comprehensive picture to stakeholders and the Company's management regarding potential opportunities and losses. Thus decision-makers and internal policymakers have the availability of data and information regarding the Company's performance, thus enabling appropriate, effective, and efficient decision making

- **Enterprise Risk Management System**

The Company runs Integrated Corporate Risk Management based on ISO 31000:2018, which focuses on harmonization of the framework, principles, and processes of integrated risk management with the management system of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), which is relatively ideal for plantation companies, including in terms of risk management accountability and efforts to increase risk awareness in all units in line with performance appraisal and remuneration. The policy to manage the main risks of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is outlined in the corporate risk profile, including market risk exposure, operational risk, financial risk, and strategic risk



• **Review dan Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2022**

Perusahaan telah melakukan review dan evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko tahun 2022. Secara umum implementasi sistem manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik oleh *Business Process Owner* selaku pemilik risiko. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran *Risk Management Index (RMI)* yang diperoleh sebesar 3.58 (dalam skala 5). Capaian ini menggambarkan bahwa Perkebunan Nusantara Group telah menerapkan sistem manajemen risiko baik itu dalam kegiatan operasional maupun dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Pengintegrasian manajemen risiko dengan sistem yang dijalankan telah dilakukan meskipun dalam penerapannya masih terdapat beberapa area yang perlu dilakukan penyempurnaan sehingga pengelolaan risiko dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran Perusahaan. [GRI 2-12]

• **Review and Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2022**

The Company has reviewed and evaluated the effectiveness of the 2022 Risk Management System. In general, the implementation of the risk management system has been carried out well by the Business Process Owner as the risk owner. This can be seen from the Risk Management Index (RMI) measurement results, at 3.58 (on a scale of 5). This achievement demonstrates that Perkebunan Nusantara Group has integrated a risk management system in both operational and strategic decision making. Although risk management has been integrated into the system, there are still some areas that need to be improved in order for risk management to run more effectively and efficiently in support of the Company's objectives. [GRI 2-12]

No.	Area Subject	Nilai RMI RMI Score
1	Tata kelola Governance	1,82
2	Penilaian Risiko Risk Assessment	0,82
3	Pengelolaan TI IT Management	0,28
4	Orientasi Strategis Strategic Orientation	0,67
	Keseluruhan Overall	3,58

KODE ETIK [GRI 2-23]

PTPN III (Persero) telah merumuskan kebijakan terkait kode etik, yaitu berupa Pedoman Etika Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan berperan sebagai standar sikap dan perilaku bagi tiap-tiap entitas di Perseroan dalam melaksanakan segenap aktivitas bisnis untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) berisi sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, dan penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi individual yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pelaku bisnis lainnya. Pelaku bisnis lainnya yaitu pihak yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dan aktivitas perusahaan lainnya yang melakukan interaksi dengan berbagai *stakeholders*.

CODE OF ETHICS [GRI 2-23]

PTPN III (Persero) has formulated a policy related to the vcode of ethics, namely in the form of the Company's Code of Conduct. The Company's Code of Conduct serves as a standard of attitude and behavior for all entities within the Company in carrying out all business activities to achieve the Company's vision and mission. The Code of Conduct contains a system of values, business ethics, work ethics, commitment, and enforcement of Company regulations for individuals including the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, and other business actors. Other business actors are parties related to the Company's business and other activities that interact with various *stakeholders*.

- **Isi Kode Etik dan Penerapannya Di Lingkup Perusahaan**

Code of Conduct berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perusahaan bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

Berikut Kode Etik Perusahaan:

Sistem Nilai:

1. Paradigma Baru
 - a. Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah satu keharusan;
 - b. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam memenangkan persaingan;
 - c. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;
 - d. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan kebhinekaan;
 - e. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (human and intellectual capital) yang dibutuhkan Perusahaan;
 - f. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu, membina hubungan baik dan menjadi panutan;
 - g. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya;
 - h. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;
 - i. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif;
 - j. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;
 - k. Setiap tugas dan operasional Perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggungjawab;
 - l. Seluruh aktivitas perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan
2. Tata Nilai
 - a. *Proactivity*, selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi.
 - b. *Excellence*, selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi.
 - c. *Team Work*, perusahaan selalu mengutamakan kerjasama tim agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi Perusahaan.
 - d. *Innovation*, selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru.
 - e. *Responsibility*, selalu bertanggungjawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

- **Content of the Company's Code of Ethics and Its Implementation**

Code of Conduct contains value system, business ethics, work ethics, commitment, and reinforcement of regulations of the Company for individuals which include the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, and other business entities related with the Company's business in operating the business and other activities, as well as interacting with the stakeholders.

The Company's Code of Ethics is as follows:

Value System:

1. New Paradigm
 - a. Change, improvement, and enhancement of methods and performance are mandatory;
 - b. Customer satisfaction is the main priority in winning the competition;
 - c. Every business activity shall produce added value for the Company;
 - d. Development of egalitarian industrial relation based on openness, equality, and diversity;
 - e. Development of integrated human resources to build the human and intellectual capital required by the Company;
 - f. Leadership which effectively creates influence through the ability to share knowledge, develop good relations, and be a role model;
 - g. Rewards are given to employees based on their competency and performance;
 - h. Operational effectiveness shall be supported by simple and dynamic organizational structure;
 - i. Utilization of technology as a means to improve work productivity and competitive advantage;
 - j. Business decision is made based on accurate facts and data;
 - k. Duties and operations of the Company are performed responsively, completely, with quality, and responsibly;
 - l. All of the Company's activities shall be oriented to the improvement of quality and environment
2. Values
 - a. Proactivity, always be proactive with initiative to evaluate possible risks.
 - b. Excellence, always show passion for excellence and work hard for maximum result in accordance with competency.
 - c. Team Work, the Company always prioritizes team work to be able to produce optimal synergy for the Company.
 - d. Innovation, always appreciates creativity and produces innovation in new methods and new products.
 - e. Responsibility, always be responsible for decision made and action taken.



3. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi Perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Misi

- a. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;
- b. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani;
- d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik;
- e. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

4. Strategi

- a. Menjalin dan mengembangkan hubungan sinergik yang efektif dengan mitra strategis untuk mewujudkan peluang bisnis;
- b. Melaksanakan manajemen berorientasi pasar, sensitif terhadap kecenderungan industri dan pergerakan pasar mencermati pesaing;
- c. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampulabaan (profitability)
- d. Mematuhi aturan HSE (*Health, Safety, and Environment*) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- e. Melaksanakan keunggulan operasional agar Perusahaan menjadi efisien dan efektif dalam biaya
- f. Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan tata nilai dan paradigma baru;
- g. Membangun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan kinerja.

• **Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi [GRI 2-24]**

Pedoman Etika Perusahaan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Pelaksanaan Kode Etik ini merupakan upaya untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Perusahaan bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan.
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, dimana menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi.

3. The Company's Vision and Mission

Vision

To become a world-class leading and competitive national agribusiness company that contributes sustainably towards the nation's advancement.

Mission

- a. Producing high quality products for customers;
- b. Establishing excellent work process capabilities through continuous improvement and innovation in conjunction with good corporate governance;
- c. Developing an excellent organization and culture, as well as competent and prosperous human resources, to realize the potential of every personnel;
- d. Optimizing asset utilization to maximize returns;
- e. Contributing to the improvement of community welfare and preserving the environment for the benefit of future generations.

4. Strategy

- a. Creating and developing effective synergic relation with strategic partners to realize business opportunities;
- b. Performing market-oriented management, sensitive to industry trends and market movement, observing competitors;
- c. Maintaining the balance between growth and profitability
- d. Complying with HSE (*Health, Safety, and Environment*) regulations;
- e. Performing operational excellence thereby the Company becomes cost efficient and effective;
- f. Building conducive work culture by implementing new values and paradigms;
- g. Building and implementing competency and performance-based human resources management.

• **Enforcement of the Company's Code of Ethics for All Organizational Levels [GRI 2-24]**

The Company's Code of Conduct is the responsibility of all employees, Board of Directors, Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, to behave in accordance with the Company's culture to establish professional, responsible, fair, appropriate and trustworthy conducts in carrying out business relations with colleagues and partners.

The implementation of this code of ethics is an effort to:

1. Providing understanding to all of the Company's Personnel that the Company operates honestly and openly, so as to create a good work environment, with low employee turnover and increased welfare.
2. Being part of a particular community, in which maintaining good relations is fundamental to the Company's long-term success in achieving social welfare and economic improvement.

3. Menjadi bagian dari industri perkebunan nasional, dimana pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai perkara penting, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun reputasi Perusahaan.

• **Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku serta Penandatanganan Pakta Integritas: Upaya penyebaran dan Sosialisasi Kode Etik [GRI 2-24]**

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan Perusahaan yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh karyawan.

• **Kebijakan Penegakan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran**

Dalam rangka penegakan terhadap etika Perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran etika Perusahaan melalui WBS. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran etika.

Dalam Pedoman Etika dan Perilaku, apabila terdapat pelanggaran etika maka untuk memberikan efek jera kepada seluruh insan perusahaan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

• **Jumlah Pelanggaran Kode Etik [GRI 2-26]**

Sebagai realisasi penegakan Standar Etika Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2022 dan perbandingannya dengan tahun 2020.

c. Being part of the national plantation industry, in which implementation and commitment to the Code of Ethics can support the Company facing important cases, as well as being part of good risk management, and able to build the Company's reputation.

• **Dissemination of the Code of Ethics and Signing of the Integrity Pact: Efforts to Disseminate and Promote the Code of Ethics [GRI 2-24]**

Socialization is a critical step in creating the Company's employees that conduct in accordance with the Company's Culture, therefore PT Perkebunan Nusantara III (Persero) consistently socializes the Company's Code of Ethics and Conduct. The Code of Ethics and Conduct is communicated and disseminated to all employees, the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and of cials one level below the Board of Directors, and all employees.

• **Discipline Enforcement and Violation Management Policy**

In upholding its ethics, the Company conducts regular monitoring of enforcement and provides complaints facilities against violations of the Company ethics through WBS. Throughout 2022, there has been no ethical violation.

In the Code of Ethics and Conduct, if there is a violation of ethics, then in order to provide a deterrent effect to all of Company's personnel, sanction shall be given in accordance with the applicable rules and regulations.

• **Number of Violations against the Code of Ethics [GRI 2-26]**

As a realization of the Company's Ethical Standards enforcement, the following are details of sanctions imposed related to the enforcement of the Company's Code of Ethics during 2022 and its comparison with 2021.

Sanksi Sanction	2022	2021	2020
Tindakan Disiplin Ringan Minor Disciplinary Action	6	15	10
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Action	14	5	10
Tindakan Disiplin Berat Major Disciplinary Action	9	8	10
Tidak Dikenakan Sanksi / Pengaduan Tidak Terbukti Sanctions Are Not Applicable / Unproven Complaints	14	21	8
Jumlah Total	43	49	38



WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) [GRI 2-26]

Whistleblowing System (WBS) adalah infrastruktur penerapan GCG yang memfasilitasi laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. Whistleblowing System (WBS) yang efektif akan mendorong terbentuknya kultur perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis beretika. Sistem ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.

• **Komitmen dan Kebijakan Perusahaan [GRI 2-23]**

Manajemen telah berkomitmen untuk membangun dan mengawasi perusahaan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk penerapan fungsi dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran (WBS).

Perusahaan meyakini sistem WBS ini infrastruktur penting dalam penerapan dan penegakan GCG perusahaan, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehingga meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Ke depan, sistem pengelolaan WBS dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.

• **Pengelola Whistleblowing System [GRI 2-16]**

Perusahaan membentuk Unit Pengelola Whistleblowing System (UPW) yang ditetapkan oleh Direktur Utama melalui surat keputusan untuk mengelola WBS, yang terdiri dari:

- Ketua, yaitu 1 (satu) orang Kepala Divisi yang menangani Audit Internal.
- Anggota, yaitu 2 (dua) orang Kepala Divisi yang menangani Sekretariat Perusahaan dan Hukum.
- Sekretaris, yaitu 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi atau Staf Divisi yang menangani Audit Internal.

Setiap pelanggaran yang dilaporkan ke UPW akan ditindaklanjuti oleh team UPW dalam bentuk tindakan investasi. Hasil dari investasi tersebut, jika memang terbukti melanggar akan secara regular disampaikan kepada dewan direksi.

Sebagai bagian dari tata kelola WBS, UPW akan menyampaikan laporan pengaduan setiap bulan kepada penanggung jawab dan menyampaikan laporan tindak lanjut kegiatan per triwulan kepada Direktur dan/atau Dewan Komisaris atas penanganan laporan pelanggaran yang diterima.

• **Ruang Lingkup dan Cakupan Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Perusahaan memberikan batasan dalam pelaporan yang berpotensi untuk ditindaklanjuti oleh tim yang mengelola WBS. Ruang lingkup kasus-kasus yang dapat dilaporkan, antara lain penyimpangan kode etik/perilaku dan peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, serta penipuan. Selain itu, Perusahaan juga mengkomodir laporan terkait dengan pemerasan, penggelapan, suap dan gratifikasi yang dilarang

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) [GRI 2-26]

Whistleblowing System (WBS) is a GCG implementation infrastructure which facilitates the reports from external and internal parties of the Company on various violation allegations. Effective Whistleblowing System (WBS) will encourage the formation of corporate culture based on GCG principles and ethical business implementation. The system facilitates all parties, whether leaders, employees or external parties related with the Company to report alleged violation.

• **The Company's Commitment and Policy [GRI 2-23]**

The management is committed to build and supervise the Company by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), including implementing function and mechanisms of alleged violation reporting (WBS).

The Company believes that WBS is an important infrastructure in the implementation and enforcement of the Company's GCG, including building healthy, strong, and clean corporate culture which improves the image and reputation of the Company. In the future, WBS management system can be improved through increasingly planned, sophisticated, and integrated information technology system.

• **Whistleblowing System Manager [GRI 2-16]**

The Company established Whistleblowing System Management Unit (UPW), which is appointed by the President Director through a decree to manage the WBS, which consists of:

- Head, namely 1 (one) Head of Division who handles Internal Audit.
- Members, namely 2 (two) Heads of Division who handle Corporate Secretary and Legal.
- Secretary, namely 1 (one) Head of Sub Division or Division Staff who handles Internal Audit.

Every violation reported to UPW will be investigated and followed up on by the UPW team by investment action. If the results of these investments are found to be in violation, they will be disclosed to the Board of Directors on a regular basis.

As part of governance of the WBS, UPW will submit complaint reports on a monthly basis and submit quarterly activity follow-up reports to the Director and/or Board of Commissioners on the handling of reports of violations received.

• **Scope and Coverage of Whistleblowing System**

The Company provides limits on reporting that have the potential to be followed up by the team that manages WBS. The scope of cases that can be reported includes, among others, deviations in the Company's code of ethics/behavior and regulations, conflicts of interest, fraud, and corruption. In addition, the Company also accommodates reports relating to extortion, embezzlement, bribery and gratuity that are prohibited.

Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup. Untuk pengaduan lainnya, seperti pengaduan terkait dengan K3LH, SDM dan fasilitas perusahaan, dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan lain yang berlaku di Perusahaan.

• **Media Pelaporan**

Dugaan pelanggaran atau penyimpangan dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan oleh Perusahaan, yakni:

- Website <http://whistleblowing/@holding-perkebunan.com>
- Email wbs@holdingperkebunan.co.id
- Surat
Unit Pengelola WBS
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara
Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No.1
Kuningan, Jakarta Selatan - 12950
- SMS dan Whatsapp 08116074003
- Perseroan menerima pengaduan selama 24 jam dan tujuh hari penuh, pengaduan bisa dilakukan secara anonim, dan ditangani oleh unit independen dari tim internal PTPN III.

• **Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran [GRI 2-24]**

Ukuran Keberhasilan dari WBS adalah sistem ini diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan oleh perusahaan. Sebagai langkah awal maka WBS perlu disosialisasikan agar seluruh Insan Perusahaan memiliki pemahaman yang memadai dan persamaan persepsi terhadap konsep filosofis dan manfaat implementasi WBS tersebut. Materi WBS dapat juga digunakan sebagai bahan pendidikan pada kegiatan *capacity building* bagi Karyawan Baru.

Dengan pelaksanaan sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan multi tafsir atas penerapan WBS dapat dimitigasikan sehingga efektivitas WBS sebagai salah satu sub sistem *good corporate governance* bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan reputasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* khususnya pihak eksternal di luar insan perusahaan melalui beberapa media yaitu:

- Situs resmi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di www.holding-perkebunan.com.
- Papan informasi berupa pamflet, spanduk dan sticker yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh publik di seluruh kantor dan unit kerja Holding Perkebunan Nusantara.
- Surat Elektronik (*e-mail*) dan aplikasi *Whatsapp*.

Penerapan pedoman WBS perlu disinergikan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari antara lain disiplin pegawai, kode etik, pelaksanaan fungsi dan tugas operasional kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa dan lainnya.

Whistleblowing System will only follow up complaints on actions that fall within the scope. For other complaints, such as complaints related to Occupational Safety and Health and the Environment (K3LH), HR and corporate facilities may be submitted to related parties using other applicable reporting mechanisms in the Company.

• **Reporting Media**

In the event of alleged violations or suspected deviations, the reporter may submit complaints of alleged violations to the Company through the available media, namely:

- Website <http://whistleblowing/@holding-perkebunan.com>
- Email wbs@holdingperkebunan.co.id
- Letter
WBS Management Unit PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Holding Perkebunan Nusantara Agro Plaza Building 15th Floor
Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Kuningan, South Jakarta - 12950
- SMS and Whatsapp 08116074003
- The Company receives complaints 24 hours a day every day, complaints can be made anonymously, and are handled by an independent unit from PTPN III's internal team.

• **Dissemination of Whistleblowing System [GRI 2-24]**

The measure of WBS' success is this system is consistently and continuously implemented by the Company. As a first step, WBS needs to be disseminated thereby all of the Company's Personnel have sufficient understanding and common perceptions of the philosophical concept and the benefit of implementing WBS. WBS materials can also be used as educational materials in capacity building activities for new employees.

With the continuous implementation of dissemination, it is expected that multiple interpretations of the implementation of WBS can be mitigated thereby the effectiveness of WBS as one of the sub-systems of good corporate governance is beneficial to improve the Company's performance and reputation. Dissemination to all stakeholders, especially external parties outside the Company, through several media, namely:

- The official website of Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) at www.holding-perkebunan.com.
- Information boards in the form of pamphlets, banners and stickers placed in strategic locations that are easily accessible to the public in all offices and work units of Holding Perkebunan Nusantara.
- Electronic Mail (*e-mail*) and *Whatsapp* applications.

The implementation of WBS guidelines needs to be synergized in the daily operations, including employee discipline, code of ethics, implementation of operational functions and duties such as goods and services procurement, etc.



Penayangan WBS pada situs web Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga merupakan salah satu bentuk penerapan dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan bahwa pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari implementasi *Good Corporate Governance* di Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

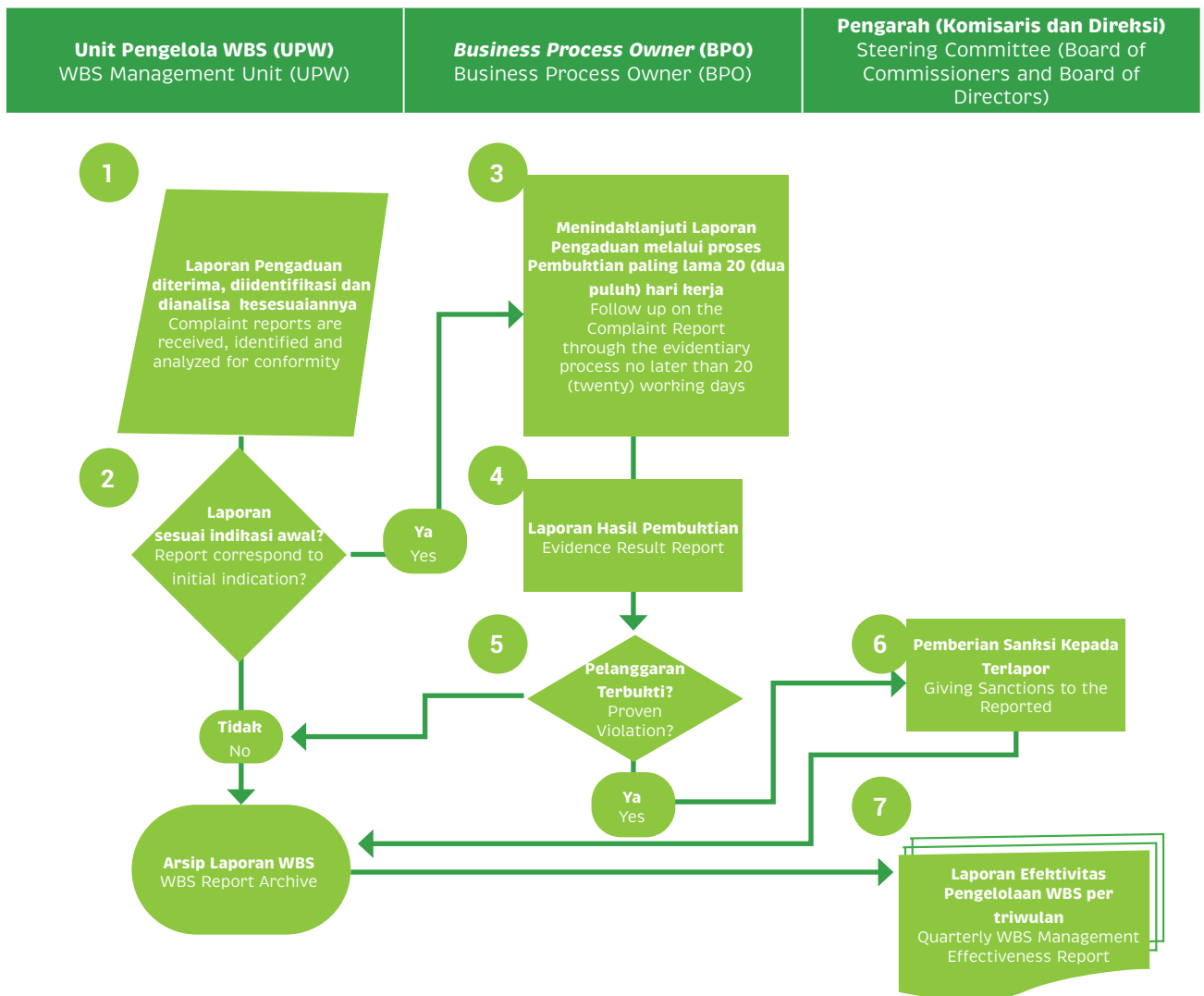
The display of WBS on the Company's website is also a form of application and notification to stakeholders that violation reporting is an integral part of the implementation of Good Corporate Governance at the Company.

• **Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran**

Segenap Insan Perusahaan dan pihak eksternal (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan mekanisme sebagai berikut:

• **Reporting Mechanisms and Handling of Violations**

All of the Company's Personnel and external parties (Customers, Business Partners and the Community) can report alleged/suspected violations using the following mechanism:



• **Perlindungan terhadap Pelapor**

Dalam pelaksanaan pengaduan/penyungkapan *Whistleblowing System* dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Untuk itu, Perusahaan bertanggungjawab atas perlindungan saksi. Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email)

• **Whistleblower Protection**

In implementing complaints/disclosures, the Whistleblowing System is protected by Law No. 13 of 2006 concerning Witness Protection. For this reason, the Company is responsible for witness protection. The Company provides reporting channel facilities (telephone, mail, email) that are independent, free,

yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

• **Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses [GRI 2-16, 2-26]**

Per 31 Desember 2022, jumlah pengaduan *Whistleblowing System* yang masuk sebanyak 43 (empat puluh tiga) dan berdasarkan verifikasi yang masuk ke tahap tindak lanjut sebanyak 43 (empat puluh tiga) laporan pelanggaran. Berikut laporan yang masuk ke tahap tindak lanjut sepanjang tahun 2022:

Uraian Description	2022	2021*	2020*
Jumlah pengaduan yang masuk Number of incoming complaints	43	49	38
Jumlah pengaduan yang diproses Number of complaints processed	43	49	38
Komposisi pengaduan yang masuk dan yang diproses Composition of incoming and processed complaints	43	49	38

Uraian Description	2022	2021*	2020*
Jumlah pengaduan yang terkonfirmasi dan diberikan sanksi Number of confirmed complaints and imposed with sanctions	29	28	30
Jumlah pengaduan yang terbukti Number of proven complaints	14	21	8

Penerapan dan implementasi *whistleblowing system* (WBS) PTPN didasarkan atas SOP Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran.

*Restated dibandingkan tahun lalu, karena perluasan lingkup dari hanya PTPN III saja menjadi seluruh PTPN Group (dari PTPN I sampai PTPN XIV).

ANTIKORUPSI

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menilai tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan berdampak sangat besar dan merugikan masyarakat dan negara. Korupsi juga mengancam kesinambungan program pembangunan, memicu in-efisiensi anggaran, dan berpotensi meningkatkan kesenjangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, Perusahaan mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi melalui berbagai instansi, seperti kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [GRI 3-3]

Merujuk Undang-undang no. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian

and confidential for whistleblowers to ensure a safe reporting process. In addition, the Company also strives to maintain the confidentiality of the reporter's identity to protect the whistleblower and family members against retaliation from the reported party or organization.

• **Number of Incoming and Processed Complaints [GRI 2-16, 2-26]**

As of December 31, 2022, the number of *Whistleblowing System* complaints that had been received was 43 (forty three) and based on verification, 43 (forty three) reports of violations had entered the follow-up stage. The following reports are in the follow-up stage throughout 2022:

The application and implementation of PTPN's *whistleblowing system* (WBS) is based on the SOP Mechanism System for Reporting of Grievances.

*Restated compared to last year, due to the expansion of the scope from only PTPN III to the entire PTPN Group (from PTPN I to PTPN XIV).

ANTI-CORRUPTION

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) considers corruption to be an extraordinary crime with a large impact on society and the state. Corruption also jeopardizes the sustainability of development programs, causes inefficiencies in the budget, and has the potential to exacerbate inequality and poverty. As a result, the Company supports the government's commitment to eradicating corruption through various agencies such as the prosecutor's office, police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). [GRI 3-3]

Referring to Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the definition of corruption includes acts against the law, enriching other people/agencies that are detrimental to the state's finances/economic (article 2); abusing the authority, the facilities or other means at their disposal due to rank or position in such a way that is detrimental to the finances of the state or the economy of the state (article 3);



negara (pasal 3); kelompok delik penyuaupan (pasal 5,6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). [GRI 3-3]

Sesuai dengan spirit antikorupsi, Perusahaan telah menerbitkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap. Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman bagi insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas, pentingnya kepatuhan melaporkan, dan penanganan praktik gratifikasi di Perusahaan. [GRI 3-3]

Berkaitan dengan dukungan terhadap antikorupsi, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah melakukan pemetaan dan pengkajian risiko dalam mata rantai dan operasional usaha yang berpotensi besar terjadi korupsi yaitu melalui identifikasi risiko fraud dan monitoring / pengelolaan risiko fraud secara berkala setiap triwulan. Untuk mencegah terjadinya korupsi, Perusahaan telah melakukan menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen yang melarang praktik penerimaan ataupun pemberian suap dan tidak mentolerir penyuaupan serta menerapkan implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuaupan. Mitigasi yang dilakukan diantaranya dalam bentuk:

1. Penandatanganan kepatuhan terhadap Code of Conduct oleh seluruh karyawan
2. Penerapan Whistle Blowing System (WBS) yang dapat diakses melalui <https://wbs.holding-perkebunan.com>
3. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui aplikasi *whistle blowing system* yang terintegrasi dengan KPK
4. Mewajibkan calon vendor / pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Perusahaan untuk menyatakan komitmen anti fraud yang tertuang di dalam Pakta Integritas.[GRI 205-1]

Kebijakan lain untuk menopang komitmen antikorupsi adalah Perusahaan melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur antikorupsi yang diadopsi oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Per Desember 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapatkan sosialisasi dan prosedur antikorupsi. Adapun seluruh karyawan juga telah mendapatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur antikorupsi melalui code of conduct PTPN. Sedangkan mitra atau vendor yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur antikorupsi sebanyak 100% dari total vendor melalui pakta integritas PTPN untuk vendor. Selain melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur antikorupsi, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memberi kesempatan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengikuti pelatihan tentang antikorupsi [GRI 205-2]

bribery offense group (article 5, 6, and 11); group of offenses for embezzlement in office (article 8, 9, and 10); offense extortion in office (article 12); offense related to contract services (article 7); and gratification offense (articles 12B and 12C).[GRI 3-3]

In maintaining the anti-corruption spirit, the Company has implemented a gratification control policy. In business relationships, it is common for one party to give and/or request gratuities from another. Given the nature of the crime of bribery, gratification is one of the concerns of the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The gratification control policy is intended to serve as a guide for Company personnel in taking a firm stance, understanding the importance of reporting compliance, and dealing with gratification practices in the Company. [GRI 3-3]

With regard to support for anti-corruption, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has conducted mapping and assessment of risks in the chain and business operations with high potential for corruption, namely through fraud risk identification and fraud risk monitoring/management on a quarterly basis. To prevent corruption, the Company has implemented a Management System Policy which prohibits the practice of accepting or giving bribes and does not tolerate bribery and implements SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System. Mitigation carried out includes in the form of:

1. Signing of compliance with the Code of Conduct by all employees
2. Implementation of the Whistle Blowing System (WBS) which can be accessed via <https://wbs.holding-perkebunan.com>
3. Collaborating with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK) regarding the handling of complaints in an effort to eradicate criminal acts of corruption through the integrated whistle blowing system application with the KPK
4. Requires prospective vendors / third parties who will cooperate with the Company to declare an anti-fraud commitment as stated in the Integrity Pact.[GRI 205-1]

Another policy to support the anti-corruption commitment is that the Company disseminates anti-corruption policies and procedures adopted by PT Perkebunan Nusantara III (Persero). As of December 2022, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors have received anti-corruption socialization and procedures. Meanwhile, all employees have also received information on anti-corruption policies and procedures through PTPN's code of conduct. Meanwhile partners or vendors who have received socialization of anti-corruption policies and procedures account for 100% of the total vendors through the PTPN integrity pact for vendors. In addition to socializing anti-corruption policies and procedures, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) also provides opportunities for the Board of Commissioners, Directors and employees to attend training on anti-corruption [GRI 205-2]

Selain melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur antikorupsi, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memberi kesempatan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengikuti pelatihan tentang antikorupsi. Hingga akhir tahun 2022, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengikuti pelatihan antikorupsi tercatat sebanyak 0 orang, atau 0% dari total Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan karyawan yang telah mengikuti pelatihan antikorupsi sebanyak 66 orang atau 0,07% dari total karyawan tetap. [GRI 205-2]

Berbagai upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Perusahaan berkaitan dengan sikap dan komitmen antikorupsi membawa hasil dengan tidak adanya insiden korupsi yang terbukti selama tahun 2022. Dengan demikian, tidak ada laporan tentang karyawan atau manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang dipecat, diberhentikan atau dihukum karena tersangkut kasus korupsi. Sejalan dengan itu, juga tidak terdapat laporan mengenai mitra atau vendor yang kontraknya dihentikan atau tidak diperbarui lagi karena tersangkut kasus korupsi. [GRI 205-3]

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan

In addition to socializing anti-corruption policies and procedures, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) also provides opportunities for the Board of Commissioners, Board of Directors and employees to attend anti-corruption training. Until the end of 2022, the number of members of the Board of Commissioners and Directors who have attended anti-corruption training was recorded at 0 people, or 0% of the total Board of Commissioners and Board of Directors. While employees who have participated in anti-corruption training amounted to 66 people or 0.07% of the total permanent employees. [GRI 205-2]

Various efforts and activities organized by the Company related to anti-corruption behavior and commitments have resulted in no proven incidents of corruption during 2022. Thus, there were no reports of employees or management of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) being fired, dismissed or punished for implicated in a corruption case. In line with that, there were also no reports of partners or vendors whose contracts were terminated or not renewed due to corruption cases. [GRI 205-3]

REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS (LHKPN)

As a State-Owned Enterprise owned by Government of Indonesia, the Company is obliged to comply with the binding laws and regulations. One form of the laws and regulations, which is based on the spirit of corruption eradication and acts of internal deviations, is the obligation of Report of State Official Assets (LHKPN)

LHKPN is a list of all of the assets of the State Official set forth in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in Decree of KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of Report of State Official Assets. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission emphasizes the authority of the KPK to carry out measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism, mandates that each official shall report and announce his/her assets before and after taking office and shall be willing to be examined before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 article 2(7) along with the elucidation, it is explained that other officials who have strategic functions in relation to state administrators shall include the Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials in SOEs and ROEs.

The objective of submitting LHKPN examination to KPK is to establish State Administrators who comply with the general principles of the state administrators, who are free from corruption, collusion, and nepotism practices, as well as other despicable acts. Each State Administrator is required to report his/her assets through LHKPN form that has been provided by the KPK to be



lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

- **Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan**

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya.
- d. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

- **Kebijakan LHKPN Perusahaan**

Kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan sampai dengan BOD-1, hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam Peraturan Direksi No. 3.06/Per/01/2017. Kebijakan ini juga berlaku bagi entitas anak Perusahaan yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara yang berlaku untuk level-level tertentu dari organisasi entitas anak Perusahaan terkait kewajiban pelaksanaan LHKPN.

- **Ruang Lingkup dan Pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat**

Seluruh Wajib Laport memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN. Kompartemen Tata Kelola Korporasi ditetapkan sebagai koordinator untuk memberikan data dan informasi mengenai perubahan dan penggantian Wajib Laport di lingkungan Perusahaan, sosialisasi pengisian LHKPN dan memonitor tingkat kepatuhan LHKPN.

Insan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang termasuk Wajib Laport LHKPN telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan LHKPN secara berkala dengan tepat waktu sesuai peraturan perundangan-undangan. Proses penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan, setelah proses verifikasi oleh KPK selanjutnya diumumkan oleh Kompartemen Tata Kelola Korporasi melalui media internal Perusahaan.

filled honestly, correctly and completely, to enable KPK in analyzing, evaluating, and assessing the total, type and value of the reported assets correctly, quickly, accurately, and responsibly.

- **Legal and Regulatory Basis in Implementing LHKPN in the Company**

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as the perspective foundation of implementing LHKPN within the Company. The legal basis include:

- a. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism.
- b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
- c. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and its amendments.
- d. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for the Implementation of Good Corporate Governance.

- **The Company's LHKPN Policy**

The policy on the compliance of official assets reporting of the Board of Commissioners, Board of Directors and all levels within the Company up to BOD-1, as determined by the Company in Regulation of the Board of Directors No. 3.06/Per/01/2017. This policy is also implemented in subsidiaries as part of the Company, which applicable to certain levels of the organization of subsidiaries related to the implementation of LHKPN obligations.

- **Scope and Manager of Report of Official Assets**

All Mandatory Reporters have the obligation to report their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) through e-LHKPN application. The Corporate Governance Compartment is established as a coordinator to provide data and information regarding changes and replacements of Mandatory Reporters within the Company, dissemination of information on how to fill LHKPN, and to monitor the compliance level of LHKPN

The Company's personnel, who were included as Mandatory Reporters of LHKPN, have received socialization regarding the policy on the compliance of LHKPN. Board of Directors and Board of Commissioners have submitted LHKPN periodically in a timely manner in accordance with the laws and regulations. LHKPN submission process is carried out directly by the relevant parties, after the verification process by KPK, the Corporate Governance Compartment subsequently announce through the Company's internal media.

• **Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2022**

Berikut adalah transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2022.

• **Transparency of LHKPN of the Company's Officials in 2022**

Transparency of LHKPN submission of the Company's Mandatory Reporters in 2022 is described below.

Pejabat Wajib LHKPN Mandatory Reporters of LHKPN	Jumlah Wajib Lapor No. of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Already Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	36	18	50,00%
Direksi Board of Directors	43	26	60,47%
SEVP	50	32	64,00%
KADIV/GM/KABAG/Manager/Project Manager Head of Division/General Manager/Head of Department/Manager/Project Manager	534	412	77,15%
Jumlah Total	663	488	73,60%

*Data updated per tanggal 24 Maret 2023

* Untuk pelaporan LHKPN pada tahun 2022 ditutup paling lambat tanggal 31 Maret 2023

*Data updated as of March 24, 2023

* For LHKPN reporting in 2022 shall be closed no later than March 31, 2023

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN [GRI 2-27]

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi dalam menjalankan operasional bisnis, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Komitmen itu membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda, yang material yang dijatuhkan kepada Perusahaan selama tahun 2022 akibat ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia.

COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS [GRI 2-27]

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is committed to complying with all regulations in conducting its business operations, both in the economic, social, and environmental sectors. As a result of this commitment, no sanctions or fines, material were imposed on the Company throughout 2022 for non-compliance with Indonesian laws and regulations.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [GRI 2-29]

Keberhasilan PT Perkebunan Nusantara III menjalankan usaha dan mencatatkan kinerja positif merupakan cerminan atas dukungan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Perseroan mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga memengaruhi Perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan.

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT [GRI 2-29]

The Company's success in running its business and achieving positive results is a reflection of the support and cooperation of stakeholders, both internal and external. Stakeholders are defined by the Company as groups or individuals who are impacted by the Company's activities, products, and services. On the other hand, their presence influences the Company's ability to successfully implement strategies and achieve its objectives.

Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha Perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis. Proses pelibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Perusahaan untuk memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stakeholder engagement is aimed at the Company's business interests by focusing on corporate social responsibility, concern for environmental issues, and the priority scale in establishing communication with various strategic partners. The stakeholder engagement process includes the Company's efforts to fulfill the expectations of each stakeholder by using its resources in the right way, accountable manner, as well as not conflicting with the provisions stipulated in the prevailing laws and regulations.



PT Perkebunan Nusantara III melakukan identifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada *AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) 2015* yang dikeluarkan oleh konsultan global AccountAbility yang membagi ke dalam 5 atribut sebagai berikut:

1. *Dependency (D)*
Jika Perusahaan memiliki ketergantungan pada individu atau kelompok, atau sebaliknya.
2. *Responsibility (R)*
Jika Perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap individu atau kelompok.
3. *Tension (T)*
Jika individu atau kelompok membutuhkan perhatian segera dari Perseoran terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan.
4. *Influence (I)*
Jika individu atau kelompok memiliki pengaruh terhadap Perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. *Diverse Perspective (DP)*
Jika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

Berdasarkan rujukan dan pemetaan tersebut, pemangku kepentingan PT Perkebunan Nusantara III adalah sebagai berikut:

The Company identifies stakeholders by referring to the AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) 2015 issued by the global consultant AccountAbility, which divides it into 5 attributes as follows:

1. *Dependency (D)*
If the Company has a dependency on an individual or group, or vice versa.
2. *Responsibility (R)*
If the Company has legal, commercial or ethical responsibilities towards individuals or groups.
3. *Tension (T)*
If an individual or group requires immediate attention from the Company regarding economic, social or environmental issues.
4. *Influence (I)*
If an individual or group has influence over the Company or strategies or policies of other stakeholders.
5. *Diverse Perspective (DP)*
If individuals or groups have different views that can affect the situation and encourage new action.

Based on these references and mapping, the Company's stakeholders are as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Basis for Determining	Topik dan Isu Utama Key Topics and Concerns	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Engagment Frequency
Pemegang Saham Shareholders	<i>Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective</i>	Peningkatan Kinerja Perusahaan The Company's Performance Improvement	RUPS GMS	Minimal 2 kali setahun At least twice a year
		Dukungan pada kepentingan pemegang saham Support to the shareholders' interests	Laporan Kinerja Performance Report	2 kali setahun Twice a year
		Kepatuhan terhadap peraturan Compliance with the regulations	Kepatuhan terhadap Peraturan Compliance with the regulations	Setiap saat Anytime
Pemerintah Government	<i>Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective</i>	Kesehatan perusahaan The Company's Health	Kesehatan perusahaan The Company's Health	Setiap saat Anytime
		Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the Government (taxes and use of subsidies)	Kontribusi ekonomi terhadap pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the Government (taxes and use of subsidies)	Sesuai ketentuan perpajakan According to tax regulations

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Basis for Determining	Topik dan Isu Utama Key Topics and Concerns	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
Karyawan Employees	<i>Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective</i>	Terjamin kesejahteraan pekerja beserta keluarganya Guarantee of welfare for employees and their families	Serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama Workers union and Collective Labor Agreement	Minimal Munas 1 kali setahun National Conference at least once a year
			Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	Sesuai kebutuhan As required
			Forum tatap muka Face-to-face forum	Minimal 4 kali setahun At least 4 times a year
			Suasana kerja yang kondusif, sehat dan aman Conducive, healthy and safe work atmosphere	1 kali setahun Once a year
			Lomba inovasi Innovation competition	Minimal 1 kali setahun/unit kerja At least once a year/ work unit
Konsumen/ Pelanggan Consumer/ Customer	<i>Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective</i>	Pelayanan jasa terbaik Best services	Survei Kepuasan Pelanggan, dan program engagement lainnya Customer Satisfaction Survey and another engagement programs	Sesuai kebutuhan As required
		Harga jasa yang bersaing dan efisien Competitive and efficient service fee	Komunikasi melalui media yang tersedia Communication via available media	Sesuai kebutuhan As required
		Kepatuhan terhadap peraturan Compliance with the regulations	Kontrak dan perjanjian kerja sama Cooperation contract and agreement	Sesuai kebutuhan As required
		Pembayaran tepat waktu Timely payment	Supplier gathering	1 kali setahun Once a year
		Pemasok Supplier	<i>Dependency Responsibility Influence Diverse Perspective</i>	Proses evaluasi yang obyektif Objective evaluation process
Hubungan yang harmonis Harmonious relationship	Kuesioner dan survei Questionnaire and survey			1 kali setahun Once a year
Kepatuhan terhadap peraturan Compliance with the regulations	Kepatuhan terhadap peraturan Compliance with the regulations			Setiap saat Anytime
Kesehatan perusahaan The Company's Health	Kesehatan perusahaan The Company's Health			Setiap saat Anytime



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Basis for Determining	Topik dan Isu Utama Key Topics and Concerns	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Engagement Frequency
		Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the Government (taxes and use of subsidies)	Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) Economic contribution to the Government (taxes and use of subsidies)	Sesuai ketentuan perpajakan According to tax regulations
		Hubungan yang harmonis tanpa ada konflik Harmonious relationship without conflict	Kegiatan TJSL BUMN dan Corporate Social Responsibility SOEs TJSL Activities and Corporate Social Responsibility	Sesuai kebutuhan/ mengikuti ketentuan pemegang saham As required/ according to shareholders' requirement
Masyarakat Community	Dependency Responsibility Influence Diverse Perspective	Dampak negatif terhadap lingkungan minimal Minimal negative impact on the environment	Program Bantuan UMK MSE Assistance Program	Sesuai ketersediaan dana In line with funds availability
		Hubungan yang harmonis Harmonious relationship	Pelatihan masyarakat Community training	Minimal 1 kali setahun At least once a year
		Memperoleh akses informasi yang luas Obtain wide access to information	Forum tatap muka Face-to-face forum	Sesuai kebutuhan As required
Media Massa Mass Media	Responsibility Influence Diverse Perspective	Hubungan yang harmonis Harmonious relationship	Konferensi pers/ Siaran Pers Press conference/ press release	Sesuai kebutuhan As required
		Memperoleh akses informasi yang luas Obtain wide access to information	Keterbukaan Informasi Information Transparency	1 kali setahun Once a year
Kelompok Rentan Vulnerable Groups	Responsibility Tension	Persamaan perlakuan dalam layanan dan kesempatan bekerja Equality of treatment in services and employment opportunities	Semua bentuk layanan All forms of service Rekrutmen untuk bidang kerja tertentu Recruitment for appropriate work	Sesuai Saat At all times Sesuai kebutuhan As required

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA [GRI 2-23]

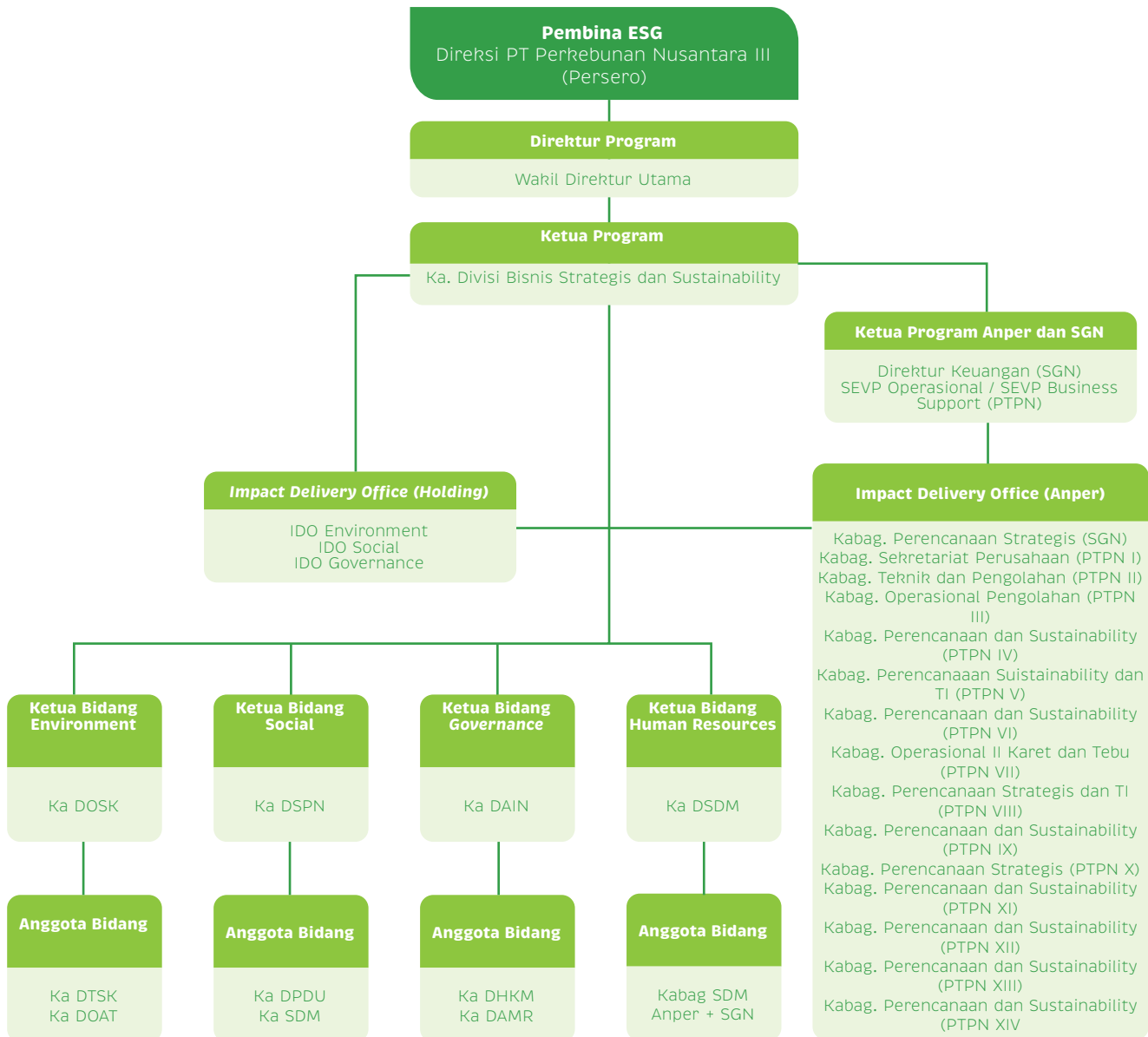
PTPN mendukung untuk menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UNHRD), Organisasi Buruh Internasional ("ILO"), Konvensi Inti Standar Buruh, Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat dan suku, serta undang-undang yang berlaku. Komitmen tersebut serta prinsip-prinsip ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia terkait ketenagakerjaan nasional maupun internasional tersebut kemudian dijadikan landasan akan Kebijakan Hak Asasi Manusia PTPN, yang kemudian diturunkan menjadi standar dan prosedur-prosedur untuk implementasi tiap topik terkait. PTPN juga telah memiliki kebijakan terkait kebijakan Hak Asasi Manusia (Human Rights Policy) yang juga sudah mengandung kebijakan terkait dengan kelompok rentan.

HUMAN RIGHT POLICY [GRI 2-23]

PTPN supports to protect human rights in accordance with the Universal Declaration of Human Rights (UNHRD), the International Labor Organization ("ILO"), the Core Convention on Labor Standards, ILO Convention 169 concerning indigenous and tribal peoples, and applicable laws. This commitment and the principles of employment and human rights related to national and international employment are then used as the basis for PTPN's Human Rights Policy, which is then reduced to standards and procedures for the implementation of each related topic. PTPN also has policies related to Human Rights policies which also contain policies related to vulnerable groups.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN [GRI 2-13] SUSTAINABILITY GOVERNANCE

STRUKTUR ORGANISASI TASKFORCE ESG PTPN GROUP
Organization Structure of Taskforce ESG PTPN Group



Perusahaan menyadari bahwa untuk memastikan terlaksananya inisiatif-inisiatif ESG untuk peningkatan kinerja keberlanjutan di PTPN, dibutuhkan adanya struktur yang ditunjuk khusus untuk bertanggung jawab serta aturan tata kelola yang jelas akan kemajuan agenda keberlanjutan perusahaan.

Seiring dengan kesadaran tersebut, PTPN telah mengeluarkan Surat Keputusan No. DBSS/SKPTS/205/2022 tentang "Tim Taskforce Penerapan Aspek Environmental, Social, and Governance Perkebunan Nusantara Group" yang mengatur tugas dan tanggung jawab tiap-tiap peran khusus untuk agenda ESG di perusahaan, serta menjabarkan personel-personel yang ditunjuk untuk mengisi peran tersebut.

The Company recognizes that in order to assure the implementation of ESG initiatives to improve sustainability performance in PTPN, a specially designated structure and clear governance rules for the advancement of the Company's sustainability agenda are required.

In response to this realization, the Company issued the Decree No. DBSS/SKPTS/205/2022 concerning "Taskforce Team for the Implementation of Environmental, Social, and Governance Aspects of Perkebunan Nusantara Group," which governs the duties and responsibilities of each role specific to the Company's ESG agenda, as well as the personnel appointed to fill these roles.



Dewan Direksi, bertindak atas arahan serta kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, dengan ini berlaku sebagai Pembina ESG yang kemudian membawahi Task Force ESG di PTPN. Dewan Direksi selaku Pembina ESG pun memiliki peran sebagai pengawas kinerja ESG di PTPN, dan Direksi bertanggung jawab untuk memberikan laporan terkait juga kepada Dewan Komisaris.

Adapun gambaran besar dari peran-peran dalam struktur ini adalah sebagai berikut:

1. **Pembina ESG** menetapkan keputusan strategis terkait penerapan aspek ESG di lingkungan PTPN
2. **Direktur Program:**
 - a. Memberikan arahan dan usulan strategis kepada Tim ESG dalam penerapan aspek ESG di lingkungan PTPN Group
 - b. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap laporan pemantauan atas penerapan ESG PTPN
 - c. Melaporkan *progress* kegiatan kepada pembina
3. **Ketua Program:**
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ESG dan administrasi dokumen
 - b. Mensosialisasikan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif terkait ESG
 - c. Melaporkan *progress* kegiatan kepada Direktur program
4. **Ketua Bidang** bertugas untuk mengevaluasi laporan serta memberikan arahan yang spesifik untuk topik-topik material ESG terkait di bawahnya kepada anak perusahaan PTPN, serta melakukan koordinasi agenda antar anak perusahaan di seluruh PTPN Group untuk topik material terkait
5. **Ketua Program Anak Perusahaan & SGN** menyusun strategi dan perencanaan pelaksanaan kegiatan ESG serta melakukan koordinasi upaya peningkatan tata kelola penerapan aspek ESG di Anak Perusahaan masing-masing
6. **IDO Anak Perusahaan & SGN** menjadi *counterpart* terhadap pengumpulan data, dokumen serta *dedicated* terhadap rapat *working team*. Tim IDO bertanggungjawab untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja ESG berkala kepada Ketua Program dan Ketua Bidang terkait untuk topik-topik material yang ada dalam frekuensi sesuai Kebijakan ESG yang berlaku
7. **IDO Holding** merupakan *full-time employee(s)* yang berkantor di Kantor Holding PTPN III Jakarta

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM PELAPORAN KEBERLANJUTAN [GRI 2-14]

Pelaporan keberlanjutan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan Perusahaan. Berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, Direksi sebagai badan tata kelola tertinggi bertanggungjawab untuk meninjau dan menyetujui informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan, termasuk di dalamnya topik material yang sebagaimana disampaikan oleh Divisi Bisnis Strategis & *Sustainability* sebagai penanggung jawab penyusunan laporan.

The Board of Directors, acting under the direction and authorization granted by the Board of Commissioners, hereby acts as the ESG Trustee, which in turn oversees the ESG Task Force at PTPN. The Board of Directors as ESG Trustee also has the role of overseeing ESG performance at PTPN, and the Board of Directors is responsible for providing related reports to the Board of Commissioners.

The overview of the roles in this structure is as follows:

1. **ESG Trustee** making strategic decisions related to the implementation of ESG aspects within PTPN.
2. **Director of Program:**
 - a. Providing strategic directions and proposals to the ESG Team in the implementation of ESG aspects within PTPN Group
 - b. Reviewing and evaluating the monitoring report on PTPN's ESG implementation.
 - c. Reporting the activity progress to the trustee
3. **Head of Program:**
 - a. Coordinating the implementation of ESG activities and document administration
 - b. Socializing policies and coordinating the implementation of ESG-related initiatives
 - c. Reporting activity progress to the Director of Program
4. **Head of Division** is in charge of evaluating reports and providing specific directions for ESG related material topics under him/her to PTPN subsidiaries, as well as coordinating the agenda between subsidiaries throughout PTPN Group for related material topics.
5. **Head of Subsidiary & SGN Program** prepares strategy and planning for the implementation of ESG activities and coordinates efforts to improve the governance of the implementation of ESG aspects in each Subsidiary.
6. **IDO of Subsidiary & SGN** becomes counterpart to data collection, documents and dedicated to working team meetings. The IDO team is responsible for preparing and submitting periodic ESG performance reports to the Head of Program Head and relevant Heads of Division for material topics that are in frequency in accordance with the applicable ESG Policy.
7. **IDO Holding** is a full-time employee(s) based in PTPN III Holding Office in Jakarta

ROLE OF THE HIGHEST GOVERNANCE ORGAN IN SUSTAINABILITY REPORTING [GRI 2-14]

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) provides sustainability reporting through the Sustainability Report, which is published with the Company's Annual Report. In terms of sustainability reporting, the Board of Directors, as the highest governance organ, is responsible for reviewing and approving the information submitted in the Sustainability Report, including material topics as submitted by the person in charge of preparing the report, the Strategic Business & Sustainability Division.

PENGETAHUAN KOLEKTIF BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [GRI 2-17]

Perusahaan memberikan fasilitas dan kesempatan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Program yang diikuti bisa berupa pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, kursus, lokakarya dan lain-lain. Pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

COLLECTIVE KNOWLEDGE OF THE HIGHEST GOVERNANCE ORGAN [GRI 2-17]

The Company provides the Board of Commissioners and the Board of Directors with facilities and opportunities to acquire necessary knowledge and competences related to sustainable development. Training, workshops, seminars, conferences, courses, and other programs may be followed. Competency development followed by the Board of Commissioners and Board of Directors during 2022 is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/ Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Zulkifli Zaini (Komisari Utama) President Commissioner	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
Indrasari Wisnu Wardhana (Komisaris) Commissioner	Onboarding Commissioner Angkatan 4 Tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 4 of 2022	Onboarding Commissioner Angkatan 4 Tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 4 of 2022	17 Maret s.d. 21 April 2022 March 17 to April 21, 2022	FCHI
Wisto Prihadi (Komisaris) Commissioner	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
Ardan Adiperdana (Komisaris) Commissioner	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
Arie Yuriwin (Komisaris) Commissioner	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
Direksi Board of Directors				
Moh. Abdul Ghani (Direktur Utama) President Director	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	05-Agu-22 August 5, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Pelatihan Komunikasi Communication Training	Pelatihan Komunikasi Communication Training	21-Des-22 December 21, 2022	Internal PTPN Group
Denaldy Mulino Mauna (Wakil Direktur Utama) Vice President Director	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Pelatihan Komunikasi Communication Training	Pelatihan Komunikasi Communication Training	21-Des-22 December 21, 2022	Internal PTPN Group
M. Iswahyudi (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko) Director of Finance & Risk Management	CFO School Tahun 2022 CFO School of 2022	CFO School Tahun 2022 CFO School of 2022	23 Februari s.d. 25 Mei 2022 February 23 to May 25, 2022	BMLI, FHCI dan Kementerian BUMN BMLI, FHCI, and Ministry of SOEs
	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/ Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	05-Agu-22 August 5, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Pelatihan Komunikasi Communication Training	Pelatihan Komunikasi Communication Training	21-Des-22 December 21, 2022	Internal PTPN Group
Seger Budiarjo (Direktur SDM) Director of Human Resources	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	05-Agu-22 August 5, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Digital Impact to Future Workforce BUMN	Digital Impact to Future Workforce BUMN	14-Sep-22 September 14, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
Dwi Sutoro (Direktur Pemasaran) Director of Marketing	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
Doni P Gandamiharja (Direktur Umum) Director of General Affairs	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Leadership Development; Immersion Program	Leadership Development; Immersion Program	5 s.d. 18 Desember 2022 December 5-18, 2022	PT Deloitte Consulting
Mahmudi (Direktur Produksi & Pengembangan) Director of Production & Development	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	Webinar Peringatan 2 (dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	05-Agu-22 August 5, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	National Sugar Summit	National Sugar Summit	8-9 Desember 2022 December 8-9, 2022	Ikatan Ahli Gula Indonesia Indonesian Sugar Expert Association (IKAGI)
	Seminar Leading Through For Young Leaders	Seminar Leading Through For Young Leaders	28-29 September 2022 September 28-29, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara
	Start Up Day Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Start Up Day Kementerian BUMN Ministry of SOEs	17-28 September 2022 September 17-28, 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Pelatihan Komunikasi Communication Training	Pelatihan Komunikasi Communication Training	21-Des-22 December 21, 2022	Internal PTPN Group	

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Venue/Date	Penyelenggara Organizer
Ahmad Haslan Saragih (Direktur Pelaksana)	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2022 Socialization of Government Regulation No. 23 of 2022	29-Jun-22 June 29, 2022	Internal Holding PTPN III (Persero)
	IPOC Tahun 2022 2022 IPOC	IPOC Tahun 2022 2022 IPOC	2 s.d. 4 November 2022 November 2-4, 2022	GAPKI
	BUMN Startup Day	BUMN Startup Day	27-28 September 2022	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
	Outlook Commodity 2023	Outlook Commodity 2023	24-Nov-22 November 24, 2022	PT LPP Agro Nusantara

KONFLIK KEPENTINGAN [GRI 2-15]

PTPN memiliki Kode Etik Perusahaan yang di dalamnya terdapat prosedur yang jelas terkait dengan konflik kepentingan. PTPN telah menetapkan pembagian yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan serta menghindari situasi apa pun yang dapat mengakibatkan atau dianggap sebagai konflik kepentingan antara kepentingan Perusahaan dan pribadi. Hal ini berlaku untuk semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hubungan afilias antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali dijelaskan dalam Laporan Tahunan 2022

PROSES EVALUASI KINERJA KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI (GRI 2-18)

PTPN memiliki Kode Etik Perusahaan yang di dalamnya terdapat prosedur yang jelas terkait dengan konflik kepentingan. PTPN telah menetapkan pembagian yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan serta menghindari situasi apa pun yang dapat mengakibatkan atau dianggap sebagai konflik kepentingan antara kepentingan Perusahaan dan pribadi. Hal ini berlaku untuk semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hubungan afilias antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali dijelaskan dalam Laporan Tahunan 2021 (halaman 286)

Selain itu, dalam menjalankan kepengurusan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk mencapai target-target kinerja, termasuk target *Key Performance Indicators* (KPI) yang mencakup Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Operasional, Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Detail mengenai target dan KPI untuk Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dan disetujui melalui Kontrak Manajemen Tahun 2022 yang didasarkan pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, salah satunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai bagian dari pelaporan reguler kepada badan tata kelola tertinggi, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan pencapaian bulanan perusahaan kepada pemegang saham utama.

CONFLICT OF INTEREST (GRI 2-15)

PTPN has a Code of Conduct in it which contains clear procedures related to conflicts of interest. PTPN has already established clear divisions between personal and corporate interests and avoids any situation that could result in or be perceived as a conflict of interest between the interests of the Company and the individual. This applies to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The affiliate relationship between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the controlled shareholders is described in the 2022 Annual Report

PERFORMANCE EVALUATION PROCESS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS (GRI 2-18)

To ensure the implementation of ESG, PTPN has set up a ESG team to develop strategies and plans related to the improvement of ESG's aspect implementation process which includes strengthening of guidelines, procedures or other internal documents

In addition, in carrying out the management of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), the Board of Commissioners will be obligated to achieve performance targets, including *Key Performance Indicators* (KPI) targets which include economic and Social value for Indonesia, Operations, Social, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development and talent Development. Details about the targets and KPIs for Board of Directors and Commissioners were established and approved by Management Contract in 2022 that is based on applicable Government Laws, one of Act No. 11/2020 on Create Business. As part of regular reporting to the highest governance bodies, the Board of Directors and the Board of Commissioners reported their monthly company's achievements to the principal shareholders.



ESG Key Performance Indicator 2022	Satuan	Target	Bobot KPI
Sertifikasi CPO (RSPO) RSPO certification	%	84	5
Pembelian Bahan Baku dari Pihak III/Petani/Plasma Purchasing from smallholder farmers	Ton	8,847,672	5
Implementasi Dekarbonisasi Implementation of decarbonisation	%	5.5	3
Rasio pengembangan talenta PTPN Grup Ratio of talent in PTPN group			
a. Milenial (<=42 tahun dalam top manajemen) Millennials (<=42 years in top management)	%	16	5
b. Perempuan dalam Nominated Talent Women in nominated talent	%	15	5
Total Bobot ESG KPI (%) Total weight of ESG-linked KPI (%)			23

KEBIJAKAN REMUNERASI (GRI 2-19)

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2022, mengacu pada Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-36/Wk1.MBU.C/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2022, sebagaimana diteruskan dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/153/2022 tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan honorarium dan gaji menurut komposisi faktor jabatan di bawah:

Dewan Komisaris Board of commissioners	
Komisaris Utama Komisaris Utama	45% dari Direktur Utama
Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris	90% dari Komisaris Utama
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama Direktur Utama	100%
Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama	90% x Direktur Utama
Anggota Direksi Lainnya Anggota Direksi Lainnya	85% x Direktur Utama

KEBIJAKAN REMUNERASI (GRI 2-20)

Dalam proses penetapan besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen melakukan kajian penghitungan penghasilan dibantu oleh konsultan independen yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sementara itu, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,

REMUNERATION POLICY (GRI 2-19)

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2022, referring to the Letter of State owned Enterprises Republic of Indonesia No. SR-36/Wk1.MBU.C/07/2022 date July 26, 2022 regarding the Announcement of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) year 2022, as followed by a Decree from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/153/2022 dated August 4, 2022, on the Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) year 2022, members of the Board of Directors and Board of Directors are awarded honorarium and salary based on the composition factor as shown below:

PROCESS FOR DETERMINING REMUNERATION (GRI 2-20)

In the process of determining the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, the management reviews the calculation of income assisted by independent consultants who have competence in their fields based on the Ministerial Decree on State-Owned Enterprises.

Meanwhile, the allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners are determined based on the Minister of BUMN Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021.

Guidelines for Determining Income for the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Trustees of State-Owned Enterprises, which was last amended by means of Minister of BUMN Regulation No. PER-13/MBU/09/2021.

No	Jenis Penghasilan Type of salary	Keputusan Order	Keterangan Remarks
1. Tunjangan Allowance			
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Asuransi Purna Jabatan Post-employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun The premium borne by the company is a maximum of 25% of the honorarium in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of the honorarium per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
2. Fasilitas			
	Fasilitas Kesehatan Health facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (at cost) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (at cost) at cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021

Tunjangan dan Fasilitas Direksi
Board of Directors Allowances and Facilities

No	Jenis Penghasilan Type of salary	Keputusan Order	Keterangan Remarks
1. Tunjangan Allowance			
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Asuransi Purna Jabatan Post-employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun The premium borne by the company is a maximum of 25% of the honorarium in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Tunjangan Perumahan Home Allowance	Rp25.000.000,00 per bulan IDR 25.000.000,00 per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/MBU/09/2021 apabila menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021 if a house of office is provided, it must be used until the term of office of the Board of Directors ends and the person concerned is not given a Housing Allowance
2. Fasilitas			
	Fasilitas Kendaraan Transportation Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the company's financial condition	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisari dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) Specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for oil-fueled vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery-based electric vehicles (battery electric vehicles).



Tunjangan dan Fasilitas Direksi Board of Directors Allowances and Facilities

No	Jenis Penghasilan Type of salary	Keputusan Order	Keterangan Remarks
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (at cost) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER- 13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal aid allowance	Sebesar pemakaian (at cost) at cost	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER- 13/MBU/09/2021 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-13/MBU/09/2021

Proses Penentuan Remunerasi (GRI 2-20)

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menunjuk konsultan independen untuk melakukan kajian penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memperoleh tanggapan, yang selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Mengacu kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan ketentuan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Dalam menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, digunakan indikator kinerja manajemen seperti yang telah disampaikan sebelumnya tentang penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Indikator kinerja manajemen tercantum dalam kontrak manajemen antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berisi target-target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 termasuk target Key Performance Indicator (KPI) dengan indikator, pembobotan, serta target. Selain itu, penetapan besarnya remunerasi memperhitungkan pasar tenaga kerja di Indonesia, serta kemampuan Perusahaan.

Gaji Direktur Utama menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

Remuneration Determination Process (GRI 2-20)

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is guided by the provisions of the Minister of BUMN Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Trustees of State-Owned Enterprises, which was last amended through Minister of BUMN Regulation No. PER-13/MBU/09/2021, the Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) appointed an independent consultant to review the income of the Directors and Board of Commissioners.

Based on the results of the study, it was submitted to the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to obtain a response, which then the Board of Commissioners submitted proposals for the income of the Directors and the Board of Commissioners to the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Referring to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and applicable regulations, the General Meeting of Shareholders determines the provisions on the remuneration of the Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, management performance indicators are used as previously discussed regarding the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors. Management performance indicators are listed in the management contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners which contains targets for the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), including Key Performance Indicator (KPI) targets with indicators, weighting, and targets. In addition, the determination of the amount of remuneration takes into account the labor market in Indonesia, as well as the Company's capabilities.

The salary of the Main Director is used as a reference for the calculation of the salaries of the Board of Commissioners and Directors, as stated in the Minister of BUMN Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Trustees of State-Owned Enterprises, which was last amended through Minister of BUMN Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors and Board of Commissioners.



KINERJA EKONOMI

ECONOMIC PERFORMANCE

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Per 31 Desember 2022, Perseroan tercatat membukukan laba konsolidasi setelah pajak sebesar Rp 6,02 triliun.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) includes subsidiaries of palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, tobacco, and cocoa plantations, as well as their respective downstream products. As of December 31, 2022, the Company has recorded consolidated income after tax in the amount of IDR 6.02 trillion.

MOMENTUM UNTUK MERAIH KINERJA TERBAIK

MOMENTUM TO ACHIEVE THE BEST PERFORMANCE

Topik Material GRI Standards 2021
Material Topics of GRI Standards 2021

Kinerja Ekonomi 201
Economic Performance 201

Dukungan terhadap SDGs/TPB
Support for SDGs

TPB ke-8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; TPB ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
SDG 8 Decent work and economic growth; SDG 12 Responsible Consumption and Production

SEKILAS PEREKONOMIAN NASIONAL

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022. Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 6 Februari 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31%, naik dibanding tahun 2021, yang tercatat sebesar 3,69% (*year on year/y-on-y*).

Pertumbuhan ekonomi seperti disampaikan BPS tersebut di atas sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan yang menyebut angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2% atau sedikit lebih tinggi. Perkiraan itu dirilis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 di bawah 5% karena situasi dan kondisinya memang lebih menantang dibanding triwulan sebelumnya. Antara lain, pada September 2022, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, dan imbasnya terhadap perekonomian terasa pada tiga bulan berikutnya.

Membaiknya perekonomian Indonesia tahun 2022 tak lepas dari keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19, yang trennya terus melandai sejak akhir tahun 2021. Temuan kasus COVID-19 yang terus menurun membuat pemerintah memberikan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masyarakat bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas, termasuk bekerja di berbagai sektor ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian pun terus bertumbuh.

Keberhasilan dalam mengendalikan COVID-19 berujung dengan pencabutan secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia per 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut diambil karena data perkembangan COVID-19 menunjukkan perbaikan dalam beberapa bulan terakhir dengan *positive rate* mingguan dan perawatan di rumah sakit di bawah standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Data per 27 Desember 2022, kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1.000.000 penduduk dengan *positivity rate* mingguan mencapai 3,35% dan tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, serta angka kematian di angka 2,39%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sangat bermakna karena diraih pada saat perekonomian global sedang mengalami perlambatan. Mengacu pada *World Economic Outlook* yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari 2023 misalnya,

OVERVIEW OF THE NATIONAL ECONOMY

In 2022, Indonesia saw tremendous economic growth. According to data released by BPS-Statistics Indonesia on February 6, 2023, Indonesia's economic growth in 2022 was 5.31%, up from 3.69% in 2021 (*year on year/ y-on-y*).

Economic growth, as mentioned by BPS-Statistics Indonesia, was consistent with the Ministry of Finance's projection of 5.2% or slightly higher economic growth in 2022. This estimate was based on the assumption that economic growth would be less than 5% in the fourth quarter of 2022, since the situation and conditions were indeed more difficult than in the previous quarter. Among other things, the Government raised the price of fuel in September 2022, with the effects felt in the economy over the next three months.

The national economy's development in 2022 was inseparable from the government's success in dealing with the COVID-19 pandemic, the trend of which has been sloping since the end of 2021. The findings of COVID-19 cases, which have continued to decline, have prompted the government to have the relaxation of the Community Activities Restriction Enforcement (PPKM) so that people can carry out their activities more freely, including working in various sectors of the economy. The economy continues to grow as a result of this policy.

Success in controlling COVID-19 resulted in President Joko Widodo's official revocation of the Community Activities Restriction Enforcement (PPKM) in all areas of Indonesia on December 30, 2022. This policy was implemented because statistics on the progression of COVID-19 showed improvement in recent months, with a weekly positive rate and hospital care falling short of World Health Organization (WHO) criteria. Data as of December 27, 2022, showed that daily COVID-19 cases reached 1.7 instances per 1,000,000 people, with a weekly positive rate of 3.35%, a hospitalization rate of 4.79%, and a mortality rate of 39%.

Indonesia's economic growth in 2022 was significant because it occurred during a period when the world economy was slowing down. According to the International Monetary Fund's (IMF) *World Economic Outlook* released in January 2023, the international



lembaga internasional tersebut memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,4%. atau lebih tinggi 0,2% dibanding proyeksi pada Oktober 2022. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan prediksi pada Januari 2022 dimana pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sempat diproyeksikan mencapai 4,4 persen. Sebagai pembandingan, lembaga yang sama menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebesar 6%.

KINERJA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN TAHUN 2022

Sejalan dengan pemulihan perekonomian di Indonesia pada tahun 2022, dari 17 lapangan usaha yang digunakan BPS untuk menyusun dan menghitung angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022, semua mengalami pertumbuhan. Di antara lapangan usaha atau sektor yang tumbuh positif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang tumbuh 2,25% serta sektor Industri Pengolahan yang tumbuh termasuk di dalamnya industri makanan dan minuman, yang tumbuh 4,89%. (2021: 3,39%)

Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan termasuk di dalamnya perkebunan meneruskan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1,87%. Tren yang sama berlaku untuk sektor Industri Pengolahan dimana pengolahan produk makanan termasuk di dalamnya, yaitu tumbuh 3,39% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sektor ini tumbuh minus 2,93%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Industri Pengolahan sudah pulih dari dampak negatif pandemi COVID-19. Lebih dari itu, menurut BPS, Industri Pengolahan berhasil menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 18,34% terhadap kenaikan PDB Indonesia

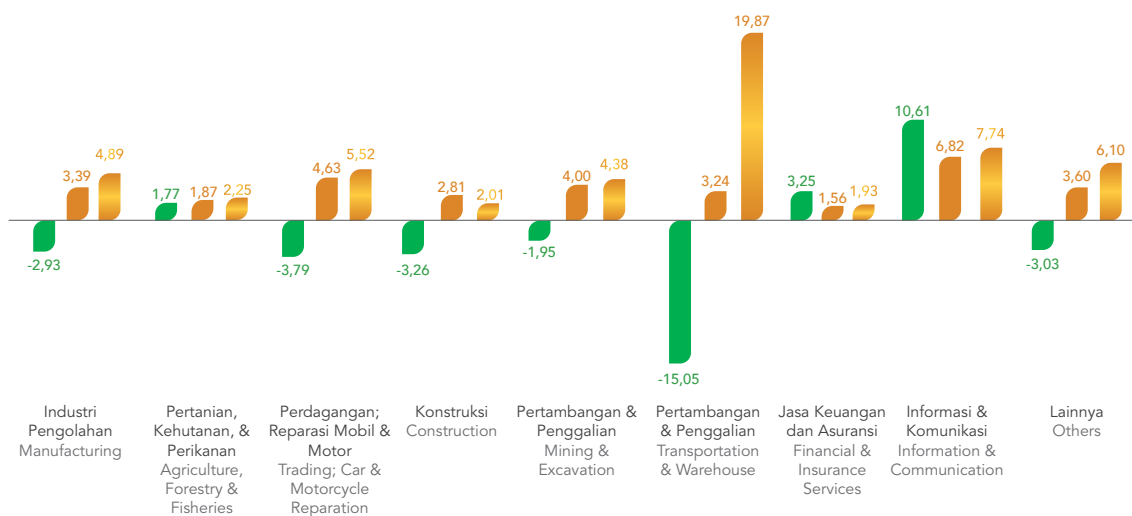
institution anticipated global economic growth in 2022 of 3.4%, or 0.2% higher than the projection in October 2022. However, the figure was still lower than the January 2022 forecast, which predicted global economic growth of 4.4% in 2022. In comparison, the same institution predicted global economic growth of 6% in 2021.

PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL, PLANTATION AND PROCESSING SECTORS IN 2022

In line with the economic recovery in Indonesia in 2022, of the 17 business sectors used by BPS-Statistics Indonesia to compile and calculate economic growth figures for 2022, all were experiencing growth. Among the business fields or sectors that grew positively were the Agriculture, Forestry and Fisheries sectors, which grew 2.25% and the Processing Industry sector, including the food and beverage industry, which grew 4.89%. (2021: 3.39%)

Growth in the Agriculture, Forestry and Fisheries sectors – including plantations – continued the previous year’s growth of 1.87%. The same trend applied to the Processing Industry sector, which includes the processing of food products, which grew 3.39% in 2021. In 2020, this sector grew minus 2.93%. The achievement showed that the Processing Industry has recovered from the negative impact of the COVID-19 pandemic. Moreover, according to BPS-Statistics Indonesia, the Processing Industry has managed to become the largest contributor to economic growth in 2022 with a contribution of 18.34% to the increase in Indonesia’s GDP.

Gambar Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022
Figure of GDP Growth of Several Business Sectors in 2022



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 6 Februari 2023
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 6 Februari 2023

Sementara itu, perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produk-produk eksportnya. Menurut Kementerian Pertanian, Ditjen Perkebunan selama tahun 2022 berhasil menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 520,76 triliun rupiah (94,66%). Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat. Adapun ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun ini paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi .

Secara spesifik, merujuk data BPS, nilai ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) sepanjang tahun 2022 naik 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, volume ekspor CPO 2022 tercatat turun tipis secara *year on year*. Tercatat, nilai ekspor CPO pada tahun 2022 mencapai US\$ 27,76 miliar, naik 3,7% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US\$ 26,75 miliar. Sementara itu, volume ekspor CPO 2022 mencapai sebesar 25 juta ton, turun dibandingkan volume ekspor tahun 2021 yang mencapai 25,6 juta ton . Penurunan volume ekspor CPO antara lain akibat adanya kebijakan ekspor CPO dan sawit lainnya pada 28 April 2022 hingga 23 Mei 2022 yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri yang melambung tinggi.

Bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan pada tahun 2022 merupakan kabar yang sangat bermakna. Hal itu selaras dengan kinerja dan pencapaian Perseroan pada tahun 2022 yang mencatatkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya . [GRI 3-3]

KEBIJAKAN STRATEGIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2022

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai bagian dari pelaku usaha di bidang perkebunan –yang termasuk dalam sektor pertanian menurut BPS, serta industri pengolahan, turut terdampak positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2022. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan kinerja ekonomi sebagaimana disampaikan dalam laporan keuangan tahun pelaporan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Pencapaian Perseroan tersebut tidak lepas dari ketepatan kebijakan strategis yang ditetapkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk mewujudkan target dan kinerja terbaik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022. Rencana tersebut disusun berdasarkan evaluasi atas kondisi perekonomian Indonesia tahun 2021 dan prediksi dari berbagai lembaga terhadap perekonomian tahun 2022 yang bernada optimis. Memperhatikan potensi pengaruh pandemic Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia yang secara langsung masih berdampak terhadap bisnis perusahaan pada tahun 2022 maka Perseroan mengambil posisi konservatif dalam penyusunan RKAP 2022. Dengan kondisi demikian untuk menjaga keseimbangan financial, Perseroan akan memaksimalkan potensi produksi dan penurunan harga pokok produksi, terutama melalui strategi dan program operasional

Meanwhile, plantations as part of the agricultural sector showed its contribution to economic growth through export products. According to the Ministry of Agriculture, the Directorate General of Plantations in 2022 has succeeded in becoming the largest contributor to exports in the agricultural sector with a contribution of IDR520.76 trillion (94.66%). This showed that the opportunity to export plantation commodities as a source of foreign exchange continued to increase. Exports of plantation commodities, which have increased significantly this year, were mostly contributed by palm oil, rubber, cocoa, coconut and coffee.

Specificall , referring to BPS-Statistics data, the export value of crude palm oil (CPO) throughout 2022 increased by 3.7% compared to the previous year. However, the 2022 CPO export volume was recorded to have slightly declined year on year. It was noted that the export value of CPO in 2022 amounted to USD27.76 billion, increased by 3.7% compared to 2021 of USD26.75 billion. Meanwhile, the export volume of CPO in 2022 amounted to 25 million tons, a decline compared to the export volume in 2021 of 25.6 million tons. The decline in CPO export volume was partly due to the government's policy to export CPO and other palm oil from April 28, 2022 to May 23, 2022 in order to keep domestic cooking oil prices from rising further.

The growth of the agriculture sector and processing industry in 2022 was highly significant news for PT Perkebunan Nusantara III (Persero). This was consistent with the Company's performance and accomplishments in 2022, which showed significant improvements over the previous year. [GRI 3-3]

2022 STRATEGIC POLICY OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as part of the business actors in the plantation sector – which are included in the agricultural sector according to BPS-Statistics Indonesia, as well as the processing industry, have also had a positive impact on Indonesia's sustainable economic growth in 2022. This is indicated by the trend of increasing economic performance as presented in the financial report for the reporting year that has been audited by the Public Accounting Firm

The Company's success is inextricably linked to the accuracy of the strategic policies established by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to achieve the best targets and performance in the Company's 2022 Work Plan and Budget. The plan was developed based on an assessment of Indonesia's economic conditions in 2021 and forecasts from numerous institutions regarding the positive tone of the 2022 economy. Considering the probable impact of the Covid-19 pandemic on the Indonesian economy, which continued to have a direct impact on the Company's business in 2022, the Company took a conservative approach in preparing the Company's 2022 Work Plan and Budget. Under these conditions, the Company would maximize production potential and reduce production costs, particularly through operational strategies and programs to improve the usage of production capacity controlled by the Company. PTPN



untuk mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan. PTPN III juga terus berkomitmen melaksanakan transformasi selaras dengan program-program strategis jangka panjang (RJPP), dengan fokus kepada 5 strategi akselerasi Perusahaan yakni:

1. Optimalisasi portfolio & operational excellence;
2. Commercial excellence & Ekspansi hilir;
3. Optimalisasi aset & kemitraan strategis;
4. Pengembangan kapabilitas & budaya;
5. Peningkatan sistem & teknologi.

KINERJA PERSEROAN TAHUN 2022

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk pencapaian target RKAPP tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi berbagai kebijakan strategis tersebut. Kepada pemangku kepentingan internal, Perseroan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan, termasuk saat manajemen melakukan rapat yang terjadwal maupun pertemuan-pertemuan lain yang bersifat insidental. Sementara itu, sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, regulator, kreditur, dan pemasok, antara lain dilakukan melalui paparan publik, *press release*, informasi pada *website*, dan lain-lain.

Selaras dengan sosialisasi yang dilakukan di atas, manajemen dengan dukungan karyawan menerapkan inisiatif dan kebijakan strategis tersebut secara konsisten. Pelaksanaannya terus dipantau dan dievaluasi sehingga Perseroan bisa menentukan solusi terbaik apabila ditemukan deviasi atau hambatan di lapangan. Komitmen dan kesungguhan tersebut bermuara dengan pencapaian kinerja positif Perseroan pada tahun 2022. Selain lebih baik dibanding pencapaian tahun sebelumnya, Perseroan juga berhasil mewujudkan sebagian target kinerja dalam RKAPP tahun 2022. [GRI 3-3]

Keberhasilan yang ditorehkan pada tahun 2022 merupakan hasil kerja keras dan kerja kolektif PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan anak perusahaan. Per 31 Desember 2022, Perseroan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Areal tanaman keseluruhan *holding* didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit seluas 562.440,99 ha, areal tanaman karet seluas 127.856,52 ha, areal konsesi teh 23.594,81 ha serta areal tebu yang ditebang sampai dengan Desember 2022 seluas 177.858 ha (TS + TR).

Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 21,69 ton/ha atau 93,08% dari RKAP 2022 yang dianggarkan sebesar 23,30 ton/ha, dan 102,95% dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 21,07 ton/ha. Penurunan produktivitas tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih terdapat kekurangan tenaga panen di beberapa PTPN.
2. Terdapat kondisi jalan rusak sepanjang 17.706 Km sehingga mengakibatkan restan 12,6%.

III remained committed to conduct transformation in accordance with long-term strategic programs (the Company's Long-term Plan), with a focus on five Company acceleration strategies

1. Portfolio optimization and operational excellence;
2. Commercial excellence and downstream expansion;
3. Asset optimization and strategic partnership;
4. Capability and culture development; and
5. System and technology improvement.

THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2022

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) recognizes that the support of stakeholders, both internal and external, is critical to the successful execution of its strategic initiatives, including meeting the Company's 2022 Revised Work Plan and Budget targets. As a result, the Company socializes these various strategic policies on a regular basis. The Company uses different media and opportunities for internal stakeholders, including when management holds scheduled meetings and other incidental meetings. Meanwhile, public exposures, press releases, and information on website are used to reach out to external stakeholders such as the government, regulators, creditors, and suppliers.

In accordance with the socialization described above, management, with the support of employees, consistently implements these strategic policies and policies. Its execution is constantly monitored and assessed, allowing the Company to choose the best solution if deviations or barriers are discovered in the field. This commitment and dedication resulted in the Company's positive performance in 2022. Apart from outperforming the previous year's results, the Company also met several of the performance targets outlined in the Company's 2022 Revised Work Plan and Budget. [GRI 3-3]

The success achieved in 2022 was the result of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and its subsidiaries' hard effort and collaboration. As of December 31, 2022, the Company included its subsidiaries of palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, tobacco, and cocoa plantations, as well as their respective downstream products. As of December 31, 2022, the holding's total plantation area was dominated by palm oil plantations of 562,440.99 ha, 127,856.52 ha of rubber plantations, 23,594.81 ha of tea concession area, and 177,858 ha of sugarcane that was cut down (TS + TR).

As of December 2022, the realization of palm oil FFB productivity amounted to 21.69 tons/ha or 93.08% of the Company's 2022 Work Plan and Budget, which was budgeted at 23.30 tons/ha, and 102.95% from the same period in 2021 of 21.07 tons/ha. The decline in productivity in 2022 was influenced by several factors, including:

1. Harvesting workers continued to be in low supply in several PTPN.
2. Damaged road conditions along 17,706 kilometers of route, leading to a 12.6% remainder.

3. Terdapat pencurian produksi 2.074 Ton (0,021%).
4. Terdapat panen buah mentah 2,12%.
5. Terdapat serangan hama tikus 0,64% areal TM.
6. Terdapat serangan UPDKS 4,61% areal TM.

Adapun produktivitas karet kering realisasi sampai dengan Desember 2022 sebesar 1.095 kg/ha atau 80,17% dari RKAP 2022 yang dianggarkan sebesar 1.366 kg/ha, dan 90,46% dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 1.211 kg/ha. Penurunan produktivitas tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih terdapat kekurangan jumlah penyadap dan *turnover* tenaga karena persaingan harga
2. Terdapat 168 hari hujan yang menyebabkan kehilangan compo dan hanca lowong
3. Masih rendahnya output prestasi penyadap (14,6 Kg/HK)
4. Kondisi tajuk tidak sempurna akibat serangan Pestalotiopsis 22,4% areal TM
5. Terdapat pencurian produksi 606 Ton atau 0,53%

Untuk produktivitas tebu per hektar sampai dengan Desember 2022 sebesar 74,4 ton/ha atau 98,8 % dari RKAP 2022 yang dianggarkan sebesar 75,3 ton/ha, dan 103,9 % dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 71,6 ton/ha. Penurunan produktivitas tahun 2022 dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman tebu terhambat sebagai dampak dari aplikasi pemupukan terlambat, adanya serangan hama penyakit dan irigasi / pengairan yang tidak lancar pada beberapa blok kebun.

Sementara itu, produktivitas teh kering per hektar sampai dengan Desember 2022 secara total 2022 sebesar 1.919 kg/ha atau 81,97% dari RKAP 2022 yang dianggarkan sebesar 2.341kg/ha, namun 106,01% dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 1.810 kg/ha. Penurunan produktivitas tahun 2022 dipengaruhi oleh adanya losis yang disebabkan pembatasan panen akibat keterbatasan bahan bakar Wood Pellet di pabrik, belum tepatnya sistem pemetikan tidak selaras dengan rekomendasi holding, kekurangan mesin petik di Triwulan I 2022, realisasi pemupukan hanya tercapai 56,47% terhadap RKAP 2022 namun 151,17% terhadap Tahun 2021.

Selama tahun pelaporan, kontribusi penjualan periode sampai dengan Desember 2022 disumbang oleh komoditi sawit sebesar 66,93% dari total penjualan. Komoditi karet memberikan kontribusi 7,26%, komoditi tebu 22,07%, teh berkontribusi sebesar 1,60% dari total penjualan, dan komoditi aneka tanaman/lainnya sebesar 2,14%.

Per 31 Desember 2022, Perseroan tercatat membukukan laba konsolidasi setelah pajak sebesar Rp 6,02 triliun. Dari jumlah itu, komoditi kelapa sawit memberikan kontribusi laba sebelum pajak sebesar Rp 9.862,85 miliar atau laba tersebut naik sebesar Rp 2.602,72 miliar dibandingkan target laba pada RKAP periode sampai dengan Desember 2022 dan dibandingkan realisasi laba pada periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp 110,98 miliar; komoditi karet memberikan kontribusi rugi sebesar Rp 361,16 miliar, teh memberikan kontribusi rugi Rp 425,12 miliar, sedangkan komoditi tebu mengalami kontribusi rugi sebesar Rp 1.392,25 miliar.

3. Production theft of 2,074 tons (0.021%).
4. Immature fruit harvesting of 2.12%
5. Rat pest infestation in 0.64% of the Mature Plants area.
6. UPDKS attack in 4.61% of the Mature Plants area.

As of December 2022, the realization of dry rubber productivity amounted to 1,095 kg/ha or 80.17% of the Company's 2022 Work Plan and Budget of 1,366 kg/ha, and 90.46% from the same period in 2021 of 1,211 kg/ha. The decline in productivity in 2022 was influenced by several factors, including

1. Insufficient number of tappers and high labor turnover as a result of price competitiveness.
2. There were 168 rainy days, which resulted in a loss of compo and hanca lowong.
3. The low performance output of tappers (14.6 kg/HK).
4. Imperfect crown condition as a result of Pestalotiopsis attack on 22.4% of the Mature Plants area
5. Production theft of 606 tons or 0.53%.

As of December 2022, sugarcane productivity per hectare amounted to 74.4 tons/ha or 98.8% of the Company's 2022 Work Plan and Budget of 75.3 tons/ha, and 103.9% from the same period in 2021 of 71.6 tons/ha. The decline in productivity in 2022 was caused by the stunted growth of sugarcane plants as a result of late fertilization applications, pest attacks and inefficient irrigation in several plantations.

Meanwhile, total dry tea productivity per hectare until December 2022 amounted to 1,919 kg/ha or 81.97% of the Company's 2022 Work Plan and Budget of 2,341 kg/ha, and 106.01% from the same period in 2021 of 1,810 kg/ha. The decline in productivity in 2022 was affected by losses caused by harvest restrictions due to limited Wood Pellet fuel at the mills, the picking system was not exactly in line with the holding recommendations, shortage of picking machines in the 1st quarter of 2022, fertilization realization only amounted to 56.47% against the Company's 2022 Work Plan and Budget but 151.17% against 2021.

During the reporting year, the sales contribution for the period up to December 2022 was contributed by palm oil commodity of 66.93% of total sales. Rubber commodity contributed 7.26%, sugarcane commodity contributed 22.07%, tea contributed 1.60% of total sales, and assorted plants/other commodities contributed 2.14%.

As of December 31, 2022, the Company recorded a consolidated profit after tax of IDR 6.02 trillion. Of that amount, the palm oil commodity contributed to profit before tax of IDR9,862.85 billion or the profit increased by IDR 2602.72 billion compared to the profit target in the Company's 2022 Revised Work Plan and Budget for the period up to December 2022 and compared to profit realization in the same period the previous year there was a decline of IDR 361.16 billion; the rubber commodity contributed a loss of IDR361.16 billion, tea contributed a loss of IDR425.12 billion, while the sugarcane commodity contributed a loss of IDR 1,392.25 billion.



Pencapaian kinerja ekonomi selengkapnya adalah sebagai berikut: Economic performance achievements are as follows:

Tabel Kinerja Ekonomi 2020-2022 (Rp Juta)
Table of Economic Performance in 2020-2022 (IDR Million)

Uraian Description	2022	2021	2020
Pendapatan Revenue	55,863,302	53.569.662	39.390.437.
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	(36,669,237)	(33.660.029)	(28.953.637)
Laba Bruto Gross Profit	19,194,065	19.909.633	10.436.800
Keuntungan (Kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis Profit (Loss) on Changes in Fair Value of Biological Assets	(377,119)	279.420	235.223
Beban pemasaran dan penjualan Marketing and Selling Expenses	(856,341)	(780.699)	(899.303)
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	(8,259,387)	(7.753.262)	(6.706.653)
Pendapatan operasi lain Other Operating Income	3,930,539	2.409.138	2.207.926
Beban operasi lain Other Operating Expenses	(2,863,502)	(3.561.034)	(1.849.992)
Laba Usaha Income from Operations	10,768,255	10.503.196	3.424.001
Bagian laba entitas asosiasi Share in Income of Associates	226,053	164.672	75.100
Pendapatan keuangan Finance Income	211,433	282.198	198.088
Pajak final atas pendapatan keuang Final Tax Relating to Finance Income	(19,971)	(22.734)	(5.833)
Beban keuangan Finance Expense	(3,151,477)	(3.450.254)	(3.525.680)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income (loss) Before Income Tax	8,034,294	7.477.077	165.676
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Income Tax Expenses (Benefits)	(2,017,313)	(2.832.745)	(1.302.279)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income (Loss) for The Year	6,016,981	4.644.333	(1.136.603)

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Berdasarkan kinerja seperti tersebut di atas, maka bisa disampaikan mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan oleh Perseroan selama tahun 2022. Nilai ekonomi yang dihasilkan adalah manfaat ekonomi yang diperoleh selama menjalankan usaha, misalnya pendapatan, pendapatan operasi, dan pendapatan keuangan. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan adalah manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti pembayaran pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (TJSL BUMN). Adapun nilai ekonomi yang ditahan adalah manfaat ekonomi yang disimpan Perusahaan yang diperoleh dari pengurangan nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan. Distribusi nilai ekonomi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 201-1]

DISTRIBUTION OF ECONOMIC VALUE

Based on the above performance, the Company's distribution of economic value in 2022, namely the direct economic value generated, the economic value distributed, and the economic value retained, can be calculated. The economic value generated refers to the economic benefits obtained by the Company during its operations, such as revenue, operating revenue, and finance income. While the economic value distributed refers to the economic benefits provided by the Company to stakeholders, such as payment of taxes, dividends, payments to suppliers, and the realization of funds for the community through Corporate Social Responsibility (CSR) Program and the Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises (SOEs TJSL) Program. The economic value retained refers to the economic benefit retained by the Company, which obtained from the difference between the economic value generated deducted by the economic value distributed. The complete distribution of economic value is presented in the following table: [GRI 201-1]

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi Tahun 2020-2022 (Rp Juta)
Table of Distribution of Economic Value in 2020-2022 (IDR Million)

Uraian Description	2022	2021	2020
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Economic Value Generated			
Pendapatan bersih Revenue	55,863,302	53.569.662	39.390.437
Pendapatan keuangan Financial Revenue	211,433	282.198	198.088
Bagian laba bersih entitas asosiasi Share of Net Income of Associates	226,053	164.672	75.100
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis Gains on Changes in Fair Value of Biological Assets	-377,119	279.420	235.223
Pendapatan operasi lain Other Operating Income	3,930,539	2.409.138	2.207.926
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (1) Economic Value Generated (1)	59,854,209	56.705.090	44.823.111
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed			
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	-36,669,237	(33.660.029)	(28.953.637)
Beban pemasaran dan penjualan Marketing and Sales Expenses	-856,341	(780.699)	(899.303)
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	-8,259,387	(7.753.262)	(6.706.653)
Beban keuangan Financial Expenses	-3,151,477	(3.450.254)	(3.525.680)
Beban operasi lain Other Operating Expenses	-2,863,502	(3.561.034)	(1.849.992)
Beban pajak penghasilan - bersih Income Tax Expense - Net	-2,017,313	(2.832.745)	(1.302.279)
Pembayaran dividen kepada pemerintah Dividend Payment to Government	0	0	(4.414)
Dana investasi/pengembangan masyarakat melalui CSR/ TJSL BUMN Community Investment/Development Funds Through SOEs/ CSR/TJSL	(126.019)	(43.713)	(85.126)
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (2) Economic Value Distributed (2)	-53,817,257	(52.081.736)	(43.327.084)
Nilai Ekonomi yang Ditahan (1-2) Economic Value Retained (1-2)	6,036,952	4.623.354	1.496.027

BANTUAN FINANSIAL DARI PEMERINTAH

Selama tahun 2022, pemerintah telah melakukan injeksi dana hingga Rp 106,8 triliun kepada BUMN dan lembaga atau badan strategis dalam rangka mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi. Merujuk data Kementerian Keuangan, pemerintah menyalurkan penerimaan kembali investasi kepada empat BUMN, yaitu Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun, PTPN 3 Rp 1,2 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 16,05 triliun dan pinjaman PEN daerah Rp 2,31 triliun. [GRI 201-4]

Terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memanfaatkannya untuk Pembiayaan Belanja Modal Perkebunan Komiditi Kelapa Sawit

FINANCIAL ASSISTANCE FROM THE GOVERNMENT

During 2022, the government has injected funds up to IDR106.8 trillion into SOEs and strategic institutions or agencies to support priority sectors and promote economic recovery. According to Ministry of Finance data, the government has channeled investment returns to four SOEs: Garuda Indonesia (IDR7.5 trillion), PTPN 3 (IDR1.2 trillion), the State Asset Management Agency (LMAN) (IDR16.05 trillion), and regional PEN loans (IDR2.31 trillion). [GRI 201-4]

Terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memanfaatkannya untuk Pembiayaan Belanja Modal Perkebunan Komiditi Kelapa Sawit



(Tranche A1) dan Komoditi Tebu (Tranche A2), Pembiayaan Belanja Modal Pabrik Komoditi Kelapa Sawit (Tranche B1) dan Komoditi Tebu (Tranche B2), serta Pembiayaan Modal Kerja untuk Kelapa Sawit (Tranche C1) dan Tebu (Tranche C2) [GRI 3-3]

(Tranche A1) dan Komoditi Tebu (Tranche A2), Pembiayaan Belanja Modal Pabrik Komoditi Kelapa Sawit (Tranche B1) dan Komoditi Tebu (Tranche B2), serta Pembiayaan Modal Kerja untuk Kelapa Sawit (Tranche C1) dan Tebu (Tranche C2) [GRI 3-3]

PTPN	Detail Pencairan Tahap I Details of Disbursement Phase I 25/10/2022	Detail Pencairan Tahap II Details of Disbursement Phase II 09/12/2022	Detail Pencairan Tahap III Details of Disbursement Phase III 23/12/2022	Total Pencairan 2022 Total Disbursement in 2022	Total Pencairan sd 31/12/2022 Total Disbursement until 31/12/2022
PTPN I	126,247	24,408	57,462	208,117	342,974
PTPN II	143,412	74,292	27,836	245,540	536,409
PTPN IV	15,760	0	19,368	35,128	183,435
PTPN VI	1,102	37,781	17,238	56,121	215,611
PTPN VII	190,449	88,898	68,716	348,063	570,095
PTPN IX	14,630	20,368	0	34,998	38,337
PTPN X	16,036	5,504	20,270	41,810	305,518
PTPN XI	112,632	1,793	8,892	123,317	438,600
PTPN XII	1,922	19,603	500	22,025	123,233
PTPN XIV	63,398	17,697	4,931	86,026	198,268
Total	685,588	290,344	225,213	1,201,145	2,952,480

DANA PENSIUN [GRI 201-3]

PTPN dan anak perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999.

Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing masing sebesar 6.00% dan 6.22% maupun dari kontribusi karyawan Entitas Anak tertentu dan Entitas Anak tertentu masing-masing sebesar 6.00% dan antara 4.94% - 9.80% dari gaji dasar tahunan untuk tahun tertentu. Informasi selengkapnya tentang Dana Pensiun disampaikan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2022.

PENSION FUND [GRI 201-3]

PTPN and its subsidiaries have implemented a pension program for all regular employees that are managed by the Pension Fund (Dapenbun) based on Decree from Minister of Finance No. Kep-344/KMK/17/1999.

Dapenbun funding comes from employee and company contributions of 6.00% and 6.22% as well as from employee contributions of certain child Entities and a specific child Entity of 6.00% and between 4.94% and 9.80% of annual salary for a given year. More information about retirement is delivered in company's 2022 financial statement





05

KEAMANAN DAN KUALITAS PRODUK

PRODUCT SAFETY AND QUALITY

Perseroan berupaya secara maksimal memberikan layanan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

The Company strives to provide maximum customer service as a form of responsibility and compliance with the Consumer Protection Law.

KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI PRIORITAS

CUSTOMER SATISFACTION AS A PRIORITY



Topik Material GRI Standards 2021
Material Topic of GRI Standards 2021

**Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 416;
Pemasaran dan Pelabelan 417**
Customer Health and Safety 416;
Marketing and Labeling 417

Dukungan terhadap SDGs/TPB
Support for SDGs

TPB ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
SDG 12 Responsible Consumption and Production

Keberlanjutan usaha PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan yang diberikan oleh konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Semakin besar dukungan diperoleh, maka keberlangsungan Perseroan akan lebih terjamin. Begitu pula sebaliknya.

Sejalan dengan posisi konsumen yang sangat strategis, maka Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan produk dan layanan terbaik. Bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), memberikan pelayanan terbaik termasuk di dalamnya adalah melakukan inovasi dalam pengembangan produk/jasa, pelayanan, pemasaran, membuka saluran pengaduan bagi konsumen, serta berupaya maksimal untuk memberikan solusi terbaik segera. Apabila semua upaya tersebut bisa diwujudkan, maka kepuasan konsumen akan diraih, yang pada gilirannya akan meningkatkan citra Perseroan, sekaligus menciptakan konsumen yang loyal.

Perseroan berupaya secara maksimal memberikan layanan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

The level of support given by consumers as one of the primary stakeholders has a significant impact on the sustainability of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The larger the level of support garnered, the more secure the Company's future. And the other way around.

In accordance with consumers' highly strategic position, the Company makes every effort to provide the best products and services. For PT Perkebunan Nusantara III (Persero), providing the best services includes marketing, distribution, and service placement innovation, as well as opening complaint channels and making maximum efforts to provide the best solution quickly. Customer satisfaction will be attained if all of these efforts are successful, which will boost the Company's image and build loyal customers.

The Company strives to provide optimal customer service as a form of responsibility and compliance with Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic



Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821). Berpedoman pada regulasi yang sama, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga terus meningkatkan kemampuan untuk menjawab kebutuhan konsumen, termasuk memberikan kualitas terbaik, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan Perseroan telah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sangat menghargai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat c, yaitu konsumen memiliki "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." [GRI 3-3]

Untuk memenuhi hak pelanggan atas informasi produk dan layanan, sekaligus untuk mempermudah pelayanan dan akses kepada pelanggan, Perseroan melakukan sosialisasi mengenai produk dan layanan, termasuk penawaran dan informasi terbaru melalui situs resmi perusahaan, yaitu www.holding-perkebunan.com. Dengan adanya informasi yang lengkap, maka konsumen bisa memilih dan menentukan produk yang dihasilkan Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. [GRI 417-1]

Tak hanya melalui *website*, Perseroan juga menyediakan saluran layanan bagi konsumen yang menginginkan penjelasan lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Untuk keperluan tersebut, konsumen bisa mengakses <http://www.ptpn3.co.id/Hubkm.php?h=tentang-kami> yang di dalamnya terdapat formulir pesan yang hendak ditanyakan, alamat Perseroan dan nomor kontak yang bisa dihubungi, termasuk jam dan hari layanan. Dengan memberikan layanan terbaik, pada tahun pelaporan tidak tercatat adanya insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. [GRI 417-2]

of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821). Guided by the same regulation, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) also continues to improve its ability to respond to consumer needs, including providing the best quality, and ensuring that the products produced by the Company meet health and safety standards.

PRODUCT AND SERVICE INFORMATION

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) highly values the rights of consumers as regulated in the Law concerning Customer Protection, among others, the right to obtain clear information about the products and services offered by the Company. This is regulated in article 4 paragraph c, namely "The right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services." [GRI 3-3]

To fulfill customers' rights to product and service information, as well as to facilitate service and access to customers, the Company socializes products and services, including the latest offers and information through the Company's official website www.holding-perkebunan.com. With complete information, consumers shall be able to choose and determine the Company's products according to the specifications they need. [GRI 417-1]

Not only through the website, the Company also provides service channels for consumers who want further explanation about the products offered by PT Perkebunan Nusantara III (Persero). For this purpose, consumers may access <http://www.ptpn3.co.id/Hubkm.php?h=tentang-kami> which includes a message form, the Company's address and contact numbers, including service hours and days. By providing the best service, in the reporting year there were no incidents of non-compliance related to product and service information and labeling. [GRI 417-2]

Informasi Information



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
Operasional: Jl. Sei Batanghari
No. 2 Medan 20122 Indonesia



(+62-61) 8452244
(+62-61) 8453100
(+62-61) 8474400
cs@email.ptpn3.co.id
<http://www.ptpn3.co.id>



Senin-Kamis: 08.00-17.00 WIB
Jumat: 08.00-12.00 WIB
Sabtu, Minggu: Tutup
Senin-Kamis: 08.00-17.00 WIB
Jumat: 08.00-12.00 WIB
Sabtu, Minggu: Tutup

Selain memberikan informasi yang jelas dan valid, komitmen Perseroan selanjutnya adalah memberikan produk dan layanan terbaik serta dengan harga kompetitif sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan maksimal. Untuk itu, Perseroan menerapkan Kebijakan Keamanan dan Kualitas Produk yang berlaku untuk seluruh operasi dalam PTPN Group. Seiring dengan itu, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mengikuti standar kualitas makanan dan sertifikasi nasional dan internasional, seperti ISO 9001:2015 (Manajemen Kualitas), ISO 22000:2018 (Manajemen Keamanan Pangan) untuk unit produksi teh, halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kebijakan nyata di lapangan di antaranya: [GRI 416-1]

1. PTPN telah melakukan proses *Quality Assurance* dengan melakukan pemeriksaan hasil panen dan bahan pendukung lainnya pada saat bahan baku diterima. Pemeriksaan dilakukan dari hulu sampai dengan hilir, termasuk kontrol kualitas produk akhir.
2. PTPN menerapkan SOP *Food Safety Manual* di unit teh yang mencakup topik ketahanan pangan, pencegahan penipuan makanan, kontrol ketidaksesuaian produk dan proses dan perencanaan dan kendali operasional untuk memenuhi persyaratan untuk realisasi produk yang aman.
3. PTPN memastikan bahwa kebijakan keamanan pangan & mutu disosialisasikan, dipahami, dan diterapkan di semua tingkatan dalam organisasi
4. Sebagai salah satu usaha untuk menjaga kesehatan dan kualitas produk, PTPN telah berusaha untuk menuliskan informasi nutrisi dari setiap produk downstream pada kemasan produk.
5. Lebih jauh lagi, PTPN juga berusaha untuk menjaga dan memonitor penggunaan pupuk pada setiap tanaman organik seperti teh dan kopi sebagai salah satu inisiatif untuk memperoleh produk organik yang dapat kami berikan pada konsumen.

Sejalan dengan itu, Perseroan juga telah mengadopsi kebijakan untuk memberikan layanan terbaik di antaranya: [GRI 3-3]

1. Senantiasa tepat waktu dalam pengiriman barang sesuai kontrak yang telah disepakati.
2. Menjaga mutu produk sesuai dengan SNI.
3. Kondisi peralatan pabrik sesuai standar.
4. Menjaga kesesuaian produk yang dipesan dan yang diterima pembeli sesuai kontrak.
5. Mewujudkan komunikasi efektif antara Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan.

Komitmen Perseroan menerapkan kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen membawa hasil dengan tidak adanya insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa selama tahun 2022. [GRI 416-2]

LAYANAN PENGADUAN PELANGGAN

Dalam menjalankan usaha, Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan dengan kualitas terbaik. Walau demikian, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan akses bagi konsumen dan pemangku kepentingan yang lain apabila produk

In addition to providing clear and valid information, the Company is also committed to provide the best products and services at competitive prices to enable customers in getting the maximum satisfaction. Thus, the Company implements a Product Safety and Quality Policy that applies to all operations within the PTPN Group. Along with that, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) also ensures that the products produced have followed food quality standards and national and international certifications, such as ISO 9001: 2015 (Quality Management), ISO 22000: 2018 (Food Safety Management) for tea production unit, halal, National Agency of Drug and Food Control (BPOM), and Indonesian National Standard (SNI). Concrete policies in the field include: [GRI 416-1]

1. PTPN has conducted a Quality Assurance process by inspecting the harvest and other supporting materials when the raw materials are received. Inspection is carried out from upstream to downstream, including quality control of the final product.
2. PTPN implements SOP for Food Safety Manual in the tea unit covering the topics of food security, food fraud prevention, product and process non-conformance control and operational planning and control to meet the requirements for safe product realization.
3. PTPN ensures that food safety & quality policies are socialized, understood and implemented at all levels in the organization.
4. As one of the efforts to maintain product health and quality, PTPN has tried to write nutritional information for each downstream product on the product packaging.
5. Furthermore, PTPN also strives to maintain and monitor the use of fertilizers in every organic crop such as tea and coffee as one of the initiatives to obtain organic products that we can provide to consumers.

In line with that, the Company has also adopted policies to provide the best service including: [GRI 3-3]

1. Always on time in the delivery of goods according to the agreed contract.
2. Maintain product quality in accordance with SNI.
3. Condition of factory/mill equipment according to standard.
4. Maintain the suitability of the product ordered and received by the buyer according to the contract.
5. Realize effective communication between Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) with customers in resolving any complaints.

The Company's commitment to implementing policies to protect the health and safety of consumers has resulted in no incidents of non-compliance related to the health and safety impacts of products and services during 2022. [GRI 416-2]

CUSTOMER COMPLAINT SERVICE

In running the business, the Company is committed to providing the best quality products and services. However, as a form of responsibility towards consumers, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) provides access for consumers and other stakeholders if the products and services received do not meet expectations.



dan layanan yang diterima tidak sesuai harapan. Bagi mereka yang hendak menyampaikan keluhan dan pengaduan bisa mengakses <http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrlj> yang di dalamnya berisi formulir keluhan/pengaduan sebagai berikut:

Those who wish to submit complaints and grievances may access <http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrlj> which contains the following complaint/grievance form:

Kategori Keluhan	2022	2021	2020
Aspek produk sesuai dengan GB	0	0	0
Konsistensi informasi kemasan produk	0	0	0
Waktu layanan	0	0	0
Kualitas pelayanan	0	0	0
Kemudahan menghubungi layanan PTPN III (PERSERO) dengan Pelanggan	0	0	0

Selanjutnya, terhadap pengaduan/keluhan yang masuk, Perseroan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sekaligus mencari solusi terbaik sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kesungguhan dan komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Keamanan dan Kualitas Produk membawa hasil positif yaitu tidak ada pelaporan/pengaduan yang disampaikan kepada Perseroan. Pencapaian ini melanjutkan keberhasilan tahun sebelumnya, dan kami berkomitmen untuk mempertahankan prestasi tersebut untuk tahun-tahun berikutnya.

Furthermore, for incoming complaints/grievances, the Company is committed to immediately following up as well as finding the best solution in accordance with the applicable standard procedures. The sincerity and commitment to implement the Product Safety and Quality Policy brought positive results, namely no reports/complaints submitted to the Company. This achievement continues the success of the previous year, and the Company is committed to maintaining this achievement for the following years.

Deskripsi Description	2022	2021	2020	2019
Jumlah Keluhan/Pengaduan Terkait Keamanan/Kualitas Produk Number of Claims/ Complaints Related to Product Safety/Quality	0	0	2	1

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Untuk memastikan tingkat kepuasan konsumen, Perseroan secara periodik melakukan survei kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*). Aspek-aspek kepuasan yang diukur antara lain kemasan produk, informasi dalam kemasan produk, dan konsistensi tentang kualitas produk. Selain berkaitan dengan kepuasan terhadap kualitas produk, survei juga bertujuan untuk memperoleh informasi berikut:

To determine the level of customer satisfaction, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) periodically conducts customer satisfaction surveys (*Customer Satisfaction Index/CSI*). Product packaging, information on product packaging, and consistency in product quality are among the aspects of satisfaction measured. In addition to satisfaction with product quality, the survey also aimed to obtain the following information:

1. Produk yang ditawarkan dapat diterima dan didukung oleh pelanggan pasar;
2. Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan serta usaha dan upaya untuk menarik pelanggan baru;
3. Mengetahui keinginan/permintaan dan keluhan pelanggan

1. The products offered can be accepted and supported by market customers;
2. The efforts that the Company must make in building and managing customer relationships as well as efforts and means to attract new customers;
3. Understand the wishes/requests and complaints of customers

terhadap produk dan pelayanan produk antara lain konsistensi mutu, harga, ketepatan waktu penyediaan barang/pengiriman barang serta komunikasi;

4. Mengetahui citra perusahaan di mata pelanggan;
5. Memperbaiki kinerja perusahaan melalui identifikasi *room to Improve*;
6. Sebagai dasar dalam penyusunan dan *monitoring* rencana tindak lanjut ke depan.

Berdasarkan survei tahun 2022, tingkat kepuasan konsumen terkait aspek produk tercatat sebesar 83,1%, naik dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 81,4%. Rincian angka ini dapat ditemukan di tabel berikut:

Metrik Metric	2020	2021	2022
Kepuasan Pelanggan - Aspek Produk Customer Satisfaction – Product Aspect	81,1	81,4	83,1
Informasi di kemasan produk lengkap Complete information on product packaging	81,7	82,5	83,9
Kualitas produk konsisten Consistency in product quality	79,8	79,1	82,6
Dikemas dengan baik Good packaging	81,7	82,6	83,0

Bagi perusahaan, hasil survei tersebut yang konsisten menunjukkan kenaikan mencerminkan komitmen PTPN untuk terus menerus meningkatkan kinerja kami dalam menyajikan produk dengan standar keamanan dan kualitas tertinggi untuk pelanggan kami.

KOMITMEN KE DEPAN

GMO (*Genetically Modified Organism*) atau Produk Rekayasa Genetika (PRG) merupakan salah satu isu penting terkait produk makanan saat ini. GMO adalah makanan yang dihasilkan dari organisme yang telah diubah DNA-nya melalui rekayasa genetika. Umumnya, rekayasa dilakukan terhadap tanaman yang bisa dikonsumsi sehingga telah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan pangan .

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memahami bahwa konsumen memiliki perspektif yang beragam mengenai penggunaan GMO (*Genetically Modified Organism*). Oleh karena itu, Perseroan tidak memakai ataupun memproduksi tanaman yang dimodifikasi secara GMO di seluruh lini produksi, termasuk minyak kelapa sawit, gula, karet, teh, kopi, tebu, tembakau, dan kakao. Apabila hendak menggunakan GMO di masa depan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan proses dan pedoman dengan melabeli produk-produk tersebut secara akurat sesuai dengan standar internasional.

Selain berkaitan dengan GMO, Perseroan juga berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen dengan target bisa mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan di atas 80%, mempertahankan jumlah keluhan dan pengaduan terkait keamanan/kualitas produk di angka 0, serta meningkatkan proses seperti pelatihan dan pelaksanaan *due diligence* terkait keamanan produk, serta mendapatkan sertifikasi-sertifikas sesuai standar internasional yang relevan.

regarding products and product services, including consistency of quality, price, timeliness of provision of goods/ delivery of goods and communication;

4. Understand the Company's image in the eyes of customers;
5. Improve the Company's performance through identification of Room to Improve;
6. As a basis for preparing and monitoring future follow-up plans.

Based on the 2022 survey, the level of consumer satisfaction related to product aspects was recorded at 83.1%, increased from 81.4% in 2021. Details of this figure can be found in the following table:

The Company's consistently growing survey results indicate PTPN's commitment to continuously improve its performance in delivering products to customers with the highest safety and quality standards.

FUTURE COMMITMENT

GMO (*Genetically Modified Organism*) or Produk Rekayasa Genetika (PRG) is one of the most important issues related to food products today. GMOs are foods produced from organisms that have had their DNA altered through genetic engineering. In general, engineering is performed on plants that may be consumed, and it has become one of the possibilities to overcoming food concerns.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) understands that consumers have diverse perspectives on the use of GMO (*Genetically Modified Organism*). Therefore, the Company does not use or produce GMO modified crops in all of its production lines, including palm oil, sugar, rubber, tea, coffee, sugarcane, tobacco, and cocoa. If it were to use GMOs in the future, the Company is committed to implementing processes and guidelines by accurately labeling such products in accordance with international standards.

In addition to GMOs, the Company is also committed to improving the level of customer satisfaction with the target of maintaining customer satisfaction level above 80%, maintaining the number of complaints and grievances related to product safety/quality at 0, and improving processes such as training and implementation of *due diligence* related to product safety, as well as obtaining certifications according to relevant international standards.





26

KINERJA LINGKUNGAN

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

PTPN menyadari pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi risiko perubahan iklim terhadap bisnis operasional, sehingga Perseroan mengacu pada rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) sebagai upaya kolaboratif antara PTPN dan pemangku kepentingan

PTPN recognizes the importance of collaboration in mitigating climate change risks to business operations. The Company refers to the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) as a collaborative effort between PTPN and its stakeholders.

MENGUKUHKAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

STRENGTHENING ENVIRONMENTAL CARRYING CAPACITY INCREASE

<p>Topik Material GRI Standards 2021 Material Topics of GRI Standards 2021</p>	<p>Energi 302 Air dan Efluen 303 Keanekaragaman Hayati 304 Emisi 305 Limbah 306 Kepatuhan Lingkungan 307 Penilaian Lingkungan Pemasok 308 Energy 302 Water and Effluent 303 Biodiversity 304 Emissions 305 Waste 306 Environmental Compliance 307 Supplier Environmental Assessment 308</p>
<p>Dukungan terhadap SDGs/TPB Support for SDGs</p>	<p>TPB ke-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB ke 7 Energi Bersih dan Terjangkau TPB ke 13 Penanganan Perubahan Iklim TPB ke 15 Ekosistem Daratan SDG 6 Clean Water and Sanitation SDG 7 Affordable and Clean Energy SDG 13 Climate Action SDG 15 Life on Land</p>

Bencana alam dan kerusakan lingkungan merupakan isu faktual sekaligus pekerjaan besar bagi Indonesia. Tak sekadar menimbulkan kerugian material, bencana alam juga menyebabkan ratusan orang meninggal, puluhan orang hilang, ribuan orang luka-luka, serta jutaan orang menderita dan mengungsi. Untuk memulihkan dampak kerusakan secara fisik, seperti pembangunan infrastruktur, perkantoran, perumahan dan fasilitas-fasilitas layanan umum yang lain memerlukan dana miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Di sisi lain, pemulihan psikis dan trauma yang dialami warga juga memerlukan waktu lama, termasuk pendampingan psikologis berbilang pekan atau bulan.

Menurut data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama tahun 2022, tercatat sebanyak 3.531 bencana alam terjadi di Indonesia. Jenis bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir yaitu 1.524 kejadian atau 43,16% dari total kejadian bencana, disusul cuaca ekstrem sebanyak 1.062 kejadian (30,08%), tanah longsor 634 kejadian (17,96%), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 252 kejadian (7,14%). Adapun gempa bumi terjadi sebanyak 28 kejadian (0,79%), gelombang pasang/abrasi 26 kejadian (0,74%) dan kekeringan sebanyak 4 kejadian (0,11%).

Natural disasters and environmental damage are real challenges that Indonesia must address. Natural disasters have not only caused material losses, but also hundreds of deaths, dozens of people missing, thousands of people injured, and millions of people suffering and displaced. To mitigate the effects of physical damage, such as the development of infrastructure, offices, housing, and other public service facilities, billions and trillions of rupiahs in materials are required. On the other hand, psychological recovery and trauma experienced by residents also requires a long time, including psychological care for several weeks or months.

According to data released by the National Disaster Management Agency (BNPB), during 2022, a total of 3,531 natural disasters were recorded in Indonesia. The most frequent types of disasters were floods with 1,524 incidents or 43.16% of the total disaster events, followed by extreme weather with 1,062 incidents (30.08%), landslides with 634 incidents (17.96%), forest and land fires (karhutla) as many as 252 incidents (7.14%). There were 28 earthquakes (0.79%), 26 tidal waves/abrasion (0.74%) and 4 droughts (0.11%).



Sumber | Sources: <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2022>

Merujuk data di atas, sebagian besar bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Kalangan ahli menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi disebabkan oleh perubahan iklim yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia, seperti alih fungsi tak yang tak sesuai dengan peruntukan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, masih belum terkendalinya penebangan hutan sebagai paru-paru dunia, semakin derasnya industrialisasi yang memicu peningkatan emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Oleh karena penyebabnya sudah dipetakan, maka menjadi tanggung jawab bersama segenap pemangku kepentingan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan dengan memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terlanjur terjadi.

Sebagai bagian dari perusahaan publik di Tanah Air, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri berkomitmen untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan daya dukung lingkungan untuk menopang terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memegang komitmen tersebut karena meyakini bahwa lingkungan yang baik merupakan hak bagi setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28h Ayat 1, UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". [GRI 3-3]

Referring to the data above, most of the disasters that occur are hydrometeorological disasters, namely disasters caused by meteorological parameters, such as rainfall, humidity, temperature, and wind. Experts say that hydrometeorological disasters are caused by climate change which is triggered by various human activities, such as the transfer of functions that are not in accordance with the designation, excessive exploitation of natural resources, uncontrolled logging of forests as the lungs of the world, increasingly rapid industrialization which triggers increase in greenhouse gas emissions and so on. Because the causes have been mapped, it is the shared responsibility of all stakeholders to prevent and minimize the hydrometeorological disaster. Among the efforts that can be made are preserving the environment, as well as strengthening the carrying capacity of the environment by repairing environmental damage that has already occurred.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), a public company in the country engaged in agribusiness and agro-industry, is committed to participating in environmental preservation while also encouraging an increase in the carrying capacity of the environment to support the realization of sustainable development. This commitment is maintained by the Company because it believes that a good environment is a right for everyone, as stated in Article 28h, paragraph 1 of the 1945 Constitution, "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, to have a good and healthy environment, and to obtain health services." [GRI 3-3]

Dalam konteks pemeliharaan lingkungan dan peningkatan daya dukung lingkungan, pelaku usaha dan korporasi merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dituntut untuk turut berkontribusi. Terlebih lagi jika dalam operasional usahanya, korporasi tersebut memberikan dampak secara langsung bagi lingkungan, termasuk mengubah bentang alam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kontribusi tersebut perlu disinergikan dengan pemangku kepentingan yang lain, terutama pemerintah dan masyarakat.

Komitmen dan Landasan Kebijakan Terkait Lingkungan

Dukungan dan komitmen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terhadap kelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan berpedoman pada berbagai regulasi di antaranya : [GRI 3-3]

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), yang diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Selain berbagai regulasi tersebut di atas, Perusahaan juga mengadopsi berbagai sertifikasi sebagai komitmen untuk melaksanakan usaha berkelanjutan. Sertifikasi nasional dan internasional yang diadopsi antara lain:

1. RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) memberikan keyakinan bahwa produk sawit dan turunannya merupakan produk yang berkelanjutan.
2. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) merupakan sertifikasi *mandatory* dan mampu meningkatkan daya saing produk sebagai produk ramah lingkungan, pengurangan karbon (decarbonization) dan perhatian produsen pada isu-isu lingkungan lain.
3. ISO 9001 (*Quality Management System*) merupakan upaya Perusahaan dalam menjamin kualitas dan mutu produk untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
4. ISO 14001 (*Environmental Management System*) memberikan manfaat pada aspek lingkungan seperti mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul karena kegiatan Perusahaan..
5. ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) merupakan sertifikasi untuk biomassa dan bioenergi.
6. Rainforest Alliance merupakan sertifikasi untuk keberlanjutan produksi dengan melihat aspek masyarakat sekitar hutan, petani, pasar komoditas, untuk keberlanjutan usaha.
7. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam

Business actors and companies are among the stakeholders who are obligated to contribute to the environment's preservation and strengthening of carrying capacity. Moreover, if a company's business operations have a direct impact on the environment, such as altering the landscape. To achieve the best results, these contributions need to be synergized with other stakeholders, particularly the government and the community.

Commitment and Basis of Policy Related to the Environment

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)'s support and commitment to sustainability and strengthening of environmental carrying capacity are guided by the following regulations: [GRI 3-3]

1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Law No. 32/2009), which was amended by Law No. 11 of 2021 concerning Job Creation
2. Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2014 concerning Industry
3. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
6. Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Water Pollution Control;
7. Decree of the State Minister of the Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines for Terms and Procedures for Licensing and Guidelines for the Study of Disposal of Wastewater into Water or Water Sources;
8. Regulation of the State Minister of the Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Management.

In addition to the various regulations mentioned above, the Company has also adopted various certifications as a commitment to conduct a sustainable business. National and international certifications adopted include

1. RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) provides confidence that palm products and their derivatives are sustainable products;
2. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) is a mandatory certification and is able to increase product competitiveness as environmentally friendly products, reduce carbon (decarbonization) and producers' attention to other environmental issues;
3. ISO 9001 (*Quality Management System*) is the Company's efforts to ensure product quality to maintain customer trust;
4. ISO 14001 (*Environmental Management System*) provides benefits on environmental aspects such as overcoming environmental risks that may arise due to the Company's activities;
5. ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) is a certification for biomass and bioenergy;
6. Rainforest Alliance is a certification for sustainable production by looking at aspects of communities surrounding the forest, farmers, commodity markets, for business sustainability.
7. PROPER (Company Performance Rating Assessment Program



Pengelolaan Lingkungan Hidup) yaitu program pengawasan terhadap industri yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.

Seiring dengan implementasi berbagai regulasi di atas, komitmen terhadap lingkungan juga diwujudkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan menerapkan operasional kantor yang ramah lingkungan. Langkah nyata yang dilakukan antara lain melakukan pengelolaan energi, emisi, air, air limbah, dan berbagai jenis limbah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*). [GRI 3-3]

Komitmen Perseroan terhadap Penanganan Perubahan Iklim

Perubahan iklim—didefinisikan sebagai perubahan yang signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan—merupakan salah satu masalah global yang paling besar dan paling menyita perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan juga oleh berbagai kegiatan manusia seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, adanya limbah dari kegiatan industri, dan lain-lain.

Penanganan perubahan iklim perlu menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya mempengaruhi berbagai industri dan sektor bisnis, termasuk agribisnis yang dijalani oleh PTPN. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI telah mengungkapkan bahwa akibat perubahan iklim, sektor perkebunan di Indonesia mulai merasakan dampaknya. Hal ini ditunjukkan melalui indikator perubahan iklim, seperti suhu yang terlalu panas, berkurangnya ketersediaan air, dan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca—di mana hal-hal tersebut dapat merusak lahan perkebunan, apalagi dapat menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya baik-baik saja.

PTPN menyadari pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi risiko perubahan iklim terhadap bisnis operasional, sehingga Perseroan mengacu pada rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD) sebagai upaya kolaboratif antara PTPN dan pemangku kepentingan. PTPN telah melakukan analisis risiko khusus yang dapat timbul dari perubahan iklim terhadap PTPN, yaitu:[GRI 3-3]

in Environmental Management) is an industrial monitoring program conducted by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia with the purpose of encouraging industrial compliance with environmental regulations.

Along with the implementation of the various regulations above, a commitment to environmental sustainability is also implemented by Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) through environmentally friendly office operations. The concrete steps taken include making efficient use of energy while reducing emissions water, managing hazardous (B3) and non-hazardous (non-B3) waste, both solid and liquid etc. according to the 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*) principle. [GRI 3-3]

The Company's Commitment to the Handling of Climate Change

Climate change, defined as significant changes in climate, air temperature, and rainfall, has emerged as one of the most serious and pressing global issues in recent decades. Climate change can be produced by rising concentrations of carbon dioxide and other gases in the atmosphere, which cause the greenhouse gas effect. The increase in greenhouse gas concentrations is also induced by various human activities such as fossil fuel emissions, changes in land use, industrial waste, etc.

The handling of climate change needs to be a shared responsibility since its impact affects various industries and business sectors, including the agribusiness that is being undertaken by PTPN. The Directorate General of Plantations of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia has revealed that due to climate change, the plantation sector in Indonesia is starting to feel the effects. This is demonstrated by indicators of climate change, such as excessively hot temperatures, reduced water availability, and natural disasters caused by changes in weather - where these things can damage plantations, as well as cause changes in planting and harvesting seasons or the emergence of pests and disease outbreaks in plants that were previously healthy.

Since the Company recognizes the importance of collaboration in addressing climate change risks to operational business, the Company refers to the *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD) recommendations as a collaborative effort between PTPN and stakeholders. PTPN has conducted a specific risk analysis that may result from climate change, namely: [GRI 3-3]

Uraian Description	Risiko Transisi Transition Risk	Risiko Fisik Physical Risk
Definis Definition	<p>Risiko yang dapat menimbulkan risiko finansial dan reputasi bagi Perseroan terkait perubahan kebijakan, hukum, teknologi, dan pasar yang mungkin terjadi dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Legal; 2. Teknologi; 3. Pasar; 4. Reputasi. <p>Risks related to changes in policy, law, technology, and markets that may occur in the transition to a low-carbon economy that may pose financial and reputational risks to the Company.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Policy and Law; 2. Technology; 3. Market; 4. Reputation. 	<p>Risiko terkait dampak fisik perubahan iklim yang dapat dipicu oleh peristiwa temporal (akut) atau perubahan jangka panjang (kronis).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akut; 2. Kronis. <p>Risks related to the physical impacts of climate change that can be triggered by temporal (acute) events or long-term (chronic) changes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acute; 2. Chronic.

ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO IKLIM

Untuk mengidentifikasi risiko iklim fisik dan peluang yang relevan dengan PTPN, Perseroan telah meninjau model risiko iklim di berbagai skenario dari International Panel for Climate Change (“IPCC”) serta literatur terperinci tentang implikasi perubahan iklim terhadap operasional perusahaan. Untuk risiko dan peluang transisi, Perseroan memantau perkembangan pada tingkat nasional dan internasional terkait topik mitigasi perubahan iklim. Dalam beberapa skenario perubahan iklim yang berbeda (seperti skenario *Business-as-usual*, 1.5°C etc), PTPN juga telah mengidentifikasi potensi implikasi pada lingkungan bisnis yang dijalankan perusahaan. Tabel di bawah ini memberikan rangkuman mengenai potensi dampak dari risiko iklim terhadap PTPN: [\[GRI 201-2\]](#)

CLIMATE RISK ANALYSIS AND MITIGATION

To identify physical climate risks and opportunities relevant to PTPN, the Company analyzed climate risk models from the International Panel on Climate Change (“IPCC”) across multiple scenarios, as well as thorough literature on the effects of climate change on the Company’s activities. For transitional risks and opportunities, the Company examined developments at the national and international levels regarding the topic of climate change mitigation. PTPN has identified potential consequences for the Company’s business environment under several alternative climate change scenarios (such as the Business-as-Usual scenario, 1.5°C, etc). The table below summarizes the potential impacts of climate risk on the Company: [\[GRI 201-2\]](#)

Uraian Description	Risiko Transisi Transition Risk	Risiko Fisik Physical Risk
Dampak potensial Potential impact	<p>Bergantung pada sifat transisi dan khususnya pada kecepatan transisi. Selain itu terdapat berbagai tingkat risiko keuangan dan reputasi, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan berkurang karena permintaan dan preferensi konsumen berubah; 2. Peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis; 3. Dampak pada nilai aset; 4. Keuangan aset berwujud dan tidak berwujud. <p>This depends on the nature and, in particular, the speed of the transition. In addition, there are varying degrees of financial and reputational risk, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Decline in revenue as consumer demand and preferences change; 2. Increase in costs of running a business; 3. Impact on asset value; 4. Obsolescence of tangible and intangible assets. 	<p>Kerusakan langsung pada aset Dampak tidak langsung termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi, misalnya cuaca ekstrem memengaruhi produksi, rantai pasokan, kesehatan, dan keselamatan; 2. Rantai nilai, misalnya ketersediaan air memengaruhi sumber dan kualitas bahan baku. <p>Direct damage to assets Indirect impacts include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operations, for example extreme weather affecting production, supply chain, health and safety; 2. Value chain, such as water availability which affects the source and quality of raw materials
Waktu Timing	<p>Waktu dan kecepatan tidak pasti dan lebih mungkin dalam jangka pendek hingga menengah.</p> <p>Timing and pace are uncertain and more likely in the short to medium term.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko akut sudah terjadi saat ini dan diperkirakan tingkat keparahan dan frekuensinya akan meningkat; 2. Risiko kronis lebih mungkin terjadi dalam jangka panjang, dalam pertengahan abad dan seterusnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Acute risks are already present and are expected to increase in severity and frequency; 2. Chronic risk increases in the long term, in the mid-century and beyond.



Untuk setiap potensi risiko dan peluang yang telah diidentifikasi PTPN di atas, Perusahaan telah menilai dampak potensial dalam beberapa jangka waktu, yaitu:

1. Pendek: 0 – 3 tahun
2. Sedang: 3 – 5 tahun
3. Lama: >5 tahun

PTPN juga telah mengidentifikasi beberapa tindakan dan strategi untuk memastikan ketahanan bisnis perusahaan. PTPN akan memantau secara ketat penerapan dan memberikan pembaruan secara berkala kepada para pemangku kepentingan tentang risiko baru yang potensial terjadi. Hal-hal ini telah dituangkan oleh PTPN pada tabel di bawah ini:

For each potential risk and opportunity that PTPN has identified above, the Company has assessed the potential impact over several timeframes, namely:

1. Short: 0 – 3 years
2. Medium: 3 – 5 years
3. Long: >5 years

PTPN has also outlined a number of initiatives and plans to ensure the Company's long-term viability. PTPN will constantly monitor implementation and provide regular information to stakeholders on any risks that may arise. PTPN has summarized these issues in the table below:

Risiko Risk	Uraian Description	Jangka Waktu Time Period	Dampak Finansial Financial Impact	Aksi Mitigasi Mitigation Actions
Risiko Fisik: Kronis Perubahan Pola Cuaca Physical Risk: Chronic Changes in Weather Pattern	Risiko yang berdampak pada kualitas hasil panen diakibatkan oleh perubahan pola cuaca. Risks caused by changes in weather patterns that affect the quality of crop yields.	Pendek ke Menengah Short to Medium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan pendapatan akibat penurunan kapasitas produksi 2. Meningkatnya harga pokok penjualan akibat kelangkaan bahan baku <ol style="list-style-type: none"> 1. Decline in revenue due to a decrease in production capacity; 2. Increased cost of goods sold due to scarcity of raw materials. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rorak atau embung untuk menjaga persediaan air bagi tanaman sawit; 2. Melakukan manajemen air pada lahan tebu untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. <ol style="list-style-type: none"> 1. Creation of reservoirs to maintain water supplies for oil palms; 2. Conduct water management on sugarcane fields to maintain water availability throughout the year.
Risiko Fisik: Kronis Kenaikan Suhu Physical Risk: Chronic Temperature Rise	Risiko yang berdampak pada produktivitas tanaman, menyebabkan perubahan masa tanam dan panen, ataupun menyebabkan munculnya hama atau penyakit pada tanaman. Risks that impact crop productivity, cause changes in planting and harvesting periods, or cause pests or diseases to arise in plants.	Menengah ke Panjang Medium to Long	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan pendapatan akibat penurunan kapasitas produksi <p>Decline in revenue due to a decrease in production capacity.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengendalian hama terpadu dengan membuat program penanaman tanaman bunga pukul delapan (Turnera subulate) dan bunga air mata pengantin (Antigonon leptopus); 2. Melakukan pengamatan terhadap potensi ledakan populasi hama; 3. Pada tanaman karet, melakukan penggalan produksi sesuai dengan norma (penyadapan tanaman karet) apabila penyadapan dilakukan dengan penyadapan berat (dalam) maka akan menyebabkan munculnya hama penyakit kekeringan alur sadap (mouldy root). <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry out integrated pest control by establishing a program for planting white buttercup flowers (Turnera subulata) and coral vines (Antigonon leptopus); 2. Observing for and predicting of pest population explosions; 3. In rubber plants, extracting production in accordance with the norm (tapping rubber plants). Heavy/deep tapping may cause the emergence of drought pests and mouldy roots.
Risiko Fisik: Akut Cuaca Ekstrem Physical Risk: Acute Extreme Weather	Risiko yang berdampak pada fasilitas atau kegiatan operasional akibat cuaca ekstrem seperti banjir, angin topan, atau badai Risks impacting building facilities or operations due to extreme weather such as floods, hurricanes, or storms.	Pendek ke Menengah Short to Medium	<p>Meningkatnya biaya operasional tidak langsung karena kebutuhan mengasuransikan aset perusahaan dari dampak cuaca ekstrem</p> <p>Increased indirect operational costs due to the need to insure company assets from the effects of extreme Weather.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan simulasi tanggap darurat bencana alam; 2. Membentuk tim tanggap darurat; 3. Memastikan personel tim tanggap darurat mengikuti pelatihan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting emergency response simulations for natural disasters; 2. Forming an emergency response team; 3. Mandatory training for emergency response team personnel.

Risiko Risk	Uraian Description	Jangka Waktu Time Period	Dampak Finansial Financial Impact	Aksi Mitigasi Mitigation Actions
Risiko Transisi: Perubahan Regulasi Transition Risk: Regulatory Changes	Sebagai hasil dari COP26 dan peningkatan perhatian terhadap iklim secara global, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru untuk aksi iklim As a result of the COP26 and increased attention to climate globally, governments are issuing new policies and regulations for climate action.	Pendek Short	Meningkatnya biaya operasional karena biaya pajak yang lebih tinggi terkait dengan penggunaan energi tidak terbarukan Increased operating costs due to higher tax costs associated with using non-renewable energy	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan program penurunan emisi GRK (pengurangan solar, penghematan listrik, melakukan <i>selective weeding</i>, melakukan penanaman tanaman konservasi); Melakukan substitusi pupuk kimia dengan organik (tandan kosong); Melakukan program pembangunan Biogas pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Conducting GHG emission reduction programs (reducing diesel fuel, saving electricity, conducting selective weeding, planting conservation plants); Substituting chemical fertilizers with organic (empty bunches); Conducting a Biogas development program in palm oil mill.
Risiko Transisi: Peningkatan Persyaratan Pelanggan Transition Risk: Higher Customer Expectations	Risiko yang timbul akibat adanya perubahan preferensi pelanggan ke arah produk rendah emisi Risks arising from changes in customer preferences towards low-emission products.	Pendek Short	Berkurangnya pendapatan akibat penurunan permintaan barang/jasa Decline in revenue due to decreased demand for goods/services.	Melakukan perhitungan emisi GRK melalui sertifikasi RSPO, ISPO, ISCC Perform GHG emission calculations through RSPO, ISPO, ISCC certifications.
Risiko Transisi: Reputasi Transition Risk: Reputation	Risiko yang antara lain disebabkan oleh publikasi negatif atas kegiatan usaha Perusahaan perihal kepatuhan terhadap regulasi perubahan iklim Risks caused by, among other things, negative publication of the Company's business activities with regards to compliance with climate change regulations.	Pendek Short	Meningkatnya biaya operasional tidak langsung untuk menyelesaikan kasus hukum atau publikasi negatif Increased indirect operational costs to resolve legal cases or negative publicity.	Mengimplementasikan seluruh persyaratan prinsip dan kriteria RSPO, ISPO, dan ISCC untuk mengurangi isu negatif terkait dengan perubahan iklim. Implement requirements of the principles and criteria of RSPO, ISPO, and ISCC to mitigate negative issues related to climate change.

Selain memantau secara ketat, ke depan, PTPN juga akan melakukan analisis kuantitatif yang lebih rinci tentang dampak perubahan iklim di seluruh bisnis perusahaan, melakukan prioritas dari aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan serta memperinci kegiatan yang dapat mendukung aksi mitigasi tersebut.

PTPN juga berkomitmen untuk ikut berkontribusi terhadap penurunan GRK, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pemantauan dan perhitungan sumber emisi yang dihasilkan, dan pemilihan penggunaan bahan yang memiliki emisi paling kecil dalam proses bisnis perusahaan yang dapat dilihat lebih lanjut pada bagian Emisi GRK dan Energi dari *Sustainability Report* ini.

TATA KELOLA STRATEGI IKLIM PTPN GROUP

Dewan Direksi PTPN bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aspek kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (“ESG”) Perusahaan. Hal ini termasuk topik risiko iklim yang telah diidentifikasi oleh PTPN sebagai salah satu topik paling kritis yang dihadapi perusahaan. Sebagai bagian dari tanggung jawab Dewan Direksi, Perusahaan juga telah menetapkan tujuan dan menyetujui strategi manajemen untuk mengurangi dampak risiko iklim serta mengurangi emisi dari operasi bisnis PTPN. Saat ini PTPN telah memiliki prosedur dan langkah-langkah untuk mengelola terjadi

Aside from closely monitoring, PTPN will conduct a more detailed quantitative analysis of the impact of climate change on all of the Company's businesses in the future, prioritize mitigation actions that the Company can carry out, and detail activities that can support these mitigation actions.

The Company is also committed to reducing GHG emissions, increasing energy efficiency, using renewable energy, monitoring and calculating the sources of emissions produced, and using materials with the lowest emissions in the Company's business processes, as detailed in the GHG and Energy Emissions section of this Sustainability Report.

GOVERNANCE OF PTPN GROUP'S CLIMATE STRATEGY

The Company's Board of Directors is responsible for overseeing all aspects of the Company's Environmental, Social and Governance (“ESG”) performance. This includes the topic of climate risk which has been identified by PTPN as one of the most critical topics faced by the Company. As part of the responsibility of the Board of Directors, the Company has also set goals and approved management strategies to reduce the impact of climate risk and reduce emissions from PTPN's business operations. Currently PTPN has procedures to manage weather changes or extreme



perubahan cuaca atau dampak lingkungan yang ekstrim, untuk menjamin, mengantisipasi dan memitigasi risiko akibat kejadian keadaan darurat serta dampak lingkungan untuk terlaksananya pencegahan, penanganan/penanggulangan, pemulihan keadaan darurat yang dapat terkoordinir dengan baik.

Direktur Program ESG PTPN bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi strategi grup dan melaporkan kepada Dewan Direksi PTPN mengenai kemajuan implementasi strategi risiko iklim PTPN. Untuk mendukung pelaksanaannya, Perusahaan telah membentuk Tim ESG yang melakukan pertemuan secara teratur untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan strategi iklim PTPN.

PENGUNAAN ENERGI DAN ENERGI BARU TERBARUKAN [GRI 302]

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menggunakan dua jenis energi utama, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Perusahaan memanfaatkan energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengoperasikan mesin pabrik, penerangan pabrik dan kantor, menyalakan berbagai sarana dan prasarana kerja, seperti mesin AC, fotokopi dan lain-lain. Sedangkan BBM jenis bensin dan solar digunakan untuk operasional mesin pabrik dan kendaraan operasional. [GRI 3-3]

Untuk kebutuhan energi listrik, selain mendapatkan pasokan dari PT PLN (Persero), Perusahaan memanfaatkan energi listrik dari dari Pembangkit Listrik Biogas (PLTBg), dan Pembangkit Listrik Biomass (PLTBm) yang membangkitkan listrik dari ef uen biogas atau biomassa dari proses operasional lapangan yaitu: [GRI 3-3]

1. PLTBg Sei Mangkei (2.4 MW);
2. PLTBg Kwala Sawit (1 MW);
3. PLTBg Hapesong (1 MW);
4. PLTBg Terantam (0.7 MW);
5. PLTBg Tandun (1.6 MW);
6. PLTBg Pagar Merbau (1 MW);
7. PLTBg Gempolkerep (2.05 MW);
8. PLTBm Rambutan (2.2 MW);
9. PLTBm Sei Mangkei (7 MW).
10. Selain itu, produk hasil pengolahan tebu adalah gula dan tetes, dimana tetes diolah oleh ENERO (Anper PTPNX) menjadi Ethanol, CO2 dan Vinase (dari limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan molases menjadi fuel grade ethanol). Vinase dapat diolah menjadi pupuk serta sumber listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)

Selain listrik dari biogas dan biomassa, Perusahaan juga menggunakan listrik terbarukan dari tenaga air seperti dari PLTA Cilaki (2,3 MW); PLTA Cijambe (0,84 MW); PLTA Gunung Tua (1,85 MW); PLTA Bah Bolon (2,5 MW) , maupun pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada kebun-kebun yang memiliki potensi debit dan ketinggian air yang cukup.

environmental impacts, to ensure, anticipate and mitigate risks due to emergency events and environmental impacts for the implementation of prevention, handling/remediation, and proper recovery from emergencies situation.

The Company's Director of ESG Program is responsible for overseeing the implementation of the group's strategy and reporting to the Company's Board of Directors on the progress of PTPN's climate risk strategy implementation. To support its implementation, the Company has formed ESG Team, which meets on a regular basis to assist the management in implementing PTPN's climate strategy.

USE OF ENERGY AND NEW RENEWABLE ENERGY [GRI 302]

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) relies on two major sources of energy: electricity and fuel oil (BBM). The Company uses energy for a variety of functions, including operating factory machinery, lighting in the factory and office, and powering numerous work facilities and infrastructure, such as air conditioning units and photocopying machines. Meanwhile, gasoline and diesel fuel are utilized to power industry machines and operational vehicles. [GRI 3-3]

In addition to obtaining supplies from PT PLN (Persero), the Company utilizes electrical energy from Biogas Power Plant (PLTBg) and Biomass Power Plant (PLTBm), both of which generate electricity from biogas or biomass effluents from field operational processes, namely: [GRI 3-3]

1. Sei Mangkei Biogas Power Plant (2.4 MW);
2. Kwala Sawit Biogas Power Plant (1 MW);
3. Hapesong Biogas Power Plant (1 MW);
4. Terantam Biogas Power Plant (0.7 MW);
5. Tandun Biomass Power Plant (1.6 MW);
6. Pagar Merbau Biogas Power Plant (1 MW);
7. Gempolkerep Biogas Power Plant (2.05 MW);
8. Rambutan Biomass Power Plant (2.2 MW);
9. Sei Mangkei Biomass Power Plant (7 MW).
10. Furthermore, the byproducts of sugarcane processing include sugar and molasses, with molasses being processed by ENERO (PTPN X's Subsidiary) into Ethanol, CO2, and Vinase (from liquid waste formed during the molasses processing into fuel grade ethanol). Vinase can be converted into fertilizer and used to power the Biogas Power Plant (PLTBg).\

In addition to electricity from biogas and biomass, the Company also uses renewable electricity from hydropower such as from Cilaki Hydroelectric Power Plant (2.3 MW); Cijambe Hydroelectric Power Plant (0.84 MW); Gunung Tua Hydroelectric Power Plant (1.85 MW); Bah Bolon Hydroelectric Power Plant (2.5 MW), as well as the construction of Microhydro Power Plant (PLTMH) in plantations with adequate water debit and height potential.

Pemanfaatan energi baru terbarukan dari biogas, biomass, dan tenaga air tersebut telah menyumbang kebutuhan energi Perusahaan sebesar 78%, sedangkan selebihnya dipenuhi oleh penggunaan listrik oleh PLN dan genset, serta penggunaan bensin dan solar. Selama tiga tahun terakhir, tren penggunaan energi baru terbarukan di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) meningkat dibanding tahun 2021. Hal itu menunjukkan bahwa Perusahaan telah berkomitmen dan melakukan implementasi untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam operasionalnya.

The utilization of renewable energy from biogas, biomass, and hydropower has contributed 78% of the Company's energy needs, while the rest is met by the use of electricity by PLN and generators, as well as the use of gasoline and diesel fuel. Over the past three years, the trend of using renewable energy in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has increased compared to 2021. This shows that the Company has committed and implemented to increase the use of renewable energy in its operations.

Peta Sebaran Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Tahun 2022
Distribution Map of Renewable Energy Utilization in 2022



Tabel Unit Energi Baru Terbarukan (EBT) PTPN Grup Tahun 2020-2022
Table of New Renewable Energy (EBT) Units of PTPN Group in 2020-2022

Unit EBT EBT Unit	2022		2021		2020	
	Jumlah Total	Kapasitas Capacity	Jumlah Total	Kapasitas Capacity	Jumlah Total	Kapasitas Capacity
PLTBg & Co Firing Biogas Power Plant & Co Firing	9 Unit	11,35 MW	9 Unit	11,35 MW	9 Unit	11,35 MW
PLTBm Biomass Power Plant	2 Unit	9,2 MW	2 Unit	9,2 MW	2 Unit	9,2 MW
PLTA Hydroelectric Power Plant	10 Unit	17,14 MW	10 Unit	17,14 MW	10 Unit	17,14 MW
Pembangkit Listrik PKS Palm Oil Plantation Power Plant	75 Unit	80 MW	75 Unit	80 MW	75 Unit	80 MW
Pembangkit Listrik PG Sugar Mill Power Plant	31 Unit	198 MW	31 Unit	198 MW	31 Unit	198 MW



Tabel penggunaan energi PTPN Group 2020-2022
Table of Use of Energy of PTPN Group in 2020-2022

Penggunaan Energi Terbarukan PTPN Group 2020-2022 Use of Renewable Energy of PTPN Group in 2020-2022			
Item (dalam GJ) Item (GJ)	2022	2021	2020
Biomass	1.701.214	1.650.100	1.601.074
Biogas	28.539	35.549	18.822
Solar (Matahari) Solar (Sun)	-	-	-
PLTA Hydroelectric Power Plant	2.188	9.557	7.668
Penggunaan Energi Non Terbarukan PTPN Group 2020-2022 Use of Non-Renewable Energy of PTPN Group in 2020-2022			
Listrik Electricity	230.932	233.136	157.386
Bensin Gasoline	12.935	6.317	7.549
Solar Diesel Fuel	217.313	233.157	244.113
Genset Generator	40.034	21.509	21.650
Total Energi Terbarukan	1.731.941	1.695.206	1.627.565
Total Energi Non-Terbarukan	501.214	494.119	430.698
Total Energi (2022)	2.233.155	2.189.325	2.058.263
Total % Penggunaan Energi Terbarukan PTPN Group Total Use of Renewable Energy of PTPN Group (%)	78%	77%	79%

Pengukuran energi di PTPN dilakukan berdasarkan tahun dasar 2021 dengan metodologi pengambilan energi melalui mesin ataupun alat pengukur sebagai berikut:

1. Biomass: meteran kWh dari turbin pembangkit/PLTBm (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
2. PLTBG: Berdasarkan kWh meter dari generator (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
3. BioCNG: Memiliki flow meter untuk kWh (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
4. Micro-Hydro: Diperoleh dari angka kWh meter (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
5. Listrik PLN: Diukur dari flow meter listrik yang digunakan pada operasional (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)
6. Bensin: Penggunaan bensin dalam liter yang diperoleh dari data struk pembelian bensin (faktor konversi: 40.19 GJ/Kiloliter)
7. Solar: Penggunaan bensin dalam liter yang diperoleh dari data struk pembelian Solar (faktor konversi: 40.19 GJ/Kiloliter)
8. Genset: Diperoleh dari angka kWh meter (faktor konversi: 277,8 GJ/kWh)

The methodology on energy measurements at PTPN are carried out based on the 2021 base year with the energy methodology through machines or measuring tools as follows:

1. Biomass: kWh meter from generator turbine/PLTBm (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
2. PLTBG: Based on kWh meter of generator (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
3. BioCNG: Has a flow meter for kWh (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
4. Micro-Hydro: Derived from the kWh meter figure (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
5. PLN electricity: Measured from the electricity flow meter used in operations (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)
6. Gasoline: Gasoline usage in liters obtained from gasoline purchase receipt data (conversion factor: 40.19 GJ/Kiloliter)
7. Diesel: Gasoline usage in liters obtained from Diesel purchase receipt data (conversion factor: 40.19 GJ/Kiloliter)
8. Genset: Obtained from the kWh meter figure (conversion factor: 277.8 GJ/kWh)

Perhitungan spesifik diselesaikan masing-masing pada penggunaan energi IPCC metodologi akuntansi yang disediakan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Pedoman IPCC 2006 tentang Perubahan Iklim untuk inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang terdapat referensi pada perhitungan tertentu, seperti nilai kalor bersih bahan bakar (NCV), kandungan karbon energy bahan bakar, factor emisi transportasi dan lain-lain.

Walaupun Perusahaan mampu memproduksi sebagian listriknya sendiri, dan sebagian lagi dipasok oleh PLN, upaya efisiensi penggunaan listrik tetap menjadi salah satu prioritas. Terlebih lagi, sekitar 62% listrik yang diproduksi PLN masih memanfaatkan batu bara yang ketersediaannya kian terbatas sebagai sumber pembangkit. Selain listrik, efisiensi juga dilakukan dalam penggunaan BBM, terlebih lagi jenis energi ini merupakan sumber energi tak terbarukan. Langkah efisiensi penggunaan listrik dan BBM sekaligus merupakan upaya Perusahaan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Kebijakan efisiensi listrik dan BBM selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Selain memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, Perusahaan berupaya untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi sebagai berikut [GRI 302-4]

1. Menggunakan peralatan elektronik hemat energi, menggunakan lampu dan piranti elektronik secara efisien dan bertanggung jawab.
2. *Operational Excellence* -
 - a. Mengubah penggunaan solar sebagai bahan bakar burner menjadi cangkang sebagai bahan bakar *Thermal Oil Heater (TOH)* sebagai penghasil energi panas untuk mesin dryer di pabrik karet
 - b. Optimalisasi kapasitas dan peningkatan teknologi untuk penghematan energi di pabrik gula misalnya penggantian teknologi continuous vacuum pan dari dex vacuum pan yang tidak continuous



- c. Penggantian teknologi *multi jet condenser* yang sebelumnya barometric sehingga kebutuhan air lebih kecil.

Specific calculations completed respectively on the IPCC energy use accounting methodology provided by the Intergovernmental Panel on the 2006 IPCC Guidelines on Climate Change for National Greenhouse Gas inventories contained reference to specific calculations, such as net calorific value of fuel (NCV), carbon content fuel energy, transportation emission factors and others.

Despite the fact that the Company can generate some of its own electricity and that some is supplied by PLN, energy efficiency remains a top priority. Furthermore, around 62% of PLN's power is still generated using coal, which is becoming increasingly scarce as a source of generation. In addition to electricity, efficiency is achieved through the utilization of fuel, which is a non-renewable energy source. Electricity and fuel efficiency are also part of the Company's efforts to reduce greenhouse gas emissions. Electricity and fuel efficiency policy is in line with the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Saving, as well as the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Electricity Saving.

In addition to maximizing the use of renewable energy, the Company strives to take steps to improve efficiency as follows [GRI 302-4]

1. Using energy-efficient electronic equipment, using lights and electronic devices efficiently and responsibly.
2. *Operational Excellence* -
 - a. Switching from diesel as burner fuel to shells as *Thermal Oil Heater (TOH)* fuel to generate heat energy for the dryer in rubber mill.
 - b. Capacity optimization and technology upgrades for energy savings in the sugar mill, such as replacing dex vacuum pan technology with continuous vacuum pan technology.

- c. Replacement of the prior barometric multi jet condenser technology, resulting in a lower water requirement.



d. Penggantian penggerak uap menjadi *electromotor* untuk mengurangi konsumsi energi

d. To reduce energy use, steam drivers are being replaced with electromotors.



e. Penggantian *direct contact heater* yang sebelumnya proses tidak dipanaskan secara manual

e. Replacement of a direct contact heater that was previously unheated manually



f. Meningkatkan pemulihan energi dan efisiensi melalui inisiatif-inisiatif seperti *steam condensate and waste heat recovery; steam residual pressure power generation*; menggantikan boiler, kompresor, dan motor yang tidak efisien; dan meningkatkan insulas

f. Improve energy recovery and efficiency by implementing programs including steam condensate and waste heat recovery, steam residual pressure power generation, replacing inefficient boilers, compressors, and motors, and improve insulation.

Melalui berbagai upaya efisiensi tersebut, per 31 Desember 2022, Perusahaan menggunakan total energi sebanyak 2.233.155 Gigajoule (GJ), turun dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 2.189.325 GJ. Penurunan disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti penggunaan biomass yang

Through these various efficiency efforts, as of December 31, 2022, the Company used a total of 2,233,155 Gigajoules (GJ) of energy, a decline compared to 2021, which amounted to 2,189,325 GJ. The decline was due to an increase in the use of renewable energy such as the use of biomass utilizing shells, palm ber, or wood

memanfaatkan cangkang, serat kelapa sawit, ataupun *wood pellet*, biogas dan PLTA. Dari penggunaan energi sejumlah itu, sumber energi terbarukan yang diproduksi secara mandiri oleh Perusahaan tercatat sebesar 1.731.941 GJ. [GRI 302-1]

Adapun volume penggunaan BBM per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 6.066,70 kiloliter atau 243.867 GJ, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5957,44 kiloliter atau 239.475 GJ. Kenaikan antara lain dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar untuk pengangkutan yang semakin besar sesuai dengan bertambahnya produksi bahan baku. Kedepannya, PTPN memiliki inisiatif untuk mengganti beberapa mesin solar dengan listrik untuk menekan penggunaan BBM. [GRI 302-1]

Dengan pemakaian energi sejumlah tersebut, PTPN juga menghitung intensitas energi berdasarkan jumlah produk akhir, yaitu: [GRI 302-3]

Tahun Year	Penggunaan Energi Energy Consumption (GJ)	Volume produk akhir End product volume (Ton)	Intensitas penggunaan energi Energy intensity (GJ/Ton)
2022	2.233.155	4.300.000	0,52
2021	2.189.325	4.200.000	0,52
2020	2.058.263	4.500.000	0,46

Catatan: Konversi kWh ke Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule> Konversi kiloliter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/klfuel/to/gigajoule>
Notes: Conversion from kWh to Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule> Conversion from kiloliter to Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/klfuel/to/gigajoule>

Sejalan dengan prinsip keberlanjutan, ke depan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan target sebagai berikut:

1. Mengembangkan Biodiesel Plant dengan kapasitas 443 kton biodiesel per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
2. Mengembangkan pabrik Biopellet dari EFB dengan kapasitas 1 jt ton EFB per tahun atau 200 kton pellet per tahun di Sei Mangkei
3. Mengembangkan pabrik pengelolaan Bioethanol dari EFB dengan kapasitas 50,000 kL per tahun
4. Sesuai dengan Program Dekarbonisasi PTPN, kami akan menambah unit PLTBg, PLTBm, BioCNG, dan Cofiring yang akan menambah penggunaan energi terbarukan dari effluen proses produksi

Selain target rencana di atas, Perusahaan juga akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti meningkatkan penggunaan solar panel.

PENGELOLAAN AIR [GRI 303]

Risiko Kelangkaan Air

Air merupakan sumber daya yang amat penting bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengingat kegiatan usaha Perusahaan adalah bidang *agri industry*. Air juga merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekeliling wilayah operasional perusahaan. Perusahaan menggunakan air untuk berbagai keperluan, terutama untuk pengolahan kelapa sawit, irigasi berbagai tanaman komoditas, serta mencukupi berbagai keperluan domestik perkantoran. Selain itu, air juga merupakan

pellets, biogas and hydroelectric power plant. Of the total energy use, renewable energy sources produced independently by the Company were recorded at 1,731,941 GJ. [GRI 302-1]

The volume of fuel consumption as of December 31, 2022 was recorded at 6,066.70 kiloliters or 243,867 GJ, a decline compared to 2021 of 5957.44 kiloliters or 239,475 GJ. The increase was partly influenced by the greater use of fuel for transportation in accordance with the increase in raw material production. In the future, the Company has an initiative to replace some diesel engines with electricity to reduce the use of fuel. [GRI 302-1]

With this amount of energy consumption, PTPN also calculates energy intensity based on the amount of final product: [GRI 302-3]

In line with the principle of sustainability, going forward, the Company is committed to continuing to increase the use of renewable energy with the following targets:

1. Develop a Biodiesel Plant with a capacity of 443 tons of biodiesel per year in Sei Mangkei Special Economic Zone
2. Develop a Biopellet plant from EFB with a capacity of 1 million tons of EFB per year or 200 kton of pellets per year in Sei Mangkei
3. Develop a Bioethanol processing plant from EFB with a capacity of 50,000 kL per year
4. In accordance with PTPN's Decarbonization Program, the Company will add Biogas, Biomass, BioCNG, and Cofirin units that will increase the use of renewable energy from the effluent of production process.

In addition to the above-mentioned target plan, the Company will also enhance its use of renewable energy, such as solar panels.

WATER MANAGEMENT [GRI 303]

Risk of Water Scarcity

Considering that the Company's business activities are in the agri-industry sector, water is a critical resource for PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Water is also an important demand for the local communities that surround the Company's areas of operations. Water is used by the Company for various purposes, including palm oil processing, irrigation of various commodities crops, and meeting numerous domestic office demands. Furthermore, water is also an essential factor in the preservation



faktor penting untuk menjaga keanekaragaman hayati lokal dan kehidupan masyarakat sekitar. Air juga penting bagi proses budidaya tanaman dan proses pengolahan pabrik serta memenuhi kebutuhan perumahan pekerja di setiap unit usaha. [GRI 3-3]

Kelangkaan air berdampak besar pada produksi operasional agribisnis. Tanpa air, perusahaan tidak memiliki sarana untuk mengairi tanaman, kebun, dan penggunaan pabrik. Menurut International Water Management Institute, agribisnis, yang menyumbang sekitar 70% dari pengambilan air global, terus bersaing dengan penggunaan domestik, industri, dan lingkungan untuk mendapatkan pasokan air yang mulai langka saat ini. Terutama di Indonesia, tantangan ini menjadi lebih sulit karena adanya kesenjangan air dan sanitasi yang tersebar di antara ribuan pulau, sedangkan jumlah air tawar yang terbatas, pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perluasan agribisnis dan pertanian kerap meningkatkan tekanan pada sumber daya air yang tersedia. Perubahan iklim pun meningkatkan kelangkaan air dengan menyebabkan peningkatan suhu di seluruh dunia, mengakibatkan kekeringan yang lebih sering dan parah berdampak pada produksi pertanian, serta meningkatkan kebutuhan air tanaman karena suhu yang semakin tinggi. [GRI 303-1]

Dalam upaya untuk memperbaiki masalah yang terus berkembang ini, PTPN memahami bahwa kelangkaan air merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dan merupakan risiko pada kegiatan operasional bisnis. Dalam hal ini perusahaan perlu mencoba membentuk metode pengelolaan air yang lebih efektif untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari kelangkaan air. Kami mengacu pada kategori penilaian PROPER yaitu penilaian kinerja dalam penataan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi Pemeliharaan Sumber Air dan Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air untuk mengidentifikasi langkah yang tepat untuk menanggulangi resiko kelangkaan air sebagai upaya kolaboratif PTPN dan pemangku kepentingan terkait.

Untuk mengevaluasi risiko kelangkaan air pada operasi bisnis PTPN, kami telah menggunakan Aqueduct tool dari World Resource Institute (WRI). Melalui tool tersebut, kami mengidentifikasi beberapa area bisnis PTPN yang telah beroperasi pada area water stress atau area yang memiliki risiko kelangkaan air tinggi (20-40%), utamanya di area Jawa Timur. Di masa mendatang, kami memprediksi lebih banyak area operasi kami yang akan menghadapi risiko kelangkaan air karena adanya perubahan iklim. Area yang memiliki tingkat risiko kelangkaan air tinggi akan mengalami dampak negatif pada serapan unsur hara dan hasil panen. Selain itu, tingkat air yang terlalu rendah dapat menyebabkan kekeringan gambut, mengurangi kesuburan, dan meningkatkan risiko kebakaran gambut.

Program Pengelolaan Air di PTPN

Untuk memenuhi kebutuhan air, Perusahaan memanfaatkan beberapa sumber air, yaitu air tanah dan air sungai. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penggunaan air, Perusahaan memonitor penggunaan air secara berkala untuk mengidentifikasi operasi di daerah yang kekurangan air dan evaluasi terhadap ekosistem alami dan masyarakat lokal yang mengandalkan sumber air untuk kehidupan.

Pemantauan pemanfaatan air menjadi perhatian Perusahaan karena ketersediaan air bersih kian terbatas. Air sungai sebagai salah satu sumber air baku PDAM banyak yang mengalami pencemaran dari

of local biodiversity and the lives of local communities. Water is also necessary for crop cultivation, mill processing, and supplying the housing demands of workers in each business unit. [GRI 3-3]

Water scarcity has a major impact on the production of agribusiness operations. Without water, companies have no means to irrigate crops, plantations, and factory usage. According to the International Water Management Institute, agribusinesses, which account for about 70% of global water withdrawals, continue to compete with domestic, industrial and environmental uses for today's increasingly scarce water supplies. Especially in Indonesia, this challenge is made more difficult by water and sanitation gaps spread among thousands of islands, while limited freshwater, population growth, urbanization, and expansion of agribusiness and agriculture often increase pressure on available water resources. Climate change is also increasing water scarcity by raising global temperatures, resulting in more frequent and severe droughts affecting agricultural production and increasing crop water requirements owing to higher temperatures. [GRI 303-1]

In order to address this rising issue, the Company acknowledges that water scarcity is an issue of concern and a risk to business operations. In this instance, the Company should aim to develop a more effective water management system in order to use water wisely and minimize water scarcity. The Company refers to the PROPER assessment category, which assesses performance in compliance with Indonesian laws and regulations including Water Source Maintenance and Water Pollution Control Management, to identify appropriate measures to mitigate the risk of water scarcity as a collaborative effort of the Company and its relevant stakeholders.

In evaluating the risk of water scarcity in PTPN's business operations, the Company has utilized the Aqueduct tool from the World Resource Institute (WRI). Through the tool, the Company identifies several PTPN business areas that have been operating in water stress areas or areas with high water scarcity risk (20-40%), mainly in the East Java area. In the future, the Company expected more of its operating areas to face the risk of water scarcity due to climate change. Areas with high water scarcity risk shall experience negative impacts on nutrient uptake and crop yields. Furthermore, low water levels can induce peat drying, reducing fertility and raising the risk of peat fires.

The Company's Water Management Program

The Company utilizes various water sources to meet its water needs, including groundwater and river water. As a form of responsibility in water usage, the Company monitors water usage on a regular basis to identify operations in water-scarce areas and evaluate natural ecosystems and local communities that rely on water sources for life.

Monitoring water utilization is a concern for the Company as the availability of clean water is increasingly limited. River water as one of the PDAM's raw water sources is polluted from various types

berbagai jenis limbah, sedangkan air tanah terus berkurang seiring dengan masifnya penyedotan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri. Dengan kondisi seperti itu, jika pemanfaatan air tidak dilakukan secara bijaksana, maka ancaman krisis air bersih kian nyata, sebagaimana pernyataan Bappenas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KKLS) RPJM 2019, yang memproyeksikan ketersediaan air akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040. Kelangkaan absolut atau 'absolute scarcity' tak lain adalah jumlah sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Seiring dengan itu, PT Perkebunan Nusantara III turut berpartisipasi dalam upaya melestarikan air, meningkatkan kualitas air, dan mendukung akses air bersih. Untuk itu, Perusahaan telah melakukan beberapa langkah untuk mengelola sumber daya air secara efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Untuk mendukung langkah-langkah Perusahaan dalam melestarikan air, para pemangku kepentingan seperti perusahaan, pemerintah, pemasok, dan pelanggan memiliki peran yang penting. Dewan Direksi PTPN, sebagai badan penanggung jawab untuk mengawasi seluruh aspek kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola ("ESG") perusahaan termasuk topik risiko kelangkaan air yang diidentifikasi oleh perusahaan sebagai salah satu topik paling kritis yang dihadapi perusahaan, telah menugaskan Kepala Divisi Operasional Tanaman (DOSK dan DOAT) untuk bertanggung jawab atas pengawasan implementasi pengurangan penggunaan air dan mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh kelangkaan air, serta melaporkan kepada Dewan Direksi secara berkala searah dengan koordinasi dari Direktur Program ESG yang mengawasi pelaksanaan program ESG secara keseluruhan di PTPN Group.

Bercermin pada semakin terbatasnya ketersediaan air bersih, Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi penggunaan air di dalam organisasi sesuai kebijakan lingkungan internal yang berlaku. PT Perkebunan Nusantara III juga memantau penggunaan air dari setiap entitas PTPN dan mengacu pada metrik pelaporan penggunaan dan pengelolaan air yang selaras dengan Prinsip dan Kriteria RSPO serta regulasi di antaranya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Di area operasi perusahaan yang menghadapi risiko kelangkaan air yang tinggi (utamanya Jawa Timur), PTPN memitigasi risiko dengan melaksanakan program *reduce, reuse, recycle, dan recovery* terhadap air yang digunakan dalam proses produksi di pabrik. Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan air permukaan maupun bawah tanah dilakukan sesuai Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Merujuk pada perizinan tersebut, selama tahun pelaporan, PTPN tidak mengambil air dari wilayah yang mengalami stress air (kesulitan memenuhi kebutuhan air) sehingga tidak terdapat dampak negatif terhadap wilayah dan warga di sekitar operasional perusahaan. Untuk mengurangi dampak operasional bisnis PTPN di daerah dengan kelangkaan air, kami mengupayakan dalam setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumbernya, perusahaan

of waste, while groundwater continues to decrease along with massive siphoning for various purposes, including for industry. Under such circumstances, if water is not used properly, the possibility of a clean water crisis becomes more real, as stated by the National Development Planning Agency (Bappenas) in the Strategic Environmental Assessment (KKLS) of the 2019 Medium Term Development Plan, which estimates that water availability will reach absolute scarcity by 2040. Absolute scarcity is defined as a lack of water resources to meet human requirements and demands.

Along with that, PT Perkebunan Nusantara III participates in efforts to conserve water, improve water quality, and support access to clean water. Thus, the Company has taken several steps to manage water resources efficiently in accordance with Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Water Pollution Control.

Stakeholders such as the Company, government, suppliers, and customers have a significant role in supporting the Company's measures in preserving water. As the responsible body for overseeing all aspects of the Company's Environmental, Social, and Governance ("ESG") performance, including the topic of water scarcity risk identified by the Company as one of the most critical topics being faced, PTPN's Board of Directors has assigned the Heads of Plants Operations Division (DOSK and DOAT) to be responsible for supervising the implementation of water use reduction and addressing the risks posed by water scarcity, in addition to reporting to the Board of Directors on a regular basis, with coordination from the Director of ESG Program, who oversees the entire implementation of the ESG program at PTPN Group.

Given the increasingly limited availability of clean water, the Company is dedicated to enhancing water usage efficiency and reducing water usage within the organization in compliance with applicable internal environmental policies. PT Perkebunan Nusantara III also monitors each PTPN entity's water usage and refers to water usage and management reporting metrics that are aligned with the RSPO Principles and Criteria as well as regulations such as the Decree of the Minister of Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines on the Terms and Procedures of Licensing and Guidelines for the Study of Wastewater Discharge to Water or Water Sources, and Regulation of the Minister of Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Procedures.

PTPN mitigates the risk of water scarcity in the Company's areas of operations that face a high risk of scarcity (mostly East Java) by adopting a reduce, reuse, recycle, and recovery program for water utilized in the production process at the mills. Thus, the usage and utilization of surface and subterranean water is carried out in line with with the Underground Water and Surface Water Utilization Permit from the East Java Provincial Government. Referring to these permits, PTPN did not withdraw water from areas facing water stress (difficulty meeting water demands) throughout the reporting year, ensuring that there was no detrimental impact on the areas and communities surrounding the Company's operations. To reduce the impact of PTPN's business operations in water-scarce areas, we aim to ensure that in every action of extracting and utilizing water from its source, the Company obtains a permit from



senantiasa melengkapi izin dari Pemerintah Daerah setempat, dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak berwenang. Perusahaan juga melanjutkan penerapan kebijakan efisiensi pemakaian air, yang diukur berdasarkan intensitas pemakaian air. Kami juga memantau penggunaan air tanah untuk menghindari penipisan dan memastikan bahwa ada penyimpanan yang memadai untuk mengisi pasokan air, serta melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai penghematan penggunaan air, dimana hal ini dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelangkaan air. Khusus berkaitan dengan penggunaan air untuk kebutuhan domestic karyawan, PTPN juga melakukan edukasi penghematan pada sarana keran dengan menempel sign board "hemat air". Dalam mengelola pemantauan air, PTPN juga menerapkan SOP Pengelolaan dan Penggunaan Air untuk melakukan pelaporan penggunaan air, distribusi air, dan juga penyelidikan penyebab ketidaksesuaian jika terjadi ketidaksesuaian terhadap penggunaan air.

Selaras dengan kebijakan efisiensi penggunaan air, Perusahaan telah membuat beberapa program, terutama untuk mengurangi penggunaan air tawar, yang dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian diperoleh manfaat yang besar, baik dari sisi penghematan biaya, perbaikan sistem kerja, dan ramah lingkungan. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Membuat embung penampungan air hujan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional, untuk mempertahankan sumber air yang ada disekitar wilayah kerja
2. Penggunaan kembali air hasil proses pengolahan kelapa sawit, karet, dan gula digunakan kembali setelah diproses dalam kolam Instalasi Air Limbah (IPAL). baik untuk areal perkebunan (land aplikasi/pengolahan kelapa sawit) ataupun dikembalikan dalam proses produksi (pengolahan karet dan gula)
3. Melakukan langkah efisiensi penggunaan air dengan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan pengecekan secara rutin instalasi air untuk mengetahui lebih cepat jika ada kebocoran terjadi

Per 31 Desember 2022, volume penggunaan air PT Perkebunan Nusantara III tercatat sebesar 60.932.016 meter kubik (m3), naik dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 58.591.254 m3. Kenaikan dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi bahan baku. Jika dinormalisasikan dengan pendapatan atau produksi tahunan, intensitas penggunaan air adalah 2.3 m3/ton bahan baku, naik dibandingkan tahun 2021 yaitu 2.6m3/ton. [GRI 303-3] [GRI 303-5]

the local government and reports to the authorities on a regular basis. In addition, the Company continues to develop water usage efficiency policy, which is based on the intensity of water usage. The Company also monitors groundwater consumption to avoid depletion and maintain appropriate storage to replace water supply, as well as socialize staff about water preservation, which can be done as part of the effort to reduce water scarcity. PTPN also undertakes savings education on tap facilities by placing a "save water" sign board, which is specifically relevant to the use of water for domestic purposes of employees. In order to manage water monitoring, the Company also uses the SOP for Water Management and Usage to report water usage, water distribution, and to examine the source of discrepancies in water usage.

In line with the water usage efficiency policy, the Company has developed many initiatives, particularly to reduce the use of fresh water, which are consistently implemented. As a result, significant benefits are realized in terms of cost savings, work system improvements, and environmental friendliness. Among these policies are:

1. Build rainwater reservoirs that can be used for operational activities, to maintain existing water sources around the work area.
2. Reuse of water from the processing of palm oil, rubber, and sugar after being processed in the Waste Water Installation (WWTP), either for the plantation area (land application/ processing of palm oil) or returned in the production process (processing of rubber and sugar)
3. Conduct water usage efficiency measures by socializing savings on the use of water resources in the office environment, as well as conducting regular checks on water installations to detect leaks sooner.

As of December 31, 2022, PT Perkebunan Nusantara III's water usage volume was recorded at 60,932,016 cubic meters (m3), an increase compared to 2021, which amounted to 58,591,254 m3. The increase was caused by an increase in raw material production. If normalized by revenue or annual production, the water usage intensity amounted to 2.3 m3/ton of raw material, an increase compared to 2021, which amounted to 2.6m3/ton. [GRI 303-3] [GRI 303-5]

Tabel Intensitas Penggunaan Air Tahun 2020-2022
Table of Water Usage Intensity in 2020-2022

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Total Penggunaan Air Total Water Usage	m3	60.932.016	58.591.254	57.016.746
Total Produksi (bahan baku) Total Production (raw materials)	ton	26.680.000	22.920.000	21.400.000
Intensitas Penggunaan Air Water Usage Intensity	m3/ton	2,3	2,6	2,7

Dalam penggunaan air, PTPN menggunakan air yang berasal dari air sungai, serta dalam jumlah penggunaan air yang masuk memiliki jumlah yang sama dengan air yang dibuang dengan metode pencatatan penggunaan air dari flow mete. [GRI 303-2, 303-3]

In water usage, PTPN uses water that comes from river, and the amount of water used has the same amount as the water that is discharged using the calculation method from a flow meter. [GRI 303-2, 303-3]

Dalam jumlah tersebut, penggunaan air yang terletak pada water stress area adalah sebesar 39.578.000 m³ atau sebanyak 64% dari total penggunaan air PTPN Group, dimana penggunaan air di daerah tersebut adalah untuk komoditas tebu/gula.

Dalam mengimplementasikan efisiensi pengelolaan air, ke depan, Perusahaan berkomitmen untuk menjaga intensitas penggunaan air sebesar 1.5-2 m³/ton FFB, selaras dengan praktik terbaik di industri. Komitmen itu ditetapkan karena PT Perkebunan Nusantara III menyadari akibat perubahan iklim, risiko ketersediaan air global menjadi salah satu permasalahan penting.

Komitmen itu ditetapkan karena PT Perkebunan Nusantara III menyadari akibat perubahan iklim, risiko ketersediaan air global menjadi salah satu permasalahan penting.

Seiring dengan itu, PT Perkebunan Nusantara III sedang mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa inisiatif untuk mencapai target komitmen dan mengurangi risiko kelangkaan air, antara lain:

1. Meningkatkan sistem manajemen air dengan memperbarui rencana pengelolaan air untuk perkebunan dan manufaktur yang mencakup penggunaan dalam budidaya, perawatan kimiawi dan alami untuk memanfaatkan air pada pengolahan, dan penyimpanan air berdasarkan standar peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Meminimalisir risiko pencemaran pada air permukaan dan air tanah dengan tidak menggunakan herbisida atau bahan kimia di dekat daerah sempadan sungai (riparian areas).
3. Melakukan penanaman tanaman konservasi untuk Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam DAS dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KONSERVASI HUTAN [GRI 304]

Indonesia merupakan salah satu negara dengan area hutan hujan terbesar di dunia. Bersamaan dengan fakta tersebut, juga muncul tanggung jawab besar untuk melindungi keanekaragaman alam dengan meminimalkan dampak kegiatan operasional bisnis terhadap area hutan. Keanekaragaman hayati memiliki beragam manfaat bagi lingkungan hidup, antara lain sebagai sumber penghasilan, kontributor keberlanjutan ekosistem, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, deforestasi; hilangnya keanekaragaman hayati; dan gangguan habitat merupakan risiko terhadap lingkungan dari industri agribisnis kami—dan penting bagi perusahaan untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik, dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati, terutama bagi habitat ekosistem dan flora-fauna yang berada di sekitar area operasional maupun di luar area operasional. [GRI 3-3]

Di PTPN, tanggung jawab akan isu keanekaragaman hayati dan konservasi hutan berada di kendali Kepala Divisi Operasional Sawit & Karet (DOSK) dan Kepala Divisi Operasional Aneka Tanaman (DOAT), di bawah pengawasan Direktur Produksi dan Pengembangan (DPP).

Within those amount, the water usage that located in the water stress area is 39,578,000 m³ or as much as 64% of the total water use of the PTPN Group, where the use of water in the area is for sugarcane/sugar commodities.

Going forward, the Company is committed to maintaining a water usage intensity of 1.5-2 m³/ton FFB in accordance with industry best practices while implementing water management efficiency. The commitment was made because PT Perkebunan Nusantara III recognizes that one of the major concerns posed by climate change is the risk of world water scarcity.

The commitment was made by PT Perkebunan Nusantara III as we recognize that one of the major concerns posed by climate change is the risk of world water scarcity.

Along with that, PT Perkebunan Nusantara III is developing and implementing several initiatives to achieve the commitment targets and reduce the risk of water scarcity, among others:

1. Improving the water management system by updating the water management plan for plantations and manufacturing that covers the use in cultivation, chemical and natural treatments to utilize water in processing, and water storage based on applicable government regulatory standards.
2. Minimizing the risk of pollution to surface water and groundwater by not using herbicides or chemicals near riparian areas.
3. Planting conservation plants for watershed areas, as an environmental conservation effort based on the role and function of each area in the watershed and includes aspects of protection, maintenance and sustainable use of the ecosystem.

BIODIVERSITY AND FOREST CONSERVATION [GRI 304]

Indonesia features one of the world's largest rainforests. This reality comes with a huge duty to protect natural diversity by minimizing the impact of business operations on forest areas. Biodiversity has various benefits for the environment, including as a source of income, a contributor to ecosystem sustainability, and a means of developing science and technology. Therefore, deforestation; biodiversity loss; and habitat disturbance are environmental risks of our agribusiness industry—and it is important for the Company to ensure the ability of plant and animal species, genetic diversity, and natural ecosystems to survive. The Company makes various efforts to preserve biodiversity, particularly for ecosystem habitats and flora and fauna in and around of its areas of operations. [GRI 3-3]

At PTPN, responsibility for biodiversity and forest conservation issues lies with the Head of the Palm Oil & Rubber Operations Division (DOSK) and the Head of the Assorted Plants Operations Division (DOAT), under the supervision of the Director of Production and Development (DPP).



Sektor kelapa sawit sering dikaitkan dengan dampak negatif lingkungan seperti deforestasi dan degradasi ekosistem lahan gambut. Adanya operasi bisnis pada area hutan kelapa sawit melibatkan transformasi lingkungan yang berdampak negatif, termasuk ancaman keanekaragaman hayati. Kegiatan operasional kami juga berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan aliran air akibat penggunaan produk kimia seperti pupuk, herbisida, pestisida, atau rodentisida. Air limbah dari pabrik kelapa sawit berpotensi merembes ke sungai sementara boiler mengeluarkan asap, debu, dan kebisingan yang dapat mengganggu hewan di sekitarnya. Lebih jauh, operasi kami dapat secara langsung atau tidak langsung merusak keanekaragaman hayati di area pengembangan kami serta di area yang telah kami sisihkan untuk dilindungi seperti HCV, daerah zona penyangga, sistem sungai, dan setiap daerah di sekitarnya yang dihuni atau dilalui oleh satwa liar. [GRI 304-2]

Menyadari hal ini, sebagai langkah pertama, PTPN berkomitmen untuk tidak merusak hutan dalam operasi kami. Semenjak bergabungnya PTPN sebagai anggota RSPO di tahun 2006, kami memiliki komitmen NDPE (*No Deforestation, Peat, and Exploitation*) yang mana termasuk didalamnya komitmen anti deforestasi sesuai prinsip dan kriteria RSPO. Memperkuat landasan perusahaan, PTPN juga telah menerapkan *Sustainability Policy*, Kebijakan Lingkungan, dan Kebijakan NDPE, dimana PTPN berkomitmen terhadap zero deforestation sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 5 tahun 2018 tentang Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Sebanyak 56% dari seluruh luas kebun kelapa sawit PTPN atau 60% unit kebun dan 80% unit PKS telah tersertifikas RSPO, dimana kami patuh terhadap salah satunya prinsip anti deforestasi. Sebagai bagian kepatuhan kami, perusahaan telah:

1. Berpartisipasi aktif dalam inisiatif-inisiatif termasuk training RSPO dan sosialisasi plasma (independent smallholders)
2. Menerapkan traceability terhadap pabrik dan kebun dan pemasok
3. Menerapkan mekanisme investigasi insiden dan tindakan korektif jika ada temuan kasus deforestasi
4. Dalam mekanisme pembukaan lahan, mengacu pada prinsip & kriteria RSPO termasuk penyusunan dokumen LURI (*Land Use & Risk Identification*) yang ditinjau dan disetujui badan sertifikasi serta menginformasikan ke RSPO secara tertulis 1 tahun sebelum pelaksanaan pembukaan lahan baru

Program-program tersebut telah membuahkan hasil, di mana berdasarkan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PTPN, tidak ada ditemukan laporan eksternal mengenai deforestasi atau penebangan hutan yang dilakukan oleh PTPN di lima tahun terakhir. Namun, penting untuk kami terus meningkatkan kinerja dan keawasan kami di bidang ini, salah satunya dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan sertifikasi RSPO ini ke 100% area operasi Sawit PTPN. Kami juga berkomitmen untuk mempertahankan target zero deforestation ke depannya.

Tidak hanya berhenti di situ, PTPN juga secara aktif melakukan upaya-upaya konservasi. Sesuai dengan Protokol dan Kriteria RSPO, PTPN telah menilai lahan yang dianggap memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) menggunakan pendekatan *High Carbon Value – High Carbon Stock Approach* untuk setiap pembangunan baru, serta melindungi hutan NKT dan SKT keanekaragaman hayati di dalamnya.

The palm oil sector is frequently associated with negative environmental impacts such as deforestation and degradation of peatland ecosystem. The existence of business operations in the area of palm plantations involves environmental transformations that may have negative impacts, including threats to biodiversity. Our operational activities also have the potential to cause contamination of soil and waterways due to the use of chemical products such as fertilizers, herbicides, pesticides or rodenticides. Wastewater from the palm oil mill has the potential to seep into the river while the boiler emits smoke, dust and noise that can disturb nearby animals. Furthermore, our operations may directly or indirectly harm biodiversity in our development areas as well as in areas we have set aside for protection such as HCVs, buffer zone areas, river systems and any surrounding areas inhabited or traversed by wildlife. [GRI 304-2]

Recognizing this, PTPN is committed to prevent damaging the forests in its operations as a first step. NDPE (*No Deforestation, Peat, and Exploitation*) has been the Company's commitment since joining RSPO as member in 2006, which includes an anti-deforestation commitment in compliance with RSPO principles and standards. Strengthening the Company's foundation, the Company has also implemented a Sustainability Policy, Environmental Policy, and NDPE Policy, where PTPN is committed to zero deforestation in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture No. 5 of 2018 concerning the Zero Burning Plantation Land Clearing and Processing. 56% of the Company's overall palm oil plantation areas or 60% of the plantation units and 80% of the palm oil plantation units are RSPO certified, where the Company complies with, among others, the anti-deforestation principle. As part of its compliance, the Company has performed the following:

1. Actively participating in initiatives including RSPO training and plasma (independent smallholders) socialization.
2. Implementing traceability to mills and plantations as well as suppliers
3. Implementing a mechanism for incident investigation and corrective action if any deforestation case is found
4. In the land clearing mechanism, the Company refers to RSPO principles & criteria including the preparation of LURI (*Land Use & Risk Identification*) documents that are reviewed and approved by the certification agency, and informs RSPO in writing 1 year prior to the implementation of new land clearing.

These programs have yielded results, where based on the Company's evaluation and monitoring, there were no external reports of deforestation or logging conducted by PTPN in the last five years. However, it is important that the Company continues to improve its performance and awareness in this area, one of which is the Company's commitment to increase RSPO certification to 100% of PTPN's Palm Oil operation areas. The Company is also committed to maintaining zero deforestation target going forward.

Not only that, but PTPN is actively engaged in conservation initiatives. The Company has assessed lands deemed to have High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) utilizing the High Carbon Value - High Carbon Stock Approach for any new development, as well as safeguarding HCV and HCS forest biodiversity within them, in compliance with the RSPO Protocol and Criteria.

Per 31 Desember 2022, area konservasi NKT yang ditetapkan Perusahaan sebagai fokus perlindungan keanekaragaman hayati adalah seluas 30,758 hektare. Area HCV tersebut telah diberi batas/plang HCV. Di area konservasi terdapat keanekaragaman flora dan fauna, termasuk spesies RTE (*Rare, Threatened, or Endangered*) di antaranya Gaharu, Meranti Kuning, Gajah, Harimau, Orangutan, dan lainnya. Kami menyimpan catatan spesies yang terdaftar menurut daftar merah IUCN dan daftar *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES). [GRI 304-3] [GRI 304-4]

As of December 31, 2022, the HCV conservation area designated by the Company as the focus of biodiversity protection amounted to 30,758 hectares. The HCV areas have been demarcated with HCV signs. The conservation areas contain a diversity of flora and fauna, including RTE (*Rare, Threatened, or Endangered*) species including Agarwood, Yellow Meranti, Elephant, Tiger, Orangutan, etc. The Company keeps records of species listed according to the IUCN red list and the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) list. [GRI 304-3] [GRI 304-4]



Detail luasan area hutan NKT PTPN Group dapat ditemukan dalam tabel berikut: [GRI 304-1]

The following table contains information on the PTPN Group's HCV forest area: [GRI 304-1]

Tabel Luas Area Hutan Konservasi Dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Table of Conservation Forest Areas with High Conservation Value (HCV)

PTPN	Luas Total Area Konservasi (ha) Total Conservation Forest Area (ha)	Daerah/Area Region/Area
I	1.730	Kab. Aceh Tamiang Aceh Tamiang Regency
II	2.503	Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Langkat Regency Deli Serdang Regency
III	5.960	Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Rokan Hilir Kab. Simalugun Kab. Serdang Bedagai Kab. Tapanuli Selatan Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu Utara Asahan Regency South Labuhan Batu Regency Rokan Hilir Regency Simalungun Regency Serdang Bedagai Regency South Tapanuli Regency Labuhan Batu Regency North Labuhan Batu Regency



Tabel Luas Area Hutan Konservasi Dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Table of Conservation Forest Areas with High Conservation Value (HCV)

PTPN	Luas Total Area Konservasi (ha) Total Conservation Forest Area (ha)	Daerah/Area Region/Area
IV	5.207	Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Serdang Bedagai Kab. Labuhan Batu Kab. Batubara Kab. Padang Lawas Kab. Langkat Simalungun Regency Asahan Regency Serdang Bedagai Regency Labuhan Batu Regency Batubara Regency Padang Lawas Regency Langkat Regency
V	1.162	Kab. Siak Sri Indrapura Kab. Siak Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Kampar Siak Sri Indrapura Regency Siak Regency Rokan Hulu Regency Rokan Hilir Regency Kampar Regency
VI	2.549	Kab. Tebo Kab. Muaro Jambi Kab. Batang Hari Kab. Pasaman Barat Tebo Regency Muaro Jambi Regency Batang Hari Regency West Pasaman Regency
VII	155	Kab. Muara Enim Kab. Lampung Tengah Kab. Musi Banyuasin Muara Enim Regency Central Lampung Regency Musi Banyuasin Regency
VIII	410	Kab. Lebak Lebak Regency
IX	977	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab. Jepara, Kab. Pati Cilacap Regency, Banyumas Regency, Brebes Regency, Pemalang Regency, Pekalongan Regency, Batang Regency, Kendal Regency, Semarang Regency, Karanganyar Regency, Jepara Regency, Pati Regency
X	132	Kediri
XI	N/A	
XII	5.763	Banyuwangi, Jember, Ngawi, Kediri, Blitar, Malang, Lumajang, Bondowoso Banyuwangi, Jember, Ngawi, Kediri, Blitar, Malang, Lumajang, Bondowoso
XIII	2.603	Kab. Sanggau Sanggau Regency
XIV	1.606	Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara East Luwu Regency North Luwu Regency
PTPN Group	30.758	

Dalam proses penentuan area konservasi, PTPN melibatkan kombinasi pihak internal dan eksternal (pakar/ahli) untuk melakukan penilaian nilai konservasi suatu area serta pertimbangan-pertimbangan kelayakan lainnya.

The Company involves a combination of internal and external parties (experts) to evaluate the conservation value of an area as well as other feasible concerns when selecting conservation areas.

PTPN secara periodik melakukan pemantauan terhadap kondisi area HCV, menjaga sempadan sungai dengan tidak memakai bahan kimia pada pemeliharaan tanaman, dan melakukan sosialisasi berkala terkait NKT, dengan rincian tertera pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan NKT Perusahaan. Beberapa inisiatif yang telah perusahaan implementasikan antara lain:

1. Melakukan pertimbangan sistematis ancaman lokal terhadap keanekaragaman hayati di luar kegiatan bisnis kami, serta mitigasi berdasarkan praktik terbaik untuk keanekaragaman hayati dalam laporan Penilaian HCV-HCS, SIA, LUCA dan LURI untuk setiap entitas PTPN
2. Pemantauan keanekaragaman Hayati yang dipimpin oleh tim konservasi (tenaga ahli dan asisten tenaga ahli), didukung dengan penilaian sejawat (*peer review*) untuk memperkuat laporan akhir identifikasi NK
 - a. Pemantauan dilakukan mengacu pada kategori NKT di tiap lokasi yaitu:
 - i) NKT 1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi
 - ii) NKT 2 Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami
 - iii) NKT 3 Kawasan yang Mempunyai Ekosistem yang Langka atau Terancam Punah
 - iv) NKT 4 Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami
 - v) NKT 5 Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal
 - vi) NKT 6 Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal
 - b. Jenis pemantauan berkala yang dilakukan antara lain
 - i) Pemantauan intensitas gangguan, termasuk bahaya dari kebakaran terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam beserta habitatnya.
 - ii) Pemantauan kondisi keanekaragaman dan kerapatan spesies tumbuhan yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam.
 - iii) Pemantauan kondisi keanekaragaman dan kelimpahan spesies satwa liar yang termasuk dilindungi dan/atau termasuk dalam Daftar CITES Appendix II dan/atau terancam.
3. Melakukan penanaman pohon di dalam area perkebunan PTPN untuk meningkatkan stok karbon yang dapat bermanfaat bagi kehidupan keanekaragaman hayati yang ada pada area perkebunan atau NKT PTPN.
4. Melakukan diskusi dan pendekatan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh-tokoh dan aparat pemerintahan lokal, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lain yang dianggap kompeten untuk bekerjasama dari tahap studi penilaian dampak sosial di areal NKT PTPN sampai dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan NKT.
5. Sesuai dengan parameter *Rainforest Alliance*, mempertahankan zona non-aplikasi pestisida atau penyangga vegetatif yang terkait dengan semua bidang aktivitas manusia, atau ekosistem alami perairan dan darat.

The Company monitors the condition of HCV regions on a regular basis, protects riverbanks by not using chemicals in plant maintenance, and conducts regular HCV outreach, as detailed in the Company's SOP for HCV Management and Monitoring. Among the initiatives implemented by the Company are as follows:

1. Systematic evaluation of local biodiversity concerns outside of the Company's business activities, as well as biodiversity mitigation based on best practices in the HCV-HCS, SIA, LUCA, and LURI Assessment reports for each of the Company's organization.
2. The conservation team (experts and assistant experts) led biodiversity monitoring, which was supported by peer review to reinforce the final HCV identification report.
 - a. Monitoring is carried out according to the HCV category in each location, which are:
 - i) HCV 1 Areas that contain significant concentrations of biodiversity values
 - ii) HCV 2 Landscape-level areas where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural patterns of distribution and abundance
 - iii) HCV 3 Areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems
 - iv) HCV 4 Areas that provide basic ecosystem services in critical situations
 - v) HCV 5 Areas fundamental to meeting basic needs of local communities
 - vi) HCV 6 Areas critical to local communities' traditional cultural identity
 - b. Jenis pemantauan berkala yang dilakukan antara lain
 - i) Monitoring the intensity of disturbance, including fire hazard to protected plant and wildlife species and/or listed in CITES Appendices II and/or threatened along with their habitats.
 - ii) Monitoring of the diversity and density of plant species that are protected and/or listed in CITES Appendices II and/or threatened.
 - iii) Monitoring of the diversity and abundance of wildlife species that are protected and/or listed as CITES Appendix II and/or threatened.
3. Planting trees within PTPN's plantation area to increase carbon stocks that can benefit biodiversity in the plantation area or PTPN's HCV.
4. Conducting discussions and approaches by engaging stakeholders such as local government leaders and officials, non-governmental organizations, and other parties deemed competent to cooperate from the social impact assessment study stage in PTPN's HCV areas to the implementation of HCV management and monitoring.
5. In accordance with Rainforest Alliance parameters, maintaining pesticide non-application zones or vegetative buffers associated with all areas of human activity, or aquatic and terrestrial natural ecosystems.



6. Anggota kelompok dan pekerja telah diberi informasi dan dilatih untuk mengidentifikasi dan melindungi spesies yang terancam dan satwa liar lain, dan kami memastikan tidak ada perburuan, pembunuhan, pengumpulan atau perdagangan tumbuhan atau hewan yang terancam punah.
7. Melakukan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan kebun sawit di areal sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan areal berhutan seperti menanam tanaman penutup tanah (cover crop), pemeliharaan terhadap anakan pohon yang tumbuh secara alami, dan melakukan pemupukan pohon sawit dengan cara dipendam di dalam tanah (tidak menabur) di areal sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
8. Menerapkan rehabilitasi di area NKT dengan memperkaya jenis vegetasi yang dapat menjadi sumber pakan satwa liar, terutama satwaliar yang termasuk dalam kategori RTE.
9. Melakukan patroli pada area NKT dan SKT untuk melindungi spesies langka, terancam, dan hampir punah, serta ekosistem atau habitat penting dari spesies tersebut dengan memasang papan himbauan yang berisikan larangan untuk melakukan perburuan.

PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN

PTPN berkomitmen untuk menerapkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan yang dapat meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan produktivitas jangka panjang operasi pertanian kami. Kami menyadari bahwa pertanian dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk erosi tanah, polusi air, dan hilangnya habitat. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menerapkan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan yang mempromosikan kesehatan tanah, melindungi sumber daya air, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Untuk mencapai tujuan ini, kami telah mengadopsi beberapa program lahan berkelanjutan seperti:

1. Mengimplementasikan prosedur pengawasan pengelolaan NKT setelah dilakukan identifikasi NKT dengan menjaga eksistensi kawasan lindung dan konservasi yang terletak pada area Unit Pengelolaan (UP) atau areal yang telah ditatabatas dan disahkan untuk dikelola oleh satu badan usaha melalui ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Dalam hal ini unit pengelolaan adalah unit perkebunan.
2. Tidak membuat jalan, kanal serta infrastruktur lainnya pada NKT. Jika pada NKT ditemukan jalan, kanal dan infrastruktur maka pemanfaatannya dikontrol penuh oleh UP dan dibuat standar prosedur operasi pengelolaan dan pemantauannya.
3. Mencegah pengurangan dan melakukan pemulihan tutupan lahan/hutan spesifik dari luas minimum yang diperlukan pada suatu letak di dalam kawasan UP pada satu kesatuan DAS dengan pemetaan secara berkala, dan memasang tanda batas.
4. Penyiapan lahan UP dengan tidak membakar lahan (zero burning).
5. Menentukan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air bagi masyarakat, memasang tanda batas, dan menentukan sebagian atau keseluruhan daerah tangkapan air yang berada di dalam kawasan UP.

6. Group members and workers have been informed and trained to identify and protect threatened species and other wildlife, and we ensure there is no hunting, killing, collection or trade of endangered plants or animals.
7. Implementing best practices in palm oil management in the riparian areas, areas around reservoirs, and forested areas such as planting cover crops, maintaining naturally growing saplings, and fertilizing palms by burying them in the ground (not sowing) in riparian areas and areas around water springs.
8. Implementing rehabilitation in HCV areas by enriching the types of vegetation that can be a source of food for wildlife, especially animals included in the RTE category.
9. Patrolling HCV and HCS areas to safeguard rare, threatened and endangered species, as well as significant ecosystems or habitats for these species by the installation of signboards prohibiting hunting.

SUSTAINABLE LAND USE MANAGEMENT

PTPN is committed to implementing sustainable land management practices that minimize environmental impacts and ensure the long-term productivity of our farming operations. We recognize that agriculture can have significant impacts on the environment, including soil erosion, water pollution and loss of habitat. Therefore, we strive to adopt sustainable land management practices that promote soil health, protect water resources and maintain biodiversity.

To achieve this goal, we have adopted several sustainable land programs such as:

1. Implement HCV management monitoring procedures after identification of HCVs by maintaining the existence of protected and conservation areas located in Management Unit areas or areas that have been demarcated and authorized to be managed by a business entity through a management permit issued by a government agency. In this case the management unit is the plantation unit.
2. Not recommends to build roads, canals and other infrastructure for HCVs. If roads, canals and infrastructure are found in HCV, their utilization is fully controlled by the Management Unit and standard operating procedures for management and monitoring are developed.
3. Preventing reduction and carrying out restoration of specific land/forest cover from the minimum area required at a location within the Management Unit area in one watershed unit by periodically mapping and placing boundary markers.
4. Management Unit land preparation by not burning the land (zero burning).
5. Determining the water catchment area which is the source of water for the community, placing boundary signs, and determining part or all of the water catchment area within the Management unit area.

Sebagai perusahaan milik negara, kami juga yakin bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pertanian berkelanjutan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kami juga telah melaksanakan program-program bagi para pemasok untuk meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan mereka. Praktik-praktik ini antara lain:

1. Menjaga kesuburan tanah dengan melakukan pelatihan mengenai penggunaan pestisida secara bijak dan disesuaikan dengan praktik terbaik yang telah ada
2. Melakukan pelatihan kepada petani pemasok TBS mengenai sistem pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan praktik terbaik RSPO
3. Melakukan pendataan dan pengawasan mengenai total lahan yang digunakan oleh supplier, total produksi TBS, pembinaan supplier, dan beberapa aspek mengenai lingkungan melalui dokumen *Annual Communication on Progress RSPO*

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN

Kebakaran hutan terus menjadi perhatian, terutama di Indonesia, karena dampaknya yang merugikan bagi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati serta kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kebakaran masih merupakan risiko yang cukup besar selama musim kemarau dan kondisi kekeringan yang berkepanjangan, dan risiko ini tidak hanya mencakup operasional bisnis PTPN sebagai perusahaan yang bergerak di *agro industry*, namun juga risiko dampak yang lebih luas karena adanya potensi kebakaran yang merambah ke luar batas wilayah operasional PTPN.

Dengan kesadaran akan pentingnya topik ini untuk dikelola secara proaktif, PTPN telah melakukan beberapa inisiatif untuk meminimalkan dan memitigasi risiko kebakaran hutan. Di bawah tanggung jawab Kepala Divisi Operasional Sawit (DOSK) & Karet dan Kepala Divisi Operasional Aneka Tanaman (DOAT) serta di bawah pengawasan Direktur Produksi & Pengembangan (DPP), PTPN telah: **[GRI 2-24; 2-25]**:

1. Menerapkan Kebijakan Keberlanjutan, Kebijakan Lingkungan, dan Kebijakan NDPE kami yang menyatakan komitmen kami untuk tidak menggunakan pembakaran untuk pembukaan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip dan kriteria RSPO, ISPO, dan ISCC terkait kebakaran hutan.
2. Berpedoman pada Permentan LHK No. 5 tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, kami juga diaudit oleh badan sertifikasi RSPO untuk memonitor kebakaran dan hotspot yang terdapat pada area perkebunan.
3. Menerapkan SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di area operasi kami. Contoh termasuk:

Pemantauan melalui menara pantau di setiap kebun. Hasil pantauan ini dijadikan dasar tindakan, seperti contoh dashboard untuk memonitor *hotspots* dan kebakaran di sekitar perkebunan

As a state-owned company, we also believe that we have a responsibility to ensure that sustainable agriculture is implemented throughout Indonesia. As such, we have also implemented programs for our suppliers to improve their sustainable farming practices. These practices include:

1. Maintaining soil fertility by conducting training on the wise use of pesticides and in accordance with existing best practices
2. Conduct training to smallholders supplying FFB on sustainable farming systems according to RSPO best practices
3. Carry out data collection and supervision regarding the total land used by suppliers, total FFB production, supplier development, and several aspects regarding the environment through the RSPO Annual Communication on Progress document

FOREST FIRE PREVENTION AND MANAGEMENT

Forest fires continue to be a concern, especially in Indonesia, due to its detrimental impact on forest ecosystems and biodiversity as well as the health and socio-economic well-being of local communities. Fires remain a considerable risk during the dry season and prolonged drought conditions, and this risk not only covers the Company's business operations as an agro-industry company, but also the risk of wider impacts due to the potential for fires to extend beyond its operational boundaries.

With an awareness of the importance of this topic to be proactively managed, the Company has undertaken several initiatives to minimize and mitigate the risk of forest fires. Under the responsibility of the Head of Palm Oil & Rubber Operations Division (DOSK) & the Head of Assorted Plants Operations Division (DOAT) and under the supervision of the Director of Production & Development (DPP), the Company has conducted the following: **[GRI 2-24; 2-25]**:

1. Implementing Sustainability Policy, Environmental Policy, and NDPE Policy stating our commitment to zero burning for land clearing in accordance with the applicable laws and regulations as well as RSPO, ISPO, and ISCC principles and criteria related to forest fires.
2. Referring to Regulation of the Ministry of Environment and Forestry No. 5 of 2018 concerning Zero Burning Plantation Land Clearing and/or Processing, the Company is also audited by the RSPO certification agency to monitor fires and hotspots in the Company's plantation areas.
3. Implementing SOPs for forest fire prevention and management in the Company's areas of operations.

Monitoring through monitoring towers in each plantation. The results of this monitoring are used as a basis for action, such as a dashboard to monitor hotspots and fires around the plantation.



- a. Pendirian Tim Reaksi Cepat Tanggap Kebakaran yang memiliki fungsi, tugas, dan struktur yang sistematis. Selain itu, Tim Reaksi Cepat Tanggap Kebakaran harus selalu siaga dengan informasi akurat dan peralatan lengkap untuk mencegah dan menangani kebakaran
- b. Pelibatan masyarakat dalam pemadaman kebakaran, dimana kami melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan di perkebunan dan masyarakat setempat untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi kebakaran dengan regu pemadam kebakaran (Masyarakat Peduli Api).

Berdasarkan hasil monitoring perusahaan akan kebakaran hutan di tahun 2022, tidak ada kebakaran termonitor di area lahan/kebun perusahaan PTPN.

Ke depannya, untuk mempertahankan komitmen anti-pembakaran dan melakukan aksi preventif dan cepat tanggap kebakaran, perusahaan akan terus meningkatkan proses monitoring & pelaporan sesuai standar RSPO dan regulasi terkait, serta mengencangkan kerjasama serta edukasi dengan masyarakat lokal untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan.

PENGELOLAAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) [GRI 305]

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk menghindari dampak negatif berkelanjutan akibat emisi gas rumah kaca, maka setiap kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global wajib didukung. Salah satu upaya itu adalah ditandatanganinya Perjanjian Paris atau *Paris Agreement*. Ini adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework*

- a. Establishment of a Rapid Fire Response Team with functions, duties, and a systematic structure. In addition, the Fire Rapid Response Team must always be ready with accurate information and complete equipment to prevent and manage fires.
- b. Community involvement in fire fighting, where the Company collaborates with all stakeholders in the plantation and local communities to conduct fire training and socialization with fire fighting team (Masyarakat Peduli Api)

Based on the results of the Company's monitoring of forest fires in 2022, there were no confirmed fire incidents in the plantation or operational areas of PTPN.

Going forward, to maintain its anti-fire commitment and conduct preventive and rapid fire response actions, the Company will continue to improve the monitoring & reporting process in accordance with RSPO standard and relevant regulations, as well as intensify cooperation and education with local communities to prevent and mitigate forest fires.

MANAGEMENT OF GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS [GRI 305]

Greenhouse gas (GHG) emissions are one of the drivers of global warming and climate change. To avoid the long-term detrimental effects of greenhouse gas emissions, any strategy aimed at reducing emissions and global warming must be supported. One of these efforts is the signing of the Paris Agreement, which is an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on greenhouse gas emissions mitigation, adaptation and finance. The Agreement was negotiated by 195

Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Perjanjian ini dinegosiasikan oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi, Perjanjian Paris ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani. Kesepakatan global ini bertujuan membatasi kenaikan suhu hingga rata-rata global hingga 1.5°C di atas tingkat pra-industri, serta Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menuju *Net Zero* di tahun 2060 atau lebih awal.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berkomitmen untuk ikut membangun kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Perjanjian Paris. Apalagi, dalam operasional sehari-hari, Perusahaan turut menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Perusahaan menyadari betapa kritisnya topik ini, dan telah menunjuk Kepala Divisi Bisnis Strategis & Sustainability (DBSS) sebagai penanggung jawab pelaksanaan upaya PTPN dalam topik ini, di bawah pengawasan langsung dari Wakil Direktur Utama.

Langkah awal bagi perusahaan untuk membuat strategi reduksi emisi GRK adalah dengan melakukan inventarisasi emisi GRK baik cakupan 1 (langsung) maupun cakupan 2 dan cakupan 3 (tidak langsung) di sepanjang rantai nilai perusahaan. Di tahun 2022, PTPN bekerja sama dengan Bureau Veritas untuk melakukan perhitungan inventarisasi emisi GRK ini dengan lingkup sebagai berikut :

Metodologi penghitungan GRK [GRI 3-3]

PTPN mengikuti panduan daripada *GHG Protocol corporate standard* dan *Corporate Value Chain (scope 3)* untuk melakukan kalkulasi GRK. Emisi yang dilaporkan terdiri dari emisi langsung, berasal dari dalam batas kerja sebenarnya dari seluruh unit PTPN dan emisi tidak langsung, yang berasal dari rantai nilai perusahaan dan personel terkait (karyawan, tamu, klien).

countries at the 21st UN Climate Change Conference in Paris, France. Following the negotiation process, the Paris Agreement was signed on Earth Day, April 22, 2016, in New York, USA, with Indonesia among the signatories. The objective of this global agreement is to limit the global average temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels, and Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) to Net Zero by 2060 or earlier.

As a sustainability-oriented company, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is committed to building environmental awareness as a form of support for the Paris Agreement. Moreover, in its daily operations, the Company contributes to global warming and climate change. The Company realizes how critical this topic is, and has appointed the Head of Strategic Business & Sustainability Division (DBSS) as the person in charge of implementing PTPN’s efforts on this topic, under the direct supervision of the Vice President Director.

The first step for the Company to create a GHG emission reduction strategy is to conduct an inventory of both scope 1 (direct) and scope 2 and scope 3 (indirect) GHG emissions along the Company’s value chain. In 2022, PTPN worked with Bureau Veritas to conduct GHG emissions inventory calculation with the following scope:

Methodology for GHG calculation [GRI 3-3]

PTPN follows the guidance of the *GHG Protocol corporate standard* and *Corporate Value Chain (scope 3)* to conduct the GHG calculation. Reported emissions consist of direct emissions, originating from within the actual working boundaries of all PTPN units and indirect emissions, originating from the corporate value chain and associated personnel (employees, guests, clients).

Scope	No	Category	Example of Emission Source	GHG reported: Using units specified
	1.1	Direct emissions from stationary combustion	Combustion of fuels, including combustion of biomass (to be quantified separately) e.g. Generators, boilers, CHP, mill-ing, dryers, irrigation	CO2, CH4, N2O, CO2e
	1.2	Direct emissions from mobile combustion	Combustion of fuels from mobile sources including combustion of biomass (to be quantified separately) e.g. Tilling, sowing, harvesting, transport	CO2, CH4, N2O, CO2e
	1.3	Direct process related emissions	N/A	
Scope 1				HFCs, PFCs, CO2e (refrigerator, air conditioning), N2O, CO2e (fertilizer), CH4, N2O, CO2e (anaerobic digestion), CH4, CO2e (composting organic waste)
	1.4	Direct fugitive emissions	Fugitive GHG emissions include leaks from equipment and storage and transport systems, and leaks from reservoirs and injection wells. Disposal/treatment of waste generated in operations.	
	1.5	Direct emissions and removals from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	CO2 emissions from the conversion of: - forests into ranch land or cropland, or- wetlands to cropland	CO2, CH4, N2O, CO2e



Scope	No	Category	Example of Emission Source	GHG reported: Using units specified
Scope 2	2.1	Indirect emissions from imported electricity consumed	Emissions resulting from the generation of imported electricity.	CO2, CH4, N2O, CO2e
	2.2	Indirect emissions from consumed energy imported through a physical network (Heating, steam, cooling, compressed air) excluding electricity	Emissions resulting from the generation of imported steam, heating, cooling, compressed air.	-
Scope 3	3.1	Upstream transport and distribution	Transport and distribution of inputs (i.e. purchased or acquired goods, services, materials or fuels), including intermediate (inter-facility) transport and distribution, warehousing and storage, associated with direct suppliers	CO2, CH4, N2O, CO2e
	3.2	Downstream transport and distribution	Transport and distribution of sold products, including warehousing and retail	CO2, CH4, N2O, CO2e
	3.3	Employee commuting	Transportation of employees between their homes and their worksites during the reporting year (in vehicles not owned or operated by the reporting company); Employee telecommuting	CO2, CH4, N2O, CO2e
	3.4	Client and Visitor transport	Transport to and from the client visitor location to the organization	CO2, CH4, N2O, CO2e
	3.5	Business travel	Employee business travel	CO2, CH4, N2O, CO2e

Perhitungan spesifik diselesaikan masing-masing pada emisi IPCC metodologi akuntansi yang disediakan oleh Panel Antar Pemerintah tentang Pedoman IPCC 2006 tentang Perubahan Iklim untuk inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, referensi lain diterakan pada perhitungan tertentu, seperti nilai kalor bersih bahan bakar (NCV), kandungan karbon energy bahan bakar, factor emisi transportasi dan lain-lain.

Referensi tersebut diberikan oleh UK Defra Emission Factor (EF 2022), Kementerian Indonesia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK : Puspipjak / Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM : Faktor Emisi Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan) dan agensi lainnya yang relevan.

Dalam tahapan operasional untuk memperoleh data emisi Gas Rumah Kaca, PTPN melakukan perhitungan melalui kalkulator GRK dengan memasukkan data-data operasional setiap pabrik dan kebun, yang kemudian dilakukan konsolidasi dan kalkulasi oleh masing-masing entitas PTPN. Dalam hal ini, PTPN juga telah bekerja sama dengan Bureau Veritas untuk memverifikasi data emisi gas rumah kaca di tahun 2021

Berdasarkan perhitungan tersebut, dan dengan menggunakan metodologi yang sama untuk memproses data operasional tahun 2020 dan tahun 2022 menjadi emisi GRK, PTPN melaporkan jumlah emisi sebagai berikut:

Specific calculations are completed respectively on the IPCC emissions accounting methodology provided by the Intergovernmental Panel on Climate Change's 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, other references are applied to specific calculations, such as Net Calorific Value (NCV) of fuel, fuel energy carbon content, transportation emission factors, etc.

These references are provided by the UK Defra Emission Factor (EF 2022), the Indonesian Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (MoEF: Puspipjak/Directorate General of Climate Change Control), Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR: Electricity Emission Factor, Directorate General of Electricity) and other relevant agencies.

In the operational stage to obtain Greenhouse Gas emission data, PTPN performs calculations through the GHG calculator by entering operational data for each factory and plantation, which is then consolidated and calculated by each PTPN entity. In this case, PTPN has also collaborated with Bureau Veritas to verify data on greenhouse gas emissions in 2021.

Based on these calculations, and using the same methodology to process 2020 and 2022 operations data into GHG emissions, PTPN reported the following emissions:

Tabel Emisi Cakupan 1-3 PTPN Group Tahun 2020 - 2022 (tonCO2e) [GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4]

Cakupan Scope	2022	2021	2020
Cakupan 1 Scope 1	1.968.870,48	1.834.518,41	1.751.782,67
Cakupan 2 Scope 2	197.533	218.477,22	239.268,66
Cakupan 3 Scope 3	135.962,14	155.732,51	144.629,10

Tabel Emisi Cakupan 1-3 PTPN Group Tahun 2020 - 2022 (tonCO2e) [GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4]

Cakupan Scope	2022	2021	2020
Intensitas cakupan 1 & 2 Intensity of scope 1 & 2	0,56 tCO2e/ton	0,49 tCO2e/ton	0,44 tCO2e/ton
Total emisi Total emissions	2.302.366,61	2.208.698,20	2.135.680,44

Detail Cakupan 3 Details of Scope 3	2022	2021	2020
Upstream transportation and distribution	65.914	70.231	49.135
Downstream transportation and distribution	6.785	9.229	7.670
Employee commuting	56.220	66.894	79.340
Client and visitor transport	2.706	2.702	2.706
Business travel	3.041	2.978	3.130
Transport of Waste generated in operations	1.296	3.698	2.648
Total	135.962	155.733	144.629

Kami menggunakan tahun baseline 2021 dalam menganalisis data emisi yang diproduksi oleh perusahaan. Berdasarkan data cakupan tersebut, emisi cakupan 1 kami mengalami kenaikan dari tahun 2021 menjadi 1.968.870,48 ton CO2e yang dikarenakan oleh peningkatan volume produksi bahan baku. Walaupun demikian, kami melakukan beberapa inisiatif untuk mengurangi emisi fugitif kami dengan membangun PLTBG di beberapa anak perusahaan PTPN untuk memanfaatkan cangkang dan tandan kosong dari kelapa sawit, sedangkan untuk mengurangi emisi dari *fertilizer*, PTPN memanfaatkan penggunaan POME untuk menangkap gas metana dan penggunaan tankos untuk *land application*. Selain itu, kami juga telah melakukan inisiatif logistik hijau (*green logistics*) yang diterapkan untuk membantu menurunkan emisi pembakaran mesin/kendaraan (*mobile combustions*), yaitu: [GRI 305-5]

1. Penggunaan B30 (Biodiesel 30%) untuk mobil dinas dan kendaraan berat yang digunakan oleh perusahaan.
2. Penggunaan *electric vehicle* atau kendaraan listrik untuk beberapa kendaraan pada beberapa anak perusahaan PTPN.
3. Melakukan kajian evaluasi optimalisasi transportasi untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan transportasi pada perusahaan.

Untuk emisi cakupan 2, kami mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi 197.533 ton CO2e karena adanya penggunaan energi terbarukan (biomassa) yang meningkat untuk menekan penggunaan listrik. Sehingga total emisi cakupan 1 & 2 adalah 2.166.403,46 ton CO2e.

Meskipun cakupan kami 3 terbatas, yaitu menurun dari tahun 2021 menjadi sebesar 135.962,14 ton CO2e pada tahun 2022, namun mengingat betapa pentingnya upaya iklim yang harus dilakukan, kami juga telah mengambil langkah awal untuk mengatasinya. Sebagai contoh, kami telah memperluas inisiatif logistik hijau (*green*

We use the 2021 baseline year in analyzing the emission data produced by companies. Based on this data, our scope 1 emissions have increased from 2021 to 1,968,870.48 tons of CO2e due to an increase in production volume of raw material. However, we carried out several initiatives to reduce our fugitive emissions by building PLTBGs at several PTPN subsidiaries to utilize empty oil palm shells and fruit bunches, while to reduce emissions from fertilizer, PTPN utilized the use of POME to capture methane gas and use empty fruit bunch for land application. In addition, we have also carried out green logistics initiatives that are implemented to help reduce emissions from combustion engines/vehicles (mobile combustions), namely: [GRI 305-5]

1. Use of B30 (30% Biodiesel) for official transportation and heavy vehicles used by companies.
2. The use of electric vehicles or electric vehicles for several vehicles in several PTPN subsidiaries.
3. Conducting a study evaluating the optimization of transportation to achieve efficiency in the use of transportation in companies.

For scope 2 emissions, we have decreased from 2021 to 197,533 tons of CO2e due to increased use of renewable energy (biomass) to reduce electricity use. So that the total emissions of coverage 1 & 2 are 2,166,403.46 tons of CO2e.

Although our scope 3 is limited, i.e. decreasing from 2021 to 135,962.14 tons of CO2e in 2022, given how important climate efforts are, we have also taken the first steps to address them. For example, we have extended our green logistics initiatives to our suppliers. For some of our suppliers, we have instituted



logistics) kepada pemasok kami. Untuk beberapa pemasok, kami telah melembagakan persyaratan untuk menggunakan solar industri (yaitu B30). Hal ini merupakan salah satu langkah pertama yang kami ambil untuk mengatasi emisi secara lebih luas di sepanjang rantai pasokan PTPN.

Mengacu kepada hasil inventarisasi tersebut, perusahaan berfokus kepada emisi cakupan 1, 2 dan 3 menimbang kontribusi emisi yang lebih signifikan. PTPN juga mencatat adanya kontribusi negatif emisi GRK *Land Use, Land Use Change, and Forestry* dari stok-karbon Gain dari area perkebunan perusahaan (yang sudah di net-off dengan stok-karbon Loss dari penanaman kembali, penebangan pohon, penipisan areal, dan sebagainya), namun perusahaan tetap berupaya untuk mengurangi keluaran emisi langsung dari operasi perusahaan guna berkontribusi maksimal kepada pengurangan emisi GRK.

requirements to use industrial diesel (namely B30). This is one of the first steps we are taking to address emissions more broadly along PTPN's supply chain.

According to the inventory data, the Company focused on scope 1, 2, and 3 emissions due to their greater contribution to emissions. The Company also noted a negative GHG emissions contribution to *Land Use, Land Use Change, and Forestry* from Gain carbon-stock from the Company's plantation areas (which were offset by carbon stock losses from replanting, tree felling, area depletion, etc.), however the Company strived to reduce direct emissions output from its operations to contribute as much as possible to GHG emissions reductions.

No.	PTPN	PKS	Emission Reduction (t CO ₂ eq/year)
1	PTPN II	PKS Pagar Merbau	-13.288
		PKS Kwala Sawit	-16.566
2	PTPN III	PKS Hapesong	-7.083
		PKS Sei Mangke	-26.728
3	PTPN IV	PKS Pasir Mandoge	-26.586
		PKS Lubuk Dalam	-17.436
4	PTPN V	PKS Sei Pagar	-18.543
		PKS Tandun	-25.415
		PKS Terantam	-27.214
Total			-178.859

Ke depannya, perusahaan memiliki rencana roadmap dekarbonisasi dengan komitmen untuk mengurangi, sampai dengan tahun 2030, 48% dari total emisi GRK dengan posisi tahun 2021 sebagai baseline.

Untuk mencapai target tersebut, PTPN telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi emisi GRK dari proses operasional kami untuk mendorong berkelanjutan kinerja lingkungan. Langkah-langkah ini termasuk antara lain:

- Memperluas pembangunan fasilitas-fasilitas dengan teknologi "zero POME" – penangkapan emisi Metana dari limbah cair POME (Palm Oil Mill Effluent), di mana biogas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menambahkan pembakaran di boiler (Co-Firing), membangkitkan listrik (PLTBg), serta dikompresi menjadi BioCNG.
- Menambahkan penggunaan biomassa untuk pembangkitan listrik (PLTBm), khususnya dengan memanfaatkan Tandan Buah Kosong dari operasi Sawit.

Di luar inisiatif-inisiatif dengan dampak pengurangan emisi yang telah dikuantifikasi di atas, kami juga secara aktif melakukan eksplorasi langkah lain yang dapat kami ambil untuk mengurangi emisi GRK perusahaan lebih jauh, termasuk pembangkitan listrik dengan tenaga surya dan angin, penggunaan biodiesel dengan grade yang lebih tinggi (B35/B40), memperluas elektrifikasi kendaraan operasi, serta investasi peralatan yang lebih modern serta proses untuk meningkatkan efisiensi proses produksi.

Going forward, the Company has developed a decarbonization roadmap with a commitment to reduce, by 2030, 48% of total GHG emissions against 2021 emissions as a baseline.

To achieve this target, PTPN has taken several steps to reduce GHG emissions from its operational processes to drive sustainable environmental performance. These steps include:

- Further build-out of facilities with Zero POME technologies - the capture of Methane emissions from POME (Palm Oil Mill Effluent) liquid waste, in which the resulting biogas can be used to augment as a combustion material in the Boiler in the plant (Co-Firing), generate green electricity (PLTBg), and compressed into BioCNG
- Add to the use of biomass to generate electricity (PLTBm), specifically using palm empty fruit bunches (EFB)

On top of the initiatives with quantified emission reduction impact above, we are also actively exploring other initiatives to further reduce our GHG emissions footprint, including electricity generation with solar and wind power, the use of higher-grade biodiesels (B35/B40), expanding the electrification of our operational vehicles, and investing in more modern equipment and processes to enhance the efficiency of our production processes.

- Meningkatkan Pengelolaan Lahan Gambut – Pengurangan emisi lahan gambut melalui *water management* dengan membuat kanal di dalam kebun dan pintu air di sisi luar kebun, untuk mengatur ketinggian kedalaman gambut di dalam air (dari ketinggian 80 cm ditargetkan menjadi 40 cm).
- Mengurangi pupuk kimia – Menggunakan tandan kosong (*by product* dari pengolahan kelapa sawit) dan *land application* dari POME. Dalam mengoptimisasi penggunaan POME dan Tandan Kosong untuk dijadikan pupuk, penggunaan pupuk kimia dan emisi dari kandungan pupuk tersebut dapat berkurang
- Mengurangi penggunaan pestisida – Melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida (glifosat) untuk mengurangi emisi CO₂ yang dihasilkan dengan cara *manual weeding* untuk daerah aliran sungai, *ground cover management*, dan selektif *weeding management*
- Beberapa inisiatif yang mengurangi emisi GRK berkaitan dengan energi juga telah diterapkan (lihat rincian di bagian energi)

Kedepannya, kami juga akan meninjau dan menyempurnakan target kami sesuai dengan kriteria SBTi

PENGELOLAAN LIMBAH & POLUSI [GRI 306]

Dalam operasional usaha, PT Perkebunan Nusantara III menghasilkan air limbah (effluen) dari sisa pemanfaatan air bersih, serta berbagai limbah, baik cair maupun padat, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non-B3. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka air limbah maupun limbah merupakan salah satu sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah dan air akibat pembuangan limbah. [GRI 3-3]

Berkaitan dengan pengelolaan limbah dan polusi, perusahaan berangkat dari regulasi terkait di Indonesia serta standar internasional yaitu ISO 14001 “Sistem Manajemen Lingkungan”, yang diturunkan menjadi prosedur perusahaan seperti:

1. PDIK (Pedoman Dasar & Instruksi Kerja) Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3, dan Limbah Domestik
2. SOP Pemantauan dan Pengangkutan Limbah B3
3. SOP Pemantauan dan Pengukuran Kualitas Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit
4. SOP Operasional Pengelolaan Limbah Pabrik Gula
5. SOP Pemantauan Pengukuran Kualitas Udara, Kebisingan dan Kebauan

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam implementasi prosedur-prosedur pengelolaan limbah dan polusi yang baik tersebut antara lain berupa:

1. Pengelolaan limbah B3 sesuai komitmen untuk memenuhi Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6 Tahun 2021 [GRI 306-3, 306-5]:
 - a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan, antara lain oli bekas, aki bekas, kemasan/jerigen eks bahan kimia (*water treatment*, pestisida), limbah kimia laboratorium (kemasan, bahan kimia kadaluarsa), limbah elektronik yang tidak terpakai, dan sebagainya.

- Improving Peatland Management - Reducing peatland emissions through water management by making canals inside the plantation and sluiceway on the outer side of the plantation, to regulate the height of peat depth in water (from 80 cm targeted to 40 cm).
- Reducing chemical fertilizers - Using empty fruit bunches (by product of palm oil processing) and land application of POME. In optimizing the use of POME and Empty Fruit Bunches as fertilizers, the use and emissions of chemical fertilizers and its content can be reduced.
- Reducing the use of pesticides - Efforts are made to reduce the use of pesticides (glyphosate) to reduce CO₂ emissions by manual weeding for watersheds, ground cover management, and selective weeding management.
- Implementing several initiatives that reduce energy-related GHG emissions (see details in the energy section).

Going forward, we will also review and refine our targets in accordance with SBTi criteria.

WASTE & POLLUTION MANAGEMENT [GRI 306]

In business operations, PT Perkebunan Nusantara III generates wastewater (effluent) from the remaining utilization of clean water, as well as various wastes, both liquid and solid, Hazardous and Toxic Materials (B3) and non-B3. If not managed properly, wastewater and waste become the sources of pollution and environmental damage. Therefore, the Company is committed to preventing land and water pollution due to waste disposal. [GRI 3-3]

With regard to waste and pollution management, the Company departs from the relevant regulations in Indonesia as well as the international standard, ISO 14001 “Environmental Management System”, which is derived into the Company’s procedures such as:

1. PDIK (Basic Guidelines & Work Instructions) for Liquid Waste, Hazardous Waste, and Domestic Waste Management
2. SOP for Monitoring and Transportation of Hazardous Waste
3. SOP for Monitoring and Assessment of Palm Oil Mill Waste Water Quality
4. SOP for Sugar Mill Waste Management Operations
5. SOP for Monitoring and Assessment of Air Quality, Noise and Odor

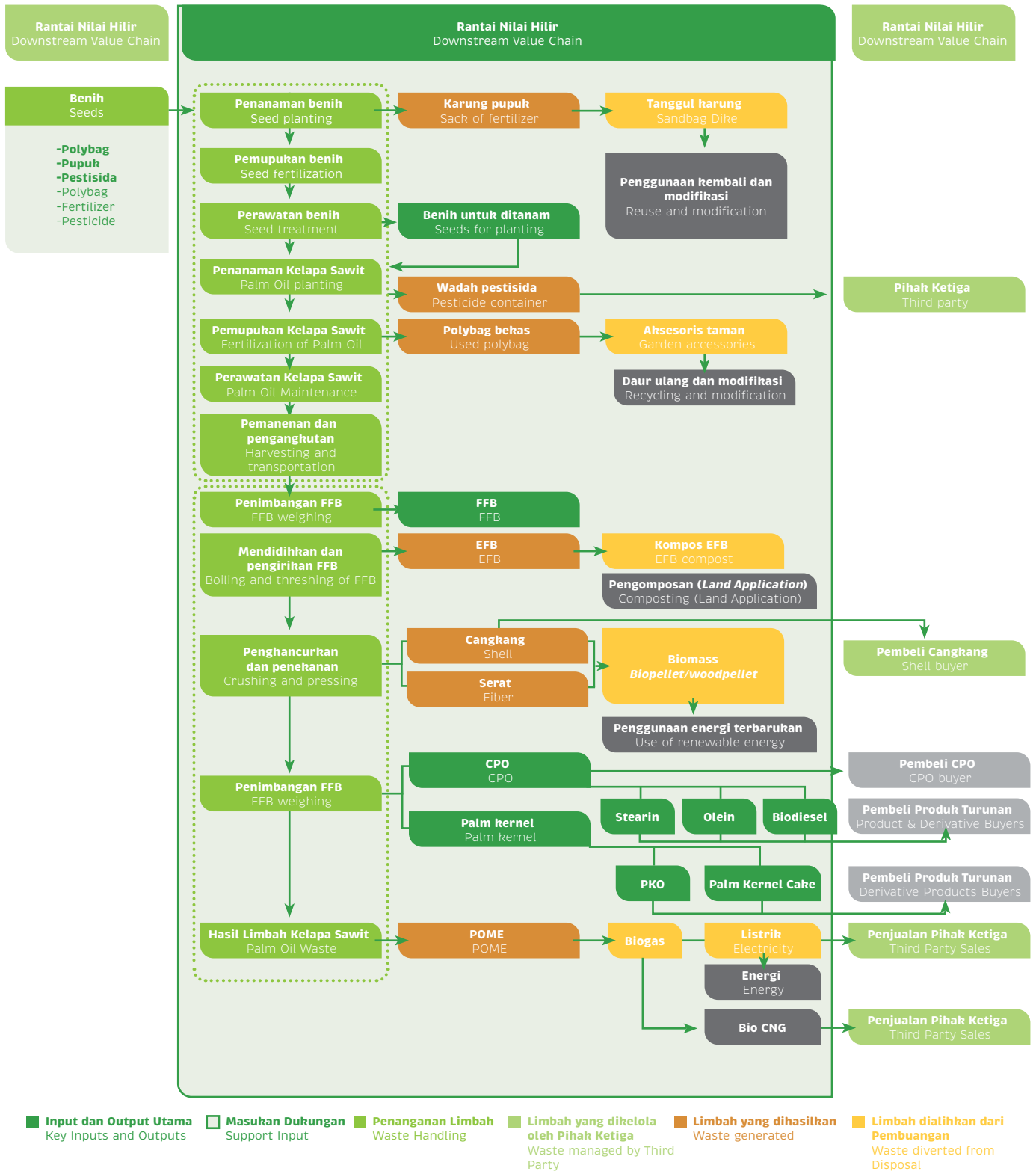
The Company’s efforts in implementing good waste and pollution management procedures include:

1. Hazardous and toxic waste management in accordance with the commitment to comply with Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021 [GRI 306-3, 306-5]:
 - a. Identifying hazardous and toxic waste generated by the Company, including used oil, used batteries, packaging/jerry cans of chemicals (*water treatment*, pesticides), laboratory chemical waste (packaging, expired chemicals), unused electronic waste, etc.



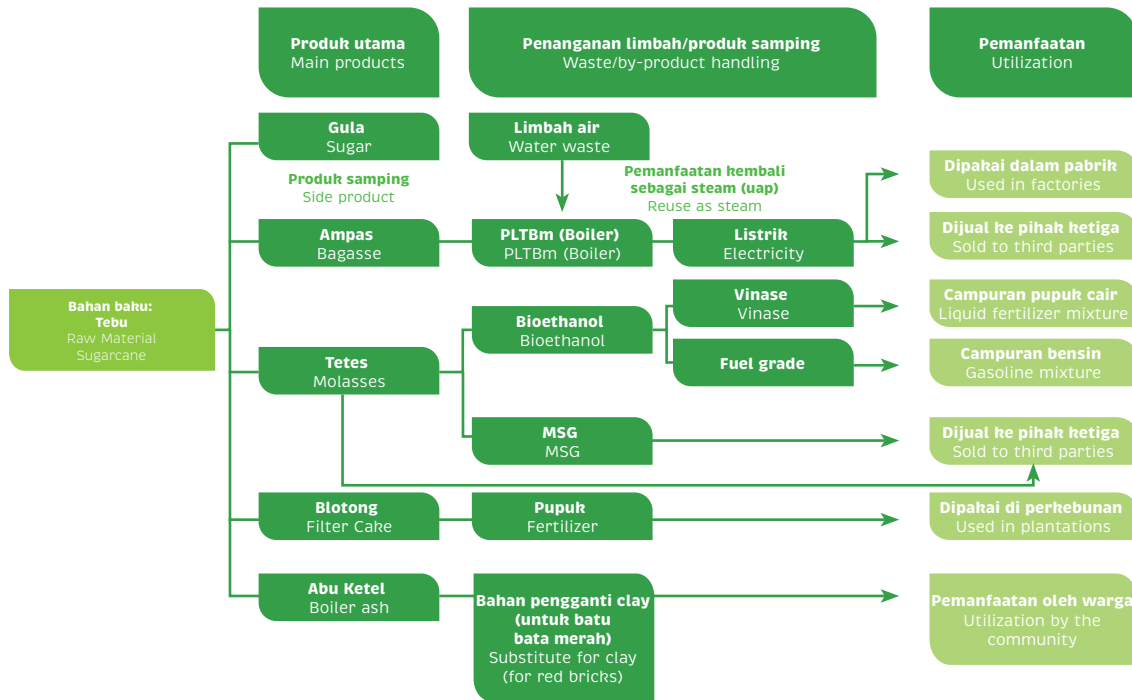
- b. Menyerahkan kepada pihak ketiga yang berizin untuk mengelola limbah tersebut sesuai dengan standar dan memperkecil kemungkinan kerusakan lingkungan karena limbah B3
- 2. Kegiatan 3R (*reuse, reduce, recycle*) untuk limbah non-B3, antara lain:
 - a. Memanfaatkan limbah cair dari POME dan padat dari EFB untuk digunakan sebagai energi terbarukan
 - b. Memanfaatkan limbah cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler pada pengolahan kelapa sawit

- b. Hand over to a licensed third party to manage the waste in accordance with standards and minimize the possibility of environmental damage due to hazardous waste.
- 2. 3R (*reuse, reduce, recycle*) activities for non-hazardous waste, among others:
 - a. Utilizing liquid waste from POME and solid waste from EFB to be used as renewable energy
 - b. Utilizing shell and fiber waste as boiler fuel in palm oil processing



c. Memanfaatkan limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi pada pabrik gula (blotong), yang dapat dipakai sebagai pupuk

c. Utilizing solid waste generated from the production process at sugar mills (blotong), which can be used as fertilizers

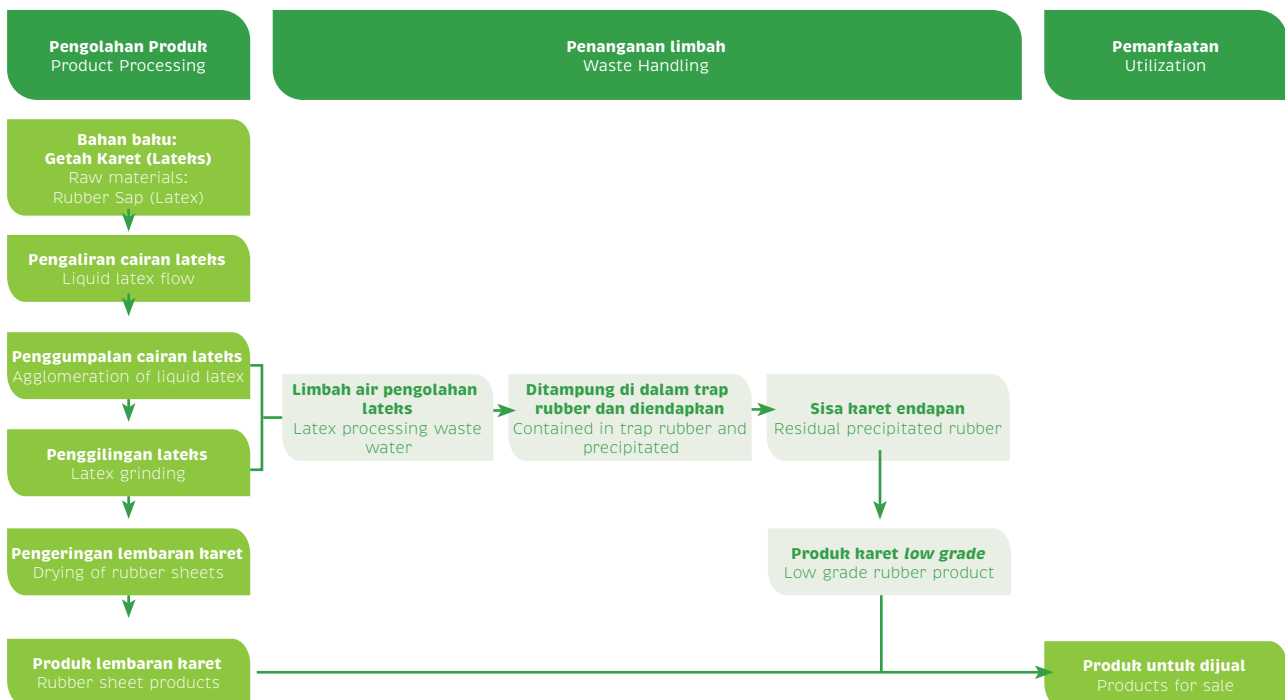


d. Mengalokasikan dana untuk jasa pembayaran pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah akhir dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dimana lokasi kantor berada.

d. Allocating funds for payment services for sending waste to landfills in coordination with the local government where the office is located

e. Menerapkan manajemen limbah dengan penerapan konsep produksi bersih (cleaner production), antara lain untuk meminimalisir sumber penghasil limbah, penggunaan saluran limbah melalui pipa tertutup, penggunaan kolam rubber trap, dan penggunaan bahan kimia dengan tingkat bahaya yang lebih rendah.

e. Implementing waste management by applying the concept of cleaner production, including minimizing sources of waste generation, the use of sewage lines through closed pipes, the use of rubber trap ponds, and the use of chemicals with lower levels of hazard.





3. Pengelolaan air limbah termasuk:

Untuk limbah cair yang dihasilkan oleh Pabrik Gula, semua pabrik sudah memiliki Unit Pengolahan Limbah Cair (UPLC) dengan Sistem Aerasi Lanjut (SAL) menggunakan bakteri Inola. Analisis juga dilakukan setiap bulan dan telah memenuhi Baku Mutu berdasarkan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota tingkat Kabupaten/Kota (BLH TK II)

- a. Menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Di instalasi ini, pengelolaan air limbah dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan zat pencemar dalam air limbah
- b. Menjaga air buangan untuk tidak terkontaminasi dengan limbah dengan membangun sumur resapan untuk limbah MCK (mandi, cuci, kakus) dan tidak dialirkan ke sungai
- c. Membuat bak penampung khusus untuk mencuci alat bekas menyemprot pestisida untuk disaring dan dialirkan ke dalam sumur resapan
- d. Menjaga ekosistem biota tanah yang secara langsung berkontribusi pada perawatan jangka panjang dari beberapa fungsi dan jasa ekosistem termasuk produksi primer, penyerapan karbon dan perputaran nitrogen, dengan melakukan pengelolaan limbah air yang benar dan tidak membuang pada tanah, maka PTPN juga berupaya dalam melindungi ekosistem biota tanah.
- e. Mengidentifikasi jumlah biota laut dan tanah yang tersedia pada area PTPN untuk mengidentifikasi bahwa limbah air telah dikelola dengan benar.
- f. Memanfaatkan air bekas pengolahan kopi untuk dialirkan ke tengah kebun, dan ditampung di embung-embung yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menyiram pohon kopi sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman.
- g. Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke air, atau sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan.
- h. Mendorong semua entitas PTPN untuk tidak melakukan pembuangan air limbah yang melampaui Batasan maksimum pembuangan yang diizinkan.
- i. Mengalokasikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan pembuangan air limbah, baik di induk perusahaan maupun anak perusahaan. Untuk limbah domestik berupa sampah, Perusahaan mengalokasikan dana untuk jasa pembayaran pengiriman sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Dalam hal ini, perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dimana lokasi kantor berada.

Upaya-upaya ini menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit & Karet (DTSK) dan Kepala Divisi Operasional Aneka Tanaman (DOAT), di bawah pengawasan Direktur Produksi dan Pengembangan (DPP).

Guna memahami efektivitas dari upaya yang dilakukan serta terus mencari cara untuk meningkatkan performa, PTPN memonitor kinerja limbah dan polusi perusahaan secara rutin. Kinerja ini selain digunakan untuk analisis dan evaluasi internal, juga digunakan untuk pelaporan ke instansi terkait utamanya badan pemerintahan. Beberapa metrik utama yang menjadi perhatian perusahaan antara lain: [GRI 305-7, 305-6, 306-1, 306-4]

3. Wastewater management includes:

For liquid waste generated by Sugar Mills, all mills already have Liquid Waste Treatment Unit (UPLC) with Advanced Aeration System (SAL) using Inola bacteria. Analyses are also carried out monthly and have met the Quality Standard based on the Environmental Agency and City Planning at the Regency/City level (Level II)

- a. Using Waste Water Management Installation (WWTP). In this installation, wastewater management is carried out by utilizing microorganisms to decompose pollutants in wastewater.
- b. Keeping waste water from being contaminated with sewage by building infiltration wells for bathing, washing, toilet (MCK) waste and not draining it into the river
- c. Making a special catch basin for washing tools used to spray pesticides to be filtered and flowed into the infiltration wells
- d. Safeguarding soil biota ecosystems that directly contribute to the long-term maintenance of several ecosystem functions and services including primary production, carbon sequestration and nitrogen cycle, by conducting proper waste water management and not dumping on the ground, PTPN is also working to protect soil biota ecosystems.
- e. Identify the amount of marine and soil biota available in PTPN areas to understand that wastewater is being managed properly.
- f. Utilizing used coffee processing water to be channeled to the middle of the plantation, and collected in reservoirs which can subsequently be utilized to water coffee trees to boost crop productivity.
- g. Performing wastewater treatment in such a way that the quality of wastewater discharged into water or water sources does not exceed the established wastewater quality standard. quality standards.
- h. Encourage all PTPN entities not to discharge wastewater that exceeds the maximum permitted discharge limit.
- i. Allocating funds for payment of wastewater disposal services, both at the parent company and subsidiaries. For domestic waste in the form of waste, the Company allocates funds for payment services for sending waste to the final landfill. In this case, the Company coordinates with the local government where the office is located

These efforts are the responsibility of the Head of Palm Oil & Rubber Engineering & Processing Division (DTSK) and the Head of Assorted Plants Operations Division (DOAT), under the supervision of the Director of Production and Development (DPP).

The Company regularly monitors its waste and pollution performance in order to understand the efficiency of its actions and to continuously seek ways to improve performance. This performance is utilized not only for internal analysis and assessment, but also for reporting to appropriate agencies, particularly government entities. The following are some of the key metrics that the Company monitors: [GRI 305-7, 305-6, 306-1, 306-4]


Metrik Metric	Unit	2022
Jumlah total limbah Total waste	ribu ton thousand ton	6.520
Jumlah limbah B3 Total hazardous waste	ribu ton thousand ton	78
Jumlah limbah non-B3 Total non-hazardous waste	ribu ton thousand ton	6.442
Limbah non-B3 yang tidak digunakan kembali dan dibuang ke TPA Non-hazardous waste that is not reused and disposed of in landfill	ribu ton thousand ton	0 (0% dari total non-B3) 0 (0% of total non-hazardous waste)
BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	34.54
COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	109.88
SOx	ppm (ml/Nm3)	68.80
NOx	ppm (ml/Nm3)	143.91

Berdasarkan angka limbah tersebut, PTPN telah berupaya untuk memanfaatkan 100% limbah non-B3, dan jumlah rata-rata BOD dan COD telah mematuhi aturan baku mutu yang diberikan oleh KLHK. Untuk data BOD dan COD, kami menggunakan angka konsolidasi dari Anper yang memiliki satuan BOD dan COD yang sesuai (mg/L). Data SOx dan NOx, kami menggunakan angka konsolidasi dari 8 Anper yang memiliki satuan sesuai (ppm). [GRI 306-2]

Based on these waste data, PTPN has made efforts to utilize 100% of non-hazardous waste, and the average amount of BOD and COD has complied with the quality standards set by the Ministry of Environment and Forestry. For BOD and COD data, we use consolidated figures from Anper which have the appropriate BOD and COD units (mg/L). For SOx and NOx data, we use a consolidated figure of 8 Anper which has the appropriate calculation units (ppm). [GRI 306-2]







07

KINERJA SOSIAL

SOCIAL PERFORMANCE

Selama akumulatif, selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebanyak 150 kegiatan yang diikuti oleh 201.833 orang, dengan rata rata karyawan mendapatkan 34,99 jam pelatihan.

Cumulatively, during 2022, the Company has organized 150 competency development activities attended by 201,833 people, with an average employee obtaining 34.99 hours of training.

KINERJA MAKSIMAL DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANDAL

OPTIMAL PERFORMANCE WITH RELIABLE HUMAN RESOURCES



Topik Material GRI Standards 2021
Material Topics of GRI Standards 2021

**Kepegawaian 401; Pelatihan dan Pendidikan 404;
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 405; Penilaian Hak
Asasi Manusia 412**

Staffing 401; Training and Education 404; Diversity and Equal
Opportunity 405; Human Rights Assessment 412

Dukungan terhadap SDGs/TPB
Support for SDGs

**TPB ke-1 Tanpa Kemiskinan, TPB ke-2 Tanpa Kelaparan, TPB ke-4
Pendidikan Berkualitas, TPB ke-5 Kesetaraan Gender**

SDG 1 No Poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 4 Quality Education,
SDG 5 Gender Equality

Sumber daya manusia/karyawan merupakan aset strategis bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam menciptakan nilai guna memenuhi kepuasan pelanggan, sekaligus kunci untuk menghadapi persaingan. Dalam operasional bisnis, karyawan merupakan mesin penggerak utama Perseroan, serta pengendali sumber daya yang lain, seperti modal dan teknologi, dalam mewujudkan kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Human capital/employees are a strategic asset for PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in creating value to achieve customer satisfaction as well as being the key to facing competition. Employees are the Company's main driving force in business operations, as well as controllers of other resources such as capital and technology, in accomplishing the performance and targets stated in the Company's Work Plan and Budget.

Sebagai aset yang sangat berharga serta memiliki posisi yang sangat strategis, keberadaan karyawan mendapatkan perhatian tersendiri bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), baik terkait pengembangan kompetensi, tingkat kesejahteraan, remunerasi, jenjang karir dan sebagainya. Pengelolaan karyawan di Perseroan dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan dan perencanaan strategis sesuai kebutuhan perusahaan dan

Employees receive special attention from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as a very important asset with a highly strategic position, both in terms of competency development, welfare level, salary, career path, etc. The Human Resources (HR) Division manages employees in the organization through policies and strategic planning based on the demands of the organization and advancements in the business environment. It is envisaged that by



perkembangan lingkungan bisnis. Melalui penerapan *best practice* pengelolaan karyawan diharapkan dapat melakukan percepatan perubahan budaya dan adaptasi teknologi digital yang sedang dikembangkan dalam proses bisnis melalui pemenuhan karyawan yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

LANDASAN KEBIJAKAN [GRI 2-23]

Dalam mengelola karyawan, Perseroan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah melalui Undang-Undang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Perseroan juga mengadopsi praktik-praktik ketenagakerjaan terbaik yang umum dilakukan di Indonesia, mulai perencanaan, seleksi dan perekrutan, manajemen karir, remunerasi, hingga jaminan sosial dan pensiun. Praktik dan pengelolaan seperti itu dilakukan sebagai komitmen Perusahaan dalam menegakkan hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis. [GRI 3-3]

Selaras dengan regulasi tentang ketenagakerjaan, maka dalam mengelola sumber daya manusia, Perusahaan selalu menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan antar-manusia, baik dari segi jenis kelamin, golongan, suku dan ras, agama, pandangan politik, dan sebagainya. Bagi Perusahaan, perbedaan tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Penghargaan tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia seharusnya dinikmati tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras atau warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul bangsa atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lain. [GRI 3-3]

Regulasi terkait serta prinsip-prinsip ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia terkait ketenagakerjaan nasional maupun internasional tersebut kemudian dijadikan landasan akan Kebijakan Hak Asasi Manusia PTPN, yang kemudian diturunkan menjadi standar dan prosedur-prosedur untuk implementasi tiap topik terkait. Implementasi dari Kebijakan ini, termasuk pelaksanaan inisiatif untuk mencapai komitmen peningkatan kinerja perusahaan ke depan untuk topik-topik sumber daya manusia, menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan pengawasan Direktur Sumber Daya Manusia. PTPN akan mempublikasikan kebijakan terkait pada situs resmi PTPN. Kebijakan Hak Asasi Manusia PTPN juga sudah memiliki kebijakan terkait dengan kelompok disabilitas/kelompok rentan.

KESETARAAN KESEMPATAN BEKERJA [GRI 405]

Penghargaan terhadap prinsip kesetaraan karyawan merupakan salah satu langkah nyata Perseroan dalam menghargai hak normatif karyawan. Bagi Perseroan, keberagaman karyawan dari segi jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, pandangan politik dan sebagainya, merupakan keniscayaan dan menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih berwarna. Sesuai prinsip kesetaraan, maka semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan meniti karier, termasuk menempati posisi-posisi penting di level manajemen, bahkan di jenjang *top management*. Kesetaraan juga berlaku dalam pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerimaan upah/remunerasi, dan sebagainya.

using best practices in employee management, it will be possible to expedite cultural change and adopt digital technology that is being produced in business operations through the fulfillment of sufficient employees in terms of both quality and quantity.

BASIS OF POLICY [GRI 2-23]

In managing employees, the Company refers to the applicable labor regulations, particularly Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, the Company also adopts practices regulations, and labor practices commonly carried out in Indonesia, ranging from planning, selection, and recruitment, career management, remuneration, to social security, and pensions. Such practices and management are conducted as part of the Company's commitment to upholding employment rights and obligations in order to achieve harmonious industrial relations. [GRI 3-3]

In accordance with employment regulations, the Company always respects and upholds differences between humans in terms of gender, class, ethnicity and race, religion, political views, etc. These differences, according to the Company, are human rights because they are inherent in every individual since birth. The respect is consistent with the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which states that human rights should be enjoyed regardless of race or color, gender, language, religion, political views or others, national or social origin, or property, birth, or other status. [GRI 3-3]

Related regulations and principles of employment and human rights related to national and international employment are then used as the basis for PTPN's Human Rights Policy, which is then developed into standards and procedures for the implementation of each related topic. The implementation of this Policy, including the implementation of initiatives to achieve a commitment to improve the company's future performance on human resource topics, is the responsibility of the Head of Human Resources Division with the supervision of the Director of Human Resources. PTPN will publish related policies on PTPN's official website. PTPN's Human Rights Policy already has policies related to groups with disabilities/vulnerable groups.

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY [GRI 405]

Appreciation of the principle of employee equality is one of the Company's concrete efforts toward protecting employees' normative rights. For the Company, employee diversity in terms of gender, class, ethnicity, religion, race, political views, etc is a requirement that enriches social life. According to the equality principle, all employees have the same opportunity to work and pursue a career, including taking important positions at the management level, including top management. Equality also applies to competency development, performance assessment, and receiving wages/remuneration, among other things.

Lebih dari itu, bagi Perseroan, keberagaman merupakan kesempatan berharga untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, kreatif, dan produktif. Lingkungan kerja inklusif & setara juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan menciptakan kultur yang positif. Implementasi prinsip kesetaraan sekaligus merupakan kontribusi Perseroan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Secara nyata, penghargaan terhadap prinsip keberagaman atau keanekaragaman tercermin dalam komposisi karyawan dan tata kelola tertinggi di Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi) baik dari segi usia, pendidikan, jenis kelamin, suku, agama dan sebagainya. Selaras dengan prinsip tersebut, Perseroan tidak membedakan rasio gaji pokok dan remunerasi antara karyawan perempuan dan laki-laki. Jika terdapat perbedaan remunerasi, hal itu lebih disebabkan oleh kompetensi masing-masing karyawan. Selama tahun 2022 tidak terdapat laporan diskriminasi dalam WBS PT Perkebunan Nusantara III (Persero). [GRI 405-1, 405-2, 406-1]

Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan talenta masyarakat lokal tanpa memandang ras, agama, suku, maupun status ekonomi karyawan. Rata-rata pekerja pelaksana berasal dari kota dan kabupaten dimana kebun tersebut berada. Pekerja pelaksana memiliki tendensi untuk bekerja di kebun hingga masa pensiun. Kami memprioritaskan pekerja pelaksana yang berasal dari masyarakat lokal serta memprioritaskan anak dari pegawai PTPN.

Per 31 Desember 2022, sebanyak 10.9% dari total karyawan adalah wanita, dan 9.4% dari total karyawan Perseroan menduduki posisi manajemen adalah wanita. Seiring dengan prinsip kesetaraan, Perseroan terus mengupayakan untuk meningkatkan peran dan representasi karyawan melalui inisiatif-inisiatif berikut:

1. Menerapkan *Respectful Workplace Policy* (RWP) dan Kode Etik Perusahaan yang ditandatangani oleh manajemen dan disosialisasikan ke seluruh karyawan.
2. Mendukung dan memfasilitasi jalannya kelompok-kelompok afinitas seperti "*women support group*" untuk membangun kesadaran akan hal-hal seperti etika di tempat kerja dan kekerasan seksual, membangun rasa keterikatan, dan memperkuat representasi suara
3. Memastikan bahwa semua pekerja perempuan dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh melalui program Srikandi BUMN agar para pemimpin wanita dapat membagikan pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin dan mentorship karir langsung agar dapat bertumbuh
4. Melakukan pelatihan tentang keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi seluruh grup, seperti pelatihan Wawasan Kebangsaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebhinekaan yang dilakukan untuk setiap insan yang bergabung ke dalam PTPN.
5. Meningkatkan *awareness* dan ketertarikan melalui komunikasi pesan seperti "*Perempuan di Perkebunan*".

Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jajaran manajemen menjadi setidaknya 20% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) akan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

Furthermore, diversity is a valuable opportunity for the Company to establish a dynamic, creative, and productive work atmosphere. An inclusive and equal work environment can also boost employee job satisfaction and foster a positive culture. The implementation of the equality principle is also the Company's contribution to the government's present emphasis on the Sustainable Development Goals (SDGs).

Respect for the principle of diversity is expressed in the composition of employees and the Company's highest management (Board of Commissioners and Board of Directors) in terms of age, education, gender, ethnicity, religion, etc. In accordance with this principle, the Company does not differentiate the ratio of basic salary and remuneration between female and male employees. If there is a difference in remuneration, it is more related to the competency of each individual. Throughout 2022, there is no report found about discrimination in WBS system of PT Perkebunan Nusantara. [GRI 405-1, 405-2, 406-1]

We also committed to empower people talent without concerning employee's race, religion, and economy status. In practice, employee and staffs coming from the city or region where the PTPN Plantation or Unit exists. Our employees tend to work on the plantation until retirement period. We prioritize to employ workers who come from the local community and prioritize the children of PTPN employees.

As of December 31, 2022, 10.9% of the total employees were women, and 9.4% of the Company's total employees in management positions were women. In line with the principle of equality, the Company continues to strive to increase the role and representation of employees through the following initiatives:

1. Implementing a *Respectful Workplace Policy* (RWP) and Company Code of Ethics signed by management and disseminated to all employees.
2. Supporting and facilitating the running of affinity groups such as "*women support groups*" to build awareness of issues such as workplace ethics and sexual violence, build a sense of engagement, and strengthen voice representation
3. Ensuring that all female workers have the opportunity to develop and grow through the Srikandi BUMN program so that female leaders can share learning to become leaders and direct career mentorship so they can grow
4. Conducting training on diversity to create a safe and inclusive work environment for the entire group, such as National Insight (Wawasan Kebangsaan) training which emphasizes the principles of diversity which is carried out for every person joining the Company.
5. Increasing awareness and interest through communication of messages such as "*Women in Plantations*".

Going forward, the Company is committed to increasing the number of women in management to at least 20% by 2030. To achieve this target, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) will undertake the following initiatives:



1. Mengkomunikasikan pesan terkait “Perempuan di Perkebunan” ke universitas-universitas dan masyarakat sekitar untuk memberikan kesempatan kerja dan dukungan PTPN terhadap keberagaman gender
2. Memberikan beasiswa dalam jurusan dengan jumlah pekerja perempuan minim untuk mendorong lebih banyak perempuan bergabung dengan perusahaan perkebunan
3. Mengembangkan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi perempuan (misalnya melalui hotline untuk pelecehan seksual, ketersediaan PPE untuk perempuan, mess yang mengakomodasi kebutuhan perempuan)
4. Mengembangkan lingkungan pembelajaran & pengembangan inklusif (misalnya, mentorship di divisi bisnis dengan perwakilan perempuan rendah)
5. Membangun kelompok afinitas (misalnya perempuan di kelompok perkebunan) untuk memperkuat ikatan dan afiliasi serta untuk berbagi *best practice* dalam lingkungan pekerjaan

1. Communicating messages regarding “Women in Plantations” to universities and surrounding communities to provide PTPN employment opportunities and support for gender diversity
2. Offering scholarships for courses with few female workers in order to encourage more women to work for plantation companies.
3. Creating a safe and inclusive work environment for women (for example, through sexual harassment hotlines, the provision of PPE for women, and accommodation for women’s requirements).
4. Promoting an inclusive learning and development environment (for example, mentorship in business divisions with low female participation).
5. Establish affinity groups (for example, women in plantation groups) to strengthen ties and affiliations and share best practices in the workplace.

Implementasi prinsip kesetaraan kesempatan dalam bekerja di atas merupakan bentuk ketaatan Perseroan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, praktik tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI). Dukungan terhadap kesetaraan juga merupakan bentuk nyata Perseroan terhadap program Pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan *Sustainable Development Growth* (SDG) nomor lima terkait kesetaraan gender dengan tujuan untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

The implementation of the principle of equal opportunity at work is a form of the Company’s compliance with the Law concerning Manpower (Labor Law) and Law concerning Job Creation. In addition, the practice is also aligned with Law No. 21 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, and Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia). Support for equality is also a concrete form of the Company’s commitment to the Government of Indonesia’s program to implement Sustainable Development Goals (SDG 5) related to gender equality with the purpose of achieving Gender Equality and Empowering Women.

TUNJANGAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN

Seperti disampaikan pada Bab Profil, berdasarkan statusnya, karyawan Perseroan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima karyawan sebagaimana tabel berikut: [\[GRI 401-2\]](#)

BENEFITS BASED ON EMPLOYEE STATUS

As stated in the Profile Chapter, based on their status, employees of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) consist of permanent employees and nonpermanent employees. The difference in status affects the allowances received by employees as shown in the following table: [\[GRI 401-2\]](#)

Jenis Komponen Penghasilan yang Diterima Berdasarkan Status Karyawan

Types of Components of Income Received Based on Employee Status

Komponen Penghasilan & Iuran Wajib Compulsory Income & Contribution Components	Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Temporary Employee	
	Pimpinan Managerial	Pelaksana Staffing	Pimpinan Managerial	Pelaksana Staffing
Gaji Pokok Basic Salary	√	√	√	√
Tunjangan Tetap Fixed Allowance	√	√	√	√
Tunjangan Tambahan Biaya Hidup Additional Allowance for Living Expenses	√	√	√	√
Tunjangan Sewa Rumah House Rental Allowance	√	√	√	√
Tunjangan Listrik Electricity Allowance	√	√	√	√

Jenis Komponen Penghasilan yang Diterima Berdasarkan Status Karyawan
Types of Components of Income Received Based on Employee Status

Komponen Penghasilan & Iuran Wajib Compulsory Income & Contribution Components	Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Temporary Employee	
	Pimpinan Managerial	Pelaksana Staffing	Pimpinan Managerial	Pelaksana Staffing
Tunjangan Air Water Allowance	√	√	√	√
Tunjangan Transport Transportation Allowance	√	√	√	√
Tunjangan Cuti (Uang Cuti Tahunan/Pjg) Leave Allowance (Annual/Long Leave)	√	√	-	-
Tunjangan Pajak Tax Allowance	√	√	√	√
Tunjangan Jabatan Positional Allowance	√	-	√	-
Komponen Prestasi I (Kinerja) Achievement Component I (Performance)	√	-	√	-
Komponen Prestasi II (Kompeten) Achievement Component II (Competence)	√	-	√	-
Komponen Prestasi III (Risiko) Achievement Component III (Risks)	√	-	√	-
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (4 Program) BPJS Ketenagakerjaan Contribution (4 Programs)	√	√	√	√
Iuran BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Contribution	√	√	√	√
Iuran Pensiun (Dapenbun/DPLK/JP) Pension Fee (Dapenbun/DPLK/JP)	√	√	-	-
Pemberian Hak Cuti Granting Leaves	√	√	√	√
Program Asuransi Kesehatan Health Insurance Program	√	√	√	√

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA [GRI 403]

Kesehatan dan keselamatan pekerja memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan operasional PTPN. Apabila kesehatan dan keselamatan pekerja tidak diperhatikan maka terdapat risiko produktivitas yang menurun serta implikasi hukum bagi PTPN yang dapat dianggap gagal memberikan lingkungan pekerjaan yang aman. Kami memiliki komitmen untuk mencapai *zero accident* dalam lingkungan kerja PTPN untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan produktivitas. Untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan pekerja, kami menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif seperti sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja, pelatihan, dan audit yang dilakukan secara berkala. [GRI 3-3]

Untuk mencapai komitmen tersebut, perusahaan telah mengimplementasikan beberapa inisiatif: [GRI 3-3, 403-1]

1. Saat ini PTPN menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diseluruh anak perusahaan dan wilayah operasional PT Perkebunan Nusantara (persero) serta mencakup karyawan tetap dan karyawan kontrak yang diaudit setiap 3 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 yang meliputi:
 - a. Penetapan Kebijakan SMK3
 - b. Perencanaan K3
 - c. Pelaksanaan Rencana K3

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY [GRI 403]

The health and safety of workers has a significant impact on PTPN operational activities. If workers' health and safety are not taken into account, there is a risk of decreased production as well as legal ramifications for PTPN for failing to offer a safe work environment. The Company has made a commitment to achieve zero accidents in the PTPN work environment in order to foster productivity growth. The Company adopts many policies and initiatives to address worker health and safety risks, including worker safety and health management system, training, and periodic audits. [GRI 3-3]

In achieving the commitment, the Company has implemented several initiatives: [GRI 3-3, 403-1]

1. Currently PTPN implements Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in all subsidiaries and operational areas of PT Perkebunan Nusantara (persero) and includes permanent employees and contract employees, which is audited every 3 years in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012 which includes:
 - a. Determination of SMK3 Policy
 - b. OHS Planning
 - c. Implementation of OHS Plan



- d. Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3
- e. Peninjauan & Peningkatan kinerja SMK3
- 2. Pelaksanaan SMK3 di lingkungan Perseroan dijamin oleh Direksi, sedangkan penerapan dan pengawasan performa SMK3 di setiap unit PTPN merupakan tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Holding PTPN Group bersama P2K3 pada masing-masing unit PTPN.
- 3. Selain menerapkan SMK3, kami juga menerapkan sosialisasi, pelatihan, dan pemenuhan kualifikasi k3 atau sertifikasi k3 bagi personil yang membutuhkan kualifikasi k3 tertentu. Pelatihan yang dilakukan termasuk pelatihan umum K3, karyaloka QHSE dan K3, serta pelatihan petugas K3
- 4. Untuk memastikan setiap risiko pekerjaan diawasi dan diinvestigasi, PTPN telah membuat aplikasi SIMAKO (Sistem Manajemen Risiko) untuk pelaksanaan identifikasi risiko oleh seluruh *risk owner* dengan sistem teknologi informasi. Hasil dari penilaian risiko keselamatan dan proses investigasi akan dilaporkan ke manajemen melalui Rapat Tinjauan Manajemen
- 5. Kami juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap peralatan-peralatan, ruangan, serta sarana dan prasarana lainnya. Pemeriksaan berkala juga diterapkan kepada karyawan yang terlibat langsung dengan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 6. Kami juga memberikan pelatihan untuk mendapatkan izin kerja khusus untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di lingkungan yang memiliki risiko tinggi yaitu yang bekerja diatas 3-4 meter dan memanen di jalur listrik

Dengan inisiatif-inisiatif tersebut, PTPN berhasil menekan *lost time injury frequency rate* (LTIFR) sejak tahun 2020 di sekitar angka 2, namun kami tidak akan berhenti bekerja sampai angka ini dapat diturunkan secara konsisten. Kami juga dengan penuh duka menyampaikan bahwa terdapat 5 fatalitas karyawan PTPN yang terjadi pada tahun 2022 akibat kegiatan operasional PTPN. Kami telah melakukan investigasi terhadap kecelakaan kerja ini, dan kami tidak akan berhenti bekerja untuk terus mengaplikasikan pembelajaran dari kejadian pahit ini untuk meminimalisir kemungkinan kejadian yang sama untuk terulang kembali di masa depan. [GRI 403-9]

Metrik Metric	Unit Unit	2022	2021	2020
LTIFR	Rate	1,996	1,746	2,004
Fatalities	orang people	5	2	5

Ke depannya, perusahaan berkomitmen untuk mencapai zero *fatalities* di PTPN dan mengurangi LTIFR sebesar 15% setiap tahunnya. Pengembangan inisiatif untuk meningkatkan keselamatan kerja ini lebih lanjut antara lain: [GRI 403-2, 403-5, 403-6, 403-7, 403-10]

- 1. Memperkuat mekanisme identifikasi bahaya & penilaian untuk mengidentifikasi, memantau (termasuk bahaya kecil) melalui aplikasi SIMAKO
- 2. Memastikan berjalannya proses internal untuk melacak proses mitigasi & PIC dari semua bahaya yang teridentifikasi
- 3. Memastikan kesesuaian & perolehan sertifikasi internasional, misalnya ISO 45001 pada OHS

- d. OHS Performance Monitoring & Evaluation
- e. Review & Improvement of SMK3 Performance
- 2. The implementation of SMK3 within the Company is guaranteed by the Board of Directors, while the implementation and monitoring of SMK3 performance in each PTPN unit is the responsibility of Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3) together with P2K3 in each PTPN unit.
- 3. In addition to implementing SMK3, the Company also implements socialization, training, and fulfillment of qualifications or certification for personnel requiring specific qualifications. The training provided includes general OSH training, QHSE and OSH workshops, as well as training for OSH officer
- 4. To ensure that every risk of work is monitored and investigated, PTPN has created SIMAKO (Risk Management System) application to carry out risk identification by all risk owners with information technology systems. The results of the safety risk assessment and investigation process will be reported to management through the Management Review Meeting
- 5. The Company also conducts periodic examinations of equipment, rooms, and other facilities and infrastructure. Periodic examinations are also applied to employees who are directly involved with Hazardous and Toxic Materials
- 6. We also provide training to obtain a special work permit for workers who carry out work in high-risk environments, namely those who work above 3-4 meters and harvest on power lines.

With these initiatives, PTPN has succeeded in reducing the *lost time injury frequency rate* (LTIFR) since 2020 at around 2. However, the Company will not stop working until this figure can be reduced consistently. We also regret to inform that 5 PTPN personnel fatalities happened in 2022 as a result of the Company's operational activities. The Company has conducted an investigation into this work accident, and will continue to implement the lessons learnt from this traumatic incident in order to reduce the likelihood of a similar incident occurring in the future. [GRI 403-9]

Going forward, the Company is committed to achieving zero fatalities at PTPN and reducing LTIFR by 15% annually. Development of initiatives to further improve work safety include: [GRI 403-2, 403-5, 403-6, 403-7, 403-10]

- 1. Strengthening hazard identification & assessment mechanisms to identify, monitor (including minor hazards) through SIMAKO application
- 2. Ensuring the running of internal processes to track the mitigation process & PIC of all identified hazards
- 3. Ensuring compliance & obtaining international certifications for example ISO 45001 on OHS

4. Tingkatkan program kebugaran di luar keselamatan & kesehatan kerja (mis., pelacakan penyakit & pengobatan penyakit kronis)
5. Mengembangkan pelatihan keselamatan simulasi VR untuk mempercepat pemahaman karyawan junior
6. Mengembangkan pelatihan/program keselamatan untuk mencapai target prioritas keselamatan (misal, program rotasi untuk mempelajari praktik terbaik)
7. Memusatkan pembelajaran keselamatan dari banyak situs perkebunan untuk berbagi praktik terbaik
8. Mengembangkan cara kerja yang terstruktur bagi kontraktor untuk menyelaraskan & mengadopsi manajemen & budaya PTPN

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga mendukung kesehatan pekerja nya melalui fasilitas dan program-program yang berfokus untuk memitigasi dan menangani penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam lingkungan operasional PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terdapat klinik di masing-masing kebun yang dapat digunakan untuk melakukan check up kesehatan dan juga penanganan kasus kesehatan yang lain. Bagi pekerja yang memiliki kontak langsung dengan limbah B3, maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyakit yang disebabkan oleh kontak langsung dengan limbah B3. Seluruh karyawan Perseroan telah dilindungi oleh asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu PTPN juga melakukan senam jantung untuk mempromosikan kesehatan jantung, melakukan medical check up untuk karyawan PTPN, dan menyediakan sarana olahraga pada setiap unit perkebunan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani karyawan PTPN [GRI 403-3, 403-6, 403-7, 403-10]

Kami mempromosikan dan mensosialisasikan HSE kepada seluruh karyawan kami melalui induksi keselamatan kerja yang dilakukan setiap pagi, melalui banner yang terus mengingatkan pekerja untuk selalu menggunakan APD, dan karyawan pimpinan, pihak pengamanan, dan P2K3 yang bertugas untuk mengingatkan penggunaan APD dan menegur karyawan yang tidak menggunakan APD. [GRI 403-4]

Selain memastikan penerapan sistem SMK3 kepada karyawan PTPN, kontraktor juga diperingatkan untuk selalu menggunakan alat keamanan seperti APD ketika bekerja. Penilaian performa K3 juga menjadi konsiderasi utama dalam menentukan kelayakan vendor untuk melaksanakan pekerjaan.

HUBUNGAN INDUSTRIAL [GRI: 407]

Perseroan menjunjung tinggi hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul sebagai bentuk kepatuhan terhadap pasal 28, Undang-undang Dasar 1945, yaitu: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga taat terhadap isi pasal 104 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh".

Penghargaan terhadap hak karyawan untuk berkumpul merupakan salah satu opsi terbaik untuk mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pegawai dan Perseroan. Untuk itu, Perseroan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk

4. Improving wellness program beyond occupational health & safety (e.g. disease tracking & chronic disease treatment)
5. Developing VR simulation safety training to accelerate understanding of junior employees
6. Developing safety training/programs to achieve safety priority targets (e.g. rotation program to learn best practices)
7. Concentrating safety lessons from multiple plantation sites to share best practices
8. Developing a structured way of working for contractors to align & adopt PTPN management & culture

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) also supports the health of its workers through facilities and programs that focus on mitigating and treating work-related illnesses. Within the operational environment of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) there is a clinic in each plantation that can be used to carry out health check-ups and also handle other health cases. For workers who have direct contact with B3 waste, periodic health checks will be carried out to ensure that there are no diseases caused by direct contact with B3 waste. All of the Company's employees are protected by the health insurance of the Social Security Administering Body. In addition, PTPN also conducts heart exercises to promote heart health, conducts medical check-ups for PTPN employees, and provides sports facilities at each plantation unit to support the physical and spiritual health of PTPN employees [GRI 403-3, 403-6, 403-7, 403-10]

We promote and socialize HSE to all of our employees through work safety inductions which are held every morning, through banners that continue to remind workers to always use PPE, and leadership employees, security personnel, and OHS whose job is to remind the use of PPE and warn employees who do not use PPE. [GRI 403-4]

Apart from ensuring the application of the SMK3 system to PTPN employees, contractors are also warned to always use safety equipment such as PPE when working. OHS performance assessment is also the main consideration in determining the eligibility of vendors to carry out work.

INDUSTRIAL RELATIONS [GRI: 407]

The Company upholds the right of employees to associate and assemble as a form of compliance article 28 which reads: "Freedom to associate and assemble, express thoughts verbally and in writing and so are stipulated by law". In addition, the Company is also subject to and obedient to the contents of Article 104 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which reads: "Every worker/ labor has the right to establish and become a member of a worker/ workers union".

Respect for employees' rights to assemble is one of the best options to create harmonious industrial relations between employees and the Company. For that, the Company gives freedom to all employees to organize in the Company's Workers Union (SP)



berorganisasi dalam wadah Serikat Pekerja (SP) Perusahaan yang bernama Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun), dengan keanggotaan per 31 Desember 2022 91.583 atau 100% dari karyawan tetap perusahaan. Seluruh anggota terlindungi hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati oleh pegawai dan manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Aktivitas yang dilakukan oleh SP Perusahaan adalah semua yang terkait dengan hubungan industrial, advokasi anggota dan pelatihan ketenagakerjaan. 100% karyawan PTPN telah diberikan sosialisasi mengenai Perjanjian Kerja Bersama. [GRI 2-30]

organization called the Plantation Workers Union (SPBun), with membership up to December 31, 2022 amounted to 91.583 or 100% of the Company's permanent employee. All members are protected by their rights and obligations, as stipulated in the Collective Labor Agreement agreed by employees and management of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Activities conducted by the Company's workers union are all related to industrial relations, member advocacy and employment training. Socialization has been provided to 100% of PTPN employees regarding the Collective Labor Agreement. [GRI 2-30]

Nama Name	:	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Plantation Workers Union Federation
Ketua Umum Chairman	:	Asmanuddin Sinaga
Periode Jabatan Period of Position	:	2021-2026
Alamat Address	:	Gd. Gula Negara jl. K.H Fakhruddin No. 14, Tanah Abang, Jakarta Pusat Gula Negara Building jl. K.H Fakhruddin No. 14, Tanah Abang, Central Jakarta
Telp Phone	:	021 3919392
Fax.	:	021 19392

Berkaitan dengan hubungan industrial, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi karyawan untuk turut berperan serta dalam pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik. Komitmen ini ditunjukkan, antara lain, dengan disediakannya sarana pengaduan bagi karyawan. Kebebasan berserikat juga didukung oleh PTPN melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit yang memfasilitasi pertemuan rutin setiap triwulan dengan Serikat Pekerja Perkebunan untuk membahas isu-isu aktual dalam bidang ketenagakerjaan dan hak-hak karyawan. Terhadap pengaduan yang masuk, Perseroan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi terbaik, termasuk dengan melibatkan Serikat Pekerja sebagai perwakilan karyawan. Walaupun saluran pengaduan telah disediakan, namun tidak terdapat pengaduan masalah ketenagakerjaan selama tahun 2022. PTPN juga memastikan bahwa seluruh rantai pasokan (termasuk supplier dan kontraktor) memberikan karyawan mereka hak untuk berserikat; hal ini dilakukan melalui klausul terkait pekerja paksa dalam kontrak supplier dan kontraktor PTPN. [GRI 3-3, 407-1]

In terms of employee relations, the Company provides employees with as many opportunities as possible to contribute to the Company's growth in a positive direction. This commitment is demonstrated, among other things, by providing an employee complaint facility. Freedom of association is also supported by PTPN through the Bipartite Cooperation Institution which facilitates quarterly meetings with the Plantation Workers' Union to discuss actual issues in the field of employment and employee rights. Regarding incoming complaints, the Company will strive to provide the best solution possible, including engaging the Workers Union as employee representatives. Despite the availability of a complaint channel, there were no complaints about labor issues in 2022. PTPN also ensures that the entire supply chain (including suppliers and contractors) gives their employees the right to organize; this is done through clauses related to forced labor in PTPN supplier and contractor contracts. [GRI 3-3, 407-1]

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN [GRI: 404]

Perusahaan meyakini bahwa pengembangan kompetensi merupakan salah satu modal bagi tumbuh dan berkembangnya skala usaha, sekaligus meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan secara berkala. Dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi, Perusahaan mendorong seluruh karyawan tanpa terkecuali, untuk mengembangkan kompetensi dan membantu pengembangan karir mereka. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan softskill maupun hardskill karyawan.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT [GRI: 404]

The Company believes that competency development is one of the capitals for business scale growth and development, as well as increasing competitiveness. As a result, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) organizes training and development programs for all employees on a regular basis. In implementing competency development, the Company encourages all employees, without exception, to develop competencies and assist in their career development. Competency development is conducted through various education and training to improve employees' soft and hard skills.

Pendekatan kami dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi di dalam PTPN dilakukan melalui serangkaian inisiatif

PTPN's approach to competency development is carried out through a variety of activities targeted at strengthening employees'

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill karyawan serta untuk memastikan setiap karyawan kami memperoleh penilaian kinerja secara berkala. Guna meraih hasil yang optimal, Perseroan terus melakukan upaya penyesuaian metode maupun mekanisme dalam menjalankan program pembelajaran dan pengembangan, baik melalui webinar, online learning (blended) maupun offline. Setelah pandemi tertangani, program pembelajaran dan pengembangan bisa dilakukan dengan fleksibel, termasuk secara daring dengan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui zoom meeting dan AgroNow sebagai learning management system (LMS) Perkebunan Nusantara Group. Program pembelajaran dan pengembangan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan melibatkan seluruh entitas perusahaan. Masing-masing entitas menyusun serta melaksanakan program-program pembelajaran technical skill improvement. Adapun program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 secara group meliputi hard & soft competency development, leadership development, sertifikasi digital talent development, talent leadership development program. [GRI 3-3]

Selama akumulatif, selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebanyak 150 kegiatan yang diikuti oleh 201.833 orang, dengan rata-rata karyawan mendapatkan 34,99 jam pelatihan. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi pada tahun pelaporan tercatat sebesar Rp. 146,8 Miliar, naik dibandingkan tahun 2021, yang mencapai Rp 41,72 miliar. Pengembangan Kompetensi selengkapnyanya selama tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut: [GRI 404-1, 404-2]

soft and hard skills, as well as ensuring that each of employees receives frequent performance assessments. To obtain the best possible results, the Company is constantly adjusting ways and mechanisms for delivering learning and development programs, both through webinars, online learning (blended), and offline. After the pandemic is over, learning and development programs can be carried out more flexibly, especially online, by employing technology, specifically zoom meetings and AgroNow as Perkebunan Nusantara Group's learning management system (LMS). By incorporating all business entities, the learning and development program is carried out while taking into account efficacy and is adjusted to the existing budget. Each entity plans and executes technical skill improvement learning programs. Hard and soft competency development, leadership development, certification, digital talent development, and talent leadership development programs have all been implemented throughout 2022. [GRI 3-3]

Accumulatively, during 2022, the Company has held 150 competency development activities attended by 201,833 people, with an average employee receiving 34.99 hours of training. The costs incurred for competency development in the reporting year were recorded at IDR146.8 billion, an increase compared to 2021, which amounted to IDR41.72 billion. The complete description of the Company's Competency Development for 2022 is presented in the following table: [GRI 404-1, 404-2]

No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
1	Online Learning; CEO Insight Competency Leadership	Online Learning; CEO Insight Competency Leadership	PT LPPAN
2	LOOP Leader As Coach Program Batch 27 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Leader As Coach Program Batch 27 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Coaching Institute
3	LOOP Leader As Coach Program Batch 28 (Women Leader PTPN Group)	LOOP Leader As Coach Program Batch 28 (Women Leader PTPN Group)	LOOP Coaching Institute
4	Webinar & Leaders Talks Building Innovative Organization; Membangun PTPN Inovatif & Adaptif Webinars & Leaders Talks Building Innovative Organizations; Building Innovative & Adaptive PTPN	Webinar & Leaders Talks Building Innovative Organization; Membangun PTPN Inovatif & Adaptif Webinars & Leaders Talks Building Innovative Organizations; Building Innovative & Adaptive PTPN	PT LPPAN
5	Webinar & Leaders Talks NWLF: Driving Innovation	Webinar & Leaders Talks NWLF: Driving Innovation	Internal SDM Holding & PTPN IV Internal HR of Holding & PTPN IV
6	Pelatihan Agile Leadership Agile Leadership Training	Pelatihan Agile Leadership Agile Leadership Training	IIAI
7	Executive Coaching Persiapan Asesmen Executive Coaching Assessment Preparation	Executive Coaching Persiapan Asesmen Executive Coaching Assessment Preparation	LMFEB UI
8	Onboarding Calon Karyawan Pimpinan Tahun 2021-2022 Onboarding for 2021-2022 Leadership Employee Candidates	Onboarding Calon Karyawan Pimpinan Tahun 2021-2022 Onboarding for 2021-2022 Leadership Employee Candidates	PT LPPAN



No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
9	PLDP 1 Angkatan VIII PLDP 1 Batch VIII	PLDP 1 Angkatan VIII PLDP 1 Batch VIII	PT LPPAN
10	PLDP 2 Angkatan XIX PLDP 2 Batch XIX	PLDP 2 Angkatan XIX PLDP 2 Batch XIX	PT LPPAN
11	PLDP 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XI PLDP 3 Finance & Accounting Division Batch XI	PLDP 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XI PLDP 3 Finance & Accounting Division Batch XI	PT LPPAN
12	Webinar & Leaders Talks NWLF: Leading Change	Webinar & Leaders Talks NWLF: Leading Change	Internal SDM Holding & PTPN IV Internal HR of Holding & PTPN IV
13	LOOP Leader As Coach Program Batch 29 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Leader As Coach Program Batch 29 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Coaching Institute
14	LOOP Leader As Coach Program Batch 30 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Leader As Coach Program Batch 30 (Kasubdiv) (Head of Sub-Division)	LOOP Coaching Institute
15	Webinar Women Leader; Kontribusi Kartini Masa Kini Webinar Women Leaders; Contribution of Kartini Today	Webinar Women Leader; Kontribusi Kartini Masa Kini Webinar Women Leaders; Contribution of Kartini Today	PT LPPAN
16	Asia Women Leadership Program	Asia Women Leadership Program	Srikandi KBUMN Srikandi Ministry of SOEs
17	CFO School Tahun 2022 CFO School of 2022	CFO School Tahun 2022 CFO School of 2022	BLMI - FHCI
18	PLDP 4	PLDP 4	PT LPPAN
20	PLDP 2 Angkatan XX PLDP 2 Batch XX	PLDP 2 Angkatan XX PLDP 2 Batch XX	PT LPPAN
21	LOOP Leader As Coach Program Batch 35 dan 39 LOOP Leader As Coach Program Batch 35 and 39	LOOP Leader As Coach Program Batch 35 dan 39 LOOP Leader As Coach Program Batch 35 and 39	LOOP Coaching Institute
22	LOOP Leader As Coach Program Batch 40 dan 41 LOOP Leader As Coach Program Batch 40 and 41	LOOP Leader As Coach Program Batch 40 dan 41 LOOP Leader As Coach Program Batch 40 and 41	LOOP Coaching Institute
23	PLDP 2 Angkatan XXI PLDP 2 Batch XXI	PLDP 2 Angkatan XXI PLDP 2 Batch XXI	PT LPPAN
24	PLDP 1 Angkatan IX PLDP 1 Batch IX	PLDP 1 Angkatan IX PLDP 1 Batch IX	PT LPPAN
25	PLDP 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XII PLDP 3 Finance & Accounting Division Batch XII	PLDP 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XII PLDP 3 Finance & Accounting Division Batch XII	PT LPPAN
26	PLDP 3 Bidang Pendukung Bisnis Angkatan V PLDP 3 Business Support Division Batch V	PLDP 3 Bidang Pendukung Bisnis Angkatan V PLDP 3 Business Support Division Batch V	PT LPPAN
27	Webinar & Leaders Talks NWLF: Customer Focus	Webinar & Leaders Talks NWLF: Customer Focus	Internal SDM Holding & PTPN VIII Internal HR of Holding & PTPN VIII
28	Webinar & Leaders Talks NWLF: Driving Execution	Webinar & Leaders Talks NWLF: Driving Execution	Internal SDM Holding & PTPN IX Internal HR of Holding & PTPN IX
29	Webinar & Leaders Talks NWLF: Managing Diversity	Webinar & Leaders Talks NWLF: Managing Diversity	Internal SDM Holding & PTPN X Internal HR of Holding & PTPN X
30	PLDP 4 Bidang Tanaman Kelapa Sawit PLDP 4 Palm Oil Plants	PLDP 4 Bidang Tanaman Kelapa Sawit PLDP 4 Palm Oil Plants	PT LPPAN
31	PLDP 4 Bidang Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit PLDP 4 Palm Oil Engineering & Processing	PLDP 4 Bidang Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit PLDP 4 Palm Oil Engineering & Processing	PT LPPAN

No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
32	Webinar & Leaders Talks NWLF: Building Strategic Partnership	Webinar & Leaders Talks NWLF: Building Strategic Partnership	Internal SDM Holding & PTPN XIII Internal HR of Holding & PTPN XIII
33	Webinar & Leaders Talks NWLF: Strategic Orientation	Webinar & Leaders Talks NWLF: Strategic Orientation	Internal SDM Holding & PT KINRA Internal HR of Holding & PT KINRA
34	Webinar & Leaders Talks NWLF: Digital Leadership	Webinar & Leaders Talks NWLF: Digital Leadership	Internal SDM Holding & PTPN III (Persero) Medan Internal HR of Holding & PTPN III (Persero) Medan
35	Onboarding Calon Karyawan Pimpinan Tahun 2022 Onboarding for 2022 Leadership Employee Candidates	Onboarding Calon Karyawan Pimpinan Tahun 2022 Onboarding for 2022 Leadership Employee Candidates	PT LPPAN
36	Leadership Development; Immersion Program	Leadership Development; Immersion Program	PT Deloitte Consulting
37	Pelatihan & Sertifikasi ERMCP & QRM ERMCP & QRM Training & Certification	Pelatihan & Sertifikasi ERMCP QRMP ERMCP & QRM Training & Certification	Center for Risk Management & Sustainability
38	Sertifikasi QIA tingkat Dasar QIA Certification Basic Level	Sertifikasi QIA tingkat Dasar QIA Certification Basic Level	YPIA
39	Sertifikasi QIA tingkat Manajerial QIA Certification Managerial Level	Sertifikasi QIA tingkat Manajerial QIA Certification Managerial Level	YPIA
40	Sertifikasi HR Skema Pengembangan HC Perencanaan HC HC Development Scheme & HC Planning HR Certification	Sertifikasi HR Skem Pengembangan HC & Perencanaan HC HC Development Scheme & HC Planning HR Certification	LSP HCMI FHCI
41	Sertifikasi Risk Governance Duel (CERG & QRGF) Risk Governance Duel (CERG & QRGF) Certification	Sertifikasi Risk Governance Duel (CERG & QRGF) Risk Governance Duel (CERG & QRGF) Certification	Center for Risk Management & Sustainability
42	Sertifikasi Ahli K3 Umu General OHS Expert Certification	Sertifikasi Ahli K3 Umu General OHS Expert Certification	LSP HCMI FHCI
43	Certified Management Accountant	Certified Management Accountant	CMA
44	Sertifikasi E-Procurement KBUMN	Sertifikasi E-Procurement KBUMN Ministry of SOEs E-Procurement Certification	PLN Corporate University
45	Sertifikasi Ahli K3 Umu General K3 Expert Certification	Sertifikasi Ahli K3 Umu General OHS Expert Certification	LSP HCMI FHCI
46	Certified Culture Agent (CCA)	Certified Culture Agent (CCA)	ACT Consulting
47	Certified Culture Specialist (CCS)	Certified Culture Specialist (CCS)	ACT Consulting
48	Sertifikasi QIA tingkat Dasar Batch I Group QIA Certification Basic Level Batch I Group	Sertifikasi QIA tingkat Dasar Batch I Group QIA Certification Basic Level Batch I Group	YPIA
49	Sertifikasi QIA tingkat Dasar Batch II Group QIA Certification Basic Level Batch II Group	Sertifikasi QIA tingkat Dasar Batch II Group QIA Certification Basic Level Batch II Group	YPIA
50	Sertifikasi QIA Lanjutan PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Advanced QIA Certification	Sertifikasi QIA Lanjutan PTPN II (Persero) QIA Certification Advanced Level PTPN III (Persero)	YPIA



No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
51	Sertifikasi Reguler Technical Analyst (RTA) & Regular Securities Analyst (RSA) Certification Regular Technical Analyst (RTA) & Regular Securities Analyst (RSA)	Sertifikasi Reguler Technical Analyst (RTA) & Regular Securities Analyst (RSA) Regular Technical Analyst (RTA) & Regular Securities Analyst (RSA) Certification	PT Reksa Madani Candradimuka
52	Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA Certification	Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial QIA Certification Managerial Level	YPIA
53	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	BPKP
54	Sertifikasi Certified Human Resources Officer (CHRO) dan Certified Recruitment Selection Officer (CRSO) Certification of Certified Human Resources Officer (CHRO) and Certified Recruitment & Selection Officer (CRSO)	Sertifikasi Certified Human Resources Officer (CHRO) dan Certified Recruitment & Selection Officer (CRSO) Certification of Certified Human Resources Officer (CHRO) and Certified Recruitment & Selection Officer (CRSO)	Sahabat Karir Indonesia
55	Sertifikasi Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Certification from the Indonesian Aero Sport Federation (FASI)	Sertifikasi Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Certification from the Indonesian Aero Sport Federation (FASI)	FASI
56	Certified Information System Auditor	Certified Information System Auditor	PT Inixindo Persada Rekayasa Komputer
57	TOT Certificatio	TOT Certificatio	PT LPPAN
58	Pelatihan Advanced Financial Modelling & Valuation Advanced Financial Modeling & Valuation training	Pelatihan Advanced Financial Modelling & Valuation Advanced Financial Modeling & Valuation training	Fidelitas Institute
59	Training PLC & VSD Pabrik Gula Sugar Factory PLC & VSD Training	Training PLC & VSD Pabrik Gula Sugar Mill PLC & VSD Training	PT LPPAN
60	Webinar Kesehatan; Waspada Fatty Liver & Hiperkolesterolemia Health Webinars; Alert Fatty Liver & Hypercholesterolemia	Webinar Kesehatan; Waspada Fatty Liver & Hiperkolesterolemia Health Webinar; Fatty Liver & Hypercholesterolemia Awareness	Internal Holding
61	Webinar Kesehatan; Strategi Memulai Pola Hidup Yang Sehat Health Webinars; Strategy to Start a Healthy Lifestyle	Webinar Kesehatan; Strategi Memulai Pola Hidup Yang Sehat Health Webinar; Strategy to Start a Healthy Lifestyle	Internal Holding
62	Pelatihan Manajemen Bibitan PTPN VI PTPN VI Seedling Management Training	Pelatihan Manajemen Bibitan PTPN VI Seedling Management Training PTPN VI	PT LPPAN
63	Online Learning; Implementasi Aplikasi AGRHRIS Online Learning; AGRHRIS Application Implementation	Online Learning; Implementasi Aplikasi AGRHRIS Online Learning; AGRHRIS Application Implementation	PT LPPAN
64	Workshop Analisis Oil Losses & Dasar Pengoperasian Alat FossNir Workshop on Oil Losses Analysis & Basic Operation of the FossNir Tool	Workshop Analisis Oil Losses & Dasar Pengoperasian Alat FossNir Workshop on Oil Losses Analysis & Basic Operation of the FossNir Tool	PPKS Medan
65	Pelatihan Ms. Excel for Mastering Microsoft Excel for Mastering training	Pelatihan Ms. Excel for Mastering Microsoft Excel for Mastering training	Binus Center Bintara
66	Pelatihan Awareness P & C RSPO PTPN Group RSPO PTPN Group Awareness P&C Training	Pelatihan Awareness P & C RSPO PTPN Group RSPO PTPN Group Awareness P&C Training	RSPO Kompas Enviro Institute

No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
67	Pelatihan Key Risk Indicators (KRIs) Key Risk Indicators (KRIs) Training	Pelatihan Key Risk Indicators (KRIs) Key Risk Indicators (KRIs) Training	Center for Risk Management & Sustainability
68	Pelatihan Risk Assessment Techniques Risk Assessment Techniques training	Pelatihan Risk Assessment Techniques Risk Assessment Techniques training	Center for Risk Management & Sustainability
69	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Audit Training	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Audit Training	YPIA
70	Webinar KSO dan KPBU (Aspek Legal, Akuntansi & Pajak) KSO and KPBU Webinar (Legal, Accounting & Tax Aspects)	Webinar KSO dan KPBU (Aspek Legal, Akuntansi & Pajak) Webinar on KSO and KPBU (Legal, Accounting & Tax Aspects)	Padjadjaran Karya Mandiri
71	Pelatihan Transfer Pricing Documentation Transfer Pricing Documentation Training	Pelatihan Transfer Pricing Documentation Transfer Pricing Documentation Training	DDTC Academy
72	Professional Financial Modeller (PFM)	Professional Financial Modeller (PFM)	RJ Consulting
73	Pelatihan PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Latest PSAK Training According to IFRS Convergence	Pelatihan PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Latest SFAS Training According to IFRS Convergence	IAI
74	Pelatihan Data Analysis For Internal Auditor Data Analysis Training for Internal Auditors	Pelatihan Data Analysis For Internal Auditor Data Analysis Training for Internal Auditors	IIAI
75	Pelatihan Accounting for Decision Making Accounting for Decision Making Training	Pelatihan Accounting for Decision Making Accounting for Decision Making Training	PPA FEBUI
76	Pelatihan Basic Financial Modelling Basic Financial Modeling training	Pelatihan Basic Financial Modelling Basic Financial Modeling Training	PPA FEBUI
77	Sharing Session; Agile Organization	Sharing Session; Agile Organization	FHCI
78	Workshop Hubungan Industrial Industrial Relations Workshop	Workshop Hubungan Industrial Industrial Relations Workshop	Lembaga Pusat Pengkajian Informasi Nasional National Institute for Information Studies Center
79	Pelatihan Lead Auditor RSPO P & C V2018 RSPO P&C Lead Auditor Training V2018	Pelatihan Lead Auditor RSPO P & C V2018 RSPO P&C Lead Auditor Training V2018	Checkmark Training
80	Webinar & Leader Talks; Sustaining Performance Through Innovation Webinars & Leader Talks; Sustaining Performance Through Innovation	Webinar & Leader Talks; Sustaining Performance Through Innovation	PT LPPAN
81	Pelatihan Filling Management Filling Management Training	Pelatihan Filling Management Filling Management Training	PPM Manajemen
82	Pelatihan Marketing Communication Marketing Communications Training	Pelatihan Marketing Communication Marketing Communications Training	PT LPPAN
83	Pelatihan Asisten Tanaman Tebu Sugarcane Plant Assistant Training	Pelatihan Asisten Tanaman Tebu Sugarcane Assistant Training	PT RPN (P3GI)
84	Pelatihan Mengenal Peralatan & Konstruksi Pabrik Kelapa Sawit Training on Palm Oil Mill Equipment & Construction	Pelatihan Mengenal Peralatan & Konstruksi Pabrik Kelapa Sawit Training on Palm Oil Mill Equipment & Construction	PT LPPAN



No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
85	Pelatihan Manajemen Perlindungan Tanaman Kepala Sawit Palm Head Plant Protection Management Training	Pelatihan Manajemen Perlindungan Tanaman Kepala Sawit Palm Oil Plants Protection Management Training	PT LPPAN
86	Pelatihan Manajemen Pemupukan Kelapa Sawit Palm Oil Fertilization Management Training	Pelatihan Manajemen Pemupukan Kelapa Sawit Palm Oil Fertilization Management Training	PT LPPAN
87	Pelatihan Utilitas & Efisiensi Ua Steam Utility & Efficiency Training	Pelatihan Utilitas & Efisiensi Ua Steam Utility & Efficiency Training	PT LPPAN
88	Webinar Technical Skill Improvement; Mill Performance	Webinar Technical Skill Improvement; Mill Performance	PT LPPAN
89	Pelatihan Dasar-Dasar Maintenance Pabrik Gula Sugar Factory Maintenance Fundamentals Training	Pelatihan Dasar-Dasar Maintenance Pabrik Gula Sugar Mill Maintenance Fundamentals Training	PT LPPAN
90	Pelatihan Sistem Pengendalian Manajemen I; Manajemen Biaya Management Control System Training I; Cost Management	Pelatihan Sistem Pengendalian Manajemen I; Manajemen Biaya Management Control System Training I; Cost Management	PT LPPAN
91	Workshop Mitigasi & Manajemen Risiko SP2DK & Pemeriksaan Pajak Dalam Pelaporan SPT PPH Badan SP2DK Risk Mitigation & Management Workshop & Tax Examination in Corporate PPH SPT Reporting	Workshop Mitigasi & Manajemen Risiko SP2DK & Pemeriksaan Pajak Dalam Pelaporan SPT PPH Badan Workshop on SP2DK Risk Mitigation & Management & Tax Audit in Corporate Income Tax Return	Padjadjaran Karya Mandiri
92	Pelatihan Petani Tebu Millennial Millennial Sugarcane Farmers Training	Pelatihan Petani Tebu Millennial Millennial Sugarcane Farmer Training	PT RPN (P3GI)
93	Workshop Pemetikan Teh Yang Peoduktif & Berkualitas Productive & Quality Tea Picking Workshop	Workshop Pemetikan Teh Yang Peoduktif & Berkualitas Workshop on Productive & Quality Tea Picking	Internal Holding
94	Webinar Technical Skill Improvement; The Challenges of Implementing Sugarcane	Webinar Technical Skill Improvement; The Challenges of Implementing Sugarcane	PT LPPAN
95	Webinar Collaboration; Collaborate or Collapse	Webinar Collaboration; Collaborate or Collapse	PT LPPAN
96	Pelatihan Pengenalan Neraca Dalam Pabrik Gula Training on Introduction to Balance in Sugar Factory	Pelatihan Pengenalan Neraca Dalam Pabrik Gula Introduction to Balance Sheet in Sugar Mill	PT LPPAN
97	Pelatihan Penyusunan Kajian Bisnis/Studi Kelayakan Business Assessment/Feasibility Study Preparation Training	Pelatihan Penyusunan Kajian Bisnis/Studi Kelayakan Business Assessment/Feasibility Study Preparation Training	PPM Manajemen
98	Pelatihan & Kursus Kompetensi Tukang Masak Pabrik Gula Sugar Factory Cook Competency Course & Training	Pelatihan & Kursus Kompetensi Tukang Masak Pabrik Gula Competency Course & Training for Sugar Mill Cooks	PT LPPAN
99	Pelatihan Perencanaan Perusahaan I (RKAP) Company Planning Training I (RKAP)	Pelatihan Perencanaan Perusahaan I (RKAP) Company Planning I Training (the Company's Work Plan and Budget)	PT LPPAN
100	Pelatihan Manajemen Strategis Strategic Management Training	Pelatihan Manajemen Strategis Strategic Management Training	PT LPPAN
101	Pelatihan Administrasi Penjualan Sales Administration Training	Pelatihan Administrasi Penjualan Sales Administration Training	PT LPPAN

No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
102	Pelatihan IACM IACM Training	Pelatihan IACM IACM Training	BPKP
103	Webinar Technical Skill Improvement	Webinar Technical Skill Improvement	PT LPPAN
104	Pelatihan HR Audit HR Audit Training	Pelatihan HR Audit HR Audit Training	PT LPPAN
105	Webinar dan FGD Membangun Industri Gula Nasional Series 5 Webinar and FGD Building the National Sugar Industry Series 5	Webinar dan FGD Membangun Industri Gula Nasional Series 5 Webinar and FGD on Building the National Sugar Industry Series 5	PT RPN (P3GI)
106	Webinar & Inspirasi Ramadhan; Tausiyah dan Do'a Bersama Ramadan Webinar & Inspiration; Tausiyah and Prayer Together	Webinar & Inspirasi Ramadhan; Tausiyah dan Do'a Bersama Ramadan Webinar & Inspiration; Tausiyah and Prayer Together	PT LPPAN
107	Workshop Finance & Accounting for Non Finance	Workshop Finance & Accounting for Non Finance	YPIA
108	Webinar Technical Skill Improvement; Sustainable Compliance Palm Oil Intensive	Webinar Technical Skill Improvement; Sustainable Compliance Palm Oil Intensive	PT LPPAN
109	Pelatihan Fisiologi Tanaman Kelapa Sawit Palm Oil Plant Physiology Training	Pelatihan Fisiologi Tanaman Kelapa Sawit Palm Oil Plants Physiology Training	PT LPPAN
110	Kursus Kompetensi Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS PKS Engineering & Processing Foreman Competency Course	Kursus Kompetensi Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS Foreman Competency Course Palm Oil Plantation Engineering & Processing Operator	PT LPPAN
111	Perencanaan SDM HR planning	Perencanaan SDM HR Planning	PT LPPAN
112	Pelatihan Finance for Non Finance Manager Finance for Non-Finance Manager Training	Pelatihan Finance for Non Finance Manager Finance for Non-Finance Manager Training	PT LPPAN
113	Pelatihan Manajemen SDM HR Management Training	Pelatihan Manajemen SDM HR Management Training	PT LPPAN
114	Workshop Online Finance & Accounting for Non Finance & Accounting	Workshop Online Finance & Accounting for Non Finance & Accounting	YPIA
115	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2022 National Seminar on Internal Audit (SNIA) 2022	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2022 2022 National Seminar on Internal Audit (SNIA)	YPIA
116	Kursus Kompetensi Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS PKS Engineering & Processing Foreman Competency Course	Kursus Kompetensi Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS Foreman Competency Course Palm Oil Plantation Engineering & Processing Operator	PT LPPAN
117	Pelatihan Manajemen SDM HR Management Training	Pelatihan Manajemen SDM HR Management Training	PT LPPAN
118	Kursus Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS PKS Engineering & Processing Operator Foreman Course	Kursus Mandor Operator Teknik & Pengolahan PKS Palm Oil Plantation Engineering & Processing Operator Foreman Course	PT LPPAN
119	Manajemen Operasional Peralatan Pabrik Kelapa Sawit Operational Management of Palm Oil Mill Equipment	Manajemen Operasional Peralatan Pabrik Kelapa Sawit Operational Management of Palm Oil Mill Equipment	PT LPPAN



No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
120	Pelatihan Project Manajemen Project Management Training	Pelatihan Project Manajemen Project Management Training	PPM Manajemen
121	Pelatihan Bahasa Inggris English Training	Pelatihan Bahasa Inggris English Training	EF Jakarta
122	Bimbingan Teknis Nasional Damkar National Fire Service Technical Guidance	Bimbingan Teknis Nasional Damkar Firefighters National Technical Guidance	PSPIN
123	Pelatihan Federasi Serikat Pekerja; Refreshment Program Pengurus Federasi Trade Union Federation Training; Federation Management Program Refreshment	Pelatihan Federasi Serikat Pekerja; Refreshment Program Pengurus Federasi Workers Union Federation Training; Refreshment Program of Federation Management	PT LPPAN
124	Pelatihan Prosedur Ekspor Export Procedure Training	Pelatihan Prosedur Ekspor Export Procedure Training	PPEI
125	Pelatihan Profesional Brevet A & B Brevet A & B Professional Training	Pelatihan Profesional Brevet A & B Brevet A & B Professional Training	IAI
126	Pelatihan Profesional Brevet C Brevet C Professional Training	Pelatihan Profesional Brevet C Brevet C Professional Training	IAI
127	Seminar CSR	Seminar CSR Seminar on CSR	Sinergi Indonesia
128	Creative Selling Techniques	Creative Selling Techniques	PPM Jakarta
129	Workshop Peningkatan Kapasitas Siber Sektor ESDA ESDA Sector Cyber Capacity Building Workshop	Workshop Peningkatan Kapasitas Siber Sektor ESDA Workshop on ESDA Sector Cyber Capacity Building	Badan Siber & Sandi Negara National Cyber & Crypto Agency
130	Webinar Critical Overview	Webinar Critical Overview	IAPI
131	Webinar HSE & SMK 3 Berbasis Risiko Performa Perusahaan HSE & SMK 3 Webinar Based on Company Performance Risk	Webinar HSE & SMK 3 Berbasis Risiko Performa Perusahaan Webinar on the Company's Performance Risk Based HSE & SMK 3	P3IP
132	Training GIS	Training GIS GIS Training	PT Esri Indonesia
133	Pelatihan Agile 4.0 Organization Design Agile 4.0 Organization Design training	Pelatihan Agile 4.0 Organization Design Agile 4.0 Organization Design Training	GML
134	Pelatihan AWS AWS training	Pelatihan AWS AWS Training	Internal Holding - PTPN VII
135	Pelatihan Kedelai Soybean Training	Pelatihan Kedelai Soybean Training	PT LPPAN
136	Pelatihan HPS PPM HPS PPM training	Pelatihan HPS PPM HPS PPM Training	PPM
137	HR Expo	HR Expo	Intipesan
138	Outlook Comodity 2023	Outlook Commodity 2023	PT LPPAN
139	Pelatihan SMAP SMAP Training	Pelatihan SMAP SMAP Training	PT Aurora Bisnis International
140	Pelatihan Awareness Training; 14064 & Carbon Stock Awareness Training Training; 14064 & Carbon Stock	Peatihan Awareness Training; 14064 & Carbon Stock Awareness Training Training; 14064 & Carbon Stock	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Perse o)
141	Pelatihan Refreshment Fundamental Risk Management Fundamental Risk Management Refreshment Training	Pelatihan Refreshment Fundamental Risk Management Fundamental Risk Management Refreshment Training	BPKP

No.	Jenis Program Type of Program	Lembaga Pelaksana Implementing Agency	
		PT LPPAN	Non-PT LPPAN
142	BUMN Startup Day	BUMN Startup Day	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
143	Pelatihan Anti Korupsi Anti-Corruption Training	Pelatihan Anti Korupsi Anti-Corruption Training	KPK
144	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 2 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 2	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 2 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 2 Briefing	PT LPPAN
145	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 3 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 3	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 3 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 3 Briefing	PT LPPAN
146	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 4 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 4	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 4 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 4 Briefing	PT LPPAN
147	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 5 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 5	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 5 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 5	PT LPPAN
148	Webinar Peringatan 2 (Dua) Tahun AKHLAK Webinar Commemorating 2 (Two) Years of AKHLAK	Webinar Peringatan 2 (Dua) Tahun AKHLAK Webinar on the 2nd Anniversary of AKHLAK	PT LPPAN
149	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 6 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 6	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 6 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 6 Briefing	PT LPPAN
150	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 7 Internalization of the Work Ethic of Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 7	Internalisasi Etos Kerja Planters & Apel Siaga Planters Nusantara Batch 7 Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Nusantara Batch 7 Briefing	PT LPPAN



No.	Nama Program Program Name	Keterangan Description
1.	Leadership Development	<p>PTPN Group mengembangkan kepemimpinan karyawan melalui leadership development program. Pada tahun 2022, Perkebunan Nusantara Group telah mengimplementasikan program kepemimpinan berjenjang yaitu Plantation Leadership Development Program (PLDP). Selain program berjenjang, juga diselenggarakan program pengembangan kompetensi kepemimpinan melalui Online Learning; CEO Insight Competency Leadership, Immersion Program.</p> <p>PTPN Group develops employee leadership through a leadership development program. In 2022, Perkebunan Nusantara Group has implemented a tiered leadership program, namely the Plantation Leadership Development Program (PLDP). In addition to tiered programs, leadership competency development programs were also carried out through Online Learning; CEO Insight Competency Leadership, Immersion Program.</p>
2.	Digital Talent Development	<p>Program pengembangan digitalisasi mandatori dari Kementerian BUMN dengan target ketercapaian digital talent sebesar 5% dari jumlah karyawan yaitu sebesar 7.442 orang yang harus memperoleh pengembangan digitalisasi. Pada tahun 2022 Perkebunan Nusantara Group telah berhasil memberikan pengembangan digitalisasi sebanyak 7.506 orang.</p> <p>Mandatory digitalization development program from the Ministry of SOEs with a target of achieving digital talent of 5% of total employees, namely 7,442 people must receive digitalization development. In 2022 Perkebunan Nusantara Group has succeeded in providing digitalization development for 7,506 people.</p>
3.	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	<p>Sertifikasi kompetensi dilakukan pada prioritas jabatan yang memerlukan pengakuan atas legitimasi akan kompetensinya. Pada tahun 2022, Perkebunan Nusantara Group telah melakukan sertifikasi yang meliputi sertifikasi ERMCP & QRM, Sertifikasi QIA tingkat Dasar, Sertifikasi QIA tingkat Manajerial, Sertifikasi QIA tingkat Lanjutan, Certified Internal Audit Executive (CIAE), Sertifikasi HR Skem Pengembangan HC & Perencanaan HC, Sertifikasi Risk Governance Duel (CERG dan QRGP), Sertifikasi Ahli K3 Umum, Certified Management Accountant, Sertifikasi E-procurement KBUMN, Certified Culture Agent (CCA), Certified Culture Specialist (CCS), Certified Human Resources Officer (CHRO dan Certified Recruitment & Selection Officer (CRSO), Sertifikasi Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dan Sertifikasi Trainer of Trainer (TOT).</p> <p>Competency certification is carried out on priority positions that require recognition of the legitimacy of their competence. In 2022, Perkebunan Nusantara Group has carried out certifications which include ERMCP & QRMP certification, QIA Certification Basic Level, QIA Certification Managerial Level, QIA Certification Advanced Level, Certified Internal Audit Executive (CIAE), HR Certification for HC Development & HC Planning Scheme, Risk Governance Duel Certification (CERG and QRGP), General OHS Expert Certification, Certified Management Accountant, the Ministry of SOEs' E-Procurement Certification, Certified Culture Agent (CCA), Certified Culture Specialist (CCS), Certified Human Resources Officer (CHRO) and Certified Recruitment & Selection Officer (CRSO), Basic Remote Pilot (BRP) & Remote Pilot License (RPL) Certification of the Indonesian Aero Sport Federation (FASI) and Trainer of Trainer (TOT) Certification.</p>
4.	Nusantara Women Leadership Forum (NWLF)	<p>Nusantara Women Leadership Forum dibuat sesuai arahan Kementerian BUMN untuk meningkatkan jumlah Karyawan Pimpinan Perempuan di lingkungan PTPN Group, anggotanya BoD-1 hingga BoD-3 di lingkungan Perkebunan Nusantara Group. Kegiatan NWLF di tahun 2022 meliputi pengembangan kompetensi melalui webinar & leader talk, leader as a coach training, leadership development program women class, women competition, penerapan kebijakan Respectful Workplace Policy (RWP) dan beberapa kegiatan kolaborasi lainnya dengan Srikandi BUMN dan BUMN Muda Perkebunan.</p> <p>The Nusantara Women Leadership Forum was established pursuant to the direction of the Ministry of SOEs in order to increase the number of Women Leadership Employees within the PTPN Group, its members are BoD-1 to BoD-3 within Perkebunan Nusantara Group. NWLF activities in 2022 include competency development through webinars & leader talks, leader as a coach training, leadership development program for women class, women competition, implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP) and several other collaborative activities with Srikandi BUMN and BUMN Muda Perkebunan.</p>
5.	Competency Development	<p>Competency development ini meliputi Hard Competency dan Soft Competency Development yang dilakukan secara daring, luring atau kombinasi (blended learning) dengan optimalisasi AgroNow sebagai learning platform PTPN Group. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 150 pelatihan yang diikuti oleh 201.833 orang. Pembelajaran yang diselenggarakan internal, Perkebunan Nusantara Group melibatkan PT LPP Agro Nusantara sebagai learning partner dan Corporate University Perkebunan Nusantara Group. Selain itu, Perkebunan Nusantara Group juga telah melakukan pengukuran Indeks Efektivitas Pembelajaran (IEP).</p> <p>This competency development includes Hard Competency and Soft Competency Development which is carried out online, offline or in combination (blended learning) by optimizing AgroNow as PTPN Group's learning platform. In 2022, there were 150 trainings attended by 201,833 people. Internally held learning, Perkebunan Nusantara Group involved PT LPP Agro Nusantara as a learning partner and Corporate University Perkebunan Nusantara Group. In addition, Perkebunan Nusantara Group has also measured the Learning Effectiveness Index (IEP).</p>

No.	Nama Program Program Name	Keterangan Description
6.	BUMN Muda Perkebunan	Sesuai dengan arahan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) bahwa seluruh BUMN diminta membentuk organisasi pengurus BUMN Muda untuk dapat berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN dalam rangka mendukung dan mensukseskan program kerja BUMN. BUMN Muda Perkebunan sebagai mitra perusahaan dalam meningkatkan keterlibatan karyawan di kegiatan social, sebagai role model, penghubung komunikasi, ide kreatif, dan monitoring program kerja yang diturunkan dari BUMN Muda Kementerian BUMN kepada Pengurus Sektor BUMN Regional. In accordance with the directives of Indonesia Human Capital Forum (FHCI) that requires all SOEs to establish BUMN Muda management organization to be able to collaborate with the Ministry of SOEs and all SOEs in order to support and succeed in SOEs work programs. BUMN Muda Perkebunan acts as the Company's partner in increasing employee involvement in social activities, as a role model, communication liaison, creative ideas, and monitoring work programs handed down from BUMN Muda of the Ministry of SOEs to Regional SOEs Sector Administrators/Managers.
7.	Culture Development	Program pengembangan budaya dalam rangka mewujudkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Program budaya di lingkup Perkebunan Nusantara Group meliputi Program Mandatory dan Program Participatory. Program mandatory di tahun 2022 sebanyak 13 program meliputi Change Vision, NGUPI BerAKHLAK, AKHLAK Booster, AKHLAK Fun Quiz, AKHLAK Experience Sharing, AKHLAK Story, AKHLAK Upskilling Series, Millennial Ber-AKHLAK Boot Camp, AKHLAK Heroes, Corporate Culture Award, Leaders Culture Exploration, ToT AKHLAK Coaching Clinic dan Pedoman AKHLAK. Perkebunan Nusantara Group juga melakukan Evaluasi dari Nilai-Nilai Budaya telah diterapkan melalui pengukuran 360°, yang dilaksanakan per semester pada tiap tahunnya. Selain itu, guna menumbuhkan Back to Basic Planters, Perkebunan Nusantara Group juga memiliki program Internalisasi Etos Kerja san Apel Siaga Planters serta mengevaluasi program tersebut melalui Pengukuran Planters Way. Cultural development program to implement Human Resources transformation in State-Owned Enterprises as an identity and work culture bond that supports continuous performance improvement. Mandatory Programs and Participatory Programs are two types of cultural programs offered by Perkebunan Nusantara Group. Change Vision, NGUPI BerAKHLAK, AKHLAK Booster, AKHLAK Fun Quiz, AKHLAK Experience Sharing, AKHLAK Story, AKHLAK Upskilling Series, Millennial Ber-AKHLAK Boot Camp, AKHLAK Heroes, Corporate Culture Award, Leaders Culture Exploration, ToT AKHLAK Coaching Clinic dan Guidelines for AKHLAK were among the 13 mandatory programs in 2022. Perkebunan Nusantara Group also conducts an Evaluation of the Cultural Values that have been implemented through a 360° measurement, which is carried out per semester each year. In addition, in order to develop Back to Basic Planters, Perkebunan Nusantara Group also has Internalization of the Work Ethic of Planters & Planters Briefing program and evaluates this program through Planters Way Assessment.

Kami juga memiliki sistem penilaian talenta kinerja yang dirancang untuk membantu karyawan menilai kinerja mereka dari target yang jelas dan terukur sesuai dengan sasaran organisasi dan KPI yang telah disepakati setiap individu. Beberapa aspek yang dinilai adalah: [\[GRI 404-3\]](#)

1. Aspek Hasil Kerja yang mengukur produktivitas terhadap capaian RKAP, Job desc, dan standar kerja
2. Aspek Perilaku yang mengukur tinggi rendahnya budi pekerti yang meliputi aspek kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama
3. Aspek Kemampuan Teknis yang mengukur ketrampilan, kemampuan, dan pengetahuan kerja
4. Aspek Kemampuan Manajerial yang mengukur kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi, dan pembinaan bawahan

PTPN memiliki proses untuk mengidentifikasi karyawan dengan Competency Level Index (CLI) Online Assessment untuk menilai performa dan potensi hard & soft competencies, dan memberikan kesempatan penugasan dalam proyek-proyek yang memfasilitasi pengembangan mereka.

Mendukung seluruh inisiatif pengembangan di atas, perusahaan juga memahami bahwa selain berinvestasi untuk mengembangkan kompetensi karyawan, amat penting juga untuk meningkatkan retensi karyawan dengan memberikan employee value proposition

The Company has also established performance talent assessment system designed to help employees assess their performance of the clear and measurable targets according to organizational goals and KPIs that have been agreed upon by each individual. Some of the aspects assessed are as follows: [\[GRI 404-3\]](#)

1. Work Results Aspect that measures productivity against the achievements of the Company's Work Plan and Budget, Job desc, and work standards
2. Behavioral Aspect that measures the level of character which includes aspects of honesty, exemplary, discipline, responsibility, and cooperation
3. Technical Capability Aspect that measures skills, abilities, and work knowledge
4. Managerial Capability Aspect that measures leadership, decision-making abilities, communication, and coaching of subordinates

PTPN has a process to identify employees using Competency Level Index (CLI) Online Assessment to assess performance and potential for hard & soft competencies, and provide assignment opportunities in projects that facilitate their development.

In addition to supporting all of the above development initiatives, the Company recognizes that, apart from investing in developing employee competencies, it is critical to boost employee retention by providing a comprehensive employee value proposition. The Company conducts employee engagement



yang menyeluruh. PTPN secara rutin melaksanakan employee engagement survey atau survei dan kuesioner seputar kepuasan karyawan PTPN yang mencakup kepuasan terhadap kultur, lingkungan, arah perusahaan. Di survey tersebut, karyawan juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan bagi PTPN. Beberapa inisiatif yang PTPN lakukan di aspek ini adalah pembangunan sekolah untuk anak-anak karyawan sesuai hasil survei yang mengindikasikan kebutuhan pembangunan sekolah di area perkebunan.

Untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pengembangan kemampuan kepada setiap karyawan PTPN, perusahaan sudah merencanakan implementasi beberapa inisiatif tambahan:

1. Mengembangkan on-the-ground rotation program (misalnya rotasi setiap 12 bulan ke beberapa situs perkebunan yang berbeda) untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menghadapi tantangan & studi kasus yang baru
2. Mengembangkan program coaching internal dengan pemimpin senior agar pemimpin dapat membagikan best practice & mendukung pengembangan bakat
3. Mengembangkan program paparan eksternal (mis. mengunjungi pesaing, pelanggan, pemasok) untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan & aspirasi pihak eksternal
4. Memastikan keberjalanan sistem penilaian kinerja secara konsisten dilakukan dan mendukung budaya sistem penilaian kinerja terbuka baik terhadap atasan dan bawahan,
5. Memastikan keberlangsungan sistem penilaian kinerja dan talent management untuk mengumpulkan hasil umpan balik dari semua bakat dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bakat & kesenjangan kapabilitas secara keseluruhan
6. Memastikan keberlangsungan critical role identification untuk menentukan jumlah peran senior kunci yang dapat dipenuhi dengan bakat internal

Rekapitulasi kegiatan pengembangan kompetensi tahun beserta rerata jam pelatihan karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

surveys on a regular basis, as well as surveys and questionnaires on PTPN employee satisfaction, which covers satisfaction with the Company's culture, environment, and direction. Employees are also given the opportunity to provide feedback for PTPN in the survey. Some of the actions undertaken by PTPN in this regard include the construction of schools for employees' children in response to survey results indicating the need for school development in plantation areas.

To continue to improve the quality and quantity of training and capacity building for every PTPN employee, the Company has planned the implementation of several additional initiatives:

1. Developing on-the-ground rotation program (e.g. rotate every 12 months to different plantation sites) to provide opportunities for employees to take on new challenges & case studies
2. Developing internal coaching programs with senior leaders so leaders can share best practices & support talent development
3. Developing external exposure programs (e.g. visits to competitors, customers, suppliers) to gain insight into the needs & aspirations of external parties
4. Ensuring the performance assessment system is consistently carried out and supporting the culture of an open performance assessment system for both superiors and subordinates,
5. Ensuring the continuity of performance assessment system and talent management to gather feedback from all talents and identify talents training needs & overall capability gaps
6. Ensuring the continuity of critical role identification to determine the number of key senior roles that can be filled with internal talent

Recapitulation of competency development activities for the year along with the full average hours of employee training is presented in the following table:

Tabel Pelatihan dan Rerata Jam Pelatihan Tahun 2020-2022 [GRI 404-1]
Table of Training and Average Training Hours 2020-2022 [GRI 404-1]

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Receiving Training			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Training Hours for Each Worker		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Keseluruhan Overall	91583	97111	105616	3204489,17	1798495	1228.314,08	34,99	18,52	11,63
Berdasarkan Jenis Kelamin By Gender									
Laki-laki Male	78013	85331	91927	2723815,79	1564691,28		34,91	18,33	11,62
Perempuan Female	13570	11780	13689	480673,38	215819,49		35,42	18,32	11,66

Tabel Pelatihan dan Rerata Jam Pelatihan Tahun 2020-2022 [GRI 404-1]
Table of Training and Average Training Hours 2020-2022 [GRI 404-1]

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Receiving Training			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Training Hours for Each Worker		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Berdasarkan kategori jabatan karyawan By Employee Position Category									
Management	37,807	5,826	6,338	224314.24	107909.74		5,93	18,52	11,62
Staf Staff	53,776	91,285	99,278	2980174.93	1744540.85		55,4	19,11	11,63

Untuk pelatihan persiapan pensiun, dari tahun 2020 s.d. 2022 belum dilakukan mengingat kondisi keuangan pada era tersebut dimasing-masing entitas perusahaan belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada pembelajaran yang mendukung proses transformasi PTPN Group.

From 2020 to 2022, retirement preparation training was not carried out since the financial constraints in each corporate entity at the time did not allow it to carry out these activities. Training activities were more focused on learnings that support the transformation of PTPN Group.

Selain memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan yang masih aktif, Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan bantuan peralihan bagi karyawan yang akan memasuki pensiun, sebagaimana tabel berikut: [GRI 404-2]

In addition to providing education and training to active employees, the Company also holds transitional assistance training for employees who are about to retire, as shown in the following table: [GRI 404-2]

Tabel Pelatihan Menjelang Pensiun/Program Bantuan Peralihan Tahun 2020-2022
Table of Pre-Retirement Training/Transitional Assistance Program 2020-2022

Materi Pelatihan Training Materials	Tujuan Objective	Syarat Peserta Participant Requirements	Waktu/Tempat Time/Venue			Jumlah Peserta Number of Participants		
			2022	2021	2020	2022	2021	2020
Pembekalan memasuki Usia Pensiun Debriefing for Entering Retirement Age	Memberikan bekal Karyawan yang akan memasuki masa pensiun Providing provisions for employees who are about to retire	1 tahun menjelang pensiun 1 year before retirement	4-5 Oktober 2022, di The Hill Sibolangit Sumatera Utara October 4-5 2022, at The Hill Sibolangit North Sumatra	-	-	20	-	-

Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlaksana dikarenakan kondisi penyebaran Covid 19 yang belum memungkinkan.

It was not carried out in 2020 and 2021 because the conditions for the spread of Covid 19 were not yet feasible.



PENDIDIKAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan salah satu topik yang kerap melekat pada pelaku usaha di bidang perkebunan, seperti sawit, karet dan sebagainya. Sebagai korporasi yang menghargai hak asasi manusia, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia. Perseroan meyakini, jumlah total karyawan yang dilatih dan jumlah pelatihan yang mereka terima, berkontribusi pada penilaian kedalaman pengetahuan Perseroan mengenai hak asasi manusia, sekaligus menjadi bekal penting saat menghadapi perkara yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia.

Hingga 31 Desember 2022, rekapitulasi jam pelatihan mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia yang relevan untuk operasional Perseroan tercatat sebanyak 0,28 jam. Adapun persentase karyawan yang dilatih selama tahun 2022 mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia tercatat sebanyak 790 orang atau 0,86% dari jumlah karyawan Perseroan. Adapun program dimaksud berupa:

1. Seminar Perlindungan & Kesejahteraan Pekerja
2. Pelatihan Literasi Moderasi Beragama di Lingkungan Perusahaan Perkebunan
3. Webinar Perlindungan Data Pribadi
4. Seminar Ketentuan Ketenagakerjaan; UU Cipta Kerja

EDUCATION ON HUMAN RIGHTS

Human rights are a topic that is frequently associated with business actors in the plantation industry, such as palm oil and rubber. As a company that values human rights, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) provides opportunities for employees to receive human rights education and training. The Company believes that the total number of employees trained and the amount of training they receive contributes to assessing the depth of the Company's knowledge of human rights, as well as being an important provision when dealing with cases related to human rights issues.

As of December 31, 2022, the recapitulation of training hours regarding human rights policies or procedures related to human rights aspects relevant to the Company's operations was recorded at 0.28 hours. The percentage of employees who were trained during 2022 regarding human rights policies or procedures related to human rights aspects was recorded at 790 people or 0.86% of the total number of the Company's employees. The program include:

1. Seminar on Workers' Protection & Welfare
2. Religious Moderation Literacy Training in a Plantation Company Environment
3. Webinar on Personal Data Protection
4. Seminar on Labor Provisions; Law concerning Job Creation

PENGUATAN KEBERLANJUTAN RANTAI PASOK

STRENGTHENED SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY

Topik Material GRI Standards 2021
Material Topics of GRI Standards 2021

[GRI 2-6]

Dukungan terhadap SDGs/TPB
Support for SDGs

TPB ke-1, ke-2, ke-3
SDG 1, SDG 2, SDG 3

Komitmen kami terhadap keberlanjutan tidak hanya berhenti di lingkup langsung perusahaan, namun juga mencakup seluruh pemasok kami, termasuk petani kecil dan koperasi mandiri yang bekerja sama dengan perusahaan untuk membeli tambahan bahan-bahan mentah untuk diolah di semua pabrik PTPN.

PTPN menyadari, apabila aspek sosial dan lingkungan pada rantai pasokan PTPN tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan berpengaruh langsung pada performa Keberlanjutan/ESG PTPN, misalkan adanya kasus Pekerja anak pada kontraktor PTPN, atau adanya Tandan Buah Segar/TBS yang diperoleh dari kebun yang dibuka melalui pembakaran hutan.

Sejalan dengan komitmen PTPN untuk melaksanakan operasi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, PTPN beranggapan bahwa penting untuk menerapkan standar ESG PTPN kepada seluruh rantai pasokan PTPN. Dewan Direksi telah menugaskan Kepala Divisi Pengadaan dan Umum (DPDU) untuk bertanggung jawab atas implementasi inisiatif terkait keberlanjutan rantai pasok serta kinerja terkait, di bawah pengawasan Direktur Umum. [GRI 3-3]

MANAJEMEN PROSES PENGADAAN

Sepanjang proses pengadaan, PTPN telah menerapkan inisiatif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah ini antara lain: [GRI 414-1]

1. **ESG due diligence:** Memastikan ketersediaan pemetaan lahan dan dokumen legalitas konsesi, serta meningkatkan sistem untuk menyertakan pemasok yang memasok TBS guna memastikan tidak ada penanaman di area terlarang.
2. **Kriteria ESG di kontrak pemasok:** PTPN telah mengintegrasikan Sistem Manajemen Keberlanjutan yang juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia kedalam kontrak perjanjian dengan pihak ketiga. Saat ini 100% Pemasok dan Kontraktor sudah memiliki komitmen untuk patuh terhadap Hak Asasi Manusia yang didalamnya mencakup tapi tidak terbatas pada: [GRI 408-1, 409-1 412-1, 412-3]
 - a. Keselamatan & kesehatan kerja
 - b. Upah hidup sesuai dengan upah minimum provinsi
 - c. Melarang pekerja anak dibawah umur
 - d. Melarang adanya praktik kerja paksa
 - e. Melarang ibu hamil dan ibu sedang menyusui untuk bekerja di area yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

The Company's commitment to sustainability extends beyond the framework of the Company to all of our suppliers, including smallholders and independent cooperatives that collaborate with the Company to purchase extra raw materials for processing in all PTPN mills.

The Company recognizes that if the social and environmental aspects of its supply chain are not properly managed, it will have a direct impact on the Company's Sustainability/ESG performance, such as cases of child labor in PTPN's contractors or fresh fruit bunches obtained from plantations cleared through forest burning.

In line with its commitment to responsible and sustainable operations, the Company's considers it important to apply PTPN's ESG standards to the entire PTPN supply chain. The Board of Directors has assigned the Head of Procurement and General Affairs Division (DPDU) to be responsible for the implementation of supply chain sustainability initiatives and related performance, under the supervision of the Director of General Affairs. [GRI 3-3]

PROCUREMENT PROCESS MANAGEMENT

Throughout the procurement process, PTPN has implemented initiatives to ensure compliance with sustainability principles. These measures include: [GRI 414-1]

1. **ESG due diligence:** Ensure availability of land mapping and concession legality documents, and improve systems to include suppliers supplying FFB, in order to ensure no planting in restricted areas.
2. **ESG criteria in supplier contracts:** PTPN has integrated Sustainability Management System that also addresses Human Rights into its contracts with third parties. Currently 100% of Suppliers and Contractors have a commitment to comply with Human Rights which includes but is not limited to: [GRI 408-1, 409-1 412-1, 412-3]
 - a. Occupational health & safety
 - b. Living wage in accordance with provincial minimum wage
 - c. No child labor
 - d. No forced labor
 - e. Prohibiting pregnant women and nursing mothers from working in areas where hazardous and toxic materials are used.



3. **Pemantauan ESG pemasok:** Memonitor dan mengaudit performa keberlanjutan pemasok secara berkala baik secara internal maupun eksternal, terutama mengenai aktivitas deforestasi
4. **Meningkatkan kinerja rantai pasokan:**
 - a. PTPN melakukan pelatihan dan lokakarya kepada pemasok dan kontraktor untuk membagikan best practices untuk mengelola lingkungan seperti tidak menyemprot pestisida di dekat sungai
 - b. PTPN juga memberikan tandan buah kosong kami kepada pemasok, agar pemasok memiliki pupuk ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali dalam proses penanaman ulang
 - c. Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengelola rantai pasokan, maka PTPN berkomitmen untuk mendukung pihak pemasok agar berupaya mengikuti program implementasi RSPO dan ISPO agar patuh terhadap peraturan anti deforestasi dalam operasi bisnisnya.
 - d. PTPN membantu Program Peremajaan Sawit Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dengan memberikan arahan kepada petani bagaimana mengelola dana yang diberikan BPDPKS dan membantu mengelola proses penanaman kembali

TRACEABILITY PRODUK

Sejalan dengan komitmen kami untuk pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab serta mengakui dampak lingkungan dari pemasok TBS kami, kami meyakini perlunya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi setempat dengan perlindungan lingkungan. Dengan dilakukannya Traceability dalam pengadaan TBS dapat mengurangi risiko lingkungan. [GRI 3-3]

Terdapat dua aspek traceability yang ditekankan oleh PTPN yaitu traceability kepada kebun dimana TBS berasal dan Pabrik dimana CPO diproses. Sebagai sebuah perusahaan, PTPN bertanggung jawab atas penelusuran TBS yang diproses pada pabrik kami. Selain itu, peran kami adalah membuat pemasok dan perantara sadar akan standar penelusuran dan keberlanjutan yang harus kami patuhi, dengan demikian, kami membutuhkan data dari para pemasok agar bisa memetakan ketertelusuran ke perkebunan, seperti yang telah diupayakan oleh PTPN saat ini. Implementasi traceability yang dilakukan oleh PTPN sejalan dengan standar sistem mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional (RSPO/ISPO).

Dalam mematuhi ketentuan RSPO dan Kebijakan Lingkungan kami, PTPN berkomitmen untuk memastikan traceability dari rantai pasokan kami dan secara sistematis memastikan protocol dari RSPO dipatuhi, sesuai dengan yang tertera pada kontrak antara PTPN dan pemasok, yaitu: [GRI 308-1]

1. Berkomitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan
2. Bersedia untuk memberikan akses kepada Lembaga sertifikasi bila diperlukan sebagai komitmen pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO
3. Berkomitmen untuk tidak melakukan pembakaran untuk membuka areal baru maupun peremajaan (replanting)

3. **Monitoring of Suppliers' ESG:** Regularly monitor and audit suppliers' sustainability performance both internally and externally, especially regarding deforestation activities.

4. Improvement of supply chain performance:

- a. The Company conducts training and workshops for suppliers and contractors to share best practices for managing the environment such as not spraying pesticides near rivers
- b. The Company also provides empty fresh fruit bunches to suppliers, so that suppliers have environmentally friendly fertilizers that can be reused in the replanting process
- c. To prevent environmental damage and manage the supply chain, PTPN is committed to supporting suppliers to work towards RSPO and ISPO implementation programs to comply with anti-deforestation regulations in their business operations.
- d. The Company assists the Palm Replanting Program of the Indonesian Oil Palm Plantations Fund Management Agency (BPDPKS) by providing directions to farmers on how to manage the funds provided by BPDPKS and helping manage the replanting process.

PRODUCT TRACEABILITY

In keeping with its commitment to responsible sustainable development and acknowledging the environmental impact of our FFB suppliers, the Company believes that local economic growth must be balanced with environmental protection. The use of traceability in FFB procurement can help to reduce environmental risks. [GRI 3-3]

The Company emphasizes two areas of traceability: traceability to the plantation where the FFB is sourced and traceability to the mill where the CPO is processed. As a company, PTPN is responsible for the traceability of FFB processed at our mills. Furthermore, the Company's role is to inform suppliers and intermediaries about the traceability and sustainability standards that the Company must follow; hence, the Company requires data from suppliers in order to map traceability to plantations, as PTPN has been working on. Traceability is implemented by PTPN in accordance with nationally and internationally recognized quality and certification system standards (RSPO/ISPO).

In complying with the provisions of RSPO and the Company's Environmental Policy, PTPN is committed to ensuring traceability of its supply chain and systematically ensuring RSPO protocols are adhered to, as stated in the contracts between PTPN and suppliers, namely: [GRI 308-1]

1. Committed to preventing environmental pollution
2. Willing to provide access to certification agencies when needed as a commitment to fulfill RSPO principles and criteri
3. Committed to zero burning for new land clearing or replanting.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Tidak melakukan pembukaan lahan baru di areal yang bernilai Stok Karbon Tinggi, Nilai Konservasi Tinggi, dan di atas lahan gambut</p> <p>5. Berkomitmen untuk memastikan TBS yang diterima dan dikirimkan berasal dari areal yang memiliki legalitas, bukan berasal dari areal terlarang dan berkomitmen menerapkan sistem maupun traceability untuk sumber bahan baku yang masuk</p> | <p>4. No new land clearing in areas with High Carbon Stock, High Conservation Value, and on peatlands</p> <p>5. Committed to ensure that the FFB received and delivered originates from legal areas, not from prohibited areas and committed to implementing a traceability system for the source of incoming raw materials.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sejalan dengan prinsip RSPO, dalam proses sertifikasi RSPO perusahaan melakukan audit terhadap setiap pabrik dan kebun untuk mengetahui asal dari TBS dan CPO; pabrik dan kebun yang sudah diaudit akan dimasukkan kedalam data traceability PTPN, di mana antara lain pemasok harus memiliki informasi dibawah ini:

In accordance with RSPO principles, the Company conducts audits of each mill and plantation during the RSPO certification process to determine the origin of FFB and CPO; audited factories and plantations will be included in PTPN traceability data, where suppliers must, among other things, have the following information:

Jenis Informasi Type of Information	RSPO	ISPO
Nama dan alamat sumber TBS Name and address of FFB source	✓	✓
Nama dan alamat pabrik penerima Name and address of receiving factory	✓	✓
Nomor kontrak Contract Number	✓	✓
Tanggal pengiriman Delivery date	✓	✓
Sistem sertifikasi dan non sertifikasi pemasok Supplier certification and non-certification system	✓	✓
Tanggal penerbitan deklarasi berkelanjutan Sustainable declaration issuance date	✓	✓
Sistem pencatatan produk <i>Mass Balance</i> Mass balance product recording system	✓	✓
Volume TBS yang dikirim Volume of FFB delivered	✓	✓
Jarak dari kebun ke pabrik Distance from plantation to mill	✓	✓
Nomor dan jenis truk pengangkut Number and type of transport truck	✓	✓

Di tahun 2022, PTPN telah memperoleh sertifikasi RSPO untuk 56% dari luas areal perkebunan Kelapa Sawit perusahaan, dan PTPN berkomitmen untuk menuntaskan proses sertifikasi ini termasuk untuk mengukuhkan traceability pemasok ini. Meski penuntasan sertifikasi RSPO masih dalam proses, perusahaan telah berinisiatif untuk memulai dengan traceability internal di mana saat ini PTPN telah memiliki 93% traceability to plantation (TTP) dan 100% traceability to mill (TTM) sesuai standar RSPO di atas, sehingga ketika proses sertifikasi RSPO dilakukan sifatnya akan lebih ke arah mengukuhkan traceability tersebut. Selain itu, PTPN juga telah berupaya untuk selalu mengkomunikasikan jumlah lahan yang digunakan oleh *supplier*, jumlah TBS yang diproduksi, dan *support* yang diberikan kepada *supplier* PTPN melalui dokumen *Annual Communication on Progress* untuk RSPO.

In 2022, the Company has received RSPO certification for 56% of the Company's Palm Oil plantation area, and PTPN is committed to completing this certification process including establishing traceability of these suppliers. Although the RSPO certification process is still ongoing, the Company has taken the initiative to begin with internal traceability, where PTPN currently has 93% traceability to plantation (TTP) and 100% traceability to mill (TTM) according to the RSPO standard above, so that when the RSPO certification process is completed, it will be more focused on strengthening the traceability. In addition, PTPN has also tried to always communicate the amount of land used by suppliers, the amount of FFB produced, and the support provided to PTPN suppliers through the Annual Communication on Progress document for RSPO.

Per 31 Desember 2022, beberapa Anak Perusahaan PTPN telah memulai audit secara internal mengenai penilaian lingkungan dan due diligence kepada pemasok berdasarkan SOP Evaluasi Penyedia Barang/Bahan Baku yang mencakup evaluasi lingkungan dan

As of 31 December 2022, several PTPN Subsidiaries have started internal audits regarding environmental assessment and due diligence on suppliers based on the SOP for Evaluation of Suppliers of Goods/Raw Materials that includes environmental evaluation and



pemenuhan terhadap perundang-undangan. Kedepannya, PTPN berkomitmen untuk membuat mekanisme dan laporan sistematis terkait ESG due diligence dan penilaian lingkungan secara berkala kepada seluruh pemasok.

Sejalan dengan itu, perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengaruh kami untuk meningkatkan praktik-praktik keberlanjutan di rantai pasok kami. Kami berkomitmen untuk:

1. Mempertahankan traceability to mill 100% dan meningkatkan traceability to plantation menjadi 100% untuk kelapa sawit, dan mengukuhkan traceability tersebut dengan assessment pihak ketiga
2. Mempertahankan praktik bahwa seluruh (100%) pemasok dan kontraktor menandatangani komitmen akan praktik-praktik keberlanjutan sebagai bagian dari kontrak
3. Melakukan audit berkala kepada pemasok untuk memastikan kepatuhan akan praktik keberlanjutan tersebut, dengan prioritas kepada high-risk suppliers (kurang lebih 20% dari total pemasok) yang akan dimulai di tahun 2025, dimana pada tahun 2030, 100% dari high-risk suppliers akan di audit dalam kurun waktu 5 tahun

Perusahaan berencana mencapai target-target di atas, antara lain dengan:

1. Memastikan ketersediaan pemetaan lahan dan dokumen legalitas konsesi PTPN yang terperinci, serta meningkatkan sistem untuk menyertakan pemasok yang memasok TBS guna memastikan tidak ada penanaman di area terlarang.
2. Melakukan penilaian terhadap pemasok sesuai dengan standard ESG PTPN sebelum melakukan hubungan bisnis, serta memonitor dan mengaudit performa keberlanjutan pemasok secara berkala baik secara internal maupun eksternal, terutama mengenai aktivitas deforestasi dan praktik terkait Hak Asasi Manusia termasuk:
 - a. Kinerja kesehatan dan keselamatan
 - b. Upah hidup minimum
 - c. Jam kerja maksimum (40 jam)
 - d. Kebebasan berkumpul dan hak untuk berserikat
 - e. Tidak ada tenaga kerja anak
 - f. Kondisi hidup yang dapat diterima
 - g. Non-diskriminasi
 - h. Hukuman fisik bagi pekerja
 - i. Pekerja paksa
3. Melanjutkan perbaharuan terhadap sistem pelaporan pemasok dan kontraktor, dan menanggapi 100% aduan terhadap pemasok dan kontraktor terkait kepatuhan prinsip Hak Asasi Manusia.
4. Melakukan pelatihan kepada pemasok seputar topik keberlanjutan termasuk Lingkungan dan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan sosialisasi dan pendidikan intensif terutama kepada petani mandiri, perantara, pengepul untuk memastikan bahwa penelusuran atau traceability dapat dilakukan.
5. Mensosialisasikan dan mendapatkan komitmen pemasok dan kontraktor untuk mematuhi kebijakan NDPE yang dipantau langsung oleh Manajerial Bidang Keberlanjutan.
6. Mengembangkan kapabilitas dan kebijakan audit terhadap pemasok dan kontraktor untuk memonitor kemajuan resolusi hak asasi manusia (termasuk memastikan setiap keluhan sedang diatasi oleh PIC masing-masing).
7. Melibatkan pihak ketiga untuk menilai tiap risiko dan kinerja hak asasi manusia di perkebunan.

compliance with local laws and regulations. Going forward, PTPN is committed to creating systematic mechanisms and reports related to ESG due diligence and periodic environmental assessments for all suppliers.

In line with that, the Company is committed to expanding its influence in order to strengthen sustainable standards throughout the Company's supply chain. The Company is committed to:

1. Maintain 100% traceability to mill and increase traceability to plantation to 100% for palm oil, and strengthen traceability with third-party assessments.
2. Maintain the practice that all (100%) suppliers and contractors sign a commitment to sustainability practices as part of the contract.
3. Conduct periodic audits of suppliers to ensure compliance with sustainability practices, with priority to high-risk suppliers (approximately 20% of total suppliers). which will start in 2025, where in 2030, 100% of high-risk suppliers will be audited within 5 years.

The Company plans to achieve the above targets, among others by:

1. Ensuring the availability of detailed land mapping and legality documents of PTPN concessions, and improving systems to include suppliers supplying FFB to ensure no planting in restricted areas.
2. Conducting supplier assessments in accordance with PTPN's ESG standards prior to entering into business relationships, and regularly monitoring and auditing supplier sustainability performance both internally and externally, especially regarding deforestation activities and human rights related practices including:
 - a. Health and safety performance
 - b. Minimum living wage
 - c. Maximum working hours (40 hours)
 - d. Freedom of association and right to assembly
 - e. No child labor
 - f. Acceptable living conditions
 - g. Non-discrimination
 - h. Physical punishment for workers
 - i. Forced labor
3. Continue refreshing suppliers and contractors reporting system, and responding to 100% of complaints against suppliers and contractors regarding compliance with Human Rights principles.
4. Conducting training to suppliers on sustainability topics including Environment and Human Rights, i.e. intensive socialization and education especially to independent farmers, middlemen, collectors to ensure traceability.
5. Socializing and obtaining suppliers and contractors commitments to comply with NDPE policies monitored directly by the Sustainability Managerial.
6. Developing auditing capabilities and policies for suppliers and contractors to monitor progress on human rights resolutions (including ensuring all complaints are being addressed by the respective PICs).
7. Engaging a third party to assess each human rights risks and performance at the plantations.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

COMMUNITY EMPOWERMENT



Topik Material GRI Standards 2021
Material Topics of GRI Standards 2021

Dampak Ekonomi Tidak Langsung 203; Masyarakat Lokal 413
Indirect Economic Impacts 203; Local Communities 413

Dukungan terhadap SDGs/TPB
Support for SDGs

TPB ke-1 Tanpa Kemiskinan, TPB ke-2 Tanpa Kelaparan, TPB ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; TPB ke-4 Pendidikan Berkualitas, TPB ke-5 Kesenjangan Gender, TPB ke-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB ke-11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, TPB ke-13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB ke-14 Ekosistem Lautan, TPB ke-15 Ekosistem Daratan, TPB ke-17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

SDG 1 No Poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 3 Good Health and Well-Being; SDG 4 Quality Education, SDG 5 Gender Equality, SDG 6 Clean Water and Sanitation, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, SDG 14 Life Below Water, SDG 15 Life on Land, SDG 17 Partnerships for the Goals

HAK-HAK DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL [GRI 411]

Masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun kesepakatan internasional. Perusahaan memahami bahwa terdapat risiko pelanggaran hak masyarakat lokal dan adat pada setiap kegiatan operasional PTPN, seperti hak tanah yang terganggu akibat pembukaan lahan dan area budaya atau sakral yang rusak. Oleh Karena itu, kami berkomitmen untuk

LOCAL COMMUNITY RIGHTS AND ENGAGEMENT [GRI 411]

Local communities, including indigenous peoples, have rights that are recognized and protected by the laws of the Republic of Indonesia and international agreements. The Company recognizes that there is a risk of violating the rights of local and indigenous peoples in every PTPN operation, such as land rights being disturbed due to land clearing and cultural or sacred areas being damaged. Therefore, the Company is committed to safeguarding



menjaga hak-hak masyarakat lokal dan adat dalam lingkungan dan konteks operasional PTPN dan juga meningkatkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat adat sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta konvensi International Labour Organization 169.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terkait pelibatan masyarakat lokal ini menjadi landasan Kebijakan Hak Asasi Manusia PTPN, yang kemudian diturunkan menjadi standar dan prosedur-prosedur untuk implementasi tiap topik terkait. Implementasi dari Kebijakan ini, termasuk pelaksanaan inisiatif untuk mencapai komitmen peningkatan kinerja perusahaan ke depan untuk topik-topik hak dan pelibatan masyarakat lokal, menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (untuk hal-hal terkait hubungan dan komunikasi masyarakat secara umum) dan Kepala Divisi Audit Internal (untuk hal-hal terkait dugaan pelanggaran prinsip-prinsip hak masyarakat lokal), dengan pengawasan Direktur Hubungan Antar Lembaga. Selama tahun 2022, tidak terdapat keluhan dalam WBS PTPN yang mengindikasikan terjadi pelanggaran HAM maupun hak-hak masyarakat adat. [GRI 3-3]

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan, PTPN saat ini telah melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Kami memiliki dan menerapkan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang mengatur hak-hak masyarakat lokal dan adat seperti hak atas tanah, menghindari relokasi, dan perlindungan daerah sensitif budaya. Beberapa komitmen di dalamnya antara lain:
2. Menerapkan prosedur analisis dampak sosial untuk memastikan bahwa tindakan operasional PTPN memiliki dampak minimal kepada komunitas di dalam dan sekitar lingkungan PTPN. Analisis dampak sosial dilakukan melalui survey lapangan dan audiensi dengan komunitas sekitar untuk mendapatkan KBDD; hal ini diterapkan dalam interaksi terhadap masyarakat lokal dan adat
3. Membuat dan menerapkan SOP Komunikasi dan Konsultasi Stakeholder yang menjabarkan mekanisme penanganan keluhan, saran, aspirasi, dari pemangku kepentingan internal dan eksternal
4. Berkomitmen untuk mendapatkan Kesepakatan Bebas Diinformasikan dan Didahulukan (KBDD) sebelum melakukan tindakan operasional yang mungkin berdampak pada hak-hak masyarakat adat dan lokal
5. Berkomitmen untuk tidak memenjarakan human rights defender atau orang-orang yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia serta tidak menggunakan paramilitar untuk menyelesaikan konflik
6. PTPN juga bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya Bumi Hijau Cemerlang dan Bina Alam Lestari untuk melakukan analisis terkait potensi & risiko pelanggaran hak asasi manusia & hak masyarakat adat dan memastikan untuk melakukan perbaikan & pengembangan untuk terus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak masyarakat adat. Pada tahun 2022, PTPN dan lembaga eksternal yang bekerjasama dengan PTPN tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia sekitar & masyarakat adat. [GRI 411-1]
7. Setiap karyawan dan supplier PTPN juga wajib menerima pelatihan mengenai hak asasi manusia yang secara rutin terus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu hak asasi manusia & masyarakat adat. Contoh pelatihannya dapat berbentuk pelatihan wawasan kebangsaan saat orientasi karyawan

the rights of local and indigenous peoples within the environment and context of PTPN's operations and also improving the socio-economic conditions of indigenous peoples in accordance with the Universal Declaration of Human Rights 1948 and International Labor Organization Convention No. 169.

These human rights principles related to local community engagement form the foundation of PTPN's Human Rights Policy, which is then translated into standards and procedures for the implementation of each related topic. Implementation of this Policy, including the implementation of initiatives to achieve future performance improvement commitments for local community rights and engagement topics, is the responsibility of the Head of Corporate Secretariat Division (for general affairs related to community relations and communications) and the Head of Internal Audit Division (for affairs related to alleged violations of local community rights principles), with supervision from the Director of Inter-Agency Relations. There were no complaints in PTPN WBS that indicates any human rights violations or the rights of indigenous peoples. [GRI 3-3]

In implementing this policy in the field, PTPN has currently undertaken several initiatives, among others:

1. Establishing and implementing Human Rights Policy that governs the rights of local and indigenous peoples such as land rights, avoidance of relocation, and protection of culturally sensitive areas. Some of the commitments include:
2. Implementing social impact analysis procedures to ensure that the Company's operational actions have minimal impact on communities in and its surrounding environment. Social impact analysis is conducted through field surveys and hearings with surrounding communities to obtain FPIC; this is applied in interactions with local and indigenous peoples
3. Creating and implementing SOP for Stakeholder Communication and Consultation SOP that outlines the mechanism for handling complaints, suggestions, aspirations, both from internal and external stakeholders.
4. Committing to obtaining Free, Prior and Informed Consent (FPIC) before undertaking operational actions that may impact the rights of local and indigenous peoples
5. Committing to not imprisoning human rights defenders or people who fight for human rights and not using paramilitaries to resolve conflicts
6. The Company is also working together with third parties, such as Bumi Hijau Cemerlang and Bina Alam Lestari to analyze the potential & risk of human rights & indigenous peoples' rights violations and ensure to make improvements & development to continue upholding human rights and indigenous peoples' rights. In 2022, PTPN and external agencies cooperating with PTPN found no violations of human rights in the vicinity & indigenous peoples [GRI 411-1]
7. Every PTPN employee and supplier is also required to receive training on human rights which is regularly conducted with the purpose of raising awareness on human rights & indigenous peoples' issues. An example of training may take the form of national insight training during new employee orientation.

baru. Kami juga memberikan informasi kepada masyarakat sekitar dan masyarakat adat mengenai cara melakukan pengaduan dan proses penyelesaian pengaduan. [GRI 412-2]

8. Meski perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya dampak negatif kepada masyarakat lokal, sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi dampak negatif, PTPN telah menyediakan berbagai saluran pengaduan. Salah satunya, PTPN memiliki sistem whistleblowing (<http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrlj>) yang juga dapat digunakan untuk Pengaduan Masyarakat oleh masyarakat adat dan lokal untuk mengajukan aduan yang berhubungan dengan PTPN. Aduan yang diajukan terhadap PTPN akan diinvestigasi untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan serta bentuk kompensasi yang diberikan apabila diperlukan. Selama tahun 2022, Perseroan menerima 2 pengaduan dari masyarakat, dan keduanya sedang dalam proses penyelesaian.

Perusahaan menyadari, masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan hubungan PTPN dengan masyarakat lokal dan adat. Ke depannya, PTPN berkomitmen untuk menerapkan inisiatif-inisiatif tambahan antara lain:

1. Menerapkan pelatihan wajib kepada karyawan khusus tentang kebijakan hak asasi manusia dan mekanisme keluhan yang tepat (termasuk keluhan-keluhan masyarakat terhadap platform keluhan)
2. Mengembangkan kapabilitas dan kebijakan audit internal untuk memonitor kemajuan resolusi hak asasi manusia (termasuk memastikan setiap keluhan sedang diatasi oleh PIC masing-masing)
3. Meningkatkan sosialisasi whistleblowing system kepada masyarakat lokal dan adat untuk meningkatkan penggunaan
4. Melanjutkan komunikasi & diskusi ke setiap stakeholder terkait sebelum melakukan kegiatan yang berdampak langsung ke stakeholder
5. Menerbitkan inisiatif kemajuan & rencana untuk menyelesaikan keluhan/isu HAM yang sedang berlangsung
6. Memastikan keberlangsungan sistem restorasi bagi korban hak asasi manusia
7. Melibatkan pihak ketiga untuk menilai setiap risiko dan kinerja hak asasi manusia di perkebunan serta melakukan penyelidikan terhadap isu-isu hak asasi manusia yang terjadi
8. Memastikan seluruh tindakan operasional PTPN memperoleh FPIC dari masyarakat lokal dan adat
9. PTPN juga berkomitmen untuk menyelesaikan 70% dari permasalahan masyarakat lokal dan adat yang masuk dalam whistleblowing system PTPN

MEMPERKUAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [GRI 413]

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Penerimaan mereka terhadap keberadaan Perseroan turut menentukan keberlangsungan operasional usaha di masa depan. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, Perseroan melakukan berbagai kebijakan dan program sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab kepada

The Company also provides information to neighboring communities and indigenous peoples on how to file a complaint along with the complaint resolution process. [GRI 412-2]

8. Although the Company has made every effort to avoid negative impacts on local communities, PTPN has established various channels for complaints as a form of responsibility in the event of unfavorable consequences. For example, PTPN has a whistleblowing system (<http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrlj>) which can also be used for Community Complaints by indigenous and local communities to file complaints related to PTPN. Complaints filed against PTPN shall be investigated to establish the appropriate follow-up and, if applicable, the form of compensation paid. During 2022, the Company received two complaints from communities, both of which are now being resolved.

The Company believes that there are still opportunities to strengthen the Company's relationship management performance with local and indigenous peoples. PTPN is committed to adopting new initiatives in the future, including:

1. Implementing mandatory training for employees specifically on human rights policies and appropriate complaints mechanisms (including community complaints on the complaints platform)
2. Developing internal audit capabilities and policies to monitor the progress of human rights resolutions (including ensuring each complaint is being addressed by the respective PIC)
3. Increase socialization of whistleblowing system to local and indigenous peoples to increase its usage
4. Continuing communication & discussion to each relevant stakeholder prior to conducting activities that directly impact stakeholders
5. Publishing progress initiatives & plans to resolve ongoing human rights complaints/issues
6. Ensuring continuity of restoration system for human rights victims
7. Engaging a third party to assess any human rights risks and performance on plantations and conducting investigations into human rights issues that occur
8. Ensuring all PTPN operational actions obtain FPIC from local and indigenous peoples.
9. PTPN is also committed to resolving 70% of local and indigenous peoples issues that are included in the Company's whistleblowing system.

STRENGTHENING COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT [GRI 413]

The community is one of the key stakeholders for PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Their acceptance of the Company's existence influences the long-term viability of the Company's business operations. To gain community support, the Company implements a variety of policies and activities as part of its responsibility to them. One of them is by implementing the Social and Environmental



mereka. Salah satunya dengan menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

Sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN menerapkan TJSL melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK, serta bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Adapun program TJSL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Spirit pelaksanaan TJSL BUMN sejalan dengan TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL PT).

Merujuk regulasi terkini, pelaksanaan TJSL di Perseroan diwujudkan secara konsisten melalui Program Pendanaan UMK dan Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebelum menyelenggarakan program, Perseroan berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. Melalui proses ini, maka program-program TJSL, Pendanaan UMK dan Bantuan/Kegiatan Lainnya yang diselenggarakan selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi Perseroan melalui berbagai program tersebut sekaligus merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TJSL BUMN

Penerapan TJSL BUMN di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merujuk pada kebijakan umum dan peraturan yang berlaku di Indonesia di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 33 menyatakan segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
2. Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Responsibility of State-Owned Enterprises (SOEs TJSL) and Corporate Social Responsibility (CSR).

In accordance with the latest regulation, namely the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/Mbu/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises, SOEs implement TJSL through the Micro and Small Enterprises Funding Program or MSE Funding Program, as well as other assistance and/or activities.

The implementation of SOEs TJSL Program is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000 as the guidelines for program implementation, with the hope that the implementation of SOEs TJSL Program will be more measurable, impactful and sustainable. The objectives of SOEs TJSL program are as follows:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development and law and governance development for the Company.
2. Contributing to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, targeted and measurable in impact and accountability.
3. Fostering micro and small enterprises as well as communities around the Company to be more resilient and independent.

The spirit of SOEs TJSL implementation is consistent with TJSL as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the implementation of which is governed by Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (TJSL PT).

Referring to the latest regulation, the Company's TJSL implementation is constantly implemented through the MSE Funding Program and Other Assistance and/or Activities. Prior to structuring the program, the Company strives to build communication with the local community in order to achieve the best results. TJSL, MSE Funding, and Other Assistance/Activities programs are aligned and in line with the requirements of the community as a result of this process.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF SOES TJSL

The implementation of SOEs TJSL at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) refers to general policies and regulations applicable in Indonesia, among others:

1. Amendment IV to the 1945 Constitution Article 33, which states that all natural resources are utilized for the prosperity of the people.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

IMPLEMENTASI TJSL BUMN TAHUN 2022 [GRI 3-3, 413-1]

Perusahaan melaksanakan Program TJSL BUMN ke dalam dua program besar, yaitu Program Pendanaan UMK dan Program TJSL non PUMK (Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya), yang dilaksanakan dengan suatu konsep pembinaan terpadu dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan program tersebut, Perseroan bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait yang berkompeten di bidangnya. Untuk menjalankan Program Pendanaan UMK, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi layak kredit dan mandiri, Perseroan menyisihkan maksimum 4% dari laba bersih sebagai sumber dananya. Adapun Program TJSL non PUMK, yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di Wilayah Usaha BUMN, dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN. Saat ini seluruh unit usaha PTPN melakukan program TJSL PUMK dan Non-PUMK

Untuk program TJSL Non-PUMK (untuk pemberdayaan masyarakat lokal), total penyaluran dana terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan komitmen kami untuk membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar.

IMPLEMENTATION OF SOES TJSL IN 2022 [GRI 3-3, 413-1]

The Company implements the SOEs TJSL Program into two major programs, namely the MSE Funding Program and the Non-MSE Funding TJSL Program (Assistance and/or Other Activities), which are implemented with an integrated and sustainable development concept. In implementing these programs, the Company collaborates with relevant institutions/agencies that are competent in their fields. In running the MSE Funding Program, which is a program to improve the ability of micro and small enterprises to become creditworthy and independent, the Company sets aside a maximum of 4% of net profit as a source of funds. The non-MSE Funding TJSL Program, which is a program to empower the social conditions of the community by SOEs in the SOEs Areas of Operations, is implemented through the utilization of funds from the SOEs Profit Share. Currently all PTPN business units carry out the TJSL PUMK and Non-PUMK programs.

For the Non-MSE Funding TJSL program (for local community empowerment), the total distribution of funds continues to grow every year in line with the Company's commitment to build and empower the surrounding community.

Metric	Unit	2022	2021	2020
Penyaluran dana TJSL Non-PUMK Distribution of Non-MSE Funding TJSL Program Funds	IDR	98,731,877,925	67,807,111,925	60,541,046,926
% Dana TJSL Non-PUMK dibandingkan Net Income perusahaan tahun sebelumnya % of Non-MSE Funding TJSL Program Funds compared to the Company's Net Income in previous year	%	2.1%	N/A	N/A

Rincian penuh untuk penyaluran dana TJSL di tahun 2022 diterangkan di bagian berikut.

The full details for the distribution of TJSL funds in 2022 are described as follows./

Per 31 Desember 2022, Perusahaan menyalurkan dana TJSL sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the Company disbursed TJSL funds as follows:

- Program Pendanaan UMK:
Realisasi penyaluran Program Pendanaan UMK Tahun 2022 tercatat sebesar Rp 27,287,223,800,- sehingga total penyaluran dana sejak digulirkannya Program Pendanaan UMK sampai dengan tahun 2022 senilai Rp194,770,061,910,- yang disalurkan kepada 4,279 Mitra Binaan.

- MSE Funding Program:
The realization of the distribution of MSE Funding Program in 2022 was recorded at IDR27,287,223,800 so that the total distribution of funds since the launch of the MSE Funding Program until 2022 amounted to IDR194,770,061,910 which was distributed to 4,279 Fostered Partners.



2. Program TJSL non PUMK:
Realisasi penyaluran Program TJSL non PUMK sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 98,731,877,925 dengan rincian:
- Penyaluran melalui Kantor Holding Jakarta Rp 43,885,853,392
 - Penyaluran mandiri Rp 54,846,024,553
 - Jumlah Rp 126,019,101,725

Dengan demikian, total penyaluran dana sejak digulirkannya Program TJSL non PUMK sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp126,019,101,725

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Untuk itu, Perseroan telah merumuskan langkah dan solusi terbaik agar masalah-masalah tersebut tidak membesar dan menjadi hambatan di kemudian hari. Masalah yang dihadapi antara lain:

- Beberapa bantuan TJSL belum berasal dari program inisiatif perusahaan.
- Bantuan yang diberikan belum memiliki ukuran dampak kepada perusahaan.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- Memiliki inisiatif program kerja sesuai dengan TPB Prioritas Perusahaan.
- Menghitung nilai dampak bantuan TJSL yang telah diberikan kepada Masyarakat.

2. Non-MSE Funding TJSL Program:
The realization of the distribution of Non-MSE Funding TJSL Program until the end of 2022 amounted to IDR98,731,877,925 with details as follows:
- Distribution through Holding Office Jakarta IDR 43,885,853,392
 - Independent distribution IDR 54,846,024,553
 - Total IDR 126,019,101,725

Thus, the total distribution of funds since the initiation of the Non-MSE Funding TJSL Program until 2022 amounted to IDR 126,019,101,725

The Company encounters a variety of issues in the field while conducting the TJSL program. As a result, the Company has formulated the best measures and solutions to ensure that these issues do not worsen and become difficulties in the future. Among the issues encountered are:

- Some of TJSL assistance was not provided through the Company's initiative program.
- The assistance provided has yet to have a mechanism for assessing its impact on the Company.

Among the measures to address these issues are:

- Having work program initiatives aligned with the Company's Priority SDGs.
- Calculating the value of the impact of TJSL assistance that has been provided to the community.

Tabel Gambaran TPB Keseluruhan yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Table of Description of Overall SDGs Implemented by PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Pilar Pembangunan Development Pillar	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp)	RKA 2022 RKA 2022 (Rp)	Persentase Capaian (RKA/ Realisasi 2022) Percentage of Achievement (RKA/Realization 2022)	Mapping TPB yang berkaitan SDG Related Mapping
Pilar Ekonomi Economy Pillar	137.738.817.276	215.250.658.762	63,99%	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4 dan TPB 5 SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, and SDG 5
Pilar Sosial Social Pillar	51.829.440.761	36.768.767.336	140,96%	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17 SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, and SDG 17
Pilar Lingkungan Environment Pillar	25.490.839.466	70.879.725.420	35,96%	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14, dan TPB 15 SDG 6, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	9.336.356.280	44.316.431.393	21,07%	TPB 16 SDG 16
Total	224.395.453.783	367.215.582.911	61,11%	

Tabel Program CSV PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Tabel CSV Program of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

No.	Program Program	KAPP Tahun 2022 KAPP 2022	RKA s.d TW-IV Tahun Berjalan (Rp) Work Plan and Budget until Q4 in the current year	Real s.d TW IV Tahun Berjalan Real Plan and Budget until Q-4 in the current year
1	Perbaikan jembatan desa lintasan transportasi TBS Perusahaan Repair of the village bridge for the Company's FFB transportation route	50,000,000	50,000,000	0
2	Bantuan Kepada Pandai Besi (pengrajin alat-alat perkebunan/pertanian seperti egrek, dodos, tojok dll) Assistance to Blacksmiths (craftsmen of plantation/agricultural tools such as egrek, dodos, tojok etc.)	50,000,000	50,000,000	0
3	Perbaikan Jembatan Besi Cot Girek Aceh Utara Repair of North Aceh Cot Girek Iron Bridge	0	0	118,000,000
4	Pendanaan UMK industri gula merah SME funding for the brown sugar industry	50,000,000	50,000,000	0
5	Perbaikan jalan dan jembatan Road and bridge repairs	100,000,000	100,000,000	0
6	Bantuan subsidi pasar murah paket sembako Cheap market subsidy assistance for basic food packages	0	0	74,500,000
7	Bantaun 1000 kg gula walini kepada Dinas Lingkungan Hidup DS Assistance of 1000 kg of walini sugar to the Elementary School Environment Service	0	0	12,900,000
8	Dukungan Sarana Produksi Petani Tebu guna mendukung produktivitas tanaman tebu di sekitar Pabrik Gula - Kolaborasi dengan PT SGN Sugarcane Farmer Production Facility Support to support sugarcane productivity around the Sugar Factory - Collaboration with PT SGN	6,500,000,000	6,500,000,000	0
9	Pelatihan Petani Tebu guna meningkatkan produktivitas tanaman tebu di sekitar pabrik Gula - Kolaborasi dengan PT SGN Sugarcane Farmer Training to increase the productivity of sugarcane plants around the Sugar factory - Collaboration with PT SGN	1,000,000,000	1,000,000,000	0
10	Program Pasar Murah Bargain Market Program	0	0	433,726,462
11	Program Desa Sejahtera Prosperous Village Program	0	0	70,682,500
12	Bantuan pengaspalan ruas jalan simpang Tanah Raja Desa Sei Buluh Serdang Bedagai Asphalt assistance for the Tanah Raja intersection of Sei Buluh Serdang Bedagai Village	0	0	889,504,264
13	Program Pemberian Bantuan kepada Pelaku Usaha UMKM Termasuk Usaha Karyawan dalam Rangka Promosi, Branding dan Pemasaran Produk PTPN IV Program for Providing Assistance to MSME Business Actors Including Employee Business in the Context of Promotion, Branding and Marketing of PTPN IV Products	1,000,000,000	1,000,000,000	0
14	Program Pemberian Bantuan Pupuk, Penyuluhan dan Peningkatan/ Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana Penunjang Produksi kepada Petani Kelapa Sawit Mitra PTPN IV Program of Providing Fertilizer Assistance, Counseling and Improvement/ Provision of Production Supporting Infrastructure Facilities to Palm Oil Farmers PTPN IV Partners	1,500,000,000	1,500,000,000	0
15	Program Pemberian Bantuan kepada Pelaku Usaha UMKM Termasuk Usaha Karyawan dalam Rangka Promosi, Branding dan Pemasaran Produk PTPN IV Program for Providing Assistance to MSME Business Actors Including Employee Business in the Context of Promotion, Branding and Marketing of PTPN IV Products	0	0	252,500,000
16	Program Pemberian Bantuan Pupuk, Penyuluhan dan Peningkatan/ Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana Penunjang Produksi kepada Petani Kelapa Sawit Mitra PTPN IV Program of Providing Fertilizer Assistance, Counseling and Improvement/ Provision of Production Supporting Infrastructure Facilities to Palm Oil Farmers PTPN IV Partners	0	0	2,123,000,000



Tabel Program CSV PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 Tabel CSV Program of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

No.	Program Program	KAPP Tahun 2022 KAPP 2022	RKA s.d TW-IV Tahun Berjalan (Rp) Work Plan and Budget until Q4 in the current year	Real s.d. TW IV Tahun Berjalan Real Plan and Budget until Q-4 in the current year
17	PTPN V Untuk Petani Plasma PTPN V For Plasma Farmers	2,000,000,000	2,000,000,000	1,330,000,000
18	PTPN V Untuk UMK Pandai Besi PTPN V For UMK Blacksmiths	500,000,000	500,000,000	200,000,000
19	Perbaikan Jalan Mitra Plasma Plasma Partner Road Repair	100,000,000	100,000,000	489,000,000
20	Bantuan Pengrajin Alat Panen Harvest Tool Craftsman Help	50,000,000	50,000,000	48,000,000
21	Bantuan perbaikan jalan dan jembatan Road and bridge repair assistance	222,000,000	222,000,000	162,020,500
22	Bantuan peralatan pasca panen untuk Petani TR (mesin kepras/potong rumput) Post-harvest equipment assistance for TR Farmers (kepras/grass cutting machines)	40,000,000	40,000,000	0
23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar Kebun (PMDK) Village Community Empowerment Program around the Plantation (PMDK)	26,961,820,000	26,961,820,000	16,334,682,605
24	Pengembangan Pelaku usaha penjualan Produk Walini 2022	250,000,000	250,000,000	0
25	pengembangan UMK Pelaku usaha Pengrajin Pandai (Pembuatan Alat Pertanian) Development of business actors selling Walini products in 2022	150,000,000	150,000,000	50,000,000
26	Pemberian Modal ke Industri Kreatif Berbasis Limbah Padat Sawit Providing Capital to Palm Solid Waste-Based Creative Industries	0	0	250,000,000
27	Branding, dukungan usaha dan pelatihan untuk masyarakat sekitar yang berdagang dikawasan agro Branding, business support and training for local communities who trade in the agro area	50,000,000	50,000,000	0
28	Bantuan ternak untuk kelompok peternak disekitar kebun Jollong Livestock assistance for farmer groups around the Jollong plantation	30,000,000	30,000,000	0
29	Perbaikan Jalan Lingkungan Kebun Improvement of Garden Environment Roads	0	0	20,000,000
30	Bantuan pinjaman bibit tebu untuk petani tebu Cane seed loan assistance for sugar cane farmers	0	0	295,500,000
31	Pendanaan UMK MSE Funding	16,408,000,000	16,408,000,000	500,000,000
32	Perbaikan jalan lahan HGU Road repair on owned land	115,000,000	115,000,000	66,906,915
33	Penanganan limbah dan debu Waste and dust handling	60,000,000	60,000,000	0
34	Elektrifikasi PJU jalan des Electrification of village roads	0	0	20,000,000
35	Kemitraan dengan UMK penjualan produk retail PTPN XII Partnership with PTPN XII retail product sales MSEs	150,000,000	150,000,000	300,000,000
36	Bantuan alat kerja untuk karyawan lepas teladan Work tool procurement for exemplary freelance employees	25,000,000	25,000,000	0
37	Bantuan Alat Kerja pemeliharaan dan Panen Tebu di kebun Mumbul Maintenance work tools and harvesting sugarcane in the Mumbul plantation	0	0	25,000,000
38	Program PUMK pemberian modal kerja kepada 363 masyarakat sebagai putra daerah asli sekitar unit kerja, untuk mendukung peningkatan kemandirian mitra binaan secara ekonomi Provides working capital to 363 people as indigenous people around the work unit, to support increasing the economic independence of fostered partners	0	0	5,082,000,000

Tabel Program CSV PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Tabel CSV Program of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

No.	Program Program	KAPP Tahun 2022 KAPP 2022	RKA s.d TW-IV Tahun Berjalan (Rp) Work Plan and Budget until Q4 in the current year	Real s.d. TW IV Tahun Berjalan Real Plan and Budget until Q-4 in the current year
39	Perbaikan Jalan & Jembatan di Wilayah Kalbar, Kaltim dan Kalselteng Repair of Roads & Bridges in West Kalimantan, East Kalimantan and Central Kalimantan	70,000,000	70,000,000	0
40	Pemasangan Gorong-Gorong Installation of Culverts	15,000,000	15,000,000	0
41	Penimbunan halaman Gereja dan Masjid Hoarding of Church and Mosque yards	15,000,000	15,000,000	14,000,000
42	Pembangunan jalan poros inti Afd Va Plasma Mengkatang menuju Desa Temiang Kab. Landak Construction of the main axis road of Afd Va Plasma Mengkatang to Temiang Village, Kab. Porcupine			20,000,000
43	Bantuan gorong-gorong perbaikan jalan akses Ds. Olong Pinang Kaltim Culvert assistance for access road repair Olong Village Pinang East Kalimantan			4,900,000
44	Pemberdayaan pedagang kecil di Kota Makassar dengan pemberian bantuan dana dan sarana/prasarana perdagangan dalam pemasaran produk gula (Gollata) PTPN Empowerment of small traders in Makassar City by providing financial assistance and trade facilities/infrastructure in marketing sugar products (Gollata) PTPN	95,000,000	95,000,000	0
45	Bantuan pupuk dan alat pertanian untuk Petani kelapa sawit di Kabupaten Luwu agar Petani menjual TBS ke PTPN Procurement of fertilizers and agricultural tools for oil palm farmers in Luwu Regency so that farmers sell FFB to PTPN	40,000,000	40,000,000	0
46	Pelatihan dan penyuluhan hukum tentang Pertanahan kepada Karang Taruna sekitar wilayah kerja untuk mencegah okupasi lahan Legal training and counseling on land for Karang Taruna around the work area to prevent land occupation	10,000,000	10,000,000	0
47	Bantuan dana/prasarana dalam mendukung pemasaran produk perusahaan Funding/infrastructure assistance in supporting the marketing of the company's products	0	0	5,050,400
48	Bantuan dana/prasarana kepada Asosiasi/Himpunan Petani Sawit dan Karet Funding/infrastructure assistance to the Association/Association of Oil Palm and Rubber Farmers	0	0	4,500,000
49	Dukungan Sarana Produksi Petani Tebu guna mendukung produktivitas tanaman tebu di sekitar Pabrik Gula - Kolaborasi dengan PT SGN Sugarcane Farmer Production Facility Support to support sugarcane productivity around the Sugar Factory - Collaboration with PT SGN	6,500,000,000	6,500,000,000	0
50	Pelatihan Petani Tebu guna meningkatkan produktivitas tanaman tebu di sekitar pabrik Gula - Kolaborasi dengan PT SGN Sugarcane Farmer Training to increase the productivity of sugarcane plants around the Sugar factory - Collaboration with PT SGN	1,000,000,000	1,000,000,000	300,000,000
51	Program Pasar Murah Bargain Market Program	0	0	433,726,462
52	Program Desa Sejahtera Prosperous Village Program	0	0	70,682,500
53	Bantuan pengaspalan ruas jalan simpang Tanah Raja Desa Sei Buluh Serdang Bedagai Asphalt assistance for the Tanah Raja intersection of Sei Buluh Serdang Bedagai Village	0	0	889,504,264



Tabel Program Unggulan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Table of Featured Program PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

No. No.	Program Unggulan Featured Program	TPB SDG	RKAPP Tahun 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget	Anggaran s.d . TW IV Tahun Berjalan Budget until Q4 in the current year	Realisasi s.d TW IV Tahun Berjalan Realization until Q4 in the current year
1	Bantuan Pembangunan/Renovasi mesjid, Mushalla, Pasantren, TPA/TPQ dan sarana ibadah lainnya Construction/renovation of mosques, prayer rooms, Islamic boarding schools, TPA/TPQ and other places of worship	12	110.000.000	110.000.000	68.500.000
2	PTPN II siaga PTPN II standby	15	100.000.000	100.000.000	6.450.000
3	PTPN II Hijau PTPN II Green	15	100.000.000	100.000.000	51.100.000
4	Program penghijauan dan pelestarian alam Greening and nature conservation program	15	3.600.000.000	3.600.000.000	898.000.000
5	Program penanganan dan penanggulangan banjir Flood handling and management program	15	2.957.611.575	2.957.611.575	806.229.080
6	Program ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi Clean water supply and sanitation facilities program	6	1.071.714.790	1.071.714.790	87.979.000
7	Program bantuan sarana ibadah dan pemukiman Religious facilities and settlement assistance program	12	3.472.171.013	3.472.171.013	4.556.916.500
8	Bantuan Program Penghijauan Greening Program Assistance	15	70.000.000	70.000.000	193.973.360
9	Bantuan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi The availability of clean water and sanitation facilities	6	65.000.000	65.000.000	107.223.000
10	Bantuan Sarana kebersihan lingkungan Assistance for environmental cleaning facilities	15	32.000.000	32.000.000	14.300.000

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Program Pendanaan UMK
Table of Source and Use of MSE Funding Program Funds

No.	Uraian Description	RKA Tahun 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp) 2022 Realization	%Capaian Realisasi / RKA 2022 % Realization Achievement
1	Saldo Awal Beginning balance	8.768.470.297	10,576,811,640	120,6
2	Tambahan Dana dari BUMN Pembina Additional Funds from SOE Trustees	500.000.000	375,000,000	75,0
	Pengembalian Pokok Pinjaman Mitra Binaan Return of Foster Partner Loan Principal			
	- Pokok Pinjaman - Loan Principal	73.051.334.971	87,514,617,348	119,8
	- Tidak Teridentifikasi - Undefined	0	0	
	Jumlah Total	73.051.334.971	87,514,617,348	119,8
4	Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain Refund from other SOE Trustees	0	0	

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Program Pendanaan UMK
Table of Source and Use of MSE Funding Program Funds

No.	Uraian Description	RKA Tahun 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp) 2022 Realization	%Capaian Realisasi / RKA 2022 % Realization Achievement
	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Revenue			
5	- Mitra Binaan - Development Partners	4.120.661.577	5,523,789,505	134,1
	- Sinergi - Synergy	0	0	
	Jumlah Total	4.120.661.577	5,523,789,505	134,1
	Pendapatan Lain (Administrasi Bank) Other Income (Bank Administration)	522.934.464	899,298,266	172,0
6	Koreksi Pendapatan Lainnya Correction of Other Income	1.192.500.000	2,587,568,603	217,0
	- Penerimaan Piutang Bermasalah Receipt of Troubled Receivables	0	0	
7	- Dana Titipan Program TJSL TJSL Program Deposit Fund	0	0	
	Jumlah Total	0	0	
Total Total		88.155.901.309	107.477.085.362	121,9

Pelaksanaan program TJSL BUMN merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya. Lebih dari itu, semua kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. [GRI 3-3]

Berdasarkan realisasi penyaluran TJSL non-PUMK tahun 2022, diperkirakan sebanyak 800 ribu orang yang telah menerima manfaat dari program TJSL non-PUMK PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Jumlah penerima TJSL non-PUMK dihitung dengan menggunakan sampel jumlah penerima di beberapa program TJSL non-PUMK, kemudian diekstrapolasi berdasarkan biaya kepada program-program TJSL non-PUMK yang lain. Pada tahun 2023, Perusahaan berkomitmen agar manfaat TJSL non-PUMK dapat diterima oleh 1,1 juta orang. Selain itu, Perusahaan akan terus memperbaiki metode perhitungan penerima manfaat program TJSL non-PUMK.

INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN DUKUNGAN LAYANAN [GRI 203-1]

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan sebagaimana uraian di atas merupakan salah satu prioritas dalam pelaksanaan TJSL BUMN Perseroan Tahun 2022. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang diambil dari ketersediaan infrastruktur tersebut. Tersedianya infrastruktur berupa jalan atau jembatan misalnya, maka masyarakat yang sebelumnya terisolasi akan terbuka aksesnya. Sementara itu, ketersediaan sekolah

The implementation of SOEs TJSL program demonstrates the Company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, social, environment, and law and governance through more integrated, directed, and measurable principles in terms of impacts. Furthermore, all of these efforts can be tracked and are part of the Company's overall strategy. [GRI 3-3]

Based on the realization of non-PUMK TJSL distribution in 2022, it is estimated that as many as 800 thousand people will benefit from PT. Nusantara Plantation III (Persero). The number of non-PUMK TJSL beneficiaries is calculated using a sample of the number of beneficiaries in several non-PUMK TJSL programs, then extrapolated based on costs to other non-PUMK TJSL programs. In 2023, the Company is committed so that the benefits of non-PUMK TJSL can be received by 1.1 million people. In addition, the Company will continue to improve the calculation method for beneficiaries of the non-PUMK TJSL program.

INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND SERVICE SUPPORT [GRI 203-1]

One of the priorities in the implementation of the Company's SOEs TJSL in 2022 is the construction of infrastructure and facilities for communities surrounding the Company's operations, as indicated above. This is inextricably linked to the numerous advantages gained from infrastructure availability. The provision of infrastructure, such as roads and bridges, will allow formerly isolated communities to get access. Meanwhile, the provision



akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan layanan kesehatan yang lain akan menaikkan derajat kesehatan, sedangkan berdirinya sarana ibadah akan membuat penganut agama tersebut bisa menunaikan ibadah dengan khusyu.

Selama tahun 2022, Perseroan banyak menerima proposal atau usulan program bantuan pembangunan infrastruktur dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap dan mengakomodasi proposal tersebut. Namun demikian, Perseroan tetap melakukan seleksi agar program-program yang terpilih bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hingga akhir tahun pelaporan, beragam infrastruktur telah dibangun Perseroan sebagai investasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Semua program tersebut merupakan bantuan dari Perseroan sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara gratis. Beragam investasi infrastruktur yang dilakukan Perseroan terbukti membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN [GRI 203-2]

Perseroan berkomitmen agar keberadaannya memberikan dampak positif dan manfaat sebesar-besarnya untuk segenap pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di sekitar Perseroan sebagai pemangku kepentingan eksternal. Dampak ekonomi tidak langsung atas keberadaan Perseroan antara lain, membuka lapangan kerja dan penduduk setempat/lokal bisa bergabung menjadi pekerja setelah lolos proses rekrutmen. Selain itu, keberadaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok atau vendor barang dan jasa yang dibutuhkan Perseroan. Pada gilirannya, terserapnya pekerja lokal dan vendor barang dan jasa lokal akan meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

of schools will improve educational quality, the development of various health services will improve health, and the establishment of worship facilities will allow religious devotees to worship solemnly.

Throughout 2022, the Company received many requests and proposals for infrastructure development support programs and made every efforts to absorb and accommodate these proposals. However, the Company continues to perform selection in order for the selected initiatives to give the most possible benefit to the community. Until the end of the reporting year, various infrastructures have been built by the Company as investments that are very beneficial for the local community. All of these programs are supported by the Company so that the community can use them for free. Various infrastructure investments made by the Company have proven to bring changes and progress to the community.

SIGNIFICANT INDIRECT ECONOMIC IMPACT [GRI 203-2]

The Company is committed that its existence provides positive impacts and maximum benefits for all stakeholders, including the communities around the Company as external stakeholders. Indirect economic impacts of the Company's presence include, among other things, the creation of job opportunities, with local individuals able to join as employees after passing the recruitment process. Furthermore, the existence of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) opens opportunities for local businesses to become suppliers or vendors of goods and services required by the Company. As a result of the absorption of local workers and sellers of local goods and services, income will increase and local economic growth will accelerate.

Keterangan Remarks	2022	2021	2020
Lokal Local	1,862 (99.9%)	1,719 (99.9%)	1,024 (100.0%)
Asing Foreign	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
Jumlah Total	1,863	1,720	1,024

Pemasok barang dan jasa lokal adalah pemasok yang berdomisili di Indonesia Pemasok barang dan jasa asing adalah selain pemasok yang berdomisili di Indonesia

Local suppliers of goods and services are suppliers who are domiciled in Indonesia Suppliers of foreign goods and services are other than suppliers domiciled in Indonesia

Jumlah pemasok barang dan jasa PTPN Berdasarkan Nilai Kontrak Pekerjaan*
Number of PTPN suppliers of goods and services based on the value of the work contract*

Keterangan Remarks	2022	2021	2020
Lokal Local	Rp18,543,600,000,000 (93.2%)	Rp11,957,000,000,000 (95.8%)	Rp8,599,900,000,000 (100%)
Asing Foreign	Rp1,361,181,600,000 (6.8%)	Rp526,378,500,000 (4.2%)	Rp0 (0%)
Jumlah Total	Rp19,904,781,600,000 (100%)	Rp12,483,378,500,000 (100%)	Rp8,599,900,000,000 (100%)

Pemasok barang dan jasa lokal adalah pemasok yang berdomisili di Indonesia Pemasok barang dan jasa asing adalah selain pemasok yang berdomisili di Indonesia

*Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam SPPBJ

INISIATIF LEBIH LANJUT

PTPN terus mendorong pemikiran dan kinerja kami untuk berkontribusi maksimal akan pengembangan masyarakat sekitar. Beberapa inisiatif yang akan menjadi program prioritas kami di tahun-tahun mendatang antara lain:

1. Di tahun 2023, PTPN berkomitmen untuk menyalurkan biaya sebesar 2,2% dari total pendapatan bersih PTPN 2022 yang diperkirakan akan diterima langsung oleh 1.1 juta orang.
2. Mengembangkan target kinerja TJSL untuk kontraktor yang beroperasi di lingkungan PTPN & mendidik praktik terbaik untuk melakukan/mendukung kegiatan TJSL
3. Mengembangkan program pelatihan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan perekrutan PTPN di masa mendatang/persyaratan pengadaan di masa mendatang
4. Bermitra dengan perusahaan/universitas lain untuk memberdayakan keterampilan & teknologi bisnis lokal untuk tumbuh melampaui komunitas lokal
5. Melakukan studi banding & berbagi praktik terbaik TJSL di seluruh lokasi perkebunan PTPN
6. Memastikan keberlangsungan komunikasi dengan stakeholder utama untuk merancang program TJSL sesuai kebutuhan utama masyarakat dan mensosialisasikan pengembangan dari program TJSL yang sedang berjalan
7. Melakukan sosialisasi pelaporan masyarakat lokal dan adat untuk memastikan seluruh pelaporan tercatat, ditanggapi, dan dievaluasi secara berkala bersama direksi dan komite terkait
8. PTPN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan terus meningkatkan jumlah karyawan dan pengadaan produk/makanan dari masyarakat sekitar

PENGADUAN MASYARAKAT

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyadari bahwa operasional usaha yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Namun demikian, Perseroan telah semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi dampak negatif, Perseroan telah menyediakan berbagai saluran pengaduan, salah satunya melalui situs <http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrljv>. [GRI 413-2]

Local suppliers of goods and services are suppliers who are domiciled in Indonesia. Suppliers of foreign goods and services are other than suppliers domiciled in Indonesia

*The value of the work contract as stated in the letter of appointment of goods and services provider

FURTHER INITIATIVES

PTPN continues to push our ideas and performance in order to make the greatest possible contribution to the growth of the surrounding community. Some of the initiatives that will be priority programs for us in the coming years are as follows:

1. By 2023, PTPN is committed to disburse 2.2% of PTPN's total 2022 net revenue, which estimated to be directly received by 1.1 million people.
2. Developing TJSL performance targets for contractors operating within PTPN & educate on best practices for conducting/supporting TJSL activities.
3. Developing community training programs to match PTPN's future recruitment needs/future procurement requirements
4. Partnering with other companies/universities to empower local business skills & technology to grow beyond local communities
5. Conducting comparative studies & share TJSL best practices across PTPN plantation sites
6. Ensuring continuity of communication with key stakeholders to design TJSL programs according to the main needs of the community and socialize the development of ongoing TJSL programs
7. Socializing local and indigenous community reporting to ensure all reports are recorded, responded to, and evaluated regularly with the Board of Directors and relevant committees.
8. PTPN is also committed to improving the economy of local communities by increasing the number of employees and sourcing products/food from surrounding communities.

COMMUNITY COMPLAINTS

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) realizes that the company's business operations have the potential to have a negative impact on the community and the surrounding environment. However, the Company has done its best to prevent these negative impacts from occurring. As a form of responsibility in the event of a negative impact, the Company has provided various complaint channels, one of which is through the website <http://www.ptpn3.co.id/keluhan.php?h=kbrljv>. [GRI 413-2]



LEMBAR UMPAN BALIK

FEEDBACK FORM

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Perkebunan Nusantara III Tahun 2022. Untuk mewujudkan kualitas pelaporan yang lebih baik pada tahun mendatang, kami mengharapkan usulan, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna laporan ini. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja keberlanjutan dan memberikan yang terbaik untuk pemangku kepentingan.

Thank you for reading PT Perkebunan Nusantara III's 2022 Sustainability Report. We anticipate suggestions, criticisms, and advices from readers and users of this report in order to improve reporting quality in the coming year. The Company is committed to continuously improving its sustainability performance and providing the best possible service to stakeholders.

Profil Pembaca Reader Profile

Nama
Name :

Nama Institusi/ Perusahaan
Name of Institution/Company :

Telp/HP :

Kategori Pemangku Kepentingan (beri tanda ✓ pada jawaban yang sesuai): Category of Stakeholders (mark ✓ in the appropriate answer)

Pemerintah
Government

Pemegang Saham
Shareholder

Karyawan
Employee

Pelanggan
Customer

Masyarakat
Community

Media
Media

Lain-lain, mohon sebutkan:
Others, please mention:

1. Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda ✓ pada kotak jawaban:

Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Tidak Setuju
Disagree

Netral
Neutral

Setuju
Agree

Sangat Setuju
Strongly Agree

2. Laporan ini bermanfaat:

Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Tidak Setuju
Disagree

Netral
Neutral

Setuju
Agree

Sangat Setuju
Strongly Agree

3. Laporan ini menarik:

Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Tidak Setuju
Disagree

Netral
Neutral

Setuju
Agree

Sangat Setuju
Strongly Agree

4. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Perseroan:

Sangat Tidak Setuju
Strongly Disagree

Tidak Setuju
Disagree

Netral
Neutral

Setuju
Agree

Sangat Setuju
Strongly Agree

1. This report has described the Company's economic, environmental and social performance in a balanced manner:

2. This report is easy to understand

3. This report is interesting:

4. This report increases your confidence in the sustainability of the Company:



1. Bagian informasi mana yang paling berguna dan menarik?
Which piece of information is the most useful and interesting?

2. Bagian informasi mana yang kurang berguna sehingga perlu dilakukan perbaikan?
Which part of the information is less useful and needs to be improved?

3. Apakah data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang?
Is the data presented transparent, reliable, and balanced?

4. Saran/usul/komentar untuk perbaikan laporan ke depan:
Suggestions/advices/comments for the improvement of future reports:

Kami sangat menghargai umpan balik yang Anda berikan. Untuk itu, mohon mengirimkan lembar umpan balik ini ke:

PT Perkebunan Nusantara III

Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telp. (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003
Email: sekretariat@holding-perkebunan.com
Website: www.holding-perkebunan.com

We really appreciate your feedback. For that, please send this feedback form to:

PT Perkebunan Nusantara III

Agro Plaza Building 15th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
South Jakarta, 12950
Tel. (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003
Email: sekretariat@holding-perkebunan.com
Website: www.holding-perkebunan.com

Pernyataan Pendapat Penjaminan Independen

Independent Assurance Opinion Statement



PERNYATAAN PENDAPAT PENJAMINAN INDEPENDEN
Laporan Keberlanjutan PT Perkebunan Nusantara III 2022
Pernyataan No: 502/TRID-S02/V/23
Tipe: 2
Level: Sedang

PT TUV Rheinland Indonesia adalah entitas independen yang tidak memiliki kepentingan keuangan dalam pengoperasian PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III atau Perseroan) selain untuk tujuan penilaian dan jaminan laporan ini. PT TUV Rheinland Indonesia dalam memberikan pernyataan pendapat jaminan independen ini, tidak menerima atau memikul tanggung jawab (hukum atau lainnya) atau menerima tanggung jawab atas, atau sehubungan dengan, tujuan lain yang dapat digunakan, atau kepada siapa pun yang dengannya pernyataan pendapat jaminan independen dapat dibacakan. **Pernyataan pendapat ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan dan manajemen PTPN III.**

Batasan Ruang Lingkup Penjaminan

Ruang lingkup perikatan yang disepakati dengan PTPN III meliputi:

1. Evaluasi laporan terhadap serangkaian Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2021 (GRI Standards) secara konsolidasi, terutama pada 18 topik material yang diidentifikasi oleh Manajemen PTPN III dan pemangku kepentingannya. Topik material adalah emisi gas rumah kaca (GRK), penggunaan energi dan energi terbarukan, keanekaragaman hayati & konservasi, pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan, efisiensi penggunaan air, limbah dan polusi, keragaman & inklusi, kesehatan & keselamatan, pengembangan kompetensi pekerja, praktik ketenagakerjaan dan hubungan industrial, keterlibatan dan hak masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat lokal, tata kelola perusahaan yang baik, pengaduan dan pelaporan penyimpangan (*whistleblowing*), etika dan antikorupsi, kualitas dan keamanan produk, rantai pasokan, kepatuhan ESG, kontribusi terhadap perekonomian nasional.
2. Tingkat Penjaminan Sedang Tipe 2 digunakan untuk mengevaluasi sifat dan tingkat kepatuhan PTPN III terhadap keempat Prinsip Akuntabilitas AA1000 (2018), yaitu **Inklusivitas, Materialitas, Daya Tanggap dan Dampak (Impact)**, menggunakan Standar Jaminan AA1000 (2008) dengan Addendum 2018.
3. Tidak menyelidiki data dan informasi di luar periode pelaporan.
4. Data keuangan yang disediakan oleh PTPN III telah diaudit oleh pihak independen sehingga penyajian data dan informasi keuangan dalam laporan TIDAK berada dalam lingkup penjaminan.
5. Data informasi emisi telah diverifikasi oleh pihak independen yang diakui oleh biro sertifikasi pemerintah. Data emisi dan data lain tentang informasi kesehatan dan keselamatan kerja, energi, dan indikator lingkungan lainnya termasuk dalam ruang lingkup jaminan bahwa kami telah memastikan keberadaannya.

19/02/2023



Pernyataan Opini

Laporan ini dijamin oleh tim penjamin laporan keberlanjutan sesuai dengan Prinsip AA1000AS (2008) dengan Addendum 2018, Prinsip AA1000AP (2008), dan Standar GRI 2021, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 mengenai Formulir dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Berdasarkan informasi dan penjelasan yang diberikan, kami telah menerima bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Laporan Keberlanjutan PTPN III 2022 memberikan gambaran yang wajar dan seimbang atas kinerja keberlanjutan PTPN III selama tahun 2022. Standar GRI 2021 telah diterapkan dan dipakai sebagai kerangka Laporan ini. Berdasarkan hasil dari semua investigasi yang dilakukan oleh tim kami sesuai dengan prosedur kami, kami menyimpulkan bahwa data tahun 2022 yang disajikan oleh PTPN III untuk semua indikator kinerja yang terkait dengan topik material cukup terwakili dan tidak ada yang menjadi perhatian kami yang akan membuat kami percaya bahwa PTPN III belum menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan.

Metodologi

Kami melakukan penjaminan sesuai dengan prosedur dan kegiatan penjaminan berikut:

- Tinjauan tingkat tinggi atas isu-isu yang diangkat oleh pihak eksternal yang dapat relevan dengan kebijakan PTPN III untuk memberikan pemeriksaan kesesuaian pernyataan dalam laporan.
- Diskusi dengan eksekutif senior PTPN III tentang pendekatan PTPN III terhadap keterlibatan pemangku kepentingan.
- Wawancara dengan staf yang terlibat dalam manajemen keberlanjutan, persiapan laporan dan penyediaan informasi laporan.
- Tinjauan perkembangan organisasi utama.
- Peninjauan bukti pendukung untuk pernyataan yang dibuat dalam laporan.
- Mengevaluasi kepatuhan isi laporan, pengungkapan dan penyajian terhadap prinsip standar, dan indikator AA1000AS (2008) dengan Addendum 2018, AA1000AP (2018), Standar GRI 2021, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK 16), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51).

Temuan dan Kesimpulan

Tinjauan terperinci terhadap AA1000AP (2018) untuk Inklusivitas, Materialitas, Daya Tanggap dan Dampak dan Standar GRI 2021 disajikan di bawah ini:

Inklusivitas

Laporan ini telah mencerminkan komitmen berkelanjutan PTPN III kepada para pemangku kepentingan, karena keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan telah dilakukan, dan respons yang akuntabel dan strategis terhadap keberlanjutan telah tercapai. Laporan ini mencakup isu-isu pemangku kepentingan bersama dengan pelaporan yang wajar dan pengungkapan topik dan informasi material. Menurut pendapat profesional kami, laporan ini

MA



mencakup penerapan prinsip-prinsip inklusivitas PTPN III.

Materialitas

PTPN III menyajikan informasi keberlanjutan yang menggambarkan konteks keberlanjutan sebagai holding company yang mengelola anak perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri. Data ini memungkinkan pemangku kepentingan PTPN III untuk membuat penilaian berdasarkan informasi tentang manajemen dan kinerja perusahaan. Menurut pendapat profesional kami, laporan ini mencakup isu-isu material organisasi dengan menggunakan matriks materialitas dan pemetaan batas PTPN III.

Responsif

PTPN III telah menerapkan praktik manajemen untuk menanggapi harapan dan kekhawatiran para pemangku kepentingannya. Respon ini termasuk komunikasi mengenai harapan pemangku kepentingan dan mekanisme umpan balik yang berbeda kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal. Menurut pendapat profesional kami, laporan ini mencakup daya tanggap PTPN III terhadap permasalahan yang ada. Masukan kami untuk penyempurnaan laporan telah dilaksanakan oleh PTPN III sebelum dikeluarkannya pernyataan pendapat ini.

Dampak

PTPN III telah membuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan bertanggung jawab atas bagaimana tindakan mereka mempengaruhi ekosistem mereka yang lebih luas termasuk aspek Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Menurut pendapat profesional kami, laporan ini mencakup dampak PTPN III terhadap ekosistem yang lebih luas. Masukan laporan penyempurnaan kami telah dilaksanakan oleh PTPN III sebelum dikeluarkannya pernyataan pendapat ini.

Sesuai dengan Standar GRI 2021

Laporan ini mengikuti **Standar GRI 2021** di mana semua pengungkapan setiap topik material disajikan dan dibahas dalam Laporan. Pengungkapan pendekatan manajemen untuk setiap topik material secara umum diungkapkan secara wajar.

Prinsip Standar GRI

Manajemen telah menerapkan Prinsip untuk Menentukan Batasan Isi Laporan (inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan) dan Prinsip Penentuan Kualitas Laporan (keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan). Dokumen pendukung disajikan secara memadai selama pekerjaan penjaminan. Jika berlaku, laporan ini menyajikan klarifikasi data dan informasi yang tidak dapat diungkapkan karena kebijakan manajemen atau masalah sistem dan administrasi data.

Penilaian Energi dan Emisi

Perhitungan energi dan emisi yang disajikan dalam laporan dihitung berdasarkan metodologi yang dipilih oleh PTPN III. Menurut pendapat profesional kami, perhitungan tersebut diungkapkan secara wajar dengan total emisi dalam Cakupan 1: 1.968.869 ton CO₂eq.

A small, handwritten signature in blue ink, possibly reading 'A. S.' or similar.



Cakupan 2: 197,553 ton CO₂eq, dan Cakupan 3: 135,960 ton CO₂eq; total intensitas emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2: 0,51 tCO₂e/ton dengan total volume produk akhir: 4.300.000 ton per 31 Desember 2022 dan terkait dengan intensitas energi: 0,52 Gigajoule/ton.

Pernyataan Tanggung Jawab Manajemen PT Perkebunan Nusantara III

Manajemen PTPN III memiliki tanggung jawab penuh untuk menyiapkan dan menyajikan Materi Pokok sesuai dengan Standar GRI 2021 dan menyiapkan Laporan sesuai dengan Prinsip AA1000AP (2018). Tanggung jawab PTPN III juga termasuk menjaga pengendalian internal yang efektif atas informasi dan data, sehingga penyusunan Pokok Bahasan dengan cara yang bebas dari kesalahan saji material.

Pernyataan Tanggung Jawab, Kompetensi, Independensi, dan Imparsialitas Penjamin

Tanggung jawab kami adalah merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan pernyataan penjaminan atas apakah Pokok Bahasan telah disusun sesuai dengan Standar GRI 2021 dan melaporkan kepada PTPN III dalam bentuk kesimpulan penjaminan independen, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan bukti yang diperoleh.

PT TUV Rheinland Indonesia adalah perusahaan jasa profesional independen yang mengkhususkan diri dalam kualitas, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan akuntabilitas sosial dengan sejarah lebih dari 25 tahun. Sebagai bagian dari Tim penjamin, para ahli harus memahami prinsip dan standar Akuntabilitas AA1000, dan juga memiliki pengalaman dalam menulis dan memperbaiki laporan keberlanjutan serta laporan terintegrasi.

PT TUV Rheinland Indonesia menerapkan Sistem Manajemen Mutu tersertifikasi yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001: 2015, dan karenanya menjaga sistem kendali mutu yang komprehensif termasuk kebijakan dan prosedur terdokumentasi mengenai kepatuhan terhadap persyaratan etika, standar profesional dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

PT TUV Rheinland Indonesia telah menerapkan Kode Etik yang memenuhi persyaratan Federasi Internasional Lembaga Inspeksi (IFIA) di seluruh bisnisnya yang memastikan bahwa semua staf kami menjaga integritas, objektivitas, kepatuhan profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar etika yang tinggi dalam kegiatan bisnis sehari-hari mereka.

Tim penjamin kami tidak memiliki keterlibatan dalam proyek-proyek dengan PT Perkebunan Nusantara III di luar ruang lingkup penjaminan yang independen dan kami tidak menganggap ada konflik antara layanan lain yang disediakan oleh PT TUV Rheinland Indonesia dan tim penjaminan kami.

Untuk dan atas nama PT TUV Rheinland Indonesia
Jakarta, 08 May 2023

Nyoman Susila
Direktur Utama



INDEPENDENT ASSURANCE OPINION STATEMENT
Sustainability Report PT Perkebunan Nusantara III 2022
Statement No: 501/TRID-S02/V/23
Type: 2
Level: Moderate

PT TUV Rheinland Indonesia is an independent entity with no financial interest in the operation of PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III or the Company) other than for the purposes of assessment and assurance of this report. PT TUV Rheinland Indonesia does not, in providing this independent assurance opinion statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for, or in connection with, any other purpose for which it may be used, or to any person by whom the independent assurance opinion statement may be read. **This opinion statement is intended to be used by stakeholders and the management of PTPN III.**

Scope Limitations of the Assurance

The scope of engagement agreed upon with PTPN III includes the following:

1. Evaluation of the report against the consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (GRI Standards), especially on the eighteen material topics identified by PTPN III Management and their stakeholders. The material topics are greenhouse gas (GHG) emissions, energy use and renewable energy, biodiversity & conservation, forest fire prevention and management, water use efficiency, waste and pollution, diversity & inclusion, health & safety, worker competency development, employment practices and industrial relations, local community engagement and rights, local community empowerment, good corporate governance, complaints and whistleblowing, ethics and anti-corruption, product quality and safety, supply chain ESG compliance, contribution to the national economy.
2. A Type 2 Moderate Level of Assurance is used to evaluate the nature and extent of PTPN III's adherence to all four AA1000 Accountability Principles (2018), namely **Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact**, using AA1000 Assurance Standard (2008) with the 2018 Addendum.
3. Not to investigate data and information outside the reporting period.
4. The financial data provided by PTPN III has been audited by independent parties and, therefore, presentation of financial data and information in the report is NOT within the scope of assurance.
5. The emission information data has been verified by an independent party recognized by the government certification bureau. The emission data and other data on occupational health and safety information, energy, and other environmental indicators are included in the scope of the guarantee that we have ensured their existence.

Handwritten signature



Opinion Statement

This report is assured by the sustainability report assurers' team in accordance with AA1000AS (2008) Principles with 2018 Addendum, AA1000AP (2008) Principles, and GRI Standards 2021, Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institution, Listed, and Public Company. Based on the information and explanations provided, we have received sufficient evidence to conclude that the PTPN III Sustainability Report 2022 provides a fair and balanced representation of PTPN III's sustainability performance during 2022. The GRI Standards has been applied and prepared in this Report. Based on the outcome of all the investigations conducted by our team according to our procedures, we conclude that the 2022 data presented by PTPN III for all the performance indicators related to the material topics are reasonably represented and nothing has come to our attention that would cause us to believe that PTPN III has not presented accurate and reliable data.

Methodology

We conducted the assurance in accordance with the following assurance procedures and activities:

- A top-level review of issues raised by external parties that could be relevant to PTPN III's policies to provide a check on the appropriateness of statements made in the report.
- Discussion with PTPN III senior executives on PTPN III's approach to stakeholder engagement.
- Interviews with staff involved in sustainability management, report preparation and provision of report information.
- Review of key organisational developments.
- Review of supporting evidence for assertions made in the reports.
- Evaluate the adherence of report content, disclosure and presentation against the standard principles, and indicators of AA1000AS (2008) with 2018 Addendum, AA1000AP (2018), GRI Standards 2021, Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies (SEOJK 16), and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institution, Listed, and Public Company (POJK 51).

Findings and Conclusions

The detailed review against AA1000AP (2018) for Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact and the GRI Standards 2021 is presented below:

Inclusivity

This report has reflected PTPN III's continued commitment to its stakeholders, as engagement and participation of stakeholders has been conducted, and an accountable and strategic response to sustainability has been achieved. This report covers stakeholder issues together with fair reporting and disclosures of material topics and information. In our professional opinion, the report covers PTPN III's application of inclusivity principles.



Materiality

PTPN III presents sustainability information that describes the sustainability context as a holding company that manages subsidiaries engaging in agribusiness and agroindustry. These data enable PTPN III's stakeholders to make informed judgments about the company's management and performance. In our professional opinion, the report covers the organisation's material issues by using PTPN III's materiality matrix and boundary mapping.

Responsiveness

PTPN III has implemented the management practice to respond to the expectations and concerns of its stakeholders. It includes communication on stakeholder expectations and different feedback mechanisms to external and internal stakeholders. In our professional opinion, the report covers PTPN III's responsiveness to issues. Our inputs for the improvement of the report were adopted by PTPN III before the issue of this opinion statement.

Impact

PTPN III has made steps to identify, measure, monitor, and be accountable for how their actions affect their broader ecosystems including Environmental, Economic and Social aspects. In our professional opinion, the report covers PTPN III's impacts on the broader ecosystems. Our improvement report inputs have been adopted by PTPN III before the issue of this opinion statement.

In Accordance with GRI Standards 2021

The Report follows the **GRI Standards 2021** where all disclosures of each material topic are presented and discussed in the Report. The management approach disclosure for each material topic in general is fairly disclosed.

GRI Standards Principles

The Management has applied the Principles for Defining Report Content (stakeholder inclusiveness, sustainability context, materiality, and completeness) and the Principles for Defining Report Quality (balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, and reliability). Supporting documents were adequately presented during the assurance work. When applicable, the report presents data and information clarification that is undisclosed due to Management discretion or system and data administration issues.

Energy and Emission Assessment

The energy and emission calculation presented in the report is computed based on the methodology chosen by PTPN III. In our professional opinion, the calculation is fairly disclosed with total emission in Scope 1: 1,968,869-ton CO₂eq, Scope 2: 197.553 ton CO₂eq, and Scope 3: 135.960 ton CO₂eq; total emission intensity of Scope 1 and Scope 2: 0,51 tCO₂e/ton with total final product volume: 4,300,000 tons as of 31 December 2022 and related to energy intensity: 0,52 Gigajoules/ton.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pan'.



Statement of Responsibility of the Management of PT Perkebunan Nusantara III

The Management of PTPN III has sole responsibility for preparing and presenting the Subject Matter in accordance with GRI Standards 2021 and preparing the Report in adherence to the AA1000AP (2018) Principles. PTPN III's responsibilities also include maintaining effective internal controls over the information and data, resulting in the preparation of the Subject Matter in a way that is free from material misstatements.

Statement of Responsibility, Competency, Independency, and Impartiality of Assurer

Our responsibility is to plan and perform our work to obtain assurance statement over whether the Subject Matter has been prepared in accordance with the GRI Standard 2021 and reporting to PTPN III in the form of an independent assurance conclusion, based on the work performed and the evidence obtained.

PT TUV Rheinland Indonesia is an independent professional services company that specialises in quality, environmental, health, safety, and social accountability with over 25 years of history. As part of the Assurer Team, the experts must understand the principles and standards of AA1000 Accountability, and also have experience in writing and reviewing sustainability reports and integrated reports.

PT TUV Rheinland Indonesia operates a certified Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

PT TUV Rheinland Indonesia has implemented a Code of Ethics which meets the requirements of the International Federation of Inspections Agencies (IFIA) across its business which ensures that all our staff maintains integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behaviour, and high ethical standards in their day-to-day business activities.

Our assurer team does not have any involvement in projects with PT Perkebunan Nusantara III outside those of an independent assurance scope and we do not consider there to be a conflict between the other services provided by PT TUV Rheinland Indonesia and that of our assurer team.

For and on behalf of PT TUV Rheinland Indonesia
Jakarta, 08 May 2023



Nyoman Susila
President Director

INDEKS KONTEN GRI STANDARD 2022

INDEX OF GRI UNIVERSAL STANDARDS 2022 CONTENT

Standard GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure	Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
2-1	Detail Organisasi Organizational details	28, 29, 38			
2-2	Entitas yang tercakup dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	22, 23, 40			
2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	22			
2-4	Pernyataan ulang informasi Restatements of information	22, 43			
2-5	Penjaminan eksternal External assurance	22			
2-6	Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	28, 29, 30, 36, 38, 42, 45, 46			
2-7	Karyawan Employees	28, 43			
2-8	Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung Workers who are not employees	44			
GRI Pengungkapan Umum 2021 GRI General Disclosures 2021	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	59		
	2-10	Nominasi dan seleksi pejabat tatakelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	60		
	2-11	Pejabat tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	60		
	2-12	Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam memantau dampak manajemen Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	64, 65		
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	60, 80		
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	81		
	2-15	Benturan kepentingan Conflicts of interest	84		
	2-16	Komunikasi terkait perhatian yang bersifat kritis Communication of critical concerns			No critical concerns identified



Standard GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure	Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	82			
2-18	Evaluasi kinerja pejabat tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	84			
2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	85			
2-20	Proses menentukan remunerasi Process to determine remuneration	85, 87			
2-21	Rasio total kompensasi tahunan Annual total compensation ratio				<i>Information unavailable due to incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods</i>
2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	10			
2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	46, 65, 69, 79, 145			
2-24	Komitmen dalam menanamkan kebijakan Embedding policy commitments	67, 68, 70, 130			
2-25	Proses remediasi dampak negatif Processes to remediate negative impacts	130			
2-26	Mekanisme pemberian nasihat dan meningkatkan perhatian Mechanisms for seeking advice and raising concerns	68, 69, 72			
2-27	Kepatuhan dalam undang-undang dan peraturan Compliance with laws and regulations	76			
2-28	Keanggotaan asosiasi Membership of associations	52			
2-29	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	76			
2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	151			

Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
TOPIK MATERIAL MATERIAL TOPICS					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Management of material topics	23		
	3-2	Daftar topik material Daftar topik material	24		
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS SPECIAL STANDARD DISCLOSURE					
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS					
KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	92, 93, 97		
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 GRI 201: Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct Economic Value Generated and Distributed	95		
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	112		
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	97		
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from government	96		
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG INDIRECT ECONOMIC IMPACT					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	180		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure Investments and Services Supported	180		
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	181		



Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS SPECIAL STANDARD DISCLOSURE					
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	45		
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 GRI 204: Procurement Practices 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	45		
ANTIKORUPSI Anti-Corruption					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	72, 73		
	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	73		
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 205: Anti- Corruption 2016	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	73, 74		
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	74		
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPICS					
ENERGI ENERGY					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	109, 110, 111, 115		
GRI 302: Energi 2016 GRI 302: Energy 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy Consumption in the Organization	120		
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organization			Not applicable since PTPN does not sell energy as part of their business activities
	302-3	Intensitas energi Energy intensity	120		
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	118		

Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	302-5		Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Reductions in energy requirements of products and services		Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods

AIR DAN EFLUEN WATER AND EFFLUENTS

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3		Manajemen topik material <i>Management of material topics</i> 13.7.1	109, 110, 111, 121	
	303-1		Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i> 13.7.2	121	
	303-2		Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i> 13.7.3	121	
GRI 303: Air dan Efluen 201 GRI 303: Water and Effluents 2018	303-3		Pengambilan air <i>Water withdrawal</i> 13.7.4	123	
	303-4		Pembuangan air <i>Water discharge</i> 13.7.5		
	303-5		Konsumsi air <i>Water consumption</i> 13.7.6	123	

KEANEKARAGAMAN HAYATI BIODIVERSITY

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3		Manajemen topik material <i>Management of material topics</i> 13.19.1	109, 110, 111, 124	
GRI 304: Keaneekaragaman Hayati 2016 GRI 304: Biodiversity 2016	304-1		Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung <i>Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas</i> 13.19.2	126	



Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	Dampak signifikan dar kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati. Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	125			
	304-2		13.19.3		
	Habitat yang dilindungi atau direstorasi Habitats protected or restored	126			
	304-3		13.3.4		
	Spesies Daftar Merah IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	126			
	304-4		13.3.5		
EMISI EMISSIONS					
	Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	109, 110, 111, 132			
	3-3		13.1.1		
	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	133, 134			
	305-1		13.1.2		
	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	133, 134			
	305-2		13.1.3		
	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Other indirect (Scope 3) GHG emissions	133, 134			
	305-3		13.1.4		
	Intensitas emisi GRK GHG emissions intensity	133, 134			
	305-4		13.1.5		

GRI 3:
Topik Material 2021
GRI 3:
Material Topics
2021
GRI 305: Emisi 2016
GRI 305: Emission
2016

Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	Pengurangan emisi GRK <i>Reduction of GHG emissions</i>	134			
	13.1.6				
	Emisi zat perusak ozon (ODS) <i>Emissions of ozone-depleting substances (ODS)</i>	139			Not relevant to PTPN because PTPN does not produce any ozone-depleting substances (ODS)
	13.1.7				
	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya <i>Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions</i>	139			
	13.1.8				
LIMBAH WASTE					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	Manajemen topik material <i>Management of material topics</i>	109, 110,			
	3-3 13.8.1				
	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah <i>Waste generation and significant waste-related impacts</i>	111, 136			
	13.8.2				
	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah <i>Management of significant waste-related impacts</i>	140			
	13.8.3				
GRI 306: Limbah 2020 GRI 306: Waste 2020	Timbulan limbah <i>Waste generated</i>	136			
	306-3 13.8.4				
	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir <i>Waste diverted from disposal</i>	140			
	306-4 13.8.5				
	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir <i>Waste directed to disposal</i>	136			
	306-5 13.8.6				
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016 GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan <i>New suppliers that were screened using environmental criteria</i>	167			
	308-1				
	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. <i>Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken</i>	-			
	308-2				



Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPICS					
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics 13.19.1	145, 148		
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Occupational health and safety management system 13.19.2	148		
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaa risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 13.19.3	149		
	403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services 13.19.4	150		
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety 13.19.5	150		
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Worker training on occupational health and safety 13.19.6	149		
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Promotion of worker health 13.19.7			Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships 13.19.8			Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods

Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	403-8		Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system 13.19.9		<i>Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods</i>
	403-9	149	Kecelakaan kerja Work-related injuries 13.19.10		
	403-10		Penyakit akibat kerja Work-related ill health 13.19.11		

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

EDUCATION AND TRAINING

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3		Manajemen topik material Management of material topics 145, 152		
	404-1		Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee 152, 163		
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 GRI 404: Education and Training 2016	404-2		Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 152, 164		
	404-3		Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews 162		

KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3		Manajemen topik material Management of material topics 13.15.1	145	
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016 GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016	405-1		Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees 13.15.2	146	
	405-2		Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men 13.15.2		<i>Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods</i>



Standard GRI GRI Standard		Hlm. Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
GRI 406: Non Diskriminasi 2016 GRI 406: Non- Discrimination 2016	406-1	146	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Incidents of discrimination and corrective actions taken		
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	145, 151	Manajemen topik material Management of material topics 13.18.1		
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016 GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining	407-1	151	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk 13.18.2		
GRI 408: Pekerja Anak 2016 GRI 408: Child Labor 2016	408-1	166	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labour		
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016 GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1	166	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor		
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES					
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	166	Manajemen topik material Management of material topics 13.14.1		
GRI 411: Hak-hak Masyarakat Adat 2016 GRI 411: Rights of Indigenous Peoples	411-1	171	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 13.14.2		
GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016 GRI 412: Human Rights Assessment 2016	412-1		Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments		Information unavailable due incomplete data. PTPN may disclose this information in subsequent reporting periods
	412-2	172	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Employee training on human right policy or procedures		

Standard GRI GRI Standard	Hlm. Page	Pengecualian Exception		
		Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul/klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia Significant investment agreements and contracts that include human right clauses or that underwent human rights screening		

MASYARAKAT LOKAL LOCAL COMMUNITIES

GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics 13.12.1	174	
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 13.12.2	174	
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 13.12.3	182	
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016 GRI 414: Supplier Social Assessment 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial New suppliers that were screened using social criteria	166	
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Negative social impacts in the supply chain and actions taken	-	No negative social impacts in the supply chain

2022

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

Creating Value for Sustainability



Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Kantor Pusat :

Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telephone : (+62-21) 29183300
Fax : (+62-21) 5203030

Kantor Operasional :

Jl. Sei Batanghari No.2, Medan 20122
(+62-61) 8452244
(+62-61) 8455177

